

WALHI



EKONOMI NUSANTARA

Tawaran Solusi Pulihkan
Indonesia

PENULIS

Boy Jerry Even Sembiring
Tanti Budi Suryani
Bagas Yusuf Kausan

EKONOMI NUSANTARA: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia

Boy Jerry Even Sembiring

Tanti Budi Suryani

Bagas Yusuf Kausan



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

***Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan
Indonesia***

xv + 431 halaman; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-8071-87-4

DITERBITKAN OLEH:

Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Jln. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790

Telp. 021-791933 63-65

Fax: 021-7941673

Email: informasi@walhi.or.id

TIM PENULIS:

Boy Jerry Even Sembiring

Tanti Budi Suryani

Bagas Yusuf Kausan

TIM KONTRIBUTOR DAERAH:

1. Sumatera Selatan
Denny Arian Nando, Abdul Ghofar, Bagas Yusuf Kausan, Puspita Indah Sari
Sitompul, dan Agus Dwi Hastutik
2. Bengkulu
Meike Inda Erlina, Abdul Ghofar, dan Zenzi Suhadi
3. Jawa Timur
Ridho Saipul dan Azzumar Adhitia
4. Bali
Suriadi Darmoko, I Putu Juli Sastrawan, Azzumar Adhitia, dan Boy Jerry
Even Sembiring
5. Kalimantan Timur
Ignasius Hanyang dan Boy Jerry Even Sembiring

PENYUNTING:

Bagas Yusuf Kausan

PENATA LETAK:

Nicko Fernando dan Andini Meytasari

DESAIN SAMPUL:

Nicko Fernando

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil penelitian yang sedang anda pegang ini tidak akan pernah hadir tanpa ide liar sahabat kami, Zenzi Suhadi. Berawal dari ketertarikannya terhadap buku sejarah dan antropologi pada era Nusantara. Dari bacaan buku tersebut, teretus ide untuk memotret sekaligus membuktikan praktik ekonomi pada era Nusantara. Satu model praktik ekonomi yang menaruh kepentingan sosial dan lingkungan secara seajar. Namun sayang, pencetus ide ini tidak dapat melanjutkan penelitian secara intens. Beragam kesibukan dan pekerjaan lain membuatnya harus beralih. Tersisa satu orang yang harus melanjutkan pekerjaan dan menyusun ulang tim peneliti. Dalam perkembangannya, beragam hasil diskusi malah membuat desain penelitian ini meluas dan kehilangan orisinalitasnya. Sampai suatu waktu, kawan Eko Cahyono membantu kami menstrukturkan desain awal penelitian ini. Akhirnya penelitian ini pun berbelok menjadi penelitian sosial dengan objek studi realitas ekonomi global vs praktik ekonomi lokal.

Usia penelitian ini mencapai umur dua tahun. Dalam prosesnya, penelitian ini sering terhenti karena cerita advokasi dan pergantian tim peneliti. Namun, kian hari ide seputar penelitian ini justru makin menarik. Hampir semua Tim Eksekutif Nasional WALHI turut mendiskusikan substansi dan temuan penelitian ini. Dari Direktur, Dewan Nasional, hingga teman lintas departemen. Oleh karena itu, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, yang tetap memberi kami kesempatan menyelesaikan penelitian ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada seorang teman muda, Abdul Ghofar, yang telah menyalakan kembali asa untuk menyelesaikan penelitian ini. Kemudian kepada Yuyun Harmono yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, dan memantik diskusi menarik tentang *degrowth*—sebuah wacana lain yang mempunyai kemiripan dengan apa yang kami

sebut “ekonomi nusantara”. Keduanya adalah wacana lain untuk lepas dari jebakan ambisi pertumbuhan ekonomi.

Kami juga berterima kasih pada Ode Rakhman, orang yang dengan penuh harap cemas selalu meminta kami segera menyelesaikan laporan ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan masukan dari Dr. I Wayan Mertha (Jro Bendesa) dan *krama* Kedonganan; Mak Iyek dan seluruh masyarakat adat Lung Isun; Ki Demang dan masyarakat Adat Sendi; Pak Robani dan masyarakat Belanti; Kak Syukri dan masyarakat lima desa di sekitar Lebak Rawang; Pak Yulisman dan masyarakat Desa Tanjung Aur; serta Pak Suwondo dan masyarakat Desa Sinar Mulya. Selain masyarakat dari lokasi penelitian, bantuan dan dukungan juga hadir dari rekan-rekan di kantor daerah seperti WALHI Sumatera Selatan; WALHI Bengkulu; WALHI Bali; WALHI Jawa Timur; dan WALHI Kalimantan Timur. Semuanya berkontribusi besar membantu proses penelitian dan penulisan laporan ini.

Kami menyadari bahwa tidak semua nama dapat kami sebutkan satu per satu. Karena itu, kami sangat berterima kasih kepada seluruh Ibu dan keluarga tim kontributor, tim penulis, dan semua yang terlibat dalam penelitian ini. Kami sadar bahwa Ibu dan keluarga adalah orang-orang yang sangat terlupakan karena pekerjaan ini. Sekali lagi, kami ucapkan maaf untuk nama-nama yang sangat berjasa, namun tidak dapat kami sebut. Terima kasih banyak untuk semua. Semoga Semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas kebaikan kalian. Kami juga sangat menerima masukan dan kritik untuk karya yang jauh dari kata sempurna ini. Selamat membaca dan berlawan.

Salam Adil dan Lestari!

Jakarta, Februari 2021

**Tim Penulis
Tim Kontributor**

Salam Adil dan Lestari!

Pada tahun 2003, WALHI menyusun suatu manifesto bertajuk “Memperbaharui Gerakan Lingkungan Hidup di Indonesia”. Manifesto ini coba mengidentifikasi akar permasalahan ketidakadilan ekologi-sosial yang dialami berbagai kelompok masyarakat marjinal dan perusakan sistematis ekosistem esensial berserta sistem-sistem alam lainnya. Akar permasalahan tersebut ialah sistem ekonomi-politik kapitalistik neoliberal yang dianut dan diimplementasikan oleh dunia saat ini, termasuk oleh negara Republik Indonesia. Kesimpulan ini tentunya tidak jatuh dari langit. Namun berangkat dari proses empat puluh tahun melakukan advokasi memajukan hak-hak rakyat, komunitas-warga, dan hak-hak lingkungan hidup yang dilakukan oleh jaringan WALHI di seluruh Indonesia. Selain itu, simpulan tersebut juga berasal dari proses bergumul secara langsung dengan proses-proses advokasi kebijakan yang ada di lingkup lokal, nasional, maupun global.

Sistem ekonomi kapitalistik-neoliberal semakin menjauhkan pemerintahan dari mandat-mandat konstitusionalnya. Alhasil ruang hidup bersama komunitas-warga dihilangkan (alih-alih dilindungi) dan diubah menjadi ruang-ruang produksi kapital yang dikuasai dan dioperasikan oleh korporasi. Sistem ekonomi kapitalistik-neoliberal ini juga diwujudkan dalam model ekonomi pertumbuhan (*growth economy*), dimana kemajuan suatu negara dihitung dari seberapa besar volume produksi mereka yang bisa ditransaksikan di dalam pasar—atau biasa disebut *Gross Domestic Product* (GDP). Peningkatan volume GDP dari waktu ke waktu itu lah yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi tujuan politik dari rezim pemerintahan dan mengesampingkan faktor-faktor keadilan, pemerataan, serta kelestarian alam.

Satu hal yang sering tidak disadari adalah suatu fakta bahwa pertumbuhan ekonomi sesungguhnya adalah proses likuidasi

alam; alam yang tersedia dengan cuma-cuma diekstraksi dan dijadikan komoditas ekonomi dan masuk dalam rantai produksi (atau sering juga disebut rantai nilai/ *value chain*) linear yang menghasilkan limbah dan dikerjakan oleh buruh-buruh berupah murah di wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*). Faktanya juga, ekonomi pertumbuhan hanya menghasilkan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin lama semakin tinggi. Philip Alston, Pelapor Khusus PBB tentang Kemiskinan Ekstrem, dalam laporan terakhirnya pada 2020 melontarkan kritik keras terhadap ekonomi pertumbuhan, termasuk penggunaannya dalam SDGSs (*Sustainable Development Goals*) sebagai alat untuk memberantas kemiskinan. Alston menyampaikan, setelah berpuluh tahun dunia menyaksikan pertumbuhan GDP, ternyata pihak yang diuntungkan hanyalah mereka yang kaya dan super kaya. Maka, alih-alih menghilangkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan ketimpangan (*inequality*) serta perusakan lingkungan hidup seperti krisis iklim.

Perjalanan advokasi bersama berbagai komunitas-warga untuk mereklaim ruang hidup dan memulihkan ekosistem yang telah rusak mempertemukan kami dengan berbagai model ekonomi ataupun sistem penghidupan (*livelihoods*). Model-model tersebut telah mengalami berbagai proses uji coba serta beradaptasi dengan aneka perubahan kebijakan dan perubahan ekosistem dari waktu ke waktu. Kami mencoba membuat kategori baru atas model/sistem ekonomi-komunitas ini dan menyebutnya sebagai “ekonomi nusantara”.

Bagi WALHI, “ekonomi nusantara” merupakan perjuangan kategoris yang menjadi kritik atas model ekonomi pertumbuhan. Model ekonomi pertumbuhan hanya mengobjektifikasi alam dan menganggapnya sebagai entitas yang terpisah dengan komunitas manusia yang hidup di dalamnya. Secara intrinsik “ekonomi nusantara” sangat menghargai keragaman interaksi manusia dengan lanskap/ekosistem ruang hidupnya dan senantiasa berorientasi pada pemulihan krisis yang dihadapi oleh komunitas-warga

dan alamnya. Sebagai suatu wacana tanding, tentu saja “ekonomi nusantara” siap untuk dikritik dan dibedah dari berbagai sudut pandang serta teori. Harapan kami, upaya ini bisa memberikan cara pandang lain di luar cara pandang ekonomi-politik yang dominan saat ini dan dapat menjadi alat perjuangan komunitas-warga untuk mereklaim model kehidupan yang dipilihnya. Dan pada akhirnya, bisa menjadi salah satu pilihan kehidupan yang diakui keberadaannya, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim peneliti—baik di Eksekutif Nasional WALHI maupun di WALHI Daerah yang dipimpin oleh Even Sembiring—yang tetap persisten menyelesaikan penelitian ini di tengah berbagai kendala substansi dan teknis yang dihadapi. Kepada komunitas-warga di lima wilayah lanskap ekologis di Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang telah berbagi dan menuturkan pengalaman serta pengetahuannya yang sangat luar biasa, kami beri penghargaan setinggi-tingginya. Demikian juga kepada Mas Eko Cahyono dari Sayogjo Institute yang telah mendampingi dan memberikan panduan metodologis kepada tim peneliti. Akhirnya kami berharap penelitian ini bisa berkontribusi pada pemajuan wacana dan praktik advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Jakarta, Februari 2021
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,

Nur Hidayati
Direktur

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Cerita Boks	xv
BAB SATU	1
Merancang Wacana Lain	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Metodologi	19
BAB DUA	22
Melahirkan Lawan Ekonomi Pertumbuhan	22
A. Ekonomi Pertumbuhan: Kritik, Krisis, dan Kekeliruan Menghitung Kesejahteraan	22
B. Perspektif Teori Hijau dan Era Kapital	35
C. Degrowth: Dari Slogan menjadi Gerakan?	44
D. Praksis Ekonomi Nusantara dan Relasi Kapitalisme	54
E. Ekonomi Nusantara: Dari Konsep Menuju Hegemoni Tanding	59
BAB TIGA	64
Praktik dan Pengetahuan Ekonomi Nusantara	64
Dua Nafas Bukit Kumbang Penyangga Bukit Barisan Selatan	67
A. Tanjung Aur	69
B. Sinar Mulya	103
Berebut Hidup di Rawa Gambut Lebak Rawang	132

A. Pesan Prasasti Talang Tuo _____	134
B. Gambut dan Kehidupan Masyarakat Lebak Rawang _____	136
C. Ekonomi Lokal Lebak Rawang _____	143
D. Merawat Kearifan Lokal Lebak Rawang _____	146
E. Warga Lebak Rawang Melawan Ekspansi Sawit _____	154
F. Epilog: Masa Depan Lebak Rawang _____	158
G. Rekomendasi _____	160

Hidup dan Mati di Lebak Belanti _____ 162

A. Sejarah Desa Belanti _____	163
B. Lanskap Ekosistem Gambut _____	166
C. Praktik Ekonomi Nusantara dan Kearifan Lokal _____	168
D. Lelang Lebak Lebung _____	171
E. Ancaman dan Inisiatif _____	173

Menjaga Surga di Timur Borneo: Praktik Ekonomi Masyarakat

Adat Lung Isun _____ 179

A. Menenal Surga Bernama Lung Isun _____	180
B. Lanskap Hutan Hujan Tropis di Lung Isun _____	190
C. Temuan Ekonomi Nusantara _____	198
D. Rekomendasi _____	230

Kearifan Adat Desa Kedongan _____ 232

A. Profil Desa Adat Kedongan _____	233
B. Lanskap Ekologis Desa Adat Kedongan _____	237
C. Temuan Ekonomi Nusantara _____	242
D. Rekomendasi _____	265

Mengembalikan Desa yang Hilang _____ 267

A. Desa yang Hilang itu Bernama Sendi _____	268
B. Gambaran Lanskap Ekologis _____	273
C. Temuan Ekonomi Nusantara _____	279
D. Rekomendasi _____	291

BAB EMPAT _____ 293

Narasi Tanding Ekonomi Nusantara _____ 293

A. Visibilitas Ekonomi Nusantara _____	293
B. Mengarusutamakan Ekonomi Nusantara sebagai Model Penolakan Ekonomi Pertumbuhan _____	323
BAB LIMA _____	403
Penutup _____	403
A. Simpulan _____	403
B. Rekomendasi _____	406
Daftar Pustaka _____	409
Biodata Penulis _____	409
Biodata Kontributor _____	409

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Peta wilayah administratif Desa Tanjung Aur hasil Pemetaan partisipatif ~ **73**
- Gambar 3.2 : Bentang Alam Bukit Kumbang dilihat dari Air Bacang ~ **106**
- Gambar 3.3 : Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro milik warga Air Bacang ~ **110**
- Gambar 3.4 : Kalender musim jenis tanaman utama di Air Bacang, Desa Sinar Mulya ~ **116**
- Gambar 3.5 : Proses pengolahan biji kopi di Air Bacang ~ **117**
- Gambar 3.6 : Lada hitam hasil panen kebun Air Bacang ~ **120**
- Gambar 3.7 : Jalan dari Air Bacang menuju Linau ~ **122**
- Gambar 3.8 Tanah longsor di Kawasan Bukit Kumbang ~ **128**
- Gambar 3.9 : Pada 2019 akses jalan menuju Air Bacang sempat terputus karena longsor ~ **129**
- Gambar 3.10 : Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westenenk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Prasasti ini kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor inventaris D.145 ~ **135**
- Gambar 3.11 : Foto udara Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Tampak sebagian besar lahannya berupa rawa gambut. Bagi sebagian masyarakat, ekosistem gambut merupakan berkah alam dan sekaligus sumber mata pencaharian ~ **138**
- Gambar 3.12 : Tokoh masyarakat Lebak Rawang kelahiran 10 Oktober 1941, Kerie Ambon ~ **140**
- Gambar 3.13 : *Lebung* atau cabang anak sungai di dalam rawang (hutan rawa gambut). Dari ekosistem semacam inilah masyarakat mencari sumber penghidupan ~ **153**
- Gambar 3.14 : Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bintang Harapan Palma (BHP) ~ **154**
- Gambar 3.15 : Peta Wilayah Kelola Rakyat Lebak Rawang yang dimanfaatkan masyarakat lima desa ~ **157**
- Gambar 3.16 : Peta Daerah Lebak Belanti. Sumber: WALHI Sumatera Selatan ~ **165**

- Gambar 3.17 : Tradisi *Ngantip* pada 1997 ~ **169**
- Gambar 3.18 : Para perempuan sedang melakukan *ngetam* menggunakan tuai (1997) ~ **170**
- Gambar 3.19 : Daerah Lebak Belanti ~ **174**
- Gambar 3.20 : Lahan Lebak Belanti yang sudah ditumbuhi Setedok ~ **175**
- Gambar 3.21 : Alur Pertautan Suku Dayak ~ **181**
- Gambar 3.22 : Dokumentasi Hutan Lung Isun ~ **188**
- Gambar 3.23 : Peta wilayah adat Lung Isun ~ **193**
- Gambar 3.24 : Peta kontur wilayah adat Kampung Lung Isun ~ **195**
- Gambar 3.25 : Peta wilayah adat Kampung Lung Isun ~ **196**
- Gambar 3.26 : Bekas tebangkan kayu PT. KBT ~ **203**
- Gambar 3.27 : Peta Izin IUPHHK yang berada dalam wilayah Long Isun. Kanan sungai adalah PT. KBT dan kiri sungai adalah PT. Roda Mas Timber ~ **220**
- Gambar 3.28 : Peta izin perkebunan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Green Persada dengan Luas wilayah 421 hektar ~ **221**
- Gambar 3.29 : Theodorus Tekwan Ajat ketika di Polres Kutai Barat ~ **223**
- Gambar 3.30 : Pertemuan pada 06 Februari 2018. Pertemuan ini mengasilkan kesepakatan damai antara PT. KBT, Long Isun, dan Naha Aruq ~ **227**
- Gambar 3.31 : Pertemuan dan penyerahan dokumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ~ **227**
- Gambar 3.32 : Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ~ **228**
- Gambar 3.33 : Pertemuan antara masyarakat dengan koalisi saat menyusun draft Ranperda usulan masyarakat ~ **229**
- Gambar 3.34 : Penyerahan dokumen usulan Raperda kepada Ketua DPRD Mahakam Ulu ~ **230**
- Gambar 3.35 : Keramaian Pantai Barat Desa Adat Kedonganan pada sore hari ~ **239**
- Gambar 3.36 : Transformasi ekonomi masyarakat Kedonganan ~ **247**

- Gambar 3.37 : Deretan kafe di Desa Adat Kedonganan sebelum penataan ~ **249**
- Gambar 3.38 : Proses pembersihan Pantai Barat Kedonganan oleh seluruh warga. Setiap warga adalah juga pemilik 24 kafe yang ada. Proses pembersihan dilakukan setiap satu minggu sekali ~ **254**
- Gambar 3.39 : Tampak depan satu dari 24 kafe hasil penataan di Kedonganan ~ **262**
- Gambar 3.40 : Peta wilayah Desa Adat Sendi ~ **269**
- Gambar 3.41 : Tempat berkemah dengan latar Gunung Welirang ~ **280**

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2007-2018 ~ **31**
- Tabel 2.2 : *The Holistic Microeconomic Agent* ~ **50**
- Tabel 2.3 : *Equilibrium* komitmen dan harapan dari studi kasus CSA ~ **52**
- Tabel 2.4 : Indikator *SSED* "Ekonomi Nusantara." ~ **53**
- Tabel 3.1 : Total pendapatan hasil panen musim 2018 berdasarkan harga terendah ~ **96**
- Tabel 3.2 : Grafik persentase kontribusi jenis tanaman pada hasil pendapatan panen perkebunan Tanjung Aur pada musim 2018 ~ **97**
- Tabel 3.3 : Kalkulasi pendapatan Air Bacang pada musim 2019 ~ **123**
- Tabel 3.4 : Nilai ekonomi hasil komoditi Lebak Rawang dengan harga terendah ~ **144**
- Tabel 3.5 : Nilai ekonomi hasil komoditi Lebak Rawang dengan harga normal ~ **145**
- Tabel 3.6 : Pembagian ekosistem gambut berdasarkan habitat ikan ~ **151**
- Tabel 3.7 : Kalender musim ikan di Lebak Rawang ~ **152**
- Tabel 3.8 : Penguasaan Lahan di Desa Belanti ~ **166**
- Tabel 3.9 : Valuasi ekonomi Kampung Lung Isun tahun 2018 ~ **211**
- Tabel 3.10 : Daftar upah pekerja di Kampung Lung Isun ~ **213**
- Tabel 3.11 : Tabel pencaharian dan acara kampung berdasarkan bulan. "Angka Romawi" = bulan dalam tahun kabisan, "x" = dilakukan suami atau istri, dan "xx" = dilakukan bersama (suami dan istri) ~ **217**
- Tabel 3.12 : Daftar dan luas izin industri ekstraktif di wilayah adat Kampung Lun Isun ~ **218**
- Tabel 3.13 : Valuasi Ekonomi Masyarakat Sendi ~ **287**
- Tabel 4.1 : Hasil Pemenuhan Indikator Ekonomi Nusantara ~ **295**
- Tabel 4.2 : Penilaian *SSED* dari Praktek dan Pengetahuan Ekonomi Nusantara ~ **314**

DAFTAR CERITA BOKS

- Boks 1 : Kontradiksi & Kesenjangan antara Keadilan Ekologis dengan SDGs ~ **39**
- Boks 2 : Sejarah Lelang Lebak Lebung ~ **172**
- Boks 3 : Strategi Jitu Bertahan dari Pandemi COVID-19 ~ **264**

BAB SATU

Merancang Wacana Lain

A. Latar Belakang

Krisis merupakan sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi terkini Indonesia. Penggunaan kata krisis dinyatakan tegas oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Paling tidak, terdapat dua momen penting saat Jokowi—biasa ia disapa— menggunakan kata krisis untuk menggambarkan kondisi Indonesia. *Pertama*, saat berpidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 14 Agustus 2020.¹ Dalam pidato tersebut, Jokowi menyebut kata krisis sebanyak 14 kali. *Kedua*, dalam acara “*Kick Off Meeting* Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020,” pada 8 September 2020.² Pada kedua momen tersebut, Jokowi menekankan kondisi krisis karena koherensi situasi pandemi COVID-19 dengan situasi ekonomi.

¹ Lihat misalnya: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-sidang-tahunan-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-dan-sidang-bersama-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-dan-dewan-perwakilan-daerah-repub/> (Diakses pada 14 Agustus 2020).

² Lihat misalnya: <https://www.presidentri.go.id/transkrip/kick-off-meeting-pemeriksaan-atas-pengelolaan-dan-tanggung-jawab-keuangan-negara-dalam-penanganan-pandemi-covid-19-tahun-2020/> (Diakses pada 15 September 2020).

Bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), narasi krisis yang disebut Jokowi bukan sebuah kondisi baru. Jokowi tahu dan sadar, Indonesia berada dalam kondisi krisis jauh sebelum mewabahnya pandemi COVID-19. Hal ini tergambar jelas dalam dokumen kampanyenya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Dalam dokumen tersebut ditemukan empat kata krisis dan dua kata kritis. Hakikatnya, kata krisis dan kritis merupakan dua kata sinonim yang bermakna “keadaan yang berbahaya dan genting.”³

Pada 2014, Jokowi menggunakan tiga kata “krisis” untuk menggambarkan (1) krisis kepribadian bangsa karena intoleransi; (2) krisis energi karena dominasi korporasi global; dan (3) krisis sosial.⁴ Kemudian, Jokowi pun menggunakan dua kata “kritis” untuk menjabarkan dua hal berbeda. *Pertama*, Jokowi coba menjelaskan niatnya untuk merehabilitasi 100 juta hektar areal tidak berhutan, hutan tidak produktif, dan lahan kritis.⁵ Sementara satu kata lainnya, dipergunakan Jokowi untuk menyiarkan komitmen mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Lebih tegas dan lengkapnya,

“Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”⁶

Penggunaan kata “kritis” merupakan bukti kondisi faktual Indonesia saat itu, bahkan hingga saat ini. Jokowi sesungguhnya sudah menyadari kondisi krisis sejak 2014. Ia juga tahu bahwa akar masalah krisis tersebut adalah kerusakan

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/krisis>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritis>, diakses pada 20 September 2020.

⁴ Lihat “*Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*,” (Jakarta: Seknas Jokowi, 2014) hlm. 1-3. Dokumen ini merupakan penjabaran visi misi dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilres 2014.

⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

lingkungan hidup. Namun sayang, terdapat keambiguan pada bagian awal pernyataan dokumen yang diajukan Jokowi. Ia menyebut kebijakan permanen, namun tidak jelas kebijakan permanen macam apa yang dimaksud. Apakah itu kebijakan permanen yang bertujuan memulihkan Indonesia dari krisis? Atau malah menjalankan kebijakan yang membuat krisis makin permanen?

1. Akar Masalah Krisis

Krisis yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan jauh sebelum Jokowi merilis dokumen janji politik dalam Pilpres 2014. Contohnya dalam konsideran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001). Dengan cukup lugas, konsideran produk hukum ini menyebut terdapat empat hal penting dalam krisis yang terjadi, yaitu (1) kemiskinan; (2) ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat; (3) kerusakan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup; dan (4) konflik agraria dan sumber daya alam.

Konsideran tersebut secara lugas menyebut bahwa terdapat dua penyebab terjadinya kondisi krisis. *Pertama*, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber agraria dan sumber daya alam. *Kedua*, adanya tumpang tindih dan pertentangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Potret kondisi dan penyebabnya pun dinarasikan dengan cukup tegas, meski belum menyentuh persoalan atau pertanyaan paling dasar. Seperti, apa penyebab terjadinya ketimpangan? Dan mengapa ada tumpang tindih dan pertentangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban sederhananya adalah pilihan berekonomi secara kapitalistik. Walau tidak diakui secara formal, kondisi

ketimpangan penguasaan ruang dan ketimpangan kesejahteraan memperlihatkan fakta sistem kapitalisme eksis di Indonesia. Pilihan ini mengakibatkan ruang ekonomi, politik, hingga pendidikan didominasi segelintir pihak. Corak kapitalisme tersebut hadir dalam moda produksi, konsumsi, hingga kebijakan. Kapitalisme menghegemoni hampir seluruh ruang kehidupan. Secara filosofis, sistem kapitalisme melahirkan kekeliruan fatal lainnya yakni cara pandang yang memisahkan unsur manusia dan non-manusia (*human and non-human*). Perspektif antroposentris semacam ini menekankan keunggulan manusia di atas makhluk lainnya (baik makhluk hidup maupun yang tidak hidup). Manusia dianggap unggul secara mental dan moral.⁷ Perspektif antroposentris dalam sistem kapitalisme akhirnya melanggengkan dua hal yaitu (1) eksploitasi terhadap manusia; dan (2) apropriasi terhadap alam.

Menurut Rob White, cara pikir antroposentris tidak hanya dipraktikkan oleh penganut ekonomi kapitalisme. Perspektif ini juga digunakan oleh kelompok *environmental justice* (keadilan lingkungan). Kelompok ini memakai pandangan antroposentris untuk mengkritik perbedaan atau ketimpangan kualitas lingkungan hidup antarmanusia. Kelompok ini melihat tidak setaranya kualitas lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat miskin dengan masyarakat *the haves* (kaya). Karena itu, perjuangan keadilan lingkungan adalah soal menyetarakan kualitas lingkungan hidup yang diperoleh setiap manusia, khususnya untuk generasi masa depan.⁸ Pandangan ini mendapat kritik serius dari penganut perspektif ekosentris. Perspektif ini menekankan keadilan bagi manusia dan non-manusia harus diwujudkan bersamaan. Dalam arti, tidak terpisahkan dan saling terkait.

Pandangan antroposentris juga mendorong satu pengistilahan babak sejarah yang disebut *anthropocene*. Hal ini

⁷ Rob White, *Crime Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, (Devon: William Publishing, 2008), hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15-18.

pun menuai kritik. Jason W. Moore merupakan salah satu pengkritiknya. Moore menyebut terdapat dua varian yang saling bertentangan dalam pandangan *anthropocene*. Cara pandang pertama menghubungkan kemanusiaan (masyarakat) dan alam, sedangkan pandangan kedua melihat hubungan kapitalisme dan alam.⁹ Pandangan kedua inilah yang diintrodusir Moore lebih lanjut. Dia melihat bahwa krisis yang terjadi saat ini sudah jauh lebih parah. Bukan semata disebabkan oleh seluruh umat manusia, tapi karena moda produksi, konsumsi, hingga kebijakan yang sedemikian hegemonik yakni kapitalisme. Bahkan logika kapitalisme tidak sekadar masuk ke dalam ruang ekonomi dan politik, tapi berhasil masuk ke alam pikiran hampir seluruh manusia. Dengan mengutip pendapat banyak ahli, akhirnya Moore pun memopulerkan istilah *capitalocene* (era kapital).¹⁰

Praktik ekonomi “era kapital” digerakkan oleh satu sistem bernama *economic growth* (ekonomi pertumbuhan/pertumbuhan ekonomi). Inti cara kerjanya adalah mengukur kesejahteraan *an sich* secara ekonomi. Lengkap dengan alat ukur utamanya yang disebut Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Logika utama sistem ini adalah kapitalisme. Logika ini mengantar penguasaan atau dominasi segelintir orang (atau organisasi ekonomi) terhadap banyak orang. Penguasaan tersebut akhirnya melahirkan dominasi secara politik. Kemudian memproteksi kepercayaannya lewat skema legislasi dan terus menjaganya melalui sistem pendidikan. Logika inilah yang berkuasa atas komponen biotik dan abiotik di planet ini.

Logika kapitalisme ini selalu membual soal kesejahteraan. Kondisi ini sudah bercokol lama di Indonesia, bahkan sejak masa kolonial. Pada masa Pemerintahan Soekarno, logika ini sempat hendak diinterupsi. Upaya meruntuhkan logika

⁹ Jason W. Moore (Ed), *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism*, (Oakland: PM Press, 2016) hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

kapitalisme dilakukan melalui perspektif antroposentris, namun gagal. Faktor kompromis, dengan upaya mendamaikan kemanusiaan (masyarakat), alam, dengan kapitalisme, merupakan salah satu faktornya. Contoh kecil kegagalan tersebut dapat dilihat dalam proses nasionalisasi *Boschwezen* (Jawatan Kehutanan) yang kini bernama Perhutani. Pasca Jawatan Kehutanan (Perhutani) dinasionalisasi, pemerintah mengambil alih seluruh tanah dan hutan yang tadinya dikuasai Belanda. Namun sayang, hal itu tidak diikuti dengan pengembalian tanah yang dirampas oleh pemerinah kolonial kepada rakyat. Atau, membiarkan tanah-tanah itu kembali menjadi hutan heterogen dan bukan hutan homogen seperti model Jawatan Perhutanan Kolonial.

Pada 1960, Pemerintahan Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU PA). Kelahiran UU PA sempat memberi angin segar untuk memulihkan hak rakyat. Pasalnya, UU PA memberi akses kepada rakyat soal sumber daya alam. Selain itu, UU PA pun mengamanatkan *landreform*. Namun naasnya, belum lama UU PA coba dioperasikan, ia malah dikikis oleh produk hukum lain yang diterbitkan oleh pemerintah pengganti Soekarno, Rezim Soeharto.¹¹ Pergantian rezim ini pula yang membawa konsekuensi semakin menguatnya logika kapitalisme.

Pada era Soeharto, ruang eksploitasi terhadap manusia dan apropriasi terhadap non-manusia terbuka sebebaskan-bebasnya. Pada mulanya melalui liberalisasi ekonomi yang membuka banyak peluang investasi. Salah satu penandanya adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Kemudian diikuti pula dengan penerbitan produk hukum lain yang juga kapitalistik. Seperti, misalnya, (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967

¹¹ Rahma Marry Dkk, *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*, (Jakarta: Perkumpulan HuMa dan LBH Semarang, 2007) hlm. 11 dan 39.

tentang Kehutanan; (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan; dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Persis pada babak sejarah inilah Indonesia masuk fase jual murah; jual cepat; dan jual habis kekayaan alam.¹²

Logika kapitalisme tidak berhenti hanya di ruang kebijakan. Pemerintah Soeharto juga menanamkannya dalam dunia pendidikan. Alhasil kurikulum pendidikan pun didesain sedemikian rupa. Tujuannya untuk meneguhkan logika kapitalisme dan melanggengkan dominasi kelas berkuasa. Akhirnya pendidikan hanya sekadar menjadi ruang reproduksi tenaga kerja untuk kebutuhan pasar. Kemudian melalui pendidikan pula pemerintah mendorong pemisahan entitas manusia dan non-manusia untuk tujuan “pembangunan”.

Kekuatan sistem kapitalisme era Soeharto juga ditopang oleh kelompok militer dan bisnis. Mereka inilah yang menguasai ruang politik, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan. Alhasil upaya peneguhan logika ini melalui regenerasi terus berjalan mulus. Kader-kader baru itulah yang makin meneguhkan hegemoni kapitalisme. Pada ujungnya, kelas penguasa menjadi pemilik sah pengetahuan dan kebenaran. Hal itu termanifestasi dari kepercayaan terhadap logika *economic growth* (ekonomi pertumbuhan/pertumbuhan ekonomi)—sebuah tipuan yang menjelma dalam mantra “hanya melalui logika pertumbuhan, kemajuan dan kesejahteraan dapat tercapai.”

Logika *economic growth* bukan semata sebuah pengetahuan, namun juga sekaligus metode yang digemari kelas penguasa (ekonomi dan politik). Logika ini mengajarkan cara mengukur kemajuan suatu negara melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Cara kerjanya adalah dengan menjumlahkan nilai konsumsi, investasi, belanja negara, dan pengurangan ekspor impor. Selain PDB, ada pula penghitungan pendapatan per

¹² Boy Jerry Even Sembiring Dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2019: Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan*, (Jakarta: WALHI, 2019) hlm. 59.

kapita (PDB per kapita). Ini merupakan alat ukur kesejahteraan individu. PDB per kapita dihitung berdasarkan pembagian Produk Nasional Bruto (PNB) dengan jumlah penduduk suatu negara. Penggunaan PDB dan PDB per kapita, abai terhadap aspek non ekonomi seperti aspek ekologi dan sosial. Kedua aspek ini dinegasikan dan sama sekali tidak diperhitungkan dalam merumuskan kriteria kesejahteraan.

Kepercayaan inilah yang mengantarkan Indonesia pada kondisi krisis. Sehingga ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi tidak layak menjadi solusi pemulihan. Alih-alih menyejahterakan, konsep ini malah memperparah ketimpangan dan kemiskinan. Bahkan, hanya menaruh rakyat di bawah bayang-bayang ancaman bencana ekologis. Dengan demikian, proses politik hanya mengantarkan perubahan kepemimpinan, tapi tidak mengubah pilihan cara berekonomi. Manusia dan alam tetap dipisahkan. Dengan kata lain, pemerintahan pasca Soeharto tetap mempertahankan logika kapitalisme dan tetap ambisius mengejar pertumbuhan ekonomi. Sehingga Reformasi tidak mengubah apapun, selain pemimpin. Bahkan soal demokrasi pun kian mundur. Narasi investasi berkedok “Cipta Kerja” merupakan simbol logika kapitalisme makin berkuasa. Fase “jual murah; jual cepat; dan jual habis kekayaan alam” kembali berulang dengan tetap mendapat sokongan tindak represi aparat. Bersamaan dengan itu, kondisi sungai dan air bersih semakin parah. Laju deforestasi pun tak terbandung. Bencana ekologis dan pandemi COVID-19 merupakan buah pahit yang dipaksa “dinikmati” rakyat. Fakta inilah yang akan melanggengkan Indonesia dalam kondisi krisis. Bahkan tidak lagi krisis parsial, namun multidimensi, dan kemungkinan akan berlangsung secara permanen.

2. Ekonomi Nusantara sebagai Wacana Lain Pemulihan

Seorang pemikir asal Italia, Antonio Gramsci, pernah mencuatkan satu gagasan yang cukup menarik. Gramsci

menyebut apabila hendak meruntuhkan kepercayaan hegemoni kelas tertentu, maka perlu lahir kepercayaan tandingannya.¹³ Jika itu terjadi, maka antardiskursus akan mengalami *war of position*. Bates menyebut hegemoni yang dimaksud Gramsci berbeda dengan yang didefinisikan Marx.¹⁴ Sebab menurut Gramsci, manusia dapat diatur bukan hanya oleh kekerasan, tetapi dapat pula dikendalikan oleh gagasan atau ide-ide.¹⁵ Sehingga hegemoni bekerja pula melalui diskursus yang disodorkan kelas penguasa. Karena itu, subordinasi kelas bawah tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, namun juga dalam hal wacana.

Gagasan Gramsci tersebut membawa satu implikasi serius. Dalam arti, upaya melawan hegemoni berarti menyodorkan wacana tanding. Seringkali penyokong wacana tanding tersebut adalah kelompok intelektual. Kelompok inilah yang berperan melakukan pengorganisasian pengetahuan kepada rakyat. Dengan harapan, wacana tanding itu dapat merebut kepercayaan dan menambah kesadaran politik rakyat. Sehingga tujuan dari perarusutamaan wacana tanding dapat tercapai.

Sejak awal, penelitian ini dengan tegas berangkat dari sebuah ketidakpercayaan. Khususnya, terhadap hegemoni pengetahuan dan praktik kapitalisme yang digerakkan oleh konsep *economic growth*. Oleh sebab itu, upaya melawan hegemoni tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan tandingan. Hal ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dimulai walau dengan berbagai keterbatasan. Pengetahuan tanding ini tidak boleh sekadar menjadi pengetahuan alternatif atau menjadi jalan tengah antara kondisi krisis dan hegemoni kapitalisme. Apalagi sebatas jalan kompromi dengan logika *economic growth*. Karena itu, WALHI menyebutnya sebagai

¹³ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Terj. Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 13-28.

¹⁴ David Kreps, *Gramsci and Foucault: A Reassessment*, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015).

¹⁵ *Ibid.*

wacana atau pengetahuan lain. Pasalnya, wacana ini tidak meletakkan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai pelengkap kepentingan ekonomi. Wacana ini justru menaruh kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu lingkaran yang sama.

WALHI mengistilahkan wacana lain tersebut dengan nama “ekonomi nusantara.” Konsep ini diambil dari praktik ekonomi lokal yang masih eksis di berbagai wilayah Indonesia. Kerangka konsep ini tentu saja harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan ketiganya dialektis – saling memengaruhi dan dipengaruhi. Potret ini sekaligus membuktikan bahwa kesejahteraan tidak melulu perkara ekonomi. Masih ada aspek lain seperti sosial dan lingkungan. Ketiga hal itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Guna menggali dan menemukan model pengoperasiannya, kami merumuskan empat indikator yang nantinya akan membentuk definisi “ekonomi nusantara.”

Empat indikator tersebut yaitu **(1) hubungan kejayaan masa lalu dengan kondisi saat ini.** Indikator ini hendak melihat praktik ekonomi lokal seperti apa yang dilakukan masyarakat pada masa lalu dalam membentuk kejayaannya. Ukuran kejayaannya tidak *an sich* secara ekonomi, tapi integral dengan aspek sosial dan lingkungan. Kemudian, potret kejayaan itu pun perlu dilihat pada konteks hari ini. Apakah masih eksis atau tidak. Lalu faktor apa yang menyebabkannya bertahan dan/atau tergerus; **(2) hubungan praktik ekonomi lokal dengan lanskap ekologis di sekitarnya.** Indikator ini merupakan dasar utama penentuan lokasi penelitian. Lanskap ekologis ini yang akan menjelaskan perbedaan masing-masing ruang kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat hidup dan menghidupi lanskap ekologis tersebut; **(3) integrasi praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan.** Praktik ekonomi lokal yang dipotret harus dilakukan dengan cara tidak merusak, dilakukan secara humanis, dan koheren dengan kearifan/nilai lokal; dan **(4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.**

Indikator akhir ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi ini mampu bertahan dari kepungan hegemoni *economic growth*, atau paling tidak berupaya pulih dari krisis yang diakibatkan dari praktik ekonomi ekstraktif.

Berangkat dari empat indikator tersebut, maka “ekonomi nusantara” dapat didefinisikan sebagai **praktik ekonomi yang dilakukan oleh komunitas lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Praktik ini memiliki riwayat kejayaan pada masa lalu dan berorientasi pada pemulihan krisis. Praktik ini juga menekankan keselarasan dan kesatuan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.** Sederhananya, konsep ini menunjukkan nilai adil dan lestari. Dalam arti, memosisikan manusia tidak terpisahkan dari entitas non-manusia (biotik dan abiotik).

Apabila ditelisik lebih dalam, konsep “ekonomi nusantara” bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri. Konsep ini mempunyai relasi dengan konsep, gerakan, teori, bahkan pendekatan filsafat yang lebih dulu eksis. Penelitian ini tidak berupaya untuk menemukan siapa yang lebih dulu mengembangkan pemikiran atau melakukan praktik pengintegrasian nilai ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Penelitian ini justru hendak menemukan kesamaan “ekonomi nusantara” dengan beragam pandangan yang menolak pemisahan manusia dan non-manusia. Termasuk kesamaan pandangan untuk menolak sistem kapitalisme. Khususnya, dalam konteks penolakan terhadap logika ekonomi pertumbuhan (*economic growth*).

Berdasarkan tendensi akar filosofis, “ekonomi nusantara” termasuk kategori ekosentris. Dalam *ecophilosophy*, ekosentrisme memosisikan manusia dengan non-manusia (biotik atau abiotik) secara setara. Atau, seperti yang dipaparkan Rob White, “*ecocentrism refuses to place humanity either above or below the rest of nature.*”¹⁶ Meski setara, sebenarnya

¹⁶ Rob White, *op.cit.* hlm. 11 dan 12.

manusia tetap diberikan kapasitas untuk memanfaatkan alam. Hanya saja dengan metode yang baik dan tetap memerhatikan batas ekosfer planet bumi. Dengan kata lain, manusia harus bertanggungjawab atas moda produksi yang dipilihnya. Proses pengambilan kebijakan harus disusun dengan memerhatikan posisi integral antara manusia dengan alam dan mengesampingkan tujuan pertumbuhan ekonomi (ekstraktif) dan akumulasi kekayaan.

Sementara dalam kerangka konsep, “ekonomi nusantara” mempunyai relasi erat dengan gerakan *degrowth*. Perlu diketahui bahwa gerakan ini lahir dari gerakan *environmental justice*. Landasan filosofisnya pun antroposentris. Secara sederhana, *environmental justice* memiliki titik juang dalam hal pemenuhan hak dan keadilan terhadap lingkungan. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan tempat bekerja yang sehat. Setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengakses kekayaan alam seperti makanan dan air. Termasuk mendapat kepastian bahwa bumi yang dipijak senantiasa lestari untuk generasi mendatang. Karena itu, perjuangannya diwujudkan dengan perubahan sosial secara demokratis. Perubahan sosial itu didorong guna meruntuhkan dominasi (secara ekonomi dan politik) segelintir orang. Pendekatan *environmental justice (EJ)* pun bukan tanpa kritik. EJ dikritik oleh kelompok penganut *ecological justice* dengan pendekatan ekosentrisnya. Bagi kelompok ini, kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus ditujukan bagi entitas manusia dan non-manusia (biotik dan abiotik).

White menerjemahkan ekosentris menjadi perspektif *social ecology* (sosial-ekologis). Penekanan utamanya adalah bahwa keadilan bagi manusia, non-manusia, dan habitat mereka dapat direngkuh secara bersamaan.¹⁷ Perspektif inilah yang diadopsi WALHI dalam penelitian ini. Adapun aktor utama

¹⁷ Marry Manton & Carlos Larrea Dkk, “Environmental justice and the SDGS: from synergies to gaps and contradictions” dalam Jurnal *Springer Sustainability Science* April 2020.

ketidakadilan yang dilawan adalah korporasi perusak lingkungan dan perampas hak rakyat. Entitas korporasi ini pun tidak sendiri, ia dibantu kekuatan politik untuk memastikan hukum yang pro investasi. Bersatunya kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi itulah yang membentuk gurita oligarki dan oligopoli. Hal itu mendorong beberapa kelompok untuk melontarkan kritik terhadap sistem kapitalisme, terutama dengan konsep pertumbuhan ekonominya. Salah satu bentuk perlawanannya adalah dengan mendorong narasi tandingan seperti, misalnya, melalui ide *ecological economics* (ekonomi ekologis).¹⁸ Kemudian beberapa kelompok lain pun mempopulerkan kata *degrowth*.¹⁹ Istilah ini kemudian menjadi slogan melawan logika pertumbuhan ekonomi.²⁰

Para pendukung *degrowth* menghendaki masa depan di mana masyarakat hidup dalam kecukupan ekologis. Praktik perekonomian lokalnya terbuka. Sumber daya terbagi secara merata, melalui kelembagaan demokratis. Jika terjadi depresi atau resesi ekonomi, maka itu adalah peluang *degrowth* untuk melakukan perbaikan ekologis. *Degrowth* mensyaratkan penghapusan PDB, terutama agar masyarakat dapat fokus mengubah pola produksi, konsumsi, agar tetap sejalan dengan batasan ekosistem.

Perlu digarisbawahi, *degrowth* bukan hanya proyek keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, ia merupakan bagian dari rencana aksi untuk keadilan sosial-ekologis. Posisinya pun jelas. Di tengah hegemoni ukuran kemajuan melalui PDB,

¹⁸ Joan Martínez-Alier, "Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements" dalam Jurnal *Capitalism Nature Socialism* Volume 23, Maret 2012, hlm. 51. Diakses dari <https://degrowth.org/wp-content/uploads/2012/11/jma-degrowth-and-ej.pdf>, pada Desember 2019.

¹⁹ *Degrowth* berasal dari Bahasa Perancis, *décroissance*, yang berarti membusuk.

²⁰ Federico Maria Dkk, "What is Degrowth: From an Activist Slogan to a Social Movement" dalam Jurnal *Environmental Values* 22, The White Horse Press, 2013, hlm. 119.

degrowth hadir untuk mendefinisikan ulang ukuran kemajuan.²¹ Dengan begitu, dalam konteks ini, penghapusan PDB adalah langkah untuk memberi ruang yang lebih luas. Tidak hanya bagi kerja sama antarmanusia, namun juga bagi praktik ekonomi ramah lingkungan. Karena itu pula, perlu penafsiran ulang atas kehidupan lokal dan/atau *rural* (perdesaan) yang tersisih praktik ekonomi ekstraktif.²² Tujuannya jelas, minimal, agar dapat membayangkan (syukur-syukur mewujudkan) jaringan desa-desa ekopolis, bioregion, dan ekomunisipalisme. Semua hal itu terikat oleh semangat swakelola dan demokrasi ekologis.²³

Sebagai pengetahuan tanding, penelitian ini pun menggunakan sebuah ukuran kemajuan dan kesejahteraan lain. Rujukan utamanya adalah *Socially Sustainable Economic Degrowth (SSED)*. Logika utama cara ukur ini adalah “*The non-monetary part of satisfaction is more important than the monetary one.*”²⁴ Cara ukur ini melihat kemajuan dan kesejahteraan tidak semata secara ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, SSED juga dilihat mempunyai kemiripan dengan visibilitas “ekonomi nusantara.”

3. Economic Growth vs Ekonomi Nusantara

Sebagai wacana lain pemulihan, konsep “ekonomi nusantara” hanya akan berhenti sebagai ide apabila tidak didesain kerangka operasionalnya. Oleh sebab itu, bagian ini akan menggambarkan secara ringkas cara yang akan digunakan untuk menciptakan narasi tanding *economic growth*. **Pertama,**

²¹ Serge Lautoche, *Farewell to Growth*, (Cambridge: Polity Press, 2009) hlm. 55.

²² Murray Bookchin, *Toward an Ecological Society*, (Quebec: Montreal Black Rose Books, 1980).

²³ *Ibid.*

²⁴ Marjolijn Bloemmen Dkk, “Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture” dalam *Jurnal Ecological Economic* 112 (2015). Hlm. 113.

konsep ini belajar dari dua kajian serupa yang sudah dilakukan oleh AMAN (2018) dan JATAM (2019). Dua kajian tersebut mempunyai kesamaan dengan konsep “ekonomi nusantara.” Dua kajian itu melahirkan konsep ekonomi tanding guna melawan logika ekonomi pertumbuhan yang merusak lingkungan. Studi JATAM menguraikan bagaimana bekerjanya ekonomi pertumbuhan melalui praktek eksploitasi pertambangan. Sementara itu, studi AMAN lebih menyoal signifikansi perekonomian rakyat berbasis sumber daya alam.

Seperti kita ketahui, ekstraksi di sektor pertambangan nyaris selalu merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tapi di tengah praktik ekstraksi tersebut, muncul perlawanan ekonomi lokal dari mereka yang terpinggirkan. Ketika dilakukan perhitungan valuasinya, praktik ekonomi lokal masyarakat adat justru melampaui ekonomi pertumbuhan regionalnya. Temuan visibilitas “ekonomi nusantara” makin memperkuat fakta itu. Praktik ekonomi lokal jelas berbeda dengan praktik *economic growth*. Praktik ekonomi lokal tidak memisahkan manusia dengan entitas alam lainnya. Sehingga secara nilai ekonomi sekali pun, praktik ekonomi lokal jauh lebih memberi manfaat.

Kedua, memosisikan *economic growth* sebagai sebuah perangkat hegemoni. Tidak hanya dalam aspek penguasaan pikiran, tapi termasuk tindak perilaku, pengambilan kebijakan, keputusan, dan ruang pendidikan. Sehingga praktik perlawanannya pun membutuhkan diskursus tanding. Seperti, misalnya, melalui konsep “ekonomi nusantara”. Dalam pengoperasiannya, konsep “ekonomi nusantara” masih meminjam metode hegemoni tanding (*counter hegemony*) Gramsci. Oleh karena itu, konsep ini pun harus dikenalkan secara luas. Ia tidak akan berguna dan tidak mampu bertarung melawan *economic growth* apabila tidak disokong oleh kekuatan orang banyak. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep “ekonomi nusantara” tidak bisa sekadar berhenti sebagai teks.

Ketiga, *economic growth* bukan sekadar praktik ekonomi. Lebih luas, ia telah menjadi pengetahuan dan kekuatan politik. Posisinya pun terus diproteksi hukum dan menjadi bagian dari proses regenerasi di ruang pendidikan. Mengutip pandangan Michel Foucault, kokohnya *economic growth* merupakan sebuah *episteme*. Dalam konteks ini, hegemoni tanding yang diusung Gramsci tidak cukup untuk melawan *economic growth*. Apabila *economic growth* dipercaya sebagai *episteme*, maka metode perluasan aliansi, partai politik, dan dukungan intelektual organik saja tidak cukup.²⁵ Sehingga dibutuhkan pengadopsian diskursus/wacana ala Foucault. Dalam arti, perlu bantuan legitimasi intelektual kampus. Melalui, salah satunya, pengarusutamaan konsep “ekonomi nusantara” sebagai lawan tanding *episteme economic growth* di dunia akademik.

Bentuk perlawanan individu juga tidak cukup. Pasalnya, narasi diskursus yang diproduksi kelompok hegemonik seolah benar dalam relasi sosial.²⁶ Misalnya, dalam konteks mantra pertumbuhan dalam SDGs, kesejahteraan buruh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses subjektifikasi individu melalui konsep “ekonomi nusantara” harus naik level menjadi diskursus/wacana publik. Dari perputaran wacana itu, diharapkan lahir pembacaan dan, tentu saja, pengetahuan tanding lain.²⁷

Perlu diketahui, regenerasi akademisi dan praktisi *economics growth* telah dimulai sejak pendidikan menengah, bahkan dasar. Lalu makin diperkuat pada level universitas. Berkat otoritas kekuasaan, pengetahuan itu pun tersebar dan menguasai seluruh ruang kehidupan. Model tolak ukur ekonomi makro begitu dipercaya dan dipertahankan. Tidak peduli bahwa

²⁵ Menurut Gramsci, intelektual organik adalah orang-orang dalam partai revolusioner. Ia mengambil peran pendidikan dan intelektual untuk mendorong level kesadaran politik kelas pekerja.

²⁶ David Kreps., *op.cit.* Hlm. 60.

²⁷ A. Sudiarja, S.J, “Michel Foucault (1926-1986),” Bahan Ajar *Extension Course* Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 11 November 2019. Hlm. 5.

pembawaan wataknya berbeda dengan semangat konstitusi. Oleh sebab itu, konsep “ekonomi nusantara” harus mendapat dukungan dari akademisi dan kekuasaan otoritatif. Sehingga, sangat mungkin konsep “ekonomi nusantara” untuk dimodifikasi dan dikembangkan. Akan tetapi, harus dengan tetap memegang semangat yang sama yakni ekonomi ekologis, anti konsumerisme, dan anti kapitalisme. Dengan begitu, dari sebuah konsep “ekonomi nusantara” harus menguat menjadi diskursus. Setelah itu baru menawarkannya sebagai sebuah hegemoni tanding.

Setelah posisinya menguat sebagai diskursus, perlahan “ekonomi nusantara” harus menjadi kepercayaan. Jika itu terjadi, maka itu masa yang tepat untuk memperluas aliansi. Tujuannya jelas yaitu untuk bertarung dalam proses politik elektoral. Karena itu, “ekonomi nusantara” lahir sebagai kesadaran politik baru dan siap menjadi pengetahuan otoritatif. Dalam arti, sebuah pengetahuan yang mengantarkan Indonesia pada situasi adil dan lestari, bukan pada kondisi krisis seperti saat ini.

WALHI menyusun konsep “ekonomi nusantara” dengan merujuk hasil pengalaman belajar bersama rakyat di beberapa lokasi seperti Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Konsep ini merupakan komitmen WALHI untuk mendorong wacana lain pemulihan dan sekaligus narasi tanding sistem kapitalisme. Lagi pula, dari hasil visibilitas praktik ekonomi lokal pun jelas. Ia makin membuktikan bahwa betapa tidak relevannya negara ini mempertahankan logika usang a la *economic growth*.

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hegemoni kapitalisme dengan konsep *economic growth*. Hegemoni ini tidak sekadar mengisi ruang ekonomi. Namun merangsek hingga ke dalam sendi kehidupan lain seperti politik, hukum, hingga

pendidikan. Hal inilah yang membuat kapitalisme dengan *economic growth*-nya menjadi *episteme*—sebuah pengetahuan yang dikendalikan oleh otoritas kelas penguasa. Kondisi ini menjadikan ekonomi sangat dominan dan abai terhadap aspek kehidupan lain (sosial dan lingkungan). Tentu saja, ini bukan keadaan yang baik bagi manusia dan alam. Karena itu, pembabakan sejarah “era kapital” harus disudahi, meski ini jelas bukan perkara mudah.

Penelitian ini coba menjawab permasalahan yang disebutkan di atas. Terutama dalam mendorong narasi tanding dan sekaligus merumuskan cara pengoperasiannya. Agar tidak terlalu melebar, maka penelitian ini pun memiliki batasan dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana visibilitas “ekonomi nusantara” di beberapa lanskap ekologis yang tersebar di beberapa lokasi riset?
2. Bagaimana cara mengarusutamakan konsep “ekonomi nusantara” sebagai sebuah wacana tanding konsep *economic growth*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Melahirkan konsep “ekonomi nusantara” sebagai wacana lain yang memuat keadilan ekologis melawan hegemoni logika kapitalisme melalui *economic growth*.
2. Menyusun strategi “ekonomi nusantara” sebagai pengetahuan tanding dan kekuatan politik anti kapitalisme.

D. Metodologi

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian sosial ini mengambil studi praktik ekonomi lokal yang tersebar di lima provinsi yakni Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Praktik ekonomi lokal yang dipotret bukan sekadar bernilai secara ekonomi, melainkan bernilai pula secara sosial dan lingkungan. Bahkan praktik ekonomi ini pun terikat dalam sistem kepercayaan lokal sehingga, disadari atau tidak, praktik ini masuk ke dalam ruang politik masyarakat.

Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah model *action research* (kaji tindak). Model ini merupakan satu bentuk riset yang tidak hanya “*to understanding and analyzing.*” Lebih dari itu, sekaligus “*to social and economic changes.*” Artinya, dalam riset ini pun melekat agenda advokasi dan pengorganisasian rakyat untuk sebuah perubahan. Menurut Gunawan Wiradi, model riset semacam ini lebih dekat pada bentuk riset partisipatoris (*participatory research*) daripada riset akademik atau riset kebijakan.²⁸

Dengan demikian, tujuan riset semacam ini bukan semata menjelaskan “misteri” atau menemukan “kebaruan” (*novelty*). Namun lebih untuk menunjukkan dan memperlihatkan (*visibility*) hal yang disembunyikan. Dan, pada akhirnya, menyusun argumen tanding (*counter discourses*) atas narasi yang lebih hegemonik. Dalam konteks ini, narasi hegemonik yang dimaksud adalah logika ekonomi pertumbuhan (*economics growth*). Konsekuensi lain dari model riset semacam itu adalah tidak bebas nilai. Dalam arti, sejak awal riset harus didesain

²⁸ Mohammad Sohibuddin, *Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, (Bogor: Sajogyo Institute dan IPB, 2009).

untuk memihak pada kelompok yang lemah, miskin, dan dirugikan.²⁹

2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Riset ini masuk dalam kategori Riset Aksi Partisipatoris (RAP) Tematik. Tujuannya untuk menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan yaitu praktik ekonomi lokal. Praktik yang disebut “ekonomi nusantara,” sebagai alat evaluasi dan pengamatan (*monitoring*). Adapun data utama yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan observasi. Khusus untuk lokasi di Bengkulu, pencarian data dilakukan dengan tambahan metode survey valuasi ekonomi.

Penentuan responden di tiap lokasi dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Artinya, responden dipilih dengan kriteria warga dampingan WALHI yang memahami empat indikator “ekonomi nusantara”. Setelah data terkumpul, data kualitatif diinterpretasi dengan menggabungkan hasil penghitungan valuasi ekonomi dari setiap lokasi penelitian. Kemudian, hasil temuan sementara akan diverifikasi kembali kepada informan kunci/responden dalam bentuk FGD. Hasil verifikasi ini kemudian digunakan untuk melengkapi keseluruhan hasil analisis penelitian.

3. Lokasi dan Durasi Penelitian

Sebaran lokasi riset berada dalam lokasi yang disebut WALHI sebagai Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Maksudnya, satu sistem pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif. Baik itu dalam hal kuasa, kelola, produksi, atau konsumsi. Mekanismenya pun harus senantiasa memerhatikan

²⁹ Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 317.

fungsi sumber daya alam sebagai pendukung kehidupan. Terutama berdasarkan nilai dan kearifan setempat. Tujuan utamanya untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan begitu, secara ringkas WKR dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari komponen tata kuasa, tata kelola, tata konsumsi, dan tata produksi. Masing-masing dari “tata” ini saling terkait untuk memastikan daulat rakyat terhadap sumber daya alam.

Pilihan lokasi studi didasarkan pada keragaman lanskap ekologis di Nusantara. Pada awalnya, penelitian ini akan memotret enam lanskap ekologis seperti gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan Sumatera, pesisir, sabana, dan hutan dataran rendah. Adapun lokasinya tersebar di delapan provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Namun dalam perkembangannya, studi ini hanya dapat dilakukan di lima lanskap ekologis yakni gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan Sumatera, hutan dataran rendah, dan pesisir. Sebaran lokasinya berada di lima provinsi yaitu Bali, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Durasi riset dilakukan selama dua tahun. Fase pra-riset berlangsung pada Oktober dan November 2018. Kemudian berlanjut pada fase pengumpulan data yang dilakukan selama delapan bulan dari Desember 2018 s/d Juli 2019. Setelah itu, proses penyusunan hasil temuan awal dilakukan pada Agustus s/d Minggu II Oktober 2019. Sementara sinkronisasi masukan pasca-paparan temuan awal berlangsung pada Desember 2019 s/d Februari 2020. Setelah itu baru masuk fase validasi data dan merumuskan hasil akhir temuan daerah pada Maret s/d Juni 2020. Dan terakhir, fase penulisan laporan pada Juli 2020 dan Oktober s/d November 2020.

BAB DUA

Melahirkan Lawan Ekonomi Pertumbuhan

A. Ekonomi Pertumbuhan: Kritik, Krisis, dan Kekeliruan Menghitung Kesejahteraan

Pada Maret 2020, Ken Klitgaard sempat menyampaikan makalah dalam “Konferensi Kedua Ekonomi *Degrowth* untuk Keberlanjutan Ekologis dan Keadilan Sosial” di Barcelona, Spanyol.³⁰ Klitgaard membuka ceramahnya dengan kalimat menohok, “ekonomi pertumbuhan merupakan cawan suci ekonomi makro arus *mainstream* (baca kapitalisme).” Klitgaard pun menjelaskan bahwa ekonomi pertumbuhan mempunyai tiga batasan. Ketiga batasan itulah yang akan mengantarkannya pada krisis. *Pertama*, batasan pada akumulasi kapital. Ketika batasan ini tercapai, maka ia hanya mampu memberikan keuntungan pada pemilik modal. Karena itu tidak mampu redistribusi kesejahteraan kepada kelompok miskin. *Kedua*, batasan biofisik. Keserakahan ekonomi kapitalisme tidak kompatibel dengan keterbatasan alam. Paksaan ekonomi untuk terus tumbuh mensyaratkan kepunahan, kerusakan, dan bencana yang paling fenomenal, perubahan iklim. *Ketiga*, batasan legitimasi politik. Ekonomi pertumbuhan hanya membatasi ruang politik pada kelompok kaya. Rakyat hanya

³⁰ Kent Klitgaard, “*Secular Stagnation and the Failed Growth Economy. 2nd Conference on Economic Degrowth*,” (Barcelona, 2010).

diposisikan sebagai konstituen untuk melanggengkan kuasa. Lengkap dengan praktik ekonomi ekstraktifnya. Melalui model politik semacam inilah tatanan sosial rusak.

Paparan Klitgaard tentang batasan ekonomi pertumbuhan adalah bentuk provokasi. Pembukaan makalah itu mendorong kebencian pada “cawan suci ekonomi kapitalisme.” Namun tidak afdol jika membenci, tanpa terlebih dahulu mengenal. Meminjam perkataan John Lennon, “*Don't hate what you don't understand.*” Oleh sebab itu, bagian ini akan fokus menjelaskan itu. Adapun maksud ekonomi pertumbuhan di sini sama dengan apa yang biasa disebut pertumbuhan ekonomi. Kami memahami ekonomi pertumbuhan (*economic growth*) lebih dari sekadar sebuah terminologi. Ia juga merupakan alat ukur ekonomi kuantitatif dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Berlangsung dari rentang tahun satu ke tahun berikutnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*). Sebagian besarnya diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan *output* per kapita.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai pasar (*total market value*) dari barang dan jasa (*final goods and services*). Total nilai dilihat dalam rentang (pada umumnya) waktu satu tahun. Dari total nilai itu pula angka tingkat pertumbuhan ekonomi muncul. Setelah itu dibuat angka persentase. Kemudian persentase itulah yang digunakan untuk membandingkan angka pendapatan nasional riil pada tahun x dengan angka tahun sebelumnya.³¹ Dengan demikian, PDB merupakan kata kunci untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Seorang Ekonom, Simon Kuznets, adalah orang pertama yang memberikan definisi umumnya. Ia pertama kali

³¹ Sri Eka Astutiningsih dan Citra Mulya Sari, "Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur," dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* Juni 2017, hlm. 3.

menyampaikannya pada 1934, ketika menyusun neraca ekonomi nasional Amerika Serikat. Menurut Kuznets, PDB merupakan data silang dalam sirkulasi barang ekonomi—produksi, distribusi, atau konsumsi—yang hasilnya identik.³² Bentuknya pun harus dalam rentang waktu tertentu. Paling umum, setiap tiga bulan sekali (kuartal). Adapun rumus umumnya adalah sebagai berikut,³³

$$\text{PDB} = \text{Konsumsi} + \text{Investasi} + \text{Belanja Negara} + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$$

Selain rumus di atas, sebenarnya terdapat beberapa cara lain untuk menghitung PDB yakni (1) pendekatan pengeluaran. PDB dihitung sebagai jumlah dari seluruh pengeluaran (atau pembelian) yang dilakukan oleh pemakai barang. Data penghitungan ini diambil dari perusahaan, penyedia jasa, toko, ritel, kantor pemerintah, dan lain-lain; (2) pendekatan pendapatan. PDB ditentukan dengan cara menghitung harga pasar dari sebuah barang jadi atau jasa. Cara hitung ini mencerminkan seluruh pendapatan yang didapat. Termasuk biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Penghitungan ini kerap dipakai untuk menilai daya beli rumah tangga dan kesehatan finansial badan usaha; dan (3) pendekatan nilai tambah. PDB diukur sebagai jumlah dari nilai tambah di setiap tahapan proses produksi.

Mempelajari PDB bukan satu pekerjaan mudah. Apalagi melontarkan kritik terhadapnya. Namun mempelajari dan mengkritik PDB tetap penting dan sangat berguna. Terutama untuk melihat betapa berpihaknya alat ukur ini terhadap kepentingan ekonomi kapitalisme. Apalagi perkakas ini pula yang digunakan untuk melanggengkan ekonomi pasar bebas.

³² Simone Kuznets, *National Income and Capital Formation, 1929-1932*, (National Bureau of Economic Research, 1937), hlm. 4.

³³ Lorenzo Fioramonti, *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Reaitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2017), hlm. 7.

Lebih naasnya lagi, PDB juga dipakai untuk melihat kesejahteraan penduduk. Caranya adalah dengan menghitung jumlah PDB tahun tertentu dengan jumlah populasi penduduk. Kemudian ada pembagian angka Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dengan jumlah penduduk. Hasil pembagian nilai PNB dengan jumlah penduduk disebut sebagai pendapatan rata-rata nasional. Selain itu, pendapatan per kapita juga bisa dihitung dari pendapatan usia produktif di suatu wilayah dibagi jumlah populasi penduduknya.

Metode semacam ini tidak mampu menggambarkan kesejahteraan ekonomi dengan tepat. Pengambilan nilai rata-rata tidak akan mampu memotret kondisi faktual kemiskinan: pendapatan rendah ditutupi pendapatan tinggi. Karena itu, penghasilan pemilik modal (level tinggi dan menengah) tidak dianggap kontras dengan pendapatan penduduk miskin. Akhirnya, pendapatan per kapita digunakan untuk menutupi angka ketimpangan pendapatan. Dengan begitu, kesahihan model pendapatan per kapita patut diragukan. Selain bermasalah sejak dalam cara ukur, pertumbuhan ekonomi juga abai terhadap aspek kesejahteraan di luar aspek ekonomi. Hal ini terkonfirmasi dari pendapat profesor ekonomi *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), Daron Acemoglu.³⁴ Ia menyebut jika pertumbuhan ekonomi umumnya baik untuk kesejahteraan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi sering kali justru menciptakan pemenang dan pecundang.

Menyoal pertumbuhan ekonomi, Acemoglu mengutip pendapat Joseph Schumpeter tentang *creative destruction* (destruksi kreatif). Proses destruksi kreatif terjadi karena pertumbuhan ekonomi selalu membutuhkan pembaharuan. Baik itu karena pengenalan teknologi baru maupun entitas badan usaha baru. Terkadang, kondisi ini yang mengakibatkan kehancuran relasi produksi. Tidak hanya pada aspek nafkah hidup individu, tapi hingga badan usaha. Proses penghancuran

³⁴ Daron Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth*, (New Jersey: Princeton University Press, 2009), hlm. 8.

ini yang mengakibatkan ketegangan sosial. Kemudian, dengan mengutip Simon Kuznets, Acemoglu juga menyebut jika pertumbuhan dan pembangunan kerap membuat transformasi struktural besar-besaran. Hal itu dapat menghancurkan hubungan tertentu yang sudah mapan. Lalu menciptakan kompetisi yang berujung kelahiran pemenang dan pecundang.³⁵ Terkait hal ini, Acemoglu melihatnya dalam kaca mata ekonomi-politik. Melalui, misalnya, bagaimana mengatur lembaga dan kebijakan agar pecundang proses pertumbuhan ekonomi dapat diberi kompensasi. Dan kompensasi itu pun tetap tidak boleh menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Paparan Acemoglu di atas makin memperjelas satu hal. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi justru melahirkan iklim kompetitif dan mengorbankan kepentingan orang lain. Namun jika ditilik dari tulisan lainnya, Acemoglu merupakan seorang pendukung *economic growth*.³⁶ Ia percaya bahwa yang memengaruhi kekayaan suatu negara adalah sistem ekonomi-politik. Ia pun meyakini jika pertumbuhan ekonomi relevan dengan kesejahteraan. Namun, lagi-lagi, Acemoglu memotret kesejahteraan *an sich* melalui kaca mata ekonomi makro. Ia masih mempertahankan cara ukur PDB dan pendapatan per kapita. Padahal cara ini tidak tepat untuk mengukur kesejahteraan. Sebab, cara ini justru acap menjadi alat menyembunyikan potret ketimpangan. Sepenuhnya mengandalkan teknologi pun bukan jawaban. Selain mendorong praktik “teknikalisasi permasalahan,” teknologi juga erat kaitannya dengan ekstraksi sumber daya alam. Hal ini dapat memicu degradasi lingkungan besar-besaran. Jika model semacam ini terus dilestarikan, maka akan selalu ada pihak yang menjadi korban pertumbuhan. Inilah buah pendekatan *winner* dan *loser*. Dan pada bagian selanjutnya, kami akan fokus

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9.

³⁶ Muhadjir Darwin, “(Resensi Buku) Negara Gagal: Bagaimana dengan Indonesia,” dalam Jurnal *Populasi* Volume 25 Nomor 1 2017.

mengurai kritik terhadap ambisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1. Kritik terhadap PDB

Pada mulanya adalah PDB. Cara ukur inilah yang membuat tipuan ekonomi pertumbuhan langgeng. Bahkan menurut Lorenzo Fioramonti, PDB merupakan angka paling digdaya di dunia. Pasalnya, ia dianggap sebagai tolok ukur kemajuan dan kesejahteraan negara. Pencapaian tinggi pada PDB akan mengantarkan negara pada tatanan kelompok ekonomi berkuasa seperti, misalnya, G8 atau G20.³⁷ Namun sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi hanya melanggengkan mantra "*faster, higher, further.*" Mantra ini sangat khas corak produksi kapitalisme. Mantra ini juga yang mendorong kompetisi dan pelegalan praktik perampokan sumber daya alam. Tidak lain, tujuan utamanya adalah mengejar target angka peningkatan PDB.

Kritik terhadap PDB juga disodorkan Joseph Stiglitz Dkk (2011). Bagi mereka, PDB bukan alat ukur yang tepat untuk mengukur kesejahteraan. Menjadikan PDB sebagai acuan hanya akan membuahkan indikasi keliru tentang kondisi masyarakat. Selain itu, acuan yang salah dapat berbuntut pada kesalahan proses pengambilan kebijakan.³⁸ Meski sama-sama melontarkan kritik, terdapat beberapa perbedaan di kalangan para ekonom. Sebagian ekonom menunjuk kelemahan PDB soal ukuran kesejahteraan. Sebagian ekonom lain tegas menolak pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi justru melanggengkan dan memperparah kemiskinan, kerusakan alam, dan kesenjangan. Begitu pula dari segi upayanya. Sangat beragam, meski tujuannya sama-sama

³⁷ Lorenzo Fioramonti, *Ibid.*, hlm. 2-3.

³⁸ Joseph E. Stiglitz Dkk, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan* (terjemahan), (Jakarta: Marjin Kiri, 2011), hlm. 13-14.

melawan PDB sebagai perangkat ekonomi kapitalisme. Misalnya, ada beberapa kelompok yang menawarkan alternatif indikatornya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lalu ada pula yang menyodorkan tawaran indikator Indeks Kebahagiaan.

Stiglitz Dkk (2011) juga menyebut jika PDB pada dasarnya hanya mengukur produksi pasar. Hal itu kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi. Padahal kerancuan dua hal tersebut justru menyesatkan. Karena menjadi sulit untuk menerka seberapa sejahtera suatu masyarakat. Hal ini berimplikasi buruk terhadap proses pengambilan keputusan.³⁹ Kemudian, PDB pun tidak akan mampu mengukur apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup. Sebab bagi Stiglitz Dkk (2011), kualitas hidup merupakan konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Ia mencakup sekumpulan faktor-faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini. Dengan kata lain, melampaui sisi materialnya.⁴⁰

Berbeda dengan Stiglitz Dkk (2011), Fioramonti berpendapat tidak ada alasan untuk mempertahankan PDB. Pasalnya, justru dengan melepaskan diri dari mantra pertumbuhan kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Satu model masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan semua orang. Karena ekonomi yang sejahtera akan berdampak luar biasa pada semua yang kita lakukan. Seperti, misalnya, mendorong bisnis kecil dan mendorong warga sebagai pemimpin kolektif pada masa depan.⁴¹ Fioramonti juga menegaskan bahwa PDB dibangun di atas dusta besar. Kosa kata utama dusta ini adalah

³⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 32 dan 68.

⁴¹ <https://cris.unu.edu/wellbeing-economy-success-world-without-growth>, Diakses pada 26 Oktober 2020.

bahwa pasar merupakan satu-satunya penghasil kesejahteraan. Fioramonti menambahkan,⁴²

“Apa yang tidak diberi harga, apa yang tidak melibatkan transaksi finansial formal yang didasari oleh uang, tidak masuk hitungan – tak peduli betapa pentingnya hal tersebut bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi kita. **Label harga merupakan simbol PDB paling utama.** Produksi terus menerus dan konsumsi tanpa akhir adalah nilai-nilai yang mendasarinya. Sifat awet, kemampuan untuk dapat digunakan kembali, dan swaproduksi menjadi musuh utamanya. **Barang-barang yang awet dan bertahan lama merupakan musuh PDB.** Karena mereka hanya dihargai sekali dan karenanya dihitung sekali. Barang-barang yang kita bikin untuk diri sendiri malah lebih buruk lagi. Karena barang-barang itu sama sekali tidak diberi harga. Dalam paradigma ini, rumah tangga direduksi menjadi kandang konsumen. ... **Apabila mereka tidak terobsesi dengan belanja, mereka pun dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.**”

Penyedia seluruh kekayaan paling utama, alam, diperbudak dan nilainya direndahkan. PDB memberi ilusi kepada umat manusia bahwa pertumbuhan itu adalah perkara industri. Padahal industri hanya satu fase transisi. Alhasil manusia cuma mengubah kekayaan alam menjadi uang. Sialnya itu tidak untuk semua manusia, tapi hanya untuk segelintir saja.

Pendapat di atas mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mendorong perilaku konsumtif. Faktor non-ekonomi seperti alam, hanya dianggap sebagai bahan baku gratis untuk mengakumulasi uang untuk segelintir orang. Karena itu, pada bagian akhir bukunya, Fioramonti menyebut

“... dengan menentang PDB, kita punya peluang mengontrol pranata politik, sosial, dan ekonomi kita. Dengan

⁴² Lorenzo Fioramonti., *op.cit.*, hlm. 201-202. Cetak tebal dari kami.

menegaskan kembali kreativitas hidup dan bukan semata-mata pertumbuhan, kita berjuang demi bertahan sebagai umat manusia. Dan ini adalah perjuangan paling penting sepanjang masa.”⁴³

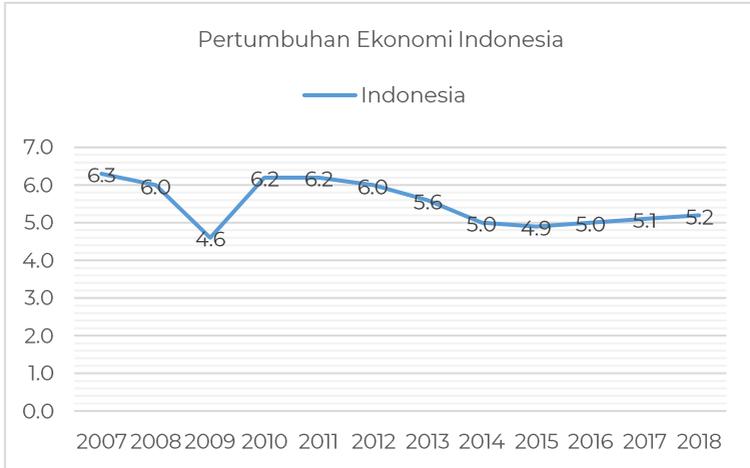
2. Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan sebagai Syarat Ekonomi Pertumbuhan

“Menjadi ‘hijau’ dan berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan.”⁴⁴

Kutipan di atas diambil dari uraian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang “Indonesia *Green Growth Program*”. Pernyataan tersebut mempertegas model pembangunan kapitalistik ala *economic growth*. Pilihan model pembangunan ini telah terbukti mengantarkan Indonesia pada jeratan krisis. Ada banyak sekali data dan fakta untuk membuktikan ini. Beragam data dan fakta itu jelas mengindikasikan bahwa akar krisis adalah kapitalisme. Segala daya dan upaya untuk memoles akar krisis agar “seolah” baik terbukti gagal. Ia tidak mampu menyelamatkan persoalan lingkungan hidup dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi dengan tetap memelihara watak eksploitasi dan apropriasinya terhadap aspek manusia dan non-manusia.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 206.

⁴⁴ <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>, Diakses pada 25 Maret 2020.



Tabel 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2007-2018. Sumber: Data Bank Dunia.

Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia relatif stabil di atas 5%. Bahkan Indonesia berhasil bangkit dengan cukup baik pascareseksi 2008. Namun sayang, pertumbuhan PDB tidak berbanding lurus dengan capaian penurunan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Beberapa laporan menyebut jika Indonesia memiliki karakteristik ketidaksetaraan yang tinggi dalam hal distribusi pendapatan.⁴⁵ Dalam kurun waktu 2011-2015 misalnya, disebutkan bahwa kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kemudian, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB. Kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 60 juta orang termiskin di Indonesia.

Laporan lain juga menunjukkan hal serupa. Pada 2016, sekitar 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai setengah atau 49 persen total kekayaan di Indonesia. Sementara itu, sekitar 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 77 persen

⁴⁵ <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia>, Diakses pada 24 Maret 2020.

total kekayaan di Indonesia.⁴⁶ Kemudian, empat miliarder paling kaya memiliki kekayaan \$ 25 miliar lebih banyak dari total kekayaan 100 juta penduduk miskin (\$ 24 miliar) di Indonesia. Padahal, jika total kekayaan 40 persen penduduk paling miskin digabungkan hanya mencapai 1,4 persen dari total kekayaan nasional. Dengan asumsi berbelanja \$ 1 juta per hari, maka butuh 22 tahun agar kekayaan orang paling kaya di Indonesia habis. Kemudian hanya butuh satu hari bagi orang paling kaya untuk mendapatkan bunga dari kekayaannya. Hal ini melebihi seribu kali jumlah yang dibelanjakan penduduk miskin untuk kebutuhan dasar selama satu tahun. Laporan itu juga menyebut ada enam faktor penyebab tingginya angka ketimpangan di Indonesia yakni (1) fundamentalisme pasar; (2) *political capture*; (3) upah murah; (4) ketidakadilan gender; (5) ketimpangan akses desa dan kota; dan (6) buruknya sistem perpajakan.⁴⁷

Gambaran ketimpangan pendapatan antarpenduduk juga berelasi dengan ketimpangan penguasaan ruang untuk industri ekstraktif. WALHI mencatat, terdapat 61,46% daratan yang dikuasai korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan migas. Jurang ketimpangan tersebut ditegaskan pula oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2013, rasio gini penguasaan lahan mencapai 0,68. Artinya, terdapat 1% penduduk Indonesia yang menguasai 68% lahan.⁴⁸ Secara afiliasinya, penguasaan konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan hanya dipegang segelintir orang. Seperti, misalnya, Sinar Mas Group (keluarga Eka Tjipa Wijaya), Salim Group (keluarga Antoni Salim), Bumi Resources (keluarga Bakri), Royal Gold Eagle (keluarga Soekanto Tanoto) dan beberapa lainnya. Naasnya, dominasi segelintir orang ini

⁴⁶ Luke Gibson, *Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest*, (Oxfam International and INFID Brief Paper, 2017), hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12-22.

⁴⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>, Diakses 20 Januari 2020.

berbanding terbalik dengan capaian program pemerintah seperti Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria. Sudah lebih dari lima tahun kebijakan ini berjalan, namun capaiannya belum genap 4 juta hektar.

Kondisi tersebut makin buruk jika mempertimbangkan statistik profil kemiskinan BPS. Dalam rilisnya pada 15 Januari 2020, persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Menurun sekitar 0,19 persen dibanding Maret 2019 dan menurun 0,44 persen terhadap September 2018.⁴⁹ BPS juga menyebut jika jumlah penduduk miskin adalah 24,79 juta orang. Pada periode ini, ukuran garis kemiskinan tercatat sebesar Rp440.538,-/kapita/bulan. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia adalah 4,58 orang anggota rumah tangga. Merujuk data tersebut, maka rata-rata garis kemiskinan rumah tangga miskin berjumlah Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan. Data BPS ini diklaim sebagai catatan keberhasilan pemerintah. Namun bagi kami, klaim ini tidak tepat.

Ketidaktepatan klaim ini dapat diuji dengan beberapa data. *Pertama*, dengan merujuk riset World Bank bertajuk *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*. Laporan itu menyebut bahwa terdapat 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia yang (baru) lepas dari garis kemiskinan dan berpotensi kembali miskin.⁵⁰ Sementara itu, jumlah *the upper class* di Indonesia pun hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk.⁵¹ *Kedua*, pada rilis BPS tentang penyebab kemiskinan. Data itu menunjukkan bahwa salah satu faktor kemiskinan adalah pendapatan buruh tani dan buruh bangunan harian. *Ketiga*, pada data-data tentang provinsi dengan upah minimum paling rendah. Setidaknya terdapat 5 provinsi dengan upah minimum di bawah garis kemiskinan

⁴⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, Diakses pada 25 Maret 2020.

⁵⁰ Matthew Wai-Poi Dkk, *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*, (The World Bank, September 2019), hlm. xviii.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 85.

(Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan) yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan NTB. Jumlahnya sekitar 40 persen dari total populasi. *Keempat*, benar bahwa ada lima provinsi dengan upah minimum di bawah garis kemiskinan. Namun ternyata, justru di empat provinsi itulah konsentrasi penduduk Indonesia berada. Terakhir, *Kelima*, dengan merujuk data penghitungan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak seorang pekerja/buruh lajang.

Pada 2020, rasa bangga atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan pun terbukti runtuh. Pasalnya, klaim keberhasilan itu seolah diuji oleh pandemi COVID-19. Pada momen itu pula mantra pertumbuhan ekonomi terbukti tidak mampu mengatasi krisis. Pembuktiannya bisa ditilik dari data BPS. Misalnya, pada triwulan I 2020, angka kemiskinan naik 0,56 persen dari 9,22 persen angka kemiskinan September 2019.⁵² Standar kemiskinan memang masih dapat diperdebatkan. Namun data itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pandemi memang merangsang kelesuan ekonomi, termasuk mendorong jumlah pengangguran. Sementara itu, situasi berbeda justru terjadi di banyak komunitas atau kelompok masyarakat. Terutama yang tidak begitu terkoneksi dengan ekonomi pasar bebas. Praktik ekonomi berbasis pengetahuan lokal dan kelestarian alam justru lebih kokoh. Mereka tidak mudah terjebak resesi. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Kampung Lung Isun. Dalam kondisi krisis ekonomi (makro), mereka tetap hidup normal. Semua kebutuhan ekonomi dan sosial hampir tetap ada. Penyebabnya karena semua kebutuhan berkorelasi dengan praktik mereka melestarikan alam.

Kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2019 tidak koheren dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka ketimpangan tetap tinggi. Begitu pula dengan orang

⁵² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, Diakses pada 26 September 2020.

miskin. Laju kerusakan lingkungan pun malah makin parah. Karena itu, kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah syarat operasional ekonomi pertumbuhan. Tanpa ada orang miskin, tanpa merusak lingkungan, maka model ekonomi pertumbuhan tidak akan berjalan. Sangat khas moda produksi kapitalisme. Kenyataan semacam ini sudah berulang kali gagal. Namun sayangnya, potret kegagalan ekonomi pertumbuhan itu tidak disadari pemerintah. Sehingga tidak pernah dijadikan alasan untuk berhenti mengimani ekonomi pertumbuhan. Padahal itu sudah menjadi bukti kuat untuk memutar haluan dan kembali pada hakikat ekonomi kerakyatan. Satu model perekonomian yang adil, tidak hanya pada semua manusia, tapi juga pada lingkungan hidup.

B. Perspektif Teori Hijau dan Era Kapital

Bagian ini akan menjelaskan dasar berpikir apa yang memengaruhi studi ini. Terutama soal krisis sosial-ekologis akibat hegemoni moda produksi kapitalisme. Moda produksi ini tidak hanya mengeksploitasi manusia dan *living entities* lainnya. Namun juga mengapropriasi aspek non-manusia seperti air, sungai, gambut, dan lain sebagainya. Kemudian, kami pun banyak menyerap pendapat para ahli studi lingkungan maupun ahli kriminologi lingkungan. Menurut kami, mereka telah membuat beberapa batasan penting. Hal itu sangat berguna untuk studi ini, karena dapat mempertajam analisis dan mengurai relasi manusia dan alam. Perlu diketahui, terdapat setidaknya tiga dasar berpikir filosofis tentang perspektif teori hijau. Dua tokoh yang memopulerkannya adalah Halsey & White.⁵³ Ketiga dasar berpikir tersebut ialah (1) Antroposentris (berpusat pada manusia); (2) Biosentris

⁵³ Mark Halsey & Rob White, "Crime, Ecophilosophie, Environmental Harm," dalam *Theoretical Criminology* (Sage Publication), Vol. 2 (3) 345 – 371, 1998, hlm. 349.

(berpusat pada alam); dan (3) Ekosentris (berpusat pada sosio-ekologis).

Pendekatan antroposentris meyakini bahwa manusia superior terhadap entitas hidup dan tidak hidup. Baik secara biologis, mental, atau pun moral. Sehingga entitas di luar manusia dianggap sebagai instrumental saja. Dalam arti, dianggap penting hanya jika bermanfaat bagi kepentingan manusia. Konsekuensi pendekatan ini adalah manusia terpisah dari ekosistemnya. Satu praktik yang lazim dilakukannya adalah mengembangkan teknologi untuk terus mengapropriasi sumber daya alam. Sehingga dasar dari pandangan ini adalah kepentingan untuk melayani kebebasan individual. Selanjutnya memaksimalkan keuntungan dan kompetisi agar proses apropriasi terhadap sumber daya alam dapat terus berjalan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan terkonsentrasi pada institusi yang memiliki kekuasaan terbesar. Seperti, misalnya, negara atau korporasi. Mereka dianggap mampu mengontrol sumber daya manusia dan non-manusia di tingkat lokal hingga global. Atas dasar itu pula, maka ukuran kesejahteraan manusia direduksi sekadar pertumbuhan ekonomi. Alhasil, posisi kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan lingkungan dan sosial.

Pendekatan antroposentris juga ada di balik strategi kebijakan lingkungan. Konsep utama mereka adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi ekonomi hijau (*green economy*). Konsep ini mulai populer sejak tahun 1990an. Pada intinya, gagasan itu mengakui bahwa manusia sangat ketergantungan pada sumber daya alam. Sehingga perlu satu resep tata kelola yang hati-hati terhadap hutan dan sumber daya alam lainnya. Salah satu caranya adalah dengan langsung mengintegrasikan lingkungan ke dalam analisis untung-rugi berbasis pasar.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, dalam Jakob (1993), hlm. 351.

Dalam aspek pengaturan hukum lingkungan, negara pun memfasilitasinya untuk mendukung prinsip ekonomi-politik liberalisme dan neo-klasik. Hal ini membawa satu implikasi serius yakni memperdalam krisis sosial-ekologis. Bentuknya bermacam-macam. Namun itu tidak dapat dilepaskan dari konteks dominasi manusia atas manusia lain dan dominasi manusia terhadap non-manusia. Bahkan di aspek sosial, implikasi tersebut berkelindan dengan praktik maksimalisasi keuntungan. Praktik tersebut juga kuat kaitannya dengan rasisme, patriarki, eksploitasi ekonomi, dan imperialisme.⁵⁵ Oleh karena itu, pendekatan antroposentris kompatibel dengan kapitalisme. Konsekuensinya pun sangat mengerikan yakni kehancuran ekosistem dan bencana yang tidak hanya menimpa manusia, tapi juga seluruh penghuni alam semesta.

Pendekatan kedua adalah biosentris. Pendekatan ini acap pula disebut kesetaraan biosentris atau egalitarianisme biologis. Gagasan utamanya adalah menganggap manusia dan spesies non-manusia memiliki nilai yang sama. Kepentingan manusia tidak dapat bertabrakan dengan kepentingan spesies non-manusia. Peralnya, spesies non-manusia pun memiliki nilai intrinsik yang independen dari manusia. Secara konseptual, pendekatan ini coba mereduksi pendekatan sosial menjadi biologis. Cara pandang seperti ini terpengaruh teori evolusi Darwin tentang seleksi alam. Kepentingan yang dilayani juga berbeda dengan antroposentris. Pendekatan ini lebih menekankan kepentingan *biotic* atau seluruh makhluk hidup. Khususnya, non-manusia agar dapat memenuhi kebutuhan vitalnya.

Secara sosial, perhatian pendekatan ini adalah mendorong kesadaran spiritual manusia agar dapat melestarikan “ibu bumi” atau kebenaran *Gaia*. Karena, hanya dengan cara itu keselamatan semua bentuk kehidupan bisa tercapai. Oleh karena itu, struktur pengambilan keputusan lingkungannya ada di tangan para ahli biologi dan lingkungan (Misalnya

⁵⁵ *Ibid.*, dalam Bookchin (1986, 1994); Pepper (1993); O'Connor (1994), hlm. 352.

ekofeminis). Pendekatan ini juga menekankan konsumsi langsung dan tata kelola yang biosentris. Dalam arti, adil untuk kepentingan ekologis dengan mengutamakan kondisi lingkungan yang alamiah. Bahkan, sebisa mungkin untuk terbebas dari tekanan manusia. Maka secara sosial, pendekatan ini turut andil dalam mempertahankan ketimpangan sosial di masyarakat. Namun kelebihanannya adalah minim laju kerusakan ekologis.

Pendekatan ketiga adalah ekosentris. Pendekatan ini menganggap bahwa secara sosial dan etis, manusia bertanggung jawab terhadap integritas entitas non-manusia. Dalam konteks ini, alam pun dilihat memiliki hubungan dialektis dengan manusia. Keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga kepentingan sosio-ekologinya harus dicapai bersamaan. Dalam arti, upaya memenuhi kebutuhan kolektif manusia harus dilakukan dengan mempertahankan stabilitas ekosistem. Struktur pengambilan keputusan dikerjakan melalui demokrasi partisipatoris. Karena itu, indikator kesejahteraan manusia adalah soal sejahtera secara sosial dan ekologis.

Prioritas strategi kebijakan pendekatan ini adalah bioregionalisme dan keseimbangan ekologis. Administrasi pengaturan lingkungan ada di tangan komunal atau kolektif. Meski menaruh perhatian pada bioregionalisme, bukan berarti tidak terkait dengan apa yang terjadi dalam konteks global. Walau prioritas utamanya tetap pada kepentingan komunitas dan regional. Bukan pada kepentingan negara, bangsa, dan dunia. Dengan demikian, tujuan sosial-ekologi dari pendekatan ini adalah keadilan dan keberlanjutan ekologis. Artinya, kepentingan alam, sosial, dan ekonomi diletakkan secara setara dalam satu lingkaran yang sama. Hal ini memerlukan proses pengintegrasian manusia dan non-manusia dalam waktu yang cukup panjang.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, dalam Pepper (1993), hlm. 357.

Boks 1: Kontradiksi & Kesenjangan antara Keadilan Ekologis dengan SDGSs

Gerakan *Environmental Justice* (Keadilan Lingkungan, selanjutnya disingkat KL) mulai dikenal sejak akhir tahun 1980an salah satunya dari aksi protes komunitas petani Afro-Amerika di North Carolina, Amerika Serikat. Mereka memprotes keberadaan tempat pembuangan limbah berbahaya di sekitar permukiman mereka (Menton., Dkk, 2020). Sejak itu, konsep gerakan Keadilan Lingkungan (KL) pun terus berkembang. Menton., Dkk (2020) membedakan perkembangannya ke dalam lima fokus kerja gerakan KL: (1) KL arus utama, (2) KL kritis, (3) Keadilan Ekologis, (4) KL abolisionis dan dekolonial, dan (5) KL interseksional dekolonial.

Pada 2015 *United Nations* (UN) meluncurkan sebuah agenda pembangunan 2030. Agenda tersebut berisi kesepakatan tingkat tinggi dari negara-negara anggota dalam bentuk 17 butir tujuan pembangunan dan diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGSs). Sejak saat itu SDGSs menjadi mantra pembangunan baru, menggantikan program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang diluncurkan tahun 2000. Pada program MDGs, aspek “keberlanjutan lingkungan” hanya muncul pada satu butir yaitu MDG 7, *Environmental Sustainability*. Sementara pada SDGSs, aspek “keberlanjutan lingkungan” menjadi faktor pengikat seluruh target capaian (Menton., Dkk, 2020).

Dari kesepakatan yang dihasilkan melalui proses yang sinergi, *trade off*, maupun kontradiksi, secara umum SDGSs seharusnya potensial menguatkan agenda keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Sayangnya, banyak kritik atas SDGSs menunjukkan kelemahan utama ada pada istilah keadilan lingkungan dan keadilan sosial yang tidak eksplisit dan belum menjadi spirit yang melekat dari kerangka SDGSs. Ada semacam pemisahan dari premis utama bahwa setiap persoalan lingkungan pada hakikatnya adalah persoalan ketidakadilan (Menton., Dkk, 2020). SDGSs justru memusatkan pada asumsi dasar bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai melalui metode pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yaitu Tujuan SDGS 8 *Decent Work and Economic Growth*. Kata ‘*growth* (pertumbuhan)’ dalam tujuan SDGS 8 tidak berdiri sendiri. Namun merangkai keseluruhan cara kerja SDGSs. Dan logika pertumbuhan ekonomi

dipacu mencapai PDB per tahun setidaknya 7 persen di negara kurang berkembang, dengan solusi *decoupling* atau pengurangan produksi dan konsumsi untuk mengurangi emisi. Hal ini jelas tidak masuk akal untuk dicapai. Pasalnya, saat ini dalam pertumbuhan PDB per tahun 3 persen saja tidak dapat mengurangi penggunaan sumber daya tanpa emisi untuk mempertahankan batas pemanasan global 2 derajat celsius (Hickel 2019 dalam Menton, dkk, 2020).

Jadi dua persoalan utama dari SDGSs adalah kerangka filosofisnya antroposentris dan masuknya logika pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) untuk mengikat keseluruhan tujuan pembangunan. Hal ini menimbulkan kontradiksi SDGSs dengan agenda gerakan keadilan lingkungan dan hak atas lingkungan yang sehat. Ketika kita melihat secara kritis konsep gerakan KL sendiri sebenarnya pada awalnya antroposentris. Kerangka filosofi ini menekankan bahwa jantung utama analisisnya adalah manusia. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, perhatian gerakan KL adalah soal kualitas lingkungan hidup manusia (White, 2008). Contohnya, betapa memprihatinkan kondisi lingkungan orang miskin yang tercemar limbah pabrik. Percakapan utamanya menyangkut kondisi 'lingkungan'. Dan bukan soal 'lingkungan' itu sendiri. Dalam taraf tertentu, kerangka filosofis KL inilah yang membuatnya relevan dengan SDGSs. Keduanya sama-sama meletakkan manusia sebagai inti. Karena itu pula keduanya seolah tidak memiliki kontradiksi. Namun konsep KL sendiri pun sudah jauh berkembang. Salah satunya menjadi konsep *Ecological Justice* (Keadilan Ekologis, selanjutnya disingkat KE). Konsep KE merupakan kritik terhadap "KL arus utama." Maksud keadilan dalam KL adalah keadilan untuk manusia dalam isu lingkungan. Berbeda dengan maksud keadilan dalam KE—yang berbicara keadilan tidak hanya manusia tetapi juga untuk alam (Kopnina dan Washington, 2020 dalam Menton., Dkk, 2020). Sehingga secara filosofis KE menggunakan kerangka ekosentris. Perspektif sosial-ekologis dari KE ini menekankan bahwa keadilan bagi manusia, non-manusia, dan habitat mereka dapat direngkuh secara bersamaan (Kopnina dan Washington, 2020 dalam Menton., Dkk, 2020).

Dengan demikian, dari perkembangan konsep KL menjadi KE, secara filosofis jelas kontradiktif dengan SDGSs. Ekonomi

pertumbuhan tidak lain hanya bentuk bahasa teknis dari moda produksi kapitalisme. Moda produksi ini harus terus berekspansi agar tetap hidup. Dalam proses ekspansinya, kapitalisme selalu mensyaratkan pembukaan wilayah-wilayah baru. Proses pembukaan atau reorganisasi ruang itu sering diiringi dengan praktik deforestasi. Di banyak tempat, deforestasi mengakibatkan tidak hanya kehancuran ekologi (non-manusia dan lingkungan pendukungnya). Tapi juga perampasan ruang hidup masyarakat (manusia) setempat. Padahal keadilan bagi manusia dan non-manusia adalah jantung analisis perspektif sosial-ekologis. Persis di situ SDGs kembali kontradiktif dengan KE.

Lebih parahnya, kontradiksi pun berlaku untuk sesama butir target capaian dalam SDGs. Kontradiksi paling kentara antara tujuan SDGs 8 dengan tujuan SDGs 13, *Climate Actions*. Apabila masih menggunakan logika *economic growth*, maka menjadi mustahil untuk mengurangi jumlah emisi karbon (Hickel, 2019 dalam Menton., Dkk, 2020). Pasalnya, penopang model ekonomi pertumbuhan hari ini adalah industri penyumbang emisi karbon. Makin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka meningkat pula jumlah emisi karbonnya. Padahal emisi karbon adalah faktor tunggal krisis iklim (*Climate Crisis*) dunia hari ini. Dengan kata lain, target *Climate Action* (Tujuan SDGS 13) kontradiktif dengan target *Economic Growth* (Tujuan SDGS 8). Karena itu, solusi aksi iklim (*Climate Action*) yang cocok adalah dengan meninggalkan model *economic growth*. Jika tidak, maka bukan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terwujud, tapi *Sustainable Capitalism Goals*. Dan ini akan memperparah ketidakadilan sosial-ekologis yang terjadi hari ini. *Degrowth* dan pendekatan Keadilan Lingkungan Kritis (ekosentris dan interseksional dekolonisasi) seharusnya menjadi revisi dari SDGs. Terutama untuk menjawab tidak hanya persoalan ketidakadilan sosial-ekologis, tetapi keadilan untuk otoritas swakelola dan keadilan epistemik untuk bebas dari tekanan logika negara liberal yang pada akhirnya melanggengkan opresi, kolonisasi, dan sistem kapitalisme rasial (Menton Dkk, 2020).

Disarikan dari: Mary Menton Dkk, "Environmental justice and the SDGs: from synergies to gaps and contradictions," *Sustainability Science* (2020) 15:1621-1636

Pendekatan ekosentris adalah penentang utama antroposentris. Terutama antroposentris yang menjadi bagian

dari varian *capitalism plus nature*. Karena dengan logika semacam itu, maka kebutuhan manusia murni berada di atas kepentingan alam. Bahkan umumnya, syarat utama keberlanjutan kapitalisme adalah degradasi lingkungan secara masif. Keuntungan dari situ pun hanya diraup 1% orang terkaya di dunia ini. Bukan untuk keseluruhan umat manusia. Padahal praktik itu telah sangat merugikan manusia dan non-manusia. Tak ayal, beberapa ahli ekologi sosial dari tradisi Marxisme pun mulai menandai satu fase kerusakan ekologis dunia hari ini. Mereka menyebutnya dengan istilah *capitalocene* (era kapital), untuk mengganti istilah *anthropocene* (era manusia). Istilah antroposen dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli biologi pada 1980an, Stoermer. Kemudian dimunculkan kembali tahun 2000 oleh seorang ahli kimia, Paul Crutzen.⁵⁷ Titik tekan era manusia adalah bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab kehancuran ekosistem hari ini. Namun tidak jelas manusia mana yang dimaksud. Sehingga istilah era kapital lebih tepat. Karena dengan jelas menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem hari ini berkaitan dengan moda produksi kapitalisme. Dan itu hanya menguntungkan segelintir manusia. Bukan manusia secara keseluruhan. Tapi sialnya, dampak kerusakan itu dirasakan oleh seluruh makhluk hidup (manusia dan non-manusia).

Semakin mendominasinya logika kapitalisme di era kapital terkait dengan peran pemilik kekuasaan besar. Baik itu di level aktor, lembaga, organisasi, atau bahkan institusi sekaliber negara. Apalagi logika itu pun mendapat dukungan mayoritas orang di luar kekuasaan. Lagi-lagi, pangkalnya karena melihat manusia dan alam sebagai dua entitas terpisah. Atau, "*ecologies without human, human relations without ecologies.*"⁵⁸ Sehingga alam pun direduksi perannya semata sebagai obyek manusia. Pemisahan ini membawa dampak serius. Sumber daya alam dihargai secara murah (*Cheap Nature*), bahkan gratis. Tidak lain,

⁵⁷ Jason W. Moore (Ed), *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁸ *Ibid.*

tujuannya agar kapital/modal dapat terus beranak-pinak. Lalu si kapitalis dapat terus mengakumulasi kekayaannya.

Logika seperti itulah yang dilanggengkan oleh aktor, lembaga, organisasi, atau institusi besar. Sehingga keberadaan mereka turut memfasilitasi dan difasilitasi hegemoni kapitalisme. Misalnya, melalui kerja ilmu dan ilmuwan. Dari situ kemudian alam diajarkan, diubah sebagai komoditas, lalu disiapkan untuk keberlanjutan moda produksi kapitalisme. Kemudian peran ilmu ekonomi pun menjadi strategis. Ia memfasilitasi terpisahnya alam dan manusia melalui jaringan uang. Sementara tugas negara dan/atau pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) adalah menegakan dan mengamankan jaringan uang tersebut.

Keberadaan era kapital melahirkan gerakan perlawanan di berbagai level. Bahkan, beberapa komunitas yang lebih ekosentris sampai menawarkan politik ontologis baru. Mereka coba membentuk gerakan anti logika kapitalisme dalam bentuk, misalnya, kedaulatan pangan, keadilan iklim, hak atas kota, *degrowth*, *the commons*, dan lain sebagainya. Seperti kata Moore,

“All organize not only for a more equitable distribution of wealth: they call for a new conception of wealth, in which equity and sustainability in the reproduction of life (of all life) is central to our vision of the future.”⁵⁹

Artinya, tetap ada gerakan baru pada era kapital ini. Bentuknya pun sangat beragam. Sebagian besar tidak lagi hanya menawarkan konsep baru kesejahteraan. Lebih dari itu, meletakkan upaya reproduksi seluruh kehidupan ini sebagai pusat atau jantung. Moore pun menegaskan bahwa visi ontologis baru ini tidak bersifat romantik. Karena tidak sekadar perkara distribusi dan tidak sekadar menempatkan pertanyaan utama seperti posisi alam dan manusia, kesetaraan, kelestarian,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

dan demokrasi secara terpisah-pisah. Semua itu terkait dan berelasi satu sama lain.

C. Degrowth: Dari Slogan menjadi Gerakan?

Ada banyak varian politik ontologis baru. Semua sedang berkembang dan sama-sama melawan logika kapitalisme. Visi gerakan mereka pun nyaris serupa. Semua menentang pemisahan entitas manusia, bukan manusia, dan alam. Salah satunya adalah *degrowth*. Sebagai sebuah gerakan, *degrowth* adalah bentuk ekspresi anti kapitalisme yang diinisiasi banyak kelompok akar rumput. Gerakan ini menjadi simbol kuat perlawanan terhadap *ecomodernist*, pertumbuhan, industrialisasi, dan ekstaktivisme.⁶⁰ Menurut Ernst Bloch, *degrowth* adalah “*Concrete Utopia*”. Sebab, mampu membuka ruang imajinasi alternatif melawan narasi TINA (*there is no alternative*). Sudah sejak lama narasi TINA memang dikembangkan para pendukung kapitalisme.⁶¹

Salah satu inisiatif anti kapitalisme lain adalah *the commons*. Gagasan *the commons* masih sejalan dengan *degrowth*. Pada mulanya, *the commons* diperkenalkan oleh ahli politik Elinor Ostrom (1980). Dia mempelajari *the commons* dari berbagai studi kasus di dunia. Termasuk di wilayah perikanan Indonesia. Satu tesis terkenal Ostrom adalah bahwa negara dan korporat sama-sama tidak mampu. Kedua kekuasaan ini gagal memastikan individu dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang panjang. Karena itu, Ostrom pun mempromosikan tindakan *commoning*. Ini adalah praktik swaregulasi untuk melampaui negara dan pasar.⁶²

⁶⁰ Corinna Burkhart Dkk (Ed), *Degrowth Movement(s): Exploring Pathways for transformation*, (UK: Zer0 Books, 2020), hlm. 11.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.6.

⁶² Meretz (2014) dalam Johannes Euler, “The Commons: A Social Form that Allows for Degrowth and Sustainability,” *Journal Capitalism Nature Socialism* 30:2 2019, hlm. 165.

Praktik *commoning* sudah menjadi bentuk produksi dan reproduksi matapencaharian manusia sehari-hari. Praktik ini sudah banyak ditemukan di berbagai tempat. Euler pun membuat satu analogi sederhana. "Jika sel kapitalisme adalah komoditas yang diproduksi untuk dijual, maka *the commons* adalah sel sosial di luar kapitalisme yang diproduksi untuk dipelihara dan dibagikan." Jadi, selalu ada transformasi dalam *the commons* ini. Terutama dari model sosial yang berbeda di luar model kapitalisme hari ini. Sebagai contoh, mereka memang masih membutuhkan barang. Akan tetapi, mereka hanya membelinya sesuai kebutuhan. Sehingga, walau mereka berada dalam sistem kapitalisme, potensi transformasinya masih terbuka lebar. Dalam arti, masih tersedia celah untuk berpikir di luar logika kapitalisme.

Selanjutnya, konsep *the commons* pun dikembangkan oleh seorang ahli politik ekonomi, De Angelis.⁶³ Dalam bukunya, *The Beginning of History* (2007), De Angelis menyebut bahwa *the Commons* adalah

"the creation of an outside to capital, a social sphere in which value practices and social relations are not dominated by capital's profit motive and its type of 'measure' on social relations, but other measures and value practices."

Menurut De Angelis, kelahiran *the commons* berkelindan dengan makin masifnya praktik penguasaan lahan atau privatisasi (*new enclosure*). Pelaku utamanya adalah korporasi skala besar. Terutama pada 1970an, saat terjadinya masa restrukturisasi neoliberal di seluruh planet. Paradigma utamanya adalah tentang sumber daya alam murah di bumi bagian "Selatan". Kemudian disusul paradigma harga buruh murah untuk menyokong industri global. Sebenarnya, praktik *enclosures* sudah ada sejak abad 15-17 di Inggris. Praktik ini pula yang mendorong terjadinya Revolusi Industri. Istilah *new enclosure* pun memiliki setidaknya dua cara untuk melihatnya.

⁶³ Massimo De Angelis, "The Commons: Brief Journey of Life Journey," *Community Development Journal* Vol 49 No S1 January 2014, hlm. 170.

Pertama, sebagai praktik privatisasi terhadap lahan *the commons*. Terutama lahan-lahan yang belum menjadi komoditas dan dibutuhkan untuk ekspansi pemilik modal. *Kedua*, sebagai bentuk perlawanan kelas pekerja. Dengan kesadaran *the commons*, kelas pekerja membagikan waktu luang dan sumber daya mereka untuk memperjuangkan gerakan sosial.

Nampaknya, terdapat satu perbedaan utama *the commons* menurut De Angelis dan Ostrom. Bagi De Angelis, *the commons* tidak melulu soal bagaimana mereka melakukan pengorganisasian diri di luar negara dan korporat. Akan tetapi, bisa juga dimaknai sebagai perjuangan kelas pekerja melawan privatisasi atau *enclosure*. Perjuangan *the commons* semacam ini terjadi di banyak tempat. Terutama sejak dimulainya fase *alter-globalization* yaitu sebuah gerakan sosial yang menerima interaksi secara global, namun menolak efek negatif globalisasi ekonomi. Bahkan, De Angelis juga menyediakan sebuah situs jurnal (*The Commoner*). Situs itu coba merekam *the commons* bukan untuk romantisme. Namun lebih sebagai upaya mendokumentasikan perkembangan *the commons vis a vis* kapital. Termasuk dengan praktik *enclosure* yang dilakukannya.⁶⁴

Praktik *Commoning* juga bermakna perjuangan suatu kelompok untuk mempertahankan *the commons*. Artinya, *the commons* pun mengalami perubahan. Baik itu karena reappropriasi atau pun reproduksi sosial secara terus menerus. Semua itu terjadi pada tiga momen krisis sekaligus yaitu (1) krisis lingkungan; (2) krisis sosial; dan (3) krisis ekologis. De Angelis pun selalu mengingatkan agar terus mengupayakan, memunculkan, dan memelihara *the commons*. Sekecil apapun bentuk dan spektrum perlawanannya. Karena, praktik semacam itu penting untuk menunjukkan seluruh perluasan batasan *commoning*. Dengan harapan, perkataan "*another world* (selain kapitalisme) *is possible*" pun menjadi benar belaka.

⁶⁴ *Ibid.*

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya sudah ada banyak contoh kasus praktiknya. Meskipun komunitas-komunitas itu mempraktikkan *commoning* dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, praktik yang terjadi di Komunitas Adat Marind (Merauke, Provinsi Papua). Mereka juga melakukan praktik solidaritas sosial dan ekonomi. Kemudian di Komunitas Samadhya di Desa Wukirsari, Yogyakarta. Mereka banyak melakukan praktik swakelola untuk kecukupan pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesenian. Bahkan, beberapa kasus lain justru jauh lebih dari itu. Mereka benar-benar hidup komunal dan selaras dengan alam. Praktik semacam inilah yang kami lihat identik dengan *degrowth*.

Kata *degrowth*, pada mulanya adalah bagian dari slogan ekonomi ekologis (*ecological economy*). Slogan ini menjadi toa perlawanan gerakan keadilan lingkungan (*environmental justice*) terhadap praktik ekonomi pertumbuhan. Tercetus pertama kali pada Hari Bumi tahun 1972, saat sesi debat laporan berjudul *Limits to Growth*.⁶⁵ Sementara sebagai sebuah gerakan, *degrowth* muncul secara lebih sistematis di Lyon, Perancis (2001). Kemudian, pada 2004 *degrowth* mulai memasuki debat publik yang lebih luas di negara-negara Utara. Pada 2008, sebuah konferensi International pertama *degrowth* pun terhelat di Paris, Perancis. Dalam forum itu, *degrowth* diperkenalkan sebagai lawan dari *economic growth*.

Sementara ekonomi ekologis, pada mulanya merupakan sebuah disiplin baru (bersifat lintas disiplin). Para pengusungnya yakin bahwa ekonomi ekologis merupakan penentang utama sistem ekonomi neoklasik. Konsep ini hanya dapat dipahami di tingkat ontologis, sehingga tidak terkesan utopis. Di tingkat ontologis tersebut, terdapat cara pandang mekanistik yang diungkapkan Fritjof Capra. Pandangan itu sangat kuat untuk melihat relasi antara manusia, alam, dan kondisi sosial. Basis yang digunakan adalah hukum fisika

⁶⁵ *Degrowth* berasal dari bahasa Perancis, *décroissance*, yang berarti membusuk. Lihat Federico Maria Dkk, *op.cit.*, hlm. 195.

mekanis. Menurut Capra, materi fisik perlu diandaikan identik dengan kenyataan. Karena itu, alam semesta pun dapat dilihat sebagai mesin atau organisme hidup. Sehingga, cara memahaminya adalah dengan menganalisis bagian terkecilnya yakni atom (atomisme).⁶⁶ Dengan begitu, sebenarnya relasi antara ketiganya (sosial, manusia, dan alam) hanya semacam interaksi timbal balik. Ketiganya saling mendapat pengaruh dari bagian terkecilnya (yang terisolasi), atom.

Cara pandang mekanistik semacam itu ditentang Dally dan Cobb (1994). Mereka berpendapat bahwa masyarakat bukan sekadar penjumlahan dari bagian-bagian kecil (atomisme). Hal ini diperkuat oleh argumen Whitehead (1967) saat mengkritik gambaran totalitas hukum mekanis. Bagi Whitehead, pemisahan relasi manusia, alam, dan kondisi sosial tak ubahnya seperti memisahkan tubuh dan pikiran. Ini adalah kekeliruan yang masih bertahan dalam praktik ilmu pengetahuan modern. Whitehead justru melihat bahwa relasi ketiganya, bukan semata penjumlahan dari serangkaian entitas. Tetapi lebih melihatnya secara organik.

Konsekuensinya, secara epistemologi, ekonomi ekologis membutuhkan pendekatan lintas disiplin yang kuat dan holistik. Terutama guna menunjukkan relasi saling keterhubungan antara manusia, alam, dan kondisi sosial. Khususnya, dalam konteks makin tergerusnya ekosistem dunia akibat praktik ekspansi tiada henti dari sistem kapitalisme. Dengan demikian, ciri ekonomi ekologis adalah menggambarkan transisi dari *economic man* (satu dimensi ekonomi) menjadi *ecological man* (multidimensi dan seimbang antara alam, sosial, dan manusia). Selain itu, ekonomi ekologis juga harus mengubah haluan dari (1) pertumbuhan kuantitatif menjadi perkembangan kualitatif; (2) dari tata kelola atas-bawah menjadi inisiatif tata kelola akar rumput; (3) dari

⁶⁶ Capra (1995) dalam Stig Ingebrigtsen dan Ove Jakobsen, "Utopias and realism in ecological economics — Knowledge, understanding, and improvisation," *Ecological Economics* 84 (2012), hlm. 85.

kompetisi ke ko-operasi atau kerjasama; dan (4) dari struktur kekuasaan global menjadi jejaring lokal sirkular.

Keberadaan gerakan *degrowth*, tidak bisa dilepaskan dari konteks gerakan keadilan lingkungan. Gerakan ini memang memiliki agenda untuk menawarkan solusi keadilan ekonomi melalui kerjasama. Selain itu, gerakan keadilan lingkungan juga fokus mendorong pengurangan ketimpangan, kesetaraan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, serta memperluas peran manajemen komunitas. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan satu model perencanaan yang adil dan lestari untuk seluruh aspek kehidupan.⁶⁷ Adapun lawan utama gerakan ini adalah logika kapitalisme. Logika ini telah terbukti hanya memperparah ketimpangan penguasaan sumber daya. Alhasil hanya segelintir orang saja yang meraup untung.

Kemunculan gerakan keadilan lingkungan merupakan implikasi dari pandangan antroposentris. Jantung utama analisisnya ada pada kepentingan manusia di atas aspek sosial dan lingkungan. Tuntutannya adalah pemenuhan hak dan keadilan untuk setiap orang. Baik itu dalam hak mendapat tempat tinggal dan tempat bekerja yang sehat, hak mendapatkan pembagian yang adil dari kekayaan alam, atau hak mendapatkan kepastian keberlanjutan lingkungan bagi generasi selanjutnya. Cita-cita gerakan ini adalah perubahan sosial secara demokratis untuk meruntuhkan logika kapitalisme. Namun dalam studi ini, kami menggunakan kerangka berpikir yang lebih jauh lagi. Keadilan bagi manusia, non-manusia, dan habitat harus direngkuh bersamaan. Tidak dapat terpisah-pisah. Karena itu, studi ini pun akan menggunakan ukuran kemajuan dan kesejahteraan yang lain. Satu model ukuran kesejahteraan yang tidak antroposentris. Cara ukur tersebut dinamakan *Socially Sustainable Economic Degrowth* (SSED).

⁶⁷ <https://www.foei.org/what-we-do/economic-justice-resisting-neoliberalism>, Diakses pada 24 Maret 2020.

Cara ukur SSED tidak semata mengandalkan ukuran pertumbuhan ekonomi. Frasa “*Socially Sustainable*” atau “lestari secara sosial” sangat identik dengan gerakan *degrowth*. Tujuan utamanya adalah keadilan sosial dan kelestarian ekologis.⁶⁸ Namun dalam studi ini, kami pun sedikit memodifikasi model SSED. Dalam arti, tidak sepenuhnya sama dengan cara ideal *degrowth*. Modifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya konteks praktik *dual economic* di tengah masyarakat – satu praktik yang tetap mempertahankan tradisi subsisten (dalam hal pangan) dan sekaligus ikut ke dalam ekonomi pasar. Lagi pula, SSED pun bersifat *grounded theory*. Sehingga sangat mungkin untuk dimodifikasi sesuai praktik, tradisi, dan pengalaman langsung dari akar rumput.⁶⁹

Perilaku Ekonomi	Tanpa maksimalisasi, tanpa mencari keuntungan (profit sebaga alat), mencari kualitas daripada kuantitas, skala kecil
Perilaku Sosial	Simpati, ramah, kerjasama, partisipasi komunitas
Perilaku Lingkungan	Tanggung jawab terhadap lingkungan

Tabel 2.2 : *The Holistic Microeconomic Agent*. Sumber: Marjolijn Bloemmen Dkk (2015).

Penyusunan tabel di atas terinspirasi dari praktik mikroekonomi *Community Supported Agriculture* (CSA) di Belgia. Praktik di bidang pertanian itu diangkat dalam riset Marjolijn Bloemmen Dkk (2015). Praktik CSA ini merupakan model transisi dari *economic growth* menjadi *degrowth*. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa SSED tetap memperhatikan keberadaan praktik ekonomi. Akan tetapi, praktik itu dilihat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Dalam masyarakat kapitalisme, hasrat memuaskan keinginan telah memicu akumulasi besar-besaran. Tak ayal, muncul istilah konsumerisme. Hal itu sangat berbeda dengan masyarakat

⁶⁸ Viana Asara Dkk, “Socially sustainable degrowth as a social-ecological transformation: repoliticizing sustainability,” dalam *Sustain Sci* (2015), hlm. 377.

⁶⁹ Marjolijn Bloemmen Dkk, *Ibid.*, hlm. 111.

model SSED. Pasalnya, tidak ada hasrat untuk meraup profit besar. Dengan kata lain, hanya secukupnya. Sehingga fokus praktik semacam ini ada pada kualitas, bukan kuantitas. Dengan komoditas berkualitas baik (dalam konteks riset Bloemmen adalah sayur), maka konsumen pun senang. Karena mereka mendapatkan barang bagus dengan harga tidak terlalu mahal. Apabila terjadi resiko, hal itu pun menjadi tanggungan bersama.

Dalam konteks ini, maka produsen dan konsumen menjadi aktor utama. Praktik ekonomi semacam ini acap melibatkan partisipasi banyak orang. Kebiasaan tersebut bagus dalam proses pembentukan masyarakat demokratis. CSA juga tidak memandang konsumen sebagai pasar semata. Begitu pula dengan para konsumennya. Mereka tidak memandang CSA layaknya produsen pabrik. Semua memandang satu sama lain sebagai manusia. Oleh sebab itu, relasi baik antarmanusia pun terbentuk. Keduanya saling berinteraksi dengan ramah, saling kerjasama, dan saling bersimpati. Bahkan seorang konsumen pun bisa bekerjasama dalam kegiatan produksi. Pada dasarnya, CSA merupakan contoh bahwa manusia bisa hidup cukup, sesuai kebutuhannya. CSA pun menjadi contoh bahwa praktik menjaga relasi adil antara manusia dengan manusia dan manusia dengan non-manusia itu ada.

Perbedaan antara ekonomi kapitalisme dengan ekonomi *degrowth* terletak pada tujuan pencarian keuntungan. Ekonomi kapitalis mutlak bertujuan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Sedangkan bagi ekonomi *degrowth*, capaian keuntungan yang dikejar adalah kualitas hidup dan alam yang baik. Praktik ekonomi *degrowth* juga menekankan bahwa ada banyak bentuk kepuasan selain uang. Dan itu jauh lebih penting. Karena itu, ekonomi *degrowth* menganggap bahwa modal alam dan manusia adalah basis utama.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 113.

Lingkup	Komitmen	Harapan
Ekonomi	<p>Komitmen terhadap konsumsi dan produksi bahan mentah, properti, tumbuhan, pengurangan peralatan, dan servis alat produksi</p> <p>Komitmen terhadap keuntungan (uang) bagi kreditur</p> <p>Komitmen terhadap keuntungan finansial (<i>financial returns</i>) bagi pemegang saham</p>	<p>Pendapatan: dapat memperkirakan harga jual dan kuantitas penjualan berdasarkan komitmen awal</p>
Sosial	<p>Komitmen untuk memberikan upah sebagai imbalan kompetensi dan tenaga kerja</p> <p>Komitmen untuk mempromosikan pertumbuhan manusia dan kesejahteraan</p>	<p>Pendapatan (finansial dan non-finansial) untuk melestarikan lingkungan sosial</p>
Alam	<p>Komitmen untuk menghargai dan melestarikan alam</p>	<p>Pendapatan (finansial dan non-finansial) untuk melestarikan alam</p>

Tabel 2.3 : *Equilibrium* komitmen dan harapan dari studi kasus CSA. Sumber: Bloemmen Dkk (2015).

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih dominan antara aspek ekonomi, sosial, dan alam. Ketiganya harus diupayakan seimbang. Namun dari situ, muncul pula pertanyaan: bagaimana apabila ada salah satu bidang yang lebih dominan? Riset Bloemmen Dkk (2015) belum menjelaskan itu. Dalam riset tersebut, kata “*revenue*” (pendapatan) diganti dengan istilah “*expectations*” (harapan). Penggantian tersebut bukan tanpa alasan. Maksudnya, agar dapat menggambarkan bahwa setiap komponen harus mendapat pengembalian dari jasa yang diberikan. Selain itu, dimaksudkan pula untuk memberi nilai pada setiap komponen. Dan tidak semata

menitikberatkannya pada pertukaran uang. Namun justru menitikberatkan pada aspek lain seperti sosial atau alam.

Praktik ekonomi kapitalisme selalu menitikberatkan pada uang. Oleh sebab itu, menurut kami, *degrowth* dengan contoh SSED dapat menjadi tandingan. Terutama karena upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya selaras dengan upaya menjaga keseimbangan sosial dan alam. Poin tersebut amat penting untuk merawat keberlangsungan kehidupan. Karena itu pula, kami pun coba menggunakan model SSED untuk melihat praktik “ekonomi nusantara”. Tentu saja, dengan melakukan modifikasi agar lebih sejalan dengan konteks Indonesia. Adapun indikator hasil modifikasinya adalah sebagai berikut:

Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Partipasi komunitas dalam praktik ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Terikat pada nilai solidaritas sosial - Praktik ekonomi terikat dengan aspek budaya, kepercayaan, dan identitas lokal - Distribusi keuntungan untuk kepentingan bersama
Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik ekonomi skala kecil - Memiliki komitmen menjaga lingkungan - Praktik ekonomi sesuai dengan karakteristik lingkungan/geografi setempat - Memiliki komitmen pemulihan untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan budaya - Kondisi lingkungan menentukan keberlanjutan praktik adat, budaya, dan lain-lain.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik ekonomi tidak merusak/ekstraktif <ul style="list-style-type: none"> - Mengambil secukupnya <ul style="list-style-type: none"> - Minim ekspansi - Minim kompetisi - Kepemilikan secara komunal/kolektif <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian keuntungan adil - Menggabungkan praktik ekonomi subsisten dengan ekonomi pasar - Memastikan standar kualitas dan kuantitas produk/jasa secara jujur

Tabel 2. 4 : Indikator SSED “Ekonomi Nusantara.” Sumber: Olahan Tim Riset WALHI (2020).

Seorang penentang logika kapitalisme, Giorgos Kallis (2015), mengatakan bahwa *degrowth* adalah sebuah benih. Pendekatan benih ini digunakan Kallis untuk menjelaskan proses transisi dari kapitalisme menuju *degrowth*.⁷¹ Pendekatan benih juga dimaksudkan untuk menyebut jika inisiatif serupa sudah banyak dilakukan. Sebagian besar berkembang sangat *bottom-up*. Transisi yang dimaksud adalah upaya untuk pelan-pelan keluar. Tidak hanya dari kapitalisme, tetapi juga keluar dari produktivisme. Walaupun, bagi sebagian kelompok, tetap dibutuhkan perjuangan untuk mengubah tatanan institusi seperti negara. Sementara sebagian kelompok lain, juga fokus pada perjuangan pengurangan jam kerja. Terutama agar dapat memiliki waktu luang untuk menjalankan ritme hidup kolektif. Dengan catatan, tanpa mengurangi penghasilan dan jaminan pekerjaan. Oleh sebab itu, meski model SSED masih sangat mikro, contoh-contoh inisiatif tetap penting dimunculkan. Agar, minimal, dapat membangun imajinasi, praktik, dan logika lain di luar kapitalisme. Dalam konteks riset ini, model SSED itu pula yang akan coba dikombinasikan dengan empat nilai pengikat dan ekonomi ekologi.

D. Praksis Ekonomi Nusantara dan Relasi Kapitalisme

Dalam kajian ini, kami merumuskan “ekonomi nusantara” sebagai konsep normatif-empiris tentang praktik ekonomi lokal. Praktik ini kaya akan nilai kelestarian. Baik secara ekonomi, lingkungan, atau sosial. Praktik ekonomi ini didasarkan pada empat nilai pengikat yakni (1) hubungan kejayaan masa lalu dengan kondisi saat ini; (2) hubungan praktik ekonomi lokal dengan lanskap ekologis di sekitarnya; (3) integrasi praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan; dan (4) memiliki

⁷¹ Giorgos Kallis, “The Degrowth Alternative,” dalam <https://greattransition.org/images/Kallis-Degrowth-Alternative.pdf>. Diakses pada 20 November 2020, hlm. 3-4.

dimensi pemulihan atas kondisi krisis sosial-ekologis. Selain itu, serupa dengan *degrowth* dan *commoning*, konsep “ekonomi nusantara” pun tidak diuraikan secara romantik. Namun diletakkan dalam konteks hegemoni pertumbuhan ekonomi saat ini. Termasuk di tengah makin masifnya proses perampasan lahan dan eksternalisasi yang dilakukan negara dan korporasi. Sehingga, konsep “ekonomi nusantara” pun coba diposisikan sebagai fase transisi untuk lepas dari cengkraman logika kapitalisme.

Konsep “ekonomi nusantara” dipraktikkan di lokasi yang WALHI sebut Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Wilayah ini merupakan satu sistem pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif. Baik dalam hal tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi. Prinsip penyelenggaraannya senantiasa memperhatikan daya dukung ekologis sebagai pendukung kehidupan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan keberlanjutan makhluk hidup (manusia dan non-manusia). Masing-masing tata kelola ini saling terkait guna memastikan daulat rakyat terhadap sumber daya alam. Pada proses tata kuasa, tentu saja rakyat harus memperoleh pengakuan dan perlindungan. Selanjutnya, pada tata kelola, rakyat menerapkan model kelola yang lestari berbasis nilai dan kearifan tertentu. Adapun dalam tata konsumsi, rakyat melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara dalam tata produksi, rakyat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas tertentu. Namun, produksi komoditas tersebut tidak semata untuk kebutuhan pasar.

Sebaran WKR sangat beragam dan menyebar di lima lanskap ekologis yaitu lanskap ekologis gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan Sumatera, hutan dataran rendah, dan pesisir. Adapun lokasinya tersebar di enam provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Sebagian besar lokasi, kecuali Bali, berada di wilayah kapitalisme pinggiran. Dalam arti, sebagian besar lokasi studi

“ekonomi nusantara” bukan terletak di jantung konsentrasi kapitalisme seperti kota besar atau megapolitan. Lokasi penelitian di Bali terletak dalam lanskap ekologis pesisir. Pada mulanya Bali adalah wilayah yang kaya dan jaya dari hasil lautnya. Perubahan mata pencaharian pascakrisis ekonomi membuat masyarakat setempat mengandalkan sektor pariwisata. Walau begitu, aktivitas nelayan tidak sepenuhnya ditinggalkan.

Model pariwisata di Bali adalah laboratorium kajian sosial politik yang menarik. Pariwisata bukan semata bentuk reappropriasi masyarakat Bali dalam mengharmonikan pariwisata dengan nilai spiritual seperti Tri Hita Karana (menjaga harmoni manusia, alam, dan Tuhan). Tapi juga menghasilkan bentuk kontestasi dengan nilai dan resistensi lokal. Apalagi kini pariwisata menjadi jantung pertumbuhan ekonomi. Hal ini sudah berlangsung lama. Sejak jaman kolonial, Belanda memang sudah memperkenalkan Bali ke dunia Eropa untuk menjadi destinasi wisata. Kemudian makin diperkenalkan secara masif pada masa pemerintahan Soeharto.

Bali merupakan penghasil perputaran uang terbesar dalam industri pariwisata di Indonesia. Pada 2017, jumlah kedatangan wisatawan mencapai 40 persen dari total wisatawan yang datang ke Indonesia. Ada kenaikan hampir tiga kali lipat sejak krisis ekonomi 2008. Bisnis akomodasi dan restoran saja menyumbang 22 persen dari PDB Bali. Bersamaan dengan itu, sekitar 30 persen PDB Bali dikontribusikan dari pekerja di sektor pariwisata.⁷² Pada 2009 terbit satu dokumen “Peta Jalan untuk Pemulihan” dari UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*). Dokumen tersebut menyebut bahwa pada momen krisis ekonomi 2008, pariwisata merupakan bagian dari perencanaan global untuk pemulihan ekonomi. Hal ini menyisakan satu persoalan yakni *Overtourism*.

⁷² Made Adityanandana dan Julien-Francois Gerber, “Post-growth in the Tropics? Contestations over Tri Hita Karana and a tourism megaproject in Bali,” dalam *Journal of Sustainable Tourism* 27(12), 1-18, hlm. 2.

Permasalahan klasik pariwisata di negara dunia ketiga memang *overtourism*. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan situasi pada era kolonialisme. Perkara ini juga tidak coba dijawab oleh SDGSs. Bahkan skema di tingkat global justru mencapai *Sustainable Tourism Growth*.⁷³ Opsi ini justru akan memperparah berlakunya relasi kapitalisme. Peralunya, pariwisata di Bali sarat dengan peminggiran yang dilakukan oleh investor dari benua lain, investor dari dalam negeri, dan juga dari negara. Misalnya, peminggiran nelayan dan desa adat yang terus terjadi. Tak ayal, resistensi lokal pun menjelma menjadi bentuk pertarungan sehari-hari. Kasus semacam inilah yang terjadi di Kedonganan. Bedanya, masyarakat Kedonganan mampu menuai kemenangan kecil dan mempraktikkan “ekonomi nusantara” di sektor pariwisata. Pada mulanya mereka tumbuh dalam relasi kapitalisme, lalu memulihkan kehancuran yang diakibatkan relasi tersebut.

Kelekatan masing-masing lokasi dengan lanskap sekitarnya memang turut membentuk konsep “ekonomi nusantara.” Hal ini makin menunjukkan bahwa dinamika dari masing-masing lokasi tidak hanya bersifat material. Tetapi buah dari proses sosial yang panjang.⁷⁴ Sebenarnya, mereka pun tidak begitu memedulikan klaim “jenius swakelola tanpa negara” seperti yang digambarkan Scott dalam *Art of Being Not Governed*. Khususnya, dalam konteks kapitalisme pinggiran di Asia Tenggara. Wilayah pinggiran di sini pun tidak selalu bermakna menyedihkan seperti Orang Perbukitan Lauje dalam studi Tania Murray Li. Tetapi lebih coba digambarkan seperti studi Anna Tsing saat menggambarkan orang Dayak Meratus di pedalaman Kalimantan Tengah dalam *Friction* yakni sebagai sebuah

⁷³ Robert Fletcher, Ivan Murray Mas, Asunción Blanco-Romero & Macià Blázquez-Salom, “Tourism and degrowth: an emerging agenda for research and praxis,” dalam *Journal of Sustainable Tourism* 27:12, 1745-1763 (2019), hlm. 1747-1749.

⁷⁴ Arturo Escobar, “Culture sits in Places: Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Localization,” dalam *Political Geography* 20 (2001), hlm. 143.

harapan. Pasalnya, justru karena dianggap “pinggiran” mereka bisa mendapat lahan di pinggiran hutan primer.⁷⁵

Konteks WKR dalam “ekonomi nusantara” juga sama dengan praktik sosial ekologi anti kapitalisme lainnya, *commoning*. Masyarakat di berbagai lanskap tersebut juga memiliki relasi dengan kapitalisme. Salah satunya, melalui proses peminggiran akibat praktik *enclosure* atau privatisasi lahan yang dilakukan korporasi dan/atau negara. Akan tetapi, pertalian mereka dengan ekonomi pasar juga tetap ada. Misalnya, tidak sedikit pula komoditas yang mereka hasilkan juga dijual ke luar wilayah. Bahkan sampai ke Jakarta. Namun praktik-praktik itu berjalan beriringan dengan praktik ekonomi subsisten untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian. Praktik yang mereka lakukan pun sangat lekat dengan tempat (*place*) mereka hidup. Persis di ruang hidup itu pula mereka berjuang mereproduksi dan mentransformasi cara hidup yang lebih baik.

Dalam kajian ini, wilayah pariwisata dan pinggiran akibat relasi kapitalisme juga tidak digambarkan secara romantik. Dalam arti, tidak seolah-olah penuh dengan kisah revolusioner. Relasi mereka dengan ruang hidupnya justru digambarkan sebagai *site for everyday struggle* terhadap hegemoni kapitalisme. Terutama di tengah kontrol negara yang makin kuat dan ancaman pencaplokan lahan oleh korporasi. Dengan demikian, konsep “ekonomi nusantara” tidak lain merupakan sebuah diskursus dan sekaligus praksis. Konsep ini coba dipersiapkan sebagai narasi tanding dari logika ekonomi pertumbuhan di Indonesia. Konsep ini juga dibayangkan sebagai bagian dari gerakan *degrowth*. Tentu, dengan modifikasi pada beberapa bagiannya. Dengan harapan, konsep ini pun bisa tumbuh menjadi proyek sosial untuk transformasi sosial-ekologis. Penekanannya pun jelas yakni membangun relasi (baru) yang berbeda dan adil antara manusia dengan makhluk hidup lain

⁷⁵ Tania Murray Li, *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), hlm. 18.

(non-manusia).⁷⁶ Sejalan dengan apa yang ditentang *degrowth*, “ekonomi nusantara” juga memiliki visi untuk menentang relasi berorientasi pasar. Lalu menggantikan model ekonomi pertumbuhan dengan relasi yang cukup berkelimpahan.⁷⁷

Visibilitas “ekonomi nusantara” merupakan basis analisis studi ini. Tentu saja, dengan tetap mempertimbangkan seberapa jauh praktik dan pengetahuan ini mengarah pada ekonomi ekologi dan SSED. Visibilitas ini juga akan dianalisis dari seberapa besar kesesuaian praktik “ekonomi nusantara” dengan nilai-nilai anti kapitalisme. Pintu utamanya ada pada empat indikator yang telah dibahas sebelumnya.

E. Ekonomi Nusantara: Dari Konsep Menuju Hegemoni Tanding

Sebagai sebuah konsep, “ekonomi nusantara” sejalan dengan *degrowth*. Karena itu, kehadirannya pun memang dipersiapkan untuk melawan hegemoni ekonomi pertumbuhan. Namun itu tidak mudah. Pasalnya, ekonomi pertumbuhan sudah terlanjur sangat mapan. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula lontaran kritik terhadapnya. Misalnya kritik yang disampaikan Swyngedouw (2007). Menurutnya, aktivis *degrowth* hanya melakukan politisasi ulang. Mereka mengidentifikasi dan menamakan imajinasi sosial lingkungan di masa depan dengan sesuatu di luar konsensus pendukung ekonomi pertumbuhan.⁷⁸ Selain itu, beberapa kelompok juga cenderung meragukan inisiatif *degrowth*. Terutama pada aspek tujuannya sebagai hegemoni tanding dari logika kapitalisme. Dan itu sangat wajar. Mengingat, logika kapitalisme telah merangsek ke segala arah. Logika itu juga

⁷⁶ Viviana Asara, *op.cit.*, hlm. 377.

⁷⁷ Latouche (2009) dalam Maria dkk, *op.cit.*, hlm. 209.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 210.

makin kuat seiring dengan proses depolitisasi terus-menerus di segala bidang.

Percakapan hegemoni dalam studi ini dipinjam dari konsep Gramsci. Menurutnya, hegemoni adalah sebuah ide yang membentuk individu dan beroperasi untuk menguntungkan institusi yang membentuknya. Terutama guna mempertahankan kontrol atas individu. Hegemoni bukan sebuah sistem yang tunggal. Ia adalah kumpulan dari beragam institusi dan representasi. Satuan nilai-nilainya pun tidak koheren. Karena itu, sulit untuk melakukan perlawanan atas hegemoni, jika hanya mengandalkan kekerasan. Sebab, hegemoni kapitalisme justru dapat menggunakan bentuk perlawanan untuk memukul balik kekuatan tandingan. Bahkan, mampu mengubahnya untuk mendukung status quo.⁷⁹

Sejalan dengan Gramsci, Foucault juga melihat bahwa kekuasaan adalah seni melakukan pengendalian sosial (*governmentality*). Foucault pun menambahkan bahwa kelompok dominan kerap menerapkan hegemoni untuk menyebarkan pengaruh pada kelompok subordinat. Bentuknya bisa beragam. Misalnya, melalui nilai dan norma tertentu. Kedua hal itu memuat klaim kebenaran dari otoritas yang berkuasa. Lalu disebar dalam bentuk wacana dengan menggunakan berbagai bentuk. Dalam banyak hal, bentuk-bentuk tersebut kadang tidak disadari oleh individu. Seperti, misalnya, media massa, pendidikan, rekreasi, dan komunitas sosial. Semua wacana yang didorong kelompok dominan seolah 'wajar' dan sudah semestinya begitu. Dan praktik semacam inilah yang turut mendukung dan mempertahankan relasi kekuasaan.

Tujuan praktik diskursif oleh kelompok dominan tidak lain adalah untuk membentuk kebenaran. Melalui kebenaran itulah akhirnya mereka dapat melakukan eksklusi sosial kepada kelompok subordinat. Semua dalam rangka mempertahankan

⁷⁹ David Kreps, *op.cit.*, hlm. 64.

kekuasaan. Foucault memang memiliki perhatian lebih pada praktik-praktik semacam itu. Misalnya, ia pun mengkritik bagaimana kebenaran ideologis (*episteme*) dapat mendukung kerja-kerja kapitalisme. Dengan kerja-kerja itu juga akhirnya kelompok penguasa (politik dan ekonomi) mendapatkan manfaat. Sialnya, pengaruh hegemoni penguasa ini tidak hanya berhenti pada tingkatan kesadaran individu. Bahkan hingga mengendalikan tubuh si individu itu sendiri. Hal ini lazim disebut dengan biopolitik.⁸⁰

Konsepsi tentang kekuasaan, menurut Foucault, tidak lagi bersifat represif seperti pendapat ahli sosial sebelumnya. Namun lebih bersifat produktif dan menormalkan susunan masyarakat. Seorang pemikir lain, Giorgio Agamben, juga menggunakan teori kekuasaan Foucault. Agamben coba mengingatkan bahwa penting untuk terus melakukan penyadaran kritis, terutama yang menyangkut moralitas. Sehingga kita tidak begitu saja menerima sebuah diskursus sebagai sesuatu yang ada dan pasti 'baik'. Termasuk dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, diskursus HAM pun tidak terlepas dari kepentingan kelas penguasa. Misalnya, benar bahwa negara harus melindungi warga negaranya karena itu bagian dari HAM. Namun melalui diskursus itu pula negara bisa mendiskreditkan mereka yang tidak menjadi warga negara. Bahkan 'warga negara' yang dimaksud pun belum jelas. Tak ayal, banyak kelompok minoritas atau warga di luar negaranya yang mengalami eksklusi dalam bentuk, misalnya, tidak mendapat hak perlindungan sebagai manusia. Dalam konteks semacam ini, demokrasi juga perlu terus diperiksa. Pasalnya, melalui demokrasi pula banyak praktik menormalisasi kekerasan untuk kepentingan penyelenggara negara.⁸¹

Sependek pengetahuan kami, Foucault memang tidak pernah terang-terangan menunjukkan bagaimana cara melawan

⁸⁰ Kevin Nobel Kurniawan, *Kisah Sosiologi: Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*, (Jakarta: Obor, 2020), hlm. 163-167.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 174-175.

hegemoni. Apalagi jika itu untuk skala yang luas. Akan tetapi, karena kekuasaan melekat dalam relasi sosial, maka ia tidak mungkin bersifat absolut. Sehingga, pada dasarnya, hegemoni pun memiliki celah untuk resistensi dan/atau kontestasi. Namun demikian, tampaknya belum banyak yang melihat celah itu. Sebagian besar masih menempatkan teori Foucault sebatas metode untuk membaca kenyataan dalam studi sosial (*heuristic device*). Karena itu, perlu kiranya untuk menempatkan teori tersebut dalam mengupayakan agenda gerakan. Menurut A. Sudiarja, salah satu peluangnya ada pada gagasan Foucault tentang subyektivasi. Gagasan tersebut coba melihat bagaimana individu menyadari kekuasaan (wacana) yang bekerja di sekitarnya. Kemudian berpartisipasi melawan kuasa tersebut dengan menyodorkan pembacaan lain atas kenyataan. Setelah itu, menghasilkan pengetahuan lain atau pengembangannya. Konsepsi Foucault tentang subyek pun sangat berbeda dengan ahli lain. Menurut Foucault, pemahaman subyek di sini tidak otonom.⁸² Dengan demikian, konsepsi subyektivasi ini perlu dipertimbangkan dalam strategi gerakan sosial. Terutama untuk menetapkan cara menggerakkan individu dalam melakukan resistensi.

Proses reproduksi hegemoni dikerjakan melalui reformasi internal. Lalu diartikulasi oleh politik oposisi dan akhirnya kembali menjadi konsensus. Sebaliknya, wacana yang coba mendorong krisis sosial-ekologis ke lingkup yang lebih luas malah terpinggirkan. Alhasil solusi krisis (dari pendukung logika kapitalisme) yang mencuat itu-itu saja. Sebatas hanya untuk menyelaraskan kontradiksi yang bertahan dalam satu atau bentuk lain.⁸³ Karena itu, agar dapat mendorong gerakan hegemoni tanding, maka para aktor dan aliansinya harus selalu melakukan refleksi kritis. Terutama pada bentuk-bentuk adaptasi baru yang muncul dari solusi krisis ala kapitalisme.

⁸² A. Sudiarja, S.J, *op.cit.*, hlm. 5.

⁸³ Ngai-Ling Sum dan Bob Jessop (2013) dalam Dorothea Elena Schoppek, "How Far is Degrowth a Really Revolutionary Counter Movement to Neoliberalism," *Environmental Values* 29 (2) April 2020, hlm. 138.

Hal semacam ini sudah diingatkan oleh kelompok Zapatista di Meksiko, "*Preguntando Caminamos* (saat berjalan, kami bertanya)." Kelompok Zapatista percaya, apapun yang terjadi, penting untuk terus melakukan pemeriksaan kritis terhadap gerakan internal dan lainnya. Tujuannya jelas yakni agar sebuah gerakan selalu memiliki refleksi kritis. Seperti, apakah upaya yang saat ini dilakukan memang dapat membawa transformasi sosial-ekologis? Jika tidak, mengapa?

BAB TIGA

Praktik dan Pengetahuan Ekonomi Nusantara

Sampai saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah alat ukur aktivitas ekonomi yang paling banyak digunakan. Tak ayal, terdapat standar Internasional untuk mengukurnya. Namun pada dasarnya, PDB hanya mengukur produksi pasar, bukan mengukur kesejahteraan (ekonomi).⁸⁴ Karena itu, nyaris setiap negara terus menggenjot konsumsi, investasi, dan produksi mereka. Semua semata demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Sebagai rezim data tunggal, PDB memang menghendaki ekonomi terus bertumbuh tanpa limit. Sebab jika ekonomi ‘tumbuh,’ maka angka PDB naik. Makin tinggi angka PDB, maka “dianggap” makin makmur dan sejahtera pula warga negaranya.

Pola pengukuran skala global tersebut bukan tanpa cacat. Kritik terhadapnya pun sudah banyak dilayangkan, bahkan sejak awal penerapannya pada 1930an. Seperti kritik bahwa PDB tidak memperhitungkan indikator keberlanjutan lingkungan. Kemudian dari situ muncul perspektif tentang “pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).” Namun pada dasarnya, perspektif itu pun masih mengusung logika yang sama yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Padahal pertumbuhan ekonomi pun memiliki batasan.

⁸⁴ Joseph E. Stiglitz Dkk., *op.cit.*

Seperti, misalnya, dibatasi dinamika akumulasi modal, dibatasi stabilitas politik, dan dibatasi daya dukung dan tampung lingkungan.⁸⁵ Pada awal abad ke-21, hadir satu perspektif lainnya yakni *degrowth*.

Sebagai sebuah gerakan sosial, *degrowth* mencuat pertama kali di Prancis. Saat itu isu yang coba didorong adalah kota tanpa mobil, mendukung pedagang kaki lima, koperasi pangan, dan anti iklan. Tidak berselang lama, spektrum praktik dan aktivisme *degrowth* pun makin meluas. Akhirnya *degrowth* pun menjadi titik temu ragam aliran pemikiran kritis. Posisinya pun jelas yakni untuk transformasi sosial-ekologis.⁸⁶ Tak ayal, para pendukung *degrowth* sangat menghendaki terbentuknya dunia baru – sebuah dunia yang masyarakat di dalamnya hidup selaras dengan daya tampung ekologis. Model perekonomiannya pun bersifat otonom. Sumber daya terbagi secara merata melalui kelembagaan yang demokratis. Karena itu, *degrowth* tidak hanya berseberangan dengan logika PDB. Namun juga dengan perspektif pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), beserta moda produksi penopangnya yaitu kapitalisme.

Namun sebagai sebuah praktik, *degrowth* sebenarnya sudah dilakukan di banyak tempat. Bahkan jauh sebelum terminologi tentang *degrowth* muncul dari negara-negara Eropa. Seperti, salah satunya, praktik ekonomi lokal di banyak wilayah di Indonesia. WALHI menyebut praktik tersebut dengan nama “ekonomi nusantara” – sebuah praktik (ekonomi) tandingan dari model ekonomi pertumbuhan (*economic growth*). Ciri utama “ekonomi nusantara” adalah pengintegrasian aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kehidupan manusia. Ketiga hal tersebut berhubungan secara dialektis. Dalam arti, yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain: saling dibentuk dan membentuk.

⁸⁵ Kent Klitgaard, *op.cit.*

⁸⁶ Federico Maria Dkk, *op.cit.*

Praktik “ekonomi nusantara” memiliki empat nilai pengikat yaitu (1) hubungan sejarah; (2) hubungan dengan lanskap ekologis; (3) praktik ekonomi yang tidak destruktif; dan (4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis. Keempat nilai itu pula yang menjadi panduan utama penelitian WALHI tentang “ekonomi nusantara.” Penelitian ini berlangsung di lima lanskap ekologis meliputi: lanskap gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan Sumatera, hutan dataran rendah, dan pesisir. Kelima lanskap tersebut tersebar di tujuh titik lokasi dan lima wilayah: Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur.

Masing-masing lokasi memiliki ciri khas masing-masing. Baik dari segi tata kuasa, tata kelola, tata konsumsi, dan tata produksinya. Namun semua titik lokasi memiliki pula satu kesamaan yakni kehidupan masyarakat sangat bergantung pada alam. Tidak hanya perkara ekonomi, namun juga perkara sosial-keagamaan. Karena itu, masyarakat menjaga betul keberlanjutan lanskap ekologis. Sebab dari situ pula ekonomi mereka berasal. Dan dari alam pula segala kebutuhan hidup bisa didapatkan. Masyarakat di seluruh lokasi penelitian “ekonomi nusantara” membuktikan bahwa kesejahteraan sosial dan ekonomi, didapatkan justru dari menjaga keasrian lingkungan. Hal ini sangat berkebalikan dengan model ekonomi pertumbuhan (*economic growth*). Dalam model ekonomi semacam itu, kerusakan lingkungan justru menjadi syarat ‘pertumbuhan ekonomi’. Tidak heran jika degradasi lingkungan terjadi di mana-mana. Bahkan kini sudah pada ambang kritis. Naasnya, hal itu pula yang tidak dilibatkan dalam perhitungan PDB.

Cerita detail dari masing-masing lokasi riset “ekonomi nusantara” ada pada bagian selanjutnya. Masing-masing tulisan yang tersaji merupakan karya penulis lokal yang dibantu tim peneliti nasional. Rincian hasil tulisan lapang tersebut akan dimulai dari dua lokasi penelitian di Bengkulu. Kemudian akan diikuti dua lokasi penelitian di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur.

Dua Nafas Bukit Kumbang Penyangga Bukit Barisan Selatan



Tim Penulis:

Meike Inda Erlina

Abdul Ghofar

Zenzi Suhadi

*“Ingat la’rangan Ju’ai ini, mukak imbe jage tanah
bebat gunung adat kerete medang ulaq ndang nube
ulu mandian”*

Ingatlah pesan leluhur ini, kalau masuk hutan jangan merusaknya. Ada makhluk lain yang hidup di dalamnya. Kalau hutan rusak maka kita akan mendapatkan musibah.

Zaili T (Sesepuh Orang Sambat Tanjung Aur)

A. Tanjung Aur

Bukit Kumbang merupakan perbukitan yang berada di Kawasan Bukit Barisan Selatan. Kawasan Bukit Kumbang menjadi penyangga kelestarian ekosistem di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Terutama di Kecamatan Maje dan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kultur sosial dan ekonomi masyarakat, dua kecamatan ini memiliki dua pola kehidupan. *Pertama*, masyarakat pesisir yang hidup dan membentuk perkampungan di sepanjang bibir pantai. *Kedua*, masyarakat perkebunan yang tinggal dan membentuk perkampungan mengikuti alur sungai dan perbukitan lereng Barat Sumatera.

Masyarakat pesisir lekat dengan aktivitas ekonomi pertanian dan nelayan. Mereka bagian dari kelompok masyarakat yang memproduksi pangan seperti beras, ikan, ternak, dan beragam tanaman pangan lainnya. Sementara masyarakat perkebunan, atau yang biasa disebut *uhang pucuk*, menjadi bagian masyarakat yang membentuk kultur pertanian dari perkebunan tanaman 'keras' dan *asil utan*. Tanaman 'keras' merupakan istilah masyarakat untuk hasil tanaman berkayu seperti cengkeh, kopi, karet, petai, dan jengkol. Sementara *asil utan* adalah istilah masyarakat untuk komoditi hasil hutan berupa damar, getah jernang, kemenyan, pinang, dan aren. Dua kelompok kultur ini hidup saling bergantung, baik dalam kehidupan perekonomian maupun lingkungan.

Orang pesisir merupakan penghasil beras. Mereka bercocok tanam padi di persawahan non irigasi. Pasokan airnya didapatkan dari proses tadah hujan dan aliran anak-anak sungai, terutama dari ceruk perbukitan di kawasan hulu. Ketersediaan air untuk pertanian padi sawah ini sangat bergantung dengan fungsi hutan di kawasan tangkapan air. Area ini menjadi hutan perkebunan tanaman keras *uhang pucuk*.

Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani, pola perkebunan campuran tanaman 'keras' *uhang pucuk* juga menjadi kunci keberhasilan fungsi kawasan tangkapan air.

Terutama bagi persawahan yang berada di hilirnya. Kegagalan *uhang pucuk* menerapkan budidaya hutan, selain akan menghancurkan sistem pertanian orang pesisir, juga akan menjadi faktor penghancur kehidupan orang hulu itu sendiri. Sebab, ketersediaan pangan untuk orang-orang di hulu, sangat bergantung pada pasokan padi dan palawija dari petani di pesisir. Dan selama ini dua cara hidup tersebut berjalan dengan baik dan saling mendukung.

Hubungan saling mendukung terjadi pula dalam sistem pangan dari ikan nelayan. Kehidupan nelayan tradisional di Kecamatan Maje dan Nasal sangat bergantung pada kelestarian fungsi ekosistem laut dan pesisir. Laut di Maje dan Nasal unik dan kaya. Sebab menjadi pertemuan langsung antara Samudera Hindia dan aliran sungai dari hutan tropis. Ditandai oleh, salah satunya, pantai yang dipenuhi oleh terumbu karang. Itulah rumah bagi berbagai jenis ikan di laut tepi. Salah satu jenis ikan yang paling khas adalah *katradarmus*. Ikan ini memijah di laut dan besar di anak sungai sepanjang lereng pantai sebelah Barat.

Relasi antara masyarakat pesisir Bengkulu dengan masyarakat di perbukitan telah terbentuk sejak lama. Meski dengan kultur dan lingkungan yang berbeda, kedua entitas masyarakat tersebut tetap saling bergantung. Terutama dalam aspek ekologis. Bahkan pada periode selang bercocok tanam padi, para petani pesisir biasa merantau ke daerah *Ulu Ayik* (hulu sungai). Di sana, para petani pesisir beralih profesi menjadi buruh petik kopi. Terutama saat puncak musim kopi tiba. Jumlah panen kopi akan melampaui ketersediaan tenaga kerja keluarga. Karena itu, para petani kopi di hulu sungai sangat bergantung pada keberadaan buruh musiman. Dan pada waktu yang sama, petani pesisir sedang tidak mempunyai aktivitas di sawah. Waktu luang itulah yang digunakan untuk mencari uang tambahan ke hulu sungai.

Terdapat belasan desa yang berada di Kawasan Bukit Kumbang. Kawasan ini sejak lama telah menjadi penyangga ekosistem Bukit Barisan Selatan. Dua dari belasan desa tersebut

adalah Tanjung Aur dan Sinar Mulya. Kedua desa ini berbatasan langsung dengan kawasan Bukit Barisan Selatan. Dan di dua desa inilah, tata kelola alam dan ekonomi berbasis kearifan lokal tumbuh dan terus diwariskan secara turun temurun. Dengan prinsip, “hidup selaras dengan alam demi kelestarian ekosistem hutan.”

1. Tanjung Aur: Desa Bersejarah Orang Sambat

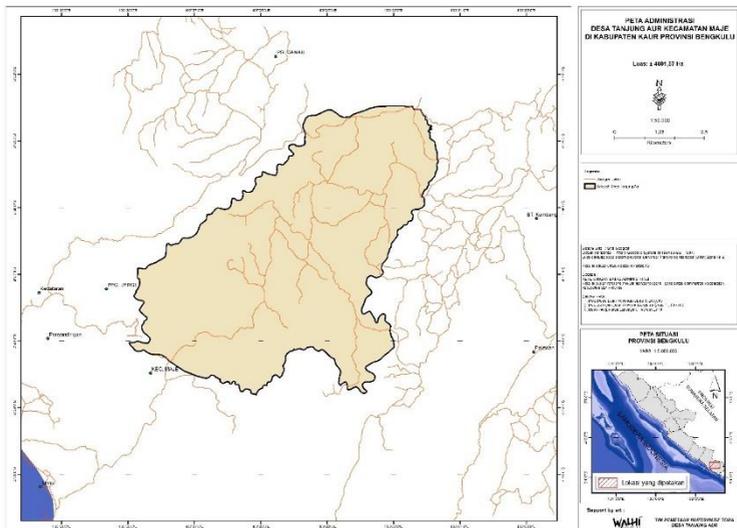
Sekilas, tidak ada yang berbeda dari kondisi jalan Desa Tanjung Aur dengan jalan desa lain di sekitaran Dermaga Linau. Namun setelah satu kilometer berjalan, kita akan melihat kondisi jalan Desa Tanjung Aur yang sebenarnya. Memasuki kilometer kedua, kita akan melalui jalan tanah khas desa di wilayah perbukitan. Sebelum memasuki desa, kami diminta untuk merapikan barang bawaan. Tas diikat dengan tali dan dililitkan ke pinggang. Barang lain diikat di atas bangku depan motor agar tidak mengganggu saat berkendara. Ban motor harus diikat dengan rantai agar tidak licin. “Di atas baru selesai hujan, jadi jalannya hancur dan licin. Nanti kalau tidak dirantai bannya akan selip,” jelas Rahmad, pemuda yang menjemput kami dari Linau menuju Tanjung Aur.⁸⁷

Setelah persiapan selesai, empat motor dengan modifikasi semi *trail* pun mulai melaju dan menggilas jalan peninggalan PT. Bengkulu Raya Timber. Jalan tanah dari kilometer 2 menuju kilometer 3, banyak yang tergenang akibat hujan. Genangan air membuat medan jalan semakin licin dan sebagian ruas tidak bisa dilintasi. Terpaksa kami pun harus berhati-hati saat mengambil bagian jalan yang akan dilalui. Tidak cukup sampai di situ. Sepanjang kilometer 3 hingga kilometer 4, kami pun melalui jalur bebatuan bekas patahan batu gunung dengan jalan menanjak nan curam. Sementara di sisi kiri dan kanan jalan, terlihat padatnya pepohonan dan semak belukar khas hutan.

⁸⁷ Rahmad merupakan Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Dan memasuki kilometer 4 hingga kilometer 10, kami kembali melintasi jalan tanah licin dan penuh genangan air. Kondisinya bahkan lebih parah dibanding sebelumnya. Sepanjang perjalanan dari kilometer 4, hanya terlihat satu atau dua pondok. Baru pada kilometer 10, kami benar-benar sampai di perkampungan. Dengan tanda, berjajarnya rumah-rumah kayu di sepanjang jalan.

Secara administratif, Desa Tanjung Aur masuk wilayah Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tanjung Aur berada pada ketinggian 158 sampai 480 meter di atas permukaan laut (mdpl). Desa ini memiliki wilayah seluas 4.001,57 ha dan menjadi salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Taman nasional ini masih menjadi bagian dari Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Dan sekitar 74.882 ha dari total luas 324.000 ha TNBBS berada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Secara umum, desa-desa penyangga ekosistem TNBBS seperti Tanjung Aur berada di daerah yang disebut Bukit Kumbang.



Gambar 3.1: Peta wilayah administratif Desa Tanjung Aur hasil Pemetaan partisipatif. Sumber: WALHI Bengkulu.

Tanah subur, kekayaan alam, dan hutan yang masih terjaga adalah berkah bagi masyarakat Tanjung Aur. Kekayaan alam dan hutan bagi masyarakat merupakan anugerah yang harus dijaga keseimbangannya. Dari alam yang terjaga, masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Seperti penuturan seorang sesepuh desa, Pak Yulisman

“Alhamdulillah kita tidak pernah miskin, kita berkecukupan, tidak pernah kekurangan beras. Masyarakat sejahtera dari bertani, bisa menyekolahkan anak dari hasil tanaman di sini. Makanya alam di sini harus dijaga, Tuhan sudah kasih gratis kita harus balas dengan menjaganya.”⁸⁸

Namun eksistensi dan sejarah Desa Tanjung Aur telah dikaburkan oleh negara. Desa ini tidak diakui sebagai satu wilayah administratif desa. Padahal sejak sebelum

⁸⁸ Pak Yulisman merupakan seorang tokoh masyarakat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

kemerdekaan Republik Indonesia, Tanjung Aur telah eksis. Bahkan pada 1943, Desa Tanjung Aur telah menjadi desa definitif. Dan pada 1949, telah menjadi pusat pemerintahan Marga Sambat, Karesidenan Kaur. Menurut Pak Yulisman, Tanjung Aur sejak dulu hingga sekarang merupakan desa definitif. Setiap tahun, Tanjung Aur juga menerima dana desa. Namun dana desa tersebut tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum. Sebab, oleh negara, wilayah Tanjung Aur dianggap menjadi bagian dari kawasan hutan. Karena itu warga Tanjung Aur merasa kebingungan oleh kebijakan negara tersebut. Terutama terkait masalah wilayah desa.

Absennya pengakuan wilayah desa oleh negara, bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagian wilayah desa seluas 1.595,62 ha diklaim oleh TNI Angkatan Laut untuk program Prokimal (Proyek Permukiman Angkatan Laut).⁸⁹ Sebagian wilayah desa lainnya seluas 2.405,95 ha, dimasukkan dalam wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Kumbang.⁹⁰ Karena itu, klaim wilayah oleh Prokimal dan tumpang tindihnya wilayah desa dengan kawasan hutan pun menjadi persoalan baru. Dan ini mengancam ruang hidup dan wilayah kelola 286 kepala keluarga di Tanjung Aur. Padahal sebagian besar rumah tangga menggantungkan hidup dari perkebunan dan hasil hutan.

2. Dari Talang Menjadi Tanjung Aur

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Bengkulu belum menjadi sebuah provinsi tersendiri. Bengkulu masih masuk bagian dari Provinsi Sumatera. Wilayah Bengkulu terdiri

⁸⁹ SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 297 tentang Penetapan Lokasi Atas Tanah Untuk Pembangunan Program Permukiman TNI Angkatan Laut (Prokimal) Bengkulu Tahun 1999.

⁹⁰ SK Menteri Kehutanan Nomor 309/Kpts-II/1998 27/02/1998 Penunjukkan HPT Bukit Kumbang Regional 85.

dari beberapa Karesidenan, salah satunya adalah Kaur. Karesidenan ini terbagi lagi menjadi beberapa marga, salah satunya adalah Sambat. Setiap marga dipimpin oleh seorang *pesirah*. Marga Sambat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pemerintahan Marga Sambat telah ada sebelum negara merdeka dan terdiri dari beberapa wilayah. Dalam bahasa Kaur, seorang sesepuh Sambat, Zaili T, menuturkan;

*“Ade 4 wilayahnye, u’ang dulu nyebutnye Talang. Ade Talang Awoer, Talang Ganti, Penyandingan, Kedataran. Masyarakatnye u’ang Ka’ur. Ade juge u’ang Serawai, u’ang Basemah. (Terjemahan: Ada 4 wilayah Marga Sambat, leluhur kita dulu menyebutnya sebagai Talang. Ada Talang Awer, Talang Ganti, Penyandingan, dan Kedataran. Penduduknya merupakan orang Suku Kaur, Serawai dan Basemah).”*⁹¹

Asal usul Desa Tanjung Aur adalah Talang Awer. Penyebutan tersebut berlaku terutama pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Menurut cerita masyarakat, nama Tanjung Aur berasal dari dua hal berikut. *Pertama*, daratan Tanjung Aur menjorok ke Sungai Air Sambat. Sehingga ia disebut sebagai tanjung. *Kedua*, di atas daratan tersebut tumbuh subur bambu berjenis Aur. Karena itu, daratan tersebut disebut Tanjung Aur. Pada tahun 1949, Desa Tanjung Aur merupakan pusat pemerintahan Marga Sambat. Wilayah tersebut dipimpin oleh seorang *Pesirah* bernama Abdul Manap. Ia dibantu oleh seorang *Pengawe*.⁹²

Sistem marga dengan kepemimpinan *Pesirah* bertahan hingga tahun 1959. Setelah itu, berganti menjadi *Depati* hingga tahun 1980.⁹³ Tak lama kemudian, lahir sebuah Undang-

⁹¹ Zaili T merupakan Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 1980-1991.

⁹² *Pesirah* adalah sebutan untuk Ketua Marga. Sementara *Pengawe* adalah sebutan untuk Kepala Dusun.

⁹³ Depati Marga Sambat tahun 1959-1968 adalah Abu J. Dan Depati Marga Sambat Tahun 1968-1980 adalah Amran M.

Undang (UU) tentang Pemerintahan Desa pada 1980. Salah satu dampak dari UU tersebut adalah bergantinya istilah *Depati* menjadi Kepala Desa. Seorang sesepuh Marga Sambat, Zaili T, dipilih menjadi Kepala Desa pertama Tanjung Aur. Dan rentetan sejarah panjang ini yang dikaburkan negara. Sebab, sampai hari ini wilayah Desa Tanjung Aur tidak diakui. Padahal keberadaan Desa Tanjung Aur sudah ada, bahkan sebelum terbentuknya Kabupaten Kaur. Hal ini yang membuat Zaili T dan para sesepuh desa lainnya kecewa.

3. Menata Ulang Peradaban Pascabanjir Bandang

Pada awalnya, permukiman masyarakat Tanjung Aur berada di bantaran Sungai Air Sambat. Akan tetapi, pada tahun 1987, terjadi sebuah musibah banjir bandang. Banjir ini diakibatkan oleh kerusakan wilayah hulu Sungai Sambat. Seluruh perkampungan pun rusak. Masyarakat terpaksa berpecah ke wilayah lain untuk mencari tempat aman. Beberapa memilih bermukim di dataran Tunggul Mutung. Beberapa yang lain memilih pindah ke dataran Lembak. Semua bergerak menjauh dari area Sungai Air Sambat. Banjir bandang membuat perkampungan Tanjung Aur berpindah ke wilayah kilometer 1 hingga 10. Wilayah ini terbagi menjadi dua: dekat Linau (Tanjung Aur I) dan dekat perkampungan yang sekarang (Tanjung Aur II). Memasuki tahun 1995, permukiman masyarakat desa makin naik lagi, bahkan hingga ke kilometer 18.

Pada tahun 2000, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengadakan program perumahan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Desa Tanjung Aur pun menerima manfaat sebanyak 150 unit rumah. Semua masuk ke dalam kategori sederhana. Perumahan tersebut didirikan di kilometer 10. Program Kemensos ini bertujuan untuk menghimpun masyarakat yang tersebar di kebun-kebun. Sebagian masyarakat pun memutuskan berpindah ke perumahan baru. Sebagian lainnya memilih kembali menetap di Desa Tanjung

Aur I— tempat terjadinya banjir bandang. Kini wilayah tersebut dikenal dengan nama Desa Muara Jaya, menyatu dengan Ibu Kota Kecamatan Maje, Linau. Sementara Desa Tanjung Aur II, kini menjadi wilayah Desa Tanjung Aur yang eksis hingga saat ini.

Selain Talang Awer, terdapat wilayah Marga Sambat lain yang turut berganti nama yaitu Muara. Wilayah ini kini berubah menjadi Desa Muara Jaya. Sementara wilayah Penyandingan, Talang Ganti, dan Kedataran, hanya bertransformasi menjadi desa dan tidak mengalami perubahan nama. Pada tahun 2003, terjadi pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 kabupaten: Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. Pemekaran ini berdampak pada Desa Tanjung Aur. Sebelumnya, desa ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah pemekaran, Desa Tanjung Aur masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Begitu pula dengan desa-desa (Marga Sambat) lainnya. Semua masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.⁹⁴

Saat ini hanya sedikit keturunan Marga Sambat dari Suku Kaur dan Basemah yang kembali menetap di Desa Tanjung Aur. Sebagian memilih menetap di Desa Penyandingan dan Muara Jaya. Sebagian lainnya menyebar ke desa lainnya di Kabupaten Kaur. Salah seorang keturunan Marga Sambat di Tanjung Aur adalah Nurlela.⁹⁵ Ia menceritakan bahwa kini hampir seluruh warga Tanjung Aur adalah pendatang. Mereka mulai banyak menjadi pemukim Desa Tanjung Aur sejak tahun 1995. Alhasil komposisi penduduk Tanjung Aur pun menjadi beragam. Mulai dari Suku Kaur, Semendo, Jawa, hingga Sunda. Keberagaman komposisi tersebut sama sekali tidak menimbulkan

⁹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur.

⁹⁵ Nurlela adalah Koordinator Km 10 Forum Perempuan Tani Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Selain Nurlela, keturunan Marga Sambat yang bertahan di Tanjung Aur adalah adik dan kakak Nurlela.

permasalahan sosial. “Semua yang menggantungkan hidup di Tanjung Aur adalah masyarakat Tanjung Aur, tidak ada pengecualian,” ujar Nurlela.

Bagi mereka yang memilih menetap dan menjadi warga, Tanjung Aur adalah tempat hidup dan mati. Karena rasa cinta pada Tanjung Aur, akhirnya mereka pun mengumpulkan aneka sumber sejarah. Mulai dari cerita tetua, dokumen desa, atau sumber-sumber lainnya. Dan sudah dikerjakan kurang lebih sejak lima tahun terakhir. Cerita tetua Tanjung Aur disampaikan dalam pertemuan dengan para sesepuh desa. Di pertemuan tersebut, para sesepuh menyampaikan pesan tentang pentingnya melanjutkan eksistensi Tanjung Aur. Baik bagi penduduk baru (pendatang) ataupun penduduk lama (orang Sambat). Semua harus bahu membahu membangun desa. Hal itu senada dengan prinsip hidup dan panduan masyarakat Kaur yakni “*Se’ase Seijean*” yang berarti “Satu Rasa Saling Peduli.” Prinsip ini memiliki makna bahwa masyarakat, harus gotong royong dan saling tolong menolong dalam menyelesaikan masalah. Atas dasar itu pula, masyarakat pun sepakat membentuk tim TURA (Tim Untuk Reforma Agraria) sebagai wadah perjuangan masyarakat Desa Tanjung Aur.⁹⁶

4. Juadah, Ke’as, Mainangan, dan Tradisi Bercocok Tanam Orang Sambat

Masyarakat Marga Sambat memiliki beberapa kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun. Seperti yang dicerminkan dalam pemilihan posisi permukiman, makanan, prosesi menanam dan panen, hingga tarian. Misalnya, kebiasaan masyarakat Suku Kaur untuk bermukim di dekat *air hidup*.⁹⁷ Kebiasaan ini sesuai dengan arti “Sambat” yakni mata air hidup. Karena itu, “*U’ang sambat biasenye buat u’mah dekat Ay’ar idup atau dekat Ay’ar besak*” (Orang Sambat biasanya

⁹⁶ Dokumen WALHI Bengkulu Tahun 2018. Tidak dipublikasikan.

⁹⁷ Istilah orang Sambat untuk menyebut mata air.

membuat rumah dekat mata air atau dekat sungai). Masyarakat memaknai bahwa mata air adalah sumber kehidupan. Dekat dengan sumber kehidupan berarti dekat dengan berkah.

Meskipun masyarakat mendirikan permukiman di dekat sungai ataupun mata air, mereka tetap menghormati peraturan desa. Seperti, misalnya, aturan untuk tidak membangun permukiman kurang dari 100 meter dari bibir sungai. Menurut seorang sesepuh, Tusiran,⁹⁸ aturan itu dibuat untuk menjaga kelestarian sumber air. Apalagi pasokan air tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan sehari-hari dan pengairan perkebunan. Kearifan ini terus diturunkan pada generasi yang lebih muda.

Kebiasaan lain orang Sambat yang diturunkan secara turun temurun adalah makanan. Saat melangsungkan hajatan, orang Sambat biasa menyuguhkan makanan bernama *Juadah Ke'as*. Makanan itu diberikan bagi para tamu yang hadir. *Juadah Ke'as* adalah makanan khas masyarakat Suku Kaur. Bentuknya menyerupai kerupuk. Motifnya beragam, tergantung selera orang yang memasak. Bahan dasarnya adalah tepung beras. Namun diberi campuran gula merah dan garam. Kebiasaan orang Sambat selanjutnya adalah seni tari bernama *Mainangan*. Kebiasaan ini masih dilestarikan, termasuk di daerah Tanjung Aur. Tarian ini merupakan bentuk perpaduan gerakan pencak silat dan iringan suara gendang. Pemain utama tarian ini adalah para pria dewasa. *Mainangan* sering diperagakan saat sore hari, malam sebelum pesta pernikahan, atau pada saat pesta pernikahan berlangsung. Biasanya *Mainangan* menjadi semacam pengiring para pengantin. Orang Sambat menyebutnya dengan istilah *belahak-belahak*.

Kebiasaan orang Sambat yang terus diwariskan adalah proses menanam dan memanen. Sebelum bertanam, masyarakat akan membersihkan lahan yang akan dijadikan

⁹⁸ Tusiran merupakan Kepala Desa Tanjung Aur pada periode 2008–2013.

ladang dengan cara *Manduak*.⁹⁹ Kegiatan *Manduak* harus dilakukan pada sore sampai malam hari. Terutama agar bunga api terlihat jelas dan mudah dikendalikan. Proses membakar semak harus berlawanan dengan arah angin. Agar api tidak menjalar ke lahan lain, maka area yang akan dibakar harus *ditebas*¹⁰⁰ terlebih dahulu.

Pada proses menanam, orang Sambat akan melibatkan para *Bujang* dan *Gadis*. Pelibatan muda-mudi itu dilakukan secara gotong-royong dan bergiliran antar keluarga Suku Kaur. Tidak hanya saat menanam, pelibatan *Bujang* dan *Gadis* juga dilakukan saat panen raya. Selama masa tanam dan panen, masyarakat diwajibkan berpuasa saat memasuki waktu magrib. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, masyarakat sangat percaya bahwa itu akan mendatangkan "*musuh*." Bisa dalam bentuk gagal panen, hama, atau berupa serbuan babi dan binatang liar lainnya. Sampai saat ini, sebagian besar tradisi orang Sambat masih berlangsung. Terutama di desa-desa dengan komposisi orang Sambat yang lebih banyak.

5. Ragam Kekayaan Alam Hutan Bukit Barisan Selatan

Secara tata guna lahan, wilayah Tanjung Aur dibagi menjadi 3 bagian: Hutan Marga, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Negara. Lokasi Hutan Marga berada di kilometer 10 ke bawah. Lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Kumbang berada mulai dari kilometer 11 hingga 21. Sementara lokasi Hutan Negara (HN), dengan rupa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), berada di area kilometer 21 ke atas. Pada tahun 1980an, negara melakukan penetapan kawasan hutan dan

⁹⁹ Istilah orang Sambat untuk menyebut proses membakar semak belukar di area yang akan dijadikan lahan.

¹⁰⁰ Proses memangkas belukar sebelum melakukan pembakaran.

pemasangan tapal batas. Namun sayang, proses ini sama sekali tidak melibatkan warga Desa Tanjung Aur.¹⁰¹

Pada 1982, TNBBS resmi ditetapkan sebagai Hutan Negara. Saat itu kondisi tutupan hutannya masih mencapai 93,5 %.¹⁰² Kondisi itu mengantarkan TNBBS menjadi satu dari sedikit hutan hujan yang masih terjaga, terutama di wilayah Sumatera. Desa-desa penyangga di sekitaran TNBBS, seperti Tanjung Aur, berperan besar menjaga kelestarian tersebut. Bentuk kontribusi warga desa adalah dengan cara menanam tanaman yang memiliki fungsi konservasi. Seperti Pohon Afrika, Sengon, Pelawi, Mahoni, Medang Setanan, Medang Gadis, Jati, Kruing, Damar, Semurau, Akasia, Bayur, dan lain-lain. Di sekitar sungai, warga pun menanam bambu dan rotan. Kedua tanaman ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pelindung sumber air dan sekaligus sumber pendapatan ekonomi. Oleh sebab itu, bagi warga Tanjung Aur, kelestarian hutan dan kesejahteraan ekonomi adalah dua hal yang berkaitan erat.

Kelestarian TNBBS berimplikasi pada terjaganya keanekaragaman hayati. Ada dua jenis flora yang sangat terkenal dan khas yakni anggrek bulan dan bunga bangkai. Sementara untuk fauna, beberapa binatang seperti siamang, kera putih, kutilang emas, elang, hingga landak masih sering terlihat. Terutama di daerah Tanjung Aur yang terhubung dengan TNBBS. Ragam fauna tersebut masih eksis hingga hari ini. Mereka hidup dan menyebar di sekitar TNBBS. Namun ada dua jenis fauna yang makin terancam keberadaannya: gajah dan harimau Sumatera. Setelah masuknya PT. Bengkulu Raya Timber (BRT), habitat kedua fauna ini rusak. Alhasil koridor lintas harimau dan gajah pun telah bergeser dari area bukit kumbang.

¹⁰¹ Profil Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

¹⁰² RPIJM Bidang Cipta Karya Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kaur 2018 – 2022.

Harimau Sumatera termasuk hewan langka. Hewan ini juga memiliki makna kultural bagi masyarakat sekitar Pegunungan Bukit Barisan. Misalnya bagi masyarakat Desa Tanjung Aur. Menurut kepercayaan Suku Kaur, harimau memiliki kekuatan mistis. Harimau jenis ini dikenal dengan istilah *Puyang*.¹⁰³ Ketika *Puyang* sudah menapak di permukiman warga, maka itu adalah sebuah pertanda buruk. Dan bagi warga Tanjung Aur, kemunculan harimau memiliki dua makna. *Pertama*, sebuah pertanda adanya pelanggaran norma sosial. *Kedua*, sebuah peringatan atas terjadinya kerusakan hutan. Dengan dua pemaknaan itu, maka masyarakat Tanjung Aur pun bisa bersikap arif terhadap alam. Alhasil mereka pun tidak pernah sekalipun mengganggu wilayah jelajah harimau Sumatera. Mereka paham. Jika melanggar, maka *Bala* akan terjadi.¹⁰⁴

Kawasan Bukit Barisan Selatan merupakan sumber pasokan air yang mengalir beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kaur seperti DAS Kolek, DAS Manula, DAS Nasal, DAS Sawang, dan DAS Sambat. Aliran sungai tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁵ Dalam sejarah Sumatera, atau bahkan di seluruh Indonesia, sungai selalu menjadi asal mula peradaban manusia. Begitu pula yang terjadi di Bukit Barisan Selatan. Aliran sungai dari kawasan itu menjadi titik kelahiran peradaban orang Sambat, Kaur, Padang Guci, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, seluruh titik peradaban itu masih eksis dan makin berkembang.

¹⁰³ *Puyang* merupakan istilah bagi Suku Kaur. Beberapa suku lain yang mendiami Bukit Barisan memiliki istilahnya sendiri. Seperti *Setue/Setuo*, *Inyek*, *Puyang Tingkis*, *Rajo Utan*, dan lain-lain.

¹⁰⁴ *Bala* merupakan istilah masyarakat Tanjung Aur untuk menyebut bencana.

¹⁰⁵ RPIJM Bidang Cipta Karya Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kaur 2018–2022.

6. Tata Kelola Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Wilayah penyangga TNBBS adalah rumah bagi aneka flora dan fauna. Selain itu, wilayah tersebut juga menjadi ruang hidup masyarakat. Secara turun temurun, masyarakat mengelola dan menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam. Seperti itulah masyarakat Desa Tanjung Aur. Mereka hidup dari perkebunan dan aneka bentuk hasil hutan. Pola perkebunan yang diterapkan adalah tumpang sari. Lahan perkebunan ditanami dengan kopi, lada, karet, cabe, palawija, dan lain-lain. Masyarakat juga menanam buah seperti durian, duku, mangga, dan tanaman-tanaman selang. Perpaduan tanaman kayu dan tanaman selang bertujuan tidak hanya untuk sumber pendapatan. Namun sekaligus sebagai upaya konservasi.

Desa Tanjung Aur memiliki lahan kelola seluas 950 hektar. Lahan itu digunakan untuk perkebunan kopi seluas 704 hektar; untuk karet seluas 194 hektar; dan untuk cengkeh seluas 55 hektar. Selain ketiga komoditas tadi, semuanya berada di area yang sama dengan model tumpang sari. Di Desa Tanjung Aur, satu Kepala Keluarga menggarap lahan paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 8 hektar. Dan rata-rata luas lahan garapan warga adalah 3-4 hektar. Sementara per satu kepala keluarga, rata-rata kemampuan pengelolaan lahannya ialah 2,9 hektar.

Dengan luas rata-rata hampir 3 hektar, setiap keluarga mampu menanam kopi sebanyak 2000-2500 batang/hektar. Tanaman kopi biasanya dikombinasikan dengan tanaman dadap. Tanaman ini berfungsi sebagai rambatan lada. Dalam satu hektar dapat ditanami 700 batang pohon dadap dan 700 batang lada. Adapun jika akan ditanami cengkeh atau karet, maka setiap hektar lahan dapat ditanami sekitar 600 batang. Sisa lahan dari jarak antar tanaman dan batas kebun juga bisa dimanfaatkan. Masyarakat biasanya menanam tanaman selang seperti durian, jengkol, dan petai.

Selain berkebun, masyarakat Tanjung Aur juga mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Terutama tanaman obat,

rotan, bambu, dan getah damar hutan. Bambu yang diambil adalah bambu muda (rebung). Oleh masyarakat, rebung biasa dijadikan lauk. Sementara rotan biasa dimanfaatkan sebagai bahan membuat *kinjar* (keranjang) atau *niru* (wadah beras). Pemanfaatan HHBK dilakukan secukupnya. Tidak berlebihan, demi kelestarian sumber daya alam.¹⁰⁶ Kearifan masyarakat ini didasarkan pada sebuah pesan bernama *Larangan Jurai*.¹⁰⁷ Pesan ini berasal dari tetua Suku Kaur di Marga Sambat yang berbunyi:

“Ingat la’rangan Ju’ai ini, mukak imbe jage tanah bebat gunung adat kerete medang ulaq ndang nube ulu mandian” (Terjemahan: Ingatlah pesan leluhur ini, kalau masuk hutan jangan merusaknya. Ada makhluk lain yang hidup di dalamnya. Kalau hutan rusak maka kita akan mendapatkan musibah).

Menurut Pak Zaili, makna pesan leluhur tersebut ialah: larangan merusak wilayah lain ketika membuka hutan. Sebab, ada makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar situ. Sehingga perlu pula untuk dihormati. Kerusakan alam akan membawa petaka. Sebab hutan itu adalah pengikat gunung. Merusak alam, merusak hutan, sama dengan menyakiti makhluk lain. Dan jika dilakukan, pada akhirnya akan membawa petaka bagi umat manusia. Pak Zaili sangat mematuhi pesan leluhur tersebut. Tidak heran, ketika menjadi Kepala Desa, Pak Zaili pernah membuat peraturan desa tentang kelestarian alam. Peraturan tersebut terdiri dari tiga bentuk tuntutan.

Pertama, larangan membuat kebun dengan jarak kurang 100 meter dari bantaran sungai. *Kedua*, larangan membuka lahan sampai wilayah TNBBS—baik untuk permukiman atau pun perkebunan. *Ketiga*, larangan membuka lahan baru di kawasan *Ulu Tulung* dan *Tulung*.¹⁰⁸ Pada 1987, beberapa desa pernah

¹⁰⁶ Pemetaan Potensi Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Dokumentasi WALHI Bengkulu 2018. Tidak dipublikasikan.

¹⁰⁷ Substansi utama pesan para leluhur ini adalah dorongan untuk menjaga alam.

¹⁰⁸ Kawasan aliran sungai yang dikeramatkan oleh masyarakat.

hancur diterjang banjir bandang. Karena itu larangan tersebut dibuat. Pak Zaili menjadikan peristiwa masa lalu sebagai pelajaran. Menurutnya, *“Kalu nak selamat, jangan sesekali me’usak hutan di pucuk. Makenye ku larang u’ang ni”* (Terjemahan: Kalau mau selamat, jangan sesekali merusak hutan di atas ((TNBBS)). Makanya saya larang orang ini).

Kerusakan Bukit Kumbang sangat terkait dengan aktivitas PT. Bengkulu Raya Timber dan PT. Bengkulu Tama Raya Timber. Kedua perusahaan itu telah melakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Alhasil fungsi hutan pun hilang dan bencana ekologis pun datang. Selain itu, aktivitas perusahaan juga mengganggu habitat asli gajah Sumatera. Akibatnya, banyak habitat gajah hancur dan mendorong gajah-gajah itu berpindah tempat. Kedua perusahaan tersebut mulai berhenti beroperasi pada 1997. Kemudian mereka pun meninggalkan desa tanpa melakukan restorasi ekosistem. Padahal selama beroperasi, kedua perusahaan itu membuat jalan desa rusak parah. Terutama karena aktivitas lalu-lalang pengangkutan kayu. Dan pada tahun 2002, kedua perusahaan terindikasi melakukan pembalakan liar selama berlangsungnya izin usaha.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat warga. Tata kelola sumber daya alam harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Tidak hanya agar dapat berkelanjutan, namun juga agar bisa terhindar dari ancaman mara bahaya. Contoh tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan adalah: (1) Tidak membuka lahan baru; (2) Tidak bermukim dekat sungai; dan (3) menanam tanaman pelindung di sekitar rumah, lahan perkebunan, dan sungai. Tindakan ini adalah bagian dari upaya menolak aktivitas apapun yang dapat merusak alam. Inilah wujud bagaimana masyarakat Tanjung Aur dapat hidup selaras dengan alam. Mereka mengelola hutan, namun tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya.

7. Relasi Ekonomi, Sosial, dan Ekologi Lanskap Bukit Kumbang

Punggungan TNBBS terlihat dari kebun warga Tanjung Aur. Dari situ terlihat pula kebun dan pondok di desa lain. Sebagian petani hutan di Bukit Kumbang, memang masih bermukim secara temporer di dekat kebun (talang). Karena itu mereka membangun rumah sederhana yang disebut pondok. Batas antar kebun warga ditandai dengan tanaman andong. Daun tanaman ini berwarna merah. Selain itu, batas kebun bisa pula berupa sungai. Kebanyakan kebun warga terletak di dataran yang cukup tinggi, sekitar 300 mdpl. Sehingga sangat cocok untuk menanam kopi dan beberapa jenis sayuran. Pasokan air untuk tanaman didapatkan dari aliran sungai. Posisinya berada di bawah kebun warga.

Selain Tanjung Aur, satu desa penyangga Bukit Barisan Selatan lain adalah Desa Sinar Mulya. Desa ini masih termasuk dalam Kawasan Bukit Kumbang. Dan kini, perusahaan telah mengekspansi hampir seluruh desa penyangga di Bukit Barisan Selatan. Termasuk di Desa Sinar Mulya. Perusahaan tersebut bernama PT. Ciptamas Bumi Selaras dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Salah satu desa yang berhasil melawan adalah Tanjung Aur. Desa ini memiliki pengalaman merasakan dampak kerusakan hutan akibat perusahaan kayu. Karena pengalaman itu pula, maka Desa Tanjung Aur bulat menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit. Warga Tanjung Aur yakin jika usaha melestarikan hutan adalah usaha melestarikan kebudayaan.

Di Desa Tanjung Aur terdapat satu kelompok tani bernama Sido Mulyo. Setiap tahun, Sido Mulyo mendapatkan bantuan bibit tanaman. Beberapa diantaranya adalah cabe, karet, jengkol, dan lain-lain. Keberadaan kelompok tani, sangat membantu masyarakat untuk mengakses program pemerintah di bidang pertanian. Selain itu, kelompok tani juga menjadi wadah untuk menampung hasil panen. Setelah tertampung semua, maka masyarakat bersama-sama menjualnya.

Solidaritas antar anggota kelompok tani tercermin terutama saat musim panen. Mereka gotong-royong, saling membantu memanen. Di samping itu, pemahaman untuk menjaga sumber air juga disampaikan melalui kelompok tani. Dari situ masing-masing petani paham arti penting aliran anak sungai Sambat bagi pertanian. Sido Mulyo pun memiliki komitmen untuk tidak membuka lahan hingga kawasan TNBBS. Karena menurut mereka, mengelola lahan seluas 4–5 hektar sudah sangat mencukupi.

Krisis ekologis pada masa lalu, sudah cukup membuat warga untuk memperhatikan relasi alam dengan aspek sosial-ekonomi mereka. Warga sadar bahwa peristiwa banjir bandang tidak hanya menghancurkan permukiman. Akan tetapi, turut menghancurkan sejarah dan relasi sosial mereka yang sudah terbangun lama. Karena itu, kini warga Tanjung Aur terus berjuang mengembalikan sejarah mereka. Termasuk mencuatkan lagi sejarah Talang Awer yang telah dibangun oleh orang Sambat.

8. Jejak Ekonomi Nusantara di Bukit Kumbang

Pada akhir abad 16, di Bukit Kumbang terdapat sebuah kerajaan bernama Kaur. Menurut sesepuh Tanjung Aur, praktik ekonomi masyarakat hari ini merupakan warisan dari zaman kerajaan. Sejak dulu, masyarakat mengandalkan hasil pertanian dan perikanan. Orang pesisir menjadi nelayan, sementara orang daratan dan bukit bertani dan berkebun. Beberapa hasil kebunnya adalah cengkeh dan lada. Kualitas terbaiknya ada di wilayah Muara Sahung. Wilayah ini masih termasuk lanskap ekologis Bukit Kumbang.

Kerajaan Kaur didirikan oleh Pangeran Raja Luwih pada 1697. Gelar raja tersebut ialah Sembrani Gunung Kaur. Setelah wafat, tampuk kekuasaan Kerajaan Kaur dilanjutkan oleh anak keturunan Raja Luwih. Pada era kepemimpinan Pangeran Cungkai V, kapal dagang Inggris berlabuh di Teluk Linau.

Mereka datang untuk membangun kerja sama dagang dengan Kerajaan Kaur. Komoditas utama perdagangan tersebut ialah rempah-rempah. Setelah itu, Inggris pun mulai mendirikan bunker, permukiman, perkantoran, dan benteng di wilayah Muara Sambat. Nama Linau sendiri, berasal dari bahasa Inggris yakni *Line* dan *New*. Artinya, garis batas wilayah Kolonial Inggris. Pada saat itu, perusahaan dagang *British East India Company* (EIC) bahkan hingga mendirikan pusat perdagangan lada.¹⁰⁹ Sejak saat itulah hasil rempah dari daerah Kaur diperdagangkan di pasar Internasional.

Pada 1811, kongsi dagang Inggris pergi dan digantikan kongsi dagang Belanda, VOC. Sama seperti Inggris, Belanda pun masuk ke daerah Kaur melalui Teluk Linau. Belanda datang dengan tujuan yang sama yaitu menawarkan kerja sama perdagangan rempah. Dan pada era VOC inilah eksploitasi warga Kaur dan Bengkulu terjadi. Semua semata demi meningkatkan produksi rempah. Tidak terima dengan perlakuan Belanda, Kerajaan Kaur pun angkat senjata. Pada 1825 perang antara Kerajaan Kaur dengan Belanda pun berlangsung.¹¹⁰ Jejak ekonomi masa perdagangan rempah tersebut masih terasa sampai saat ini. Nyaris seluruh desa di Bukit Kumbang masih menggantungkan hidup dari perkebunan lada, kopi, dan cengkeh. Ketiga komoditas itu adalah rempah-rempah yang sangat laku di pasaran Eropa. Karena itu Belanda dan Inggris datang. Budidaya rempah itulah yang kemudian diwariskan secara turun temurun.

Sejak abad ke 15, komoditas dari Bukit Kumbang sebenarnya sudah diperdagangkan ke luar daerah. Jauh sebelum era Kerajaan Kaur. Komoditas dari Bukit Kumbang yang laku di pasaran adalah damar dan kemenyan. Komoditas itu dikenal

¹⁰⁹ Zubir Zurneli, "Puyang Sembarni dan Pangeran Cungkai dari Kerajaan Kaur" dalam Neli Fitriyana, *Tesis*: "Peran Pangeran Cungkai Dalam Mengembangkan Islam Di Kaur Tahun 1700 - 1842" (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

¹¹⁰ *Ibid.*

luas di Timur Tengah dan Cina. Kedua bahan itu biasa dipergunakan untuk dupa, pengasapan, dan pengobatan tradisional. Di Cina metode ini kemudian dikenal dengan nama *Nature Medica*.¹¹¹ Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat Marga Sambat masih meneruskan tradisi menanam rempah. Namun dengan penambahan tanaman kopi dan karet. Kedua tanaman ini termasuk tanaman unggulan. Dari menanam komoditas itulah masyarakat Bukit Kumbang hidup. Bahkan menjadi sumber mata pencaharian paling utama. Termasuk di Desa Tanjung Aur. Karena itu, bagi warga bercocok tanam bukan sebatas perkara kepentingan ekonomi. Lebih dari itu, adalah sarana penghubung dengan generasi terdahulu.

Pada masa krisis ekonomi 1997-1998, kondisi perekonomian Tanjung Aur sempat mengalami guncangan hebat. Harga lada dan kopi anjlok drastis. Kondisi itu membuat petani tidak mampu membeli kebutuhan pokok dari daerah luar. Namun untungnya, sumber daya alam masih menyediakan banyak hal. Akhirnya warga pun bisa melewati krisis dengan memanfaatkan sumber pangan lokal seperti padi ladang, buah-buahan, dan ikan. Meski begitu, dampak krisis tetap terasa sampai tahun 2000an. Saat harga kopi dan lada sedang jatuh, warga banyak beralih menanam nilam. Tanaman ini bisa disuling untuk dijadikan minyak. Hasilnya cukup menguntungkan. Sehingga perekonomian masyarakat pun kembali pulih.

Saat itu, nilam memang menjadi komoditas utama. Jauh mengalahkan kopi, lada, atau cengkeh. Nilam dapat dimanfaatkan untuk membuat aromaterapi, penambah rasa makanan, pengikat pewarna, produk kosmetik, serta produk lainnya. Namun proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup lama dan sangat melelahkan. Seiring berjalannya waktu, bahan tanaman nilam makin tidak terjangkau. Akhirnya banyak

¹¹¹ William Marsden, *Sejarah Sumatra*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).

orang yang berhenti memanfaatkan nilam. Tidak lama kemudian, era nilam pun berakhir.

Setelah era nilam, masyarakat kembali mengelola perkebunan lada, cengkeh, dan kopi. Selain menanam untuk dijual, masyarakat juga bercocok tanam secara subsisten. Mereka menanam palawija dan buah-buahan untuk kebutuhan pangan keluarga. Masyarakat juga mengambil ikan dari sungai. Terutama ikan-ikan yang dapat dijadikan lauk. Sambil mencari ikan, biasanya masyarakat juga mencari tanaman yang hidup di sekitar sungai. Beberapa diantaranya adalah paku (nama sayuran), *rebung* (bambu muda), dan daun lumai.

Saat ini, kopi kembali menjadi komoditas yang laku di pasaran dunia. Tak ayal, para petani pun makin rajin mengurus perkebunannya. Sampai hari ini, petani di Tanjung Aur konsisten menjadikan kopi dan lada sebagai pemasukan utama. Sedangkan cabe, karet, dan tanaman selang lainnya, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2019), kopi dari Bengkulu cukup diminati banyak orang. Alhasil para petani Tanjung Aur pun mendapat cukup penghasilan. Dari situ mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi.

9. Berkebun: Identitas Diri dan Tulang Punggung Ekonomi

Sebagian besar warga Tanjung Aur memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berkebun. Bagi masyarakat, berkebun merupakan identitas diri orang-orang perbukitan barisan. Termasuk yang bermukim di sekitar Bukit Kumbang. Sebagai *Uhing Pucuk* (orang bukit), relasi mereka dengan tanah sangat kuat. Meskipun, ada pula sebagian warga yang berternak, berdagang, atau menjadi tukang ojek. Akan tetapi, aktivitas itu hanya alternatif sumber pendapatan. Kerja sampingan pun dilakukan berdasarkan kalender musim. Sifatnya sangat temporer. Karena itu kerja sampingan tidak dilakukan pada

bulan menanam (Januari-Maret) dan masa panen Kopi (Maret-April).

Kalender musim di Tanjung Aur berlaku satu tahun (Januari-Desember). Pada bulan Januari-Maret biasanya masuk musim penghujan. Sehingga pada bulan ini dilakukan penanaman. Pada Maret-April, biasanya mulai masuk musim panen raya kopi. Beberapa lahan bahkan masih panen saat memasuki musim kemarau (April-September). Namun intensitasnya tidak sebanyak musim panen raya. Periode akhir tahun yakni November-Desember, dihitung sebagai musim paceklik. Banyak biaya yang harus dikeluarkan. Terutama untuk melunasi utang pada *toke* (tengkulak).¹¹²

Tanaman kopi menjadi hasil perkebunan unggulan Tanjung Aur. Menurut masyarakat, ada beberapa tahapan hingga kopi tumbuh dengan baik. *Pertama, Ngranteng* atau proses memotong dahan yang kering. *Kedua, Nunas*. Tunas yang baru tumbuh akan dipotong dan disisakan hanya satu. Tujuannya agar tanaman kopi tidak mati. *Ketiga, nebas* atau membersihkan rumput. *Keempat, memupuk* dan terakhir, *kelima*, adalah *Nunas* kembali. Sementara saat panen kopi, masyarakat memiliki beberapa tahapan proses yang cukup panjang. *Pertama, Mupu Kupa* atau memetik biji kopi. *Kedua* adalah menjemur biji kopi. *Ketiga* adalah *Nutu* atau menumbuk kopi. *Keempat, Ngiling* atau menggiling kopi. Dan setelah proses penggilingan selesai, kopi akan dijemur kembali. Jika kadar air sudah mulai berkurang, maka kopi siap dijual ke para *toke* atau tengkulak. Di Tanjung Aur, hampir setiap kilometer permukiman terdapat satu orang *toke*.

Praktik perkebunan di Tanjung Aur melibatkan seluruh anggota rumah tangga. Namun dengan pembagian kerja yang berbeda-beda. Bahkan untuk tanaman kopi, masyarakat kerap melibatkan pekerja dari luar Tanjung Aur. Terutama untuk membantu proses panen. Para pekerja itu berasal dari desa-desa

¹¹² Dokumen WALHI Bengkulu tahun 2018. Tidak dipublikasikan.

di daerah pesisir. Tidak jarang bahkan hingga dari daerah Lampung. Selama panen raya, para pekerja musiman ini tinggal di rumah pemilik kebun. Mereka diperlakukan seperti anggota keluarga sendiri. Segala kebutuhan ditanggung oleh pemilik kebun. Pelibatan pekerja musiman menunjukkan bahwa putaran ekonomi perkebunan kopi dan rempah cukup kencang. Alhasil masyarakat Tanjung Aur pun sejahtera. Manfaat ekonominya bahkan dapat dirasakan pula oleh warga desa lain.

Panen kopi di Tanjung Aur terdiri dari dua masa panen. *Pertama, Ngagung Pangkal*. Satu istilah masyarakat untuk proses memanen kebun kopi saat usia tanam 3 tahun. Hasilnya memang tidak terlalu besar. Karena memang termasuk masa panen awal kopi. Kedua, *Ngagung Besar*. Ini adalah istilah masyarakat untuk menyebut proses panen kopi saat usia tanaman 4-5 tahun. Hasil panen pada proses ini paling besar. Di samping itu, para petani juga lihai mengantisipasi penurunan produktivitas kopi. Mereka menggunakan cara stek kopi. Dengan metode ini, produktivitas panen kopi bisa ditingkatkan. Misalnya dalam satu bidang lahan berukuran 1 hektar (3000 batang kopi), petani dapat menghasilkan lebih dari 3 ton kopi. Namun jika tanpa model stek, maka hasil panen pada masa *ngagung kecil* hanya sekitar 1,5 ton. Dan saat *ngagung besar* hanya 2,5 ton. Perbedaan antara menggunakan stek dan tidak menggunakan cukup besar yakni sekitar 1 ton kopi.

Pendapatan hasil panen akan digunakan untuk membayar upah pekerja. Selain itu, pendapatan juga disimpan untuk modal tanam selanjutnya dan untuk membiayai pengeluaran lainnya. Seperti untuk kebutuhan Hari Raya, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari setelah masa panen. Karena di luar masa panen raya, masyarakat memang bertahan dari sisa penjualan hasil panen. Beruntung mereka tidak hanya bergantung pada kopi dan lada. Hasil dari karet, jengkol, dan cabe juga bisa menambah pendapatan di luar musim panen raya.

Masyarakat Tanjung Aur pernah mengalami situasi krisis yang cukup parah. Krisis itu terjadi pada 1997–2000. Saat itu terjadi kemarau panjang. Lahan perkebunan pun menjadi tidak produktif. Hal tersebut diperparah dengan anjloknya harga komoditas kopi dan lada. Akhirnya sebagian penduduk terpaksa merantau. Mencoba mencari pekerjaan lain di luar desa. Sebagian masyarakat lainnya, hanya menggantungkan diri dari tengkulak. Mereka rata-rata merupakan pemilik warung di desa. Karena ketergantungan dengan tengkulak itulah, tercipta sistem *patron-client* antara petani dengan tengkulak yang juga pemilik warung. Kebutuhan sembako pada masa paceklik, diberikan dalam bentuk pinjaman lunak. Syarat utamanya adalah harus menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut. Sistem ini berlangsung cukup lama. Terutama saat musim paceklik.

Sebagian petani lain berani memutus ketergantungan pada tengkulak. Menurut mereka, hutang kepada tengkulak sangat merugikan. Ada selisih harga dari setiap kilogram kopi, lada, dan jenis panen lain. Selisih tersebut mencakup jasa ambil untung dan biaya pengangkutan menuju tengkulak yang lebih besar. Petani Tanjung Aur menyadari betul kerugian proses jual beli dengan tengkulak. Namun karena minimnya modal dan tidak adanya pemasukan saat masa paceklik, maka tidak ada opsi lainnya. Para petani terpaksa bergantung pada tengkulak. Kendala lainnya adalah infrastruktur. Sebagian besar petani tidak memiliki mobil angkut. Sehingga hasil panen pun harus dititipkan pada tengkulak. Karena akan sangat sulit membawa hasil panen tanpa menggunakan mobil. Apalagi dengan kondisi jalan tanah sepanjang Tanjung Aur-Linau.

Masyarakat belajar dari situasi krisis yang pernah terjadi. Alhasil mereka pun mulai memikirkan cara mendapatkan tambahan penghasilan. Bisa dengan cara berternak atau dengan menanam tanaman pangan. Saat ini sebagian besar petani memiliki kebun sayur dan kebun padi ladang. Keduanya dimanfaatkan untuk konsumsi lokal. Sungai sekitar juga dimanfaatkan, terutama untuk mencari ikan. Sementara hutan

dimanfaatkan pula untuk mencari getah damar hutan. Karena itu, masyarakat menyadari betul arti penting menjaga hutan dan kawasan sekitarnya. Dan terbukti, tata kelola ekonomi yang selaras dengan alam bisa membantu masyarakat keluar dari situasi krisis.

Dua tahun terakhir, masyarakat telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Sumber Makmur. Ini adalah langkah untuk mendukung perekonomian lokal. BUMDes ini bergerak di sektor penyediaan sarana pertanian seperti pupuk, obat, dan alat pertanian. Melalui inisiatif BUMDes, perlahan ekonomi lokal Tanjung Aur pun makin membaik. Sebab, kehadiran BUMDes mampu menekan harga sarana pertanian yang tergolong mahal. Para tengkulak pun dirangkul agar mau menurunkan harga sesuai dengan kemampuan petani. Ketua BUMDes Sumber Makmur, Pak Yulisman, menuturkan bahwa

selama ini penjualan hasil pertanian ke tengkulak sangat merugikan masyarakat. Hasil panen dibeli murah. Namun petani membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal. Praktik seperti ini harus diubah agar menguntungkan semua pihak.

BUMDes juga menjamin kebutuhan pupuk dan obat tanaman para petani. Selain itu, BUMDes juga membeli hasil panen petani dengan harga tinggi. Dengan begitu, Sumber Makmur telah memanfaatkan dana desa dengan sangat baik. Tujuannya pun jelas yaitu mendorong kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dua tahun sejak kehadiran BUMDes, peningkatan ekonomi lokal mulai terasa. Lembaga itu pun menjadi pintu masuk mengakses pelayanan pemerintah ke masyarakat. Dalam bentuk, salah satunya, layanan permodalan untuk petani kebun. Di satu sisi, pemberian modal telah membantu petani lepas dari jerat utang tengkulak. Akan tetapi, di sisi lain, masuknya modal bisa mendorong peningkatan produksi. Dan peningkatan produksi rentan menimbulkan perluasan lahan dan penggunaan bahan

kimia secara berlebihan. Jika benar terjadi, maka daya dukung lingkungan Tanjung Aur bisa menurun. Hal itu pada akhirnya akan mengancam ekosistem Bukit Barisan Selatan.

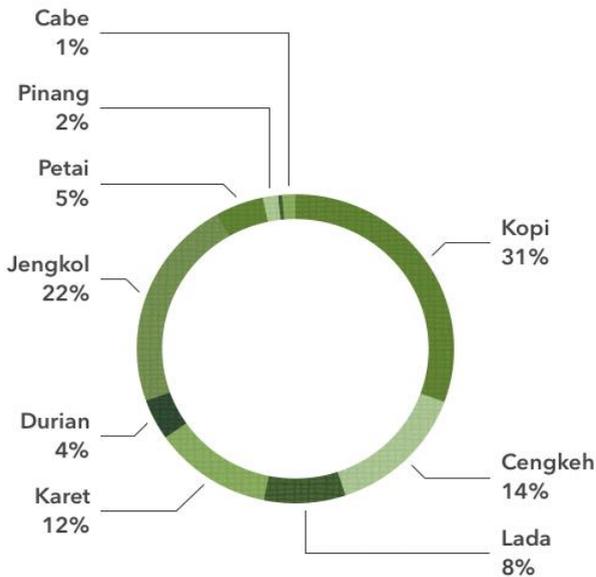
Akses jalan menuju Tanjung Aur termasuk sangat buruk. Meski begitu, ekonomi masyarakat tetap bisa bergeliat. Secara sosial-ekonomi, masyarakat Tanjung Aur memiliki relasi kuat dengan Linau dan desa-desa di kawasan pesisir. Satu kali dalam satu bulan (setiap tanggal 7), orang pesisir dan orang bukit akan berkumpul di satu pasar temporer bernama *pekan*. Pasar ini berada di dekat Balai Desa Tanjung Aur. Di sana orang-orang pesisir akan menjajakan beras, daging, ikan, dan sandang. Sementara orang bukit akan menjajakan kebutuhan rempah, kopi, karet, dan buah-buahan. Di sana, pertukaran komoditas dan ekonomi pun terjadi. Kedua entitas masyarakat saling membutuhkan. Sedangkan di luar agenda pasar bulanan, kebutuhan warga Tanjung Aur seperti bahan bakar minyak, gas elpiji dan perlengkapan sekolah didapatkan dari Linau.

Secara turun temurun, masyarakat Tanjung Aur telah mempraktikkan ekonomi yang berkelanjutan. Praktik seperti itu tidak saja mengejar kesejahteraan ekonomi, namun juga kelestarian ekologi. Perkebunan adalah identitas diri dan tulang punggung ekonomi Tanjung Aur. Dari kekayaan sumber daya alam itu pula manfaat ekonomi bagi masyarakat tercipta. Baik itu yang bisa dikalkulasi secara ekonomi atau pun yang tidak bisa. Tabel berikut ini akan menunjukkan manfaat ekonomi yang bisa dikalkulasi.

No	Komoditas	Jenis	Jumlah (Ton)	Nilai (Rupiah)
1	Kopi	Tanaman Pokok	590,325	12.987.150.000
2	Lada	Tanaman Pokok	160,625	7.549.375.000
3	Cengkeh	Tanaman Selang	27,587	2.069.025.000
4	Cabe	Tanaman Selang	26	1.040.000.000
5	Pinang	Tanaman Selang	29,79	1.042.650.000
6	Karet	Tanaman Selang	233,7	1.168.500.000
7	Alpukat	Tanaman Selang	8,03	240.900.000
8	Petai	Tanaman Selang	92,485	4.624.250.000
9	Durian	Tanaman Selang	82,232	2.466.960.000
10	Jengkol	Tanaman Selang	428,8	4.288.000.000
Total				33.717.610.000

Tabel 3.1 : Total pendapatan hasil panen musim 2018 berdasarkan harga terendah.

Sumber: Tim Ekonomi Nusantara WALHI.



Tabel 3.2 : Grafik persentase kontribusi jenis tanaman pada hasil pendapatan panen perkebunan Tanjung Aur pada musim 2018. Sumber: Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Tabel (3.1) di atas merupakan perhitungan hasil panen tanaman pokok dan tanaman selang. Semua dihitung dengan nilai terendah pada musim panen 2018. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan setiap keluarga pada musim panen 2018 adalah Rp9.825.000/bulan. Adapun jika menggunakan skema harga tertinggi, rata-rata pendapatan setiap keluarga menyentuh angka Rp20.725.000/bulan. Sebenarnya hasil panen pada musim berikutnya masih cukup bagus. Meskipun beberapa jenis tanaman mengalami penurunan. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa penghasilan warga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu di luar biaya tanam hingga panen. Sisa penghasilan pun bisa menjadi modal awal menanam pada musim berikutnya.

Sementara dari grafik (3.2) di atas, terlihat bahwa kopi menjadi penyumbang kontribusi paling banyak. Persentasenya menyentuh angka 31 persen. Di bawahnya ada jengkol dengan nilai 22 persen, cengkeh 14 persen, karet 12 persen, dan tanaman lainnya sejumlah 20 persen. Pada musim panen sebelumnya, harga cengkeh dan lada mengalami penurunan. Hal ini berimbas pada kontribusi kedua komoditas tersebut pada total pendapatan perkebunan Tanjung Aur. Sebaliknya, harga jengkol dan karet justru mengalami peningkatan. Kedua komoditas itu pun menyumbang kontribusi yang cukup signifikan. Dengan variatifnya jenis tanaman, alhasil warga pun dapat terhindar dari jebakan komoditas. Jika harga kopi jatuh, maka hasil kebun lain bisa menutup kerugiannya. Sebaliknya jika harga cengkeh dan lada jatuh, hasil panen karet dan jengkol bisa mendongkrak pendapatan.

Bagi warga Tanjung Aur, kesejahteraan tidak melulu soal seberapa banyak rupiah. Kelestarian alam juga layak disyukuri. Mulai dari sumber air yang melimpah, sinar matahari yang cukup untuk Pembangkit Tenaga Surya (PLTS), hingga kebutuhan pangan yang tidak perlu mereka beli. Karena dengan alam yang terjaga, maka sejahtera pula ekonomi warga.

10. Berjuang Bersama Demi Pengakuan Wilayah Kelola

“Tanah adalah kemerdekaan bagi petani. Tadinya merasa sudah merdeka, tapi faktanya hanya merdeka dari penjajah bangsa asing, sekarang dijajah bangsa sendiri.”¹¹³

Banyak anggapan bahwa zaman kolonialisme Belanda adalah masa paling mengerikan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya karena terjadinya kerja paksa. Selain itu, Belanda juga mengambil alih banyak wilayah perkebunan masyarakat.

¹¹³ Orasi Pak Yulisman pada acara “Temu Rakyat” WALHI Nasional pada tahun 2017.

Namun kondisi itu tidak serta merta hilang setelah era Kemerdekaan Indonesia. Lepas dari cengkraman kolonial, bangsa Indonesia justru terjerat rantai bangsa sendiri. Ironi tersebut menimpa Yulisman dan seluruh Warga Tanjung Aur. Setelah kemerdekaan, wilayah kelola dan ruang hidup mereka justru tidak diakui negara. Sejarah Marga Sambat sejak era Kerajaan Kaur dikaburkan. Pengabaian tersebut menimbulkan sederet persoalan agraria dan lingkungan hidup. Berlangsung sejak 1980an hingga saat ini.

Penghancuran lanskap ekologis Bukit Kumbang dimulai pada tahun 1980. Saat masuknya izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT. Bengkulu Raya Timber (BRT) dan PT. Bengkulu Tama Raya Timber (BTRT). Kedua perusahaan itu melakukan penebangan di wilayah administrasi Desa Tanjung Aur. Mulai dari area kilometer 11 hingga kilometer 21. Aktivitas perusahaan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sedemikian parah. Puncaknya, pada 1987 terjadi bencana banjir bandang yang menghancurkan desa-desa. Bencana itu sangat terkait dengan kerusakan wilayah hulu sungai akibat aktivitas perusahaan.

Masyarakat belajar dari pengalaman. Sejak saat itu mereka mulai bermukim di dataran yang lebih tinggi. Mereka membuat pondok dengan tetap memerhatikan kemiringan dan kondisi lingkungan. Kedua perusahaan pun berhenti beroperasi pada 1997. Perusahaan itu meninggalkan tumpukan kayu di kilometer 16. Kemudian pada 2002, pihak kepolisian, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melakukan operasi gabungan. Institusi pemerintah tersebut mensinyalir telah terjadinya penebangan liar di kawasan TNBBS. Namun sayangnya, perusahaan telah berhenti beroperasi. Upaya penegakan hukum pun terlambat. Sebab, kerusakan lingkungan telah berlangsung berpuluh tahun sebelumnya.

Setelah dua perusahaan kayu henggang, muncul persoalan baru terkait klaim wilayah Tanjung Aur. Kasus pertama adalah pemberian izin untuk Proyek Permukiman Angkatan Laut

(Prokimal). Proyek ini memakan lahan seluas 3200 hektar. Sekitar 1.595,62 hektar luas lahan tersebut berada di Tanjung Aur. Klaim wilayah oleh TNI Angkatan Laut didasarkan pada SK Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2002. Empat tahun pasca SK Bupati terbit, TNI AL tidak melakukan pembangunan apapun. Hanya ada papan nama proyek dan sebuah pondok jaga dengan kondisi rusak parah. Akan tetapi, pada 2007 rombongan TNI AL datang ke Tanjung Aur. Mereka hendak menegaskan klaimnya atas lahan proyek dengan sikap intimidatif.

Keluarnya izin Prokimal sama sekali tidak berdasarkan persetujuan warga Tanjung Aur. Izin justru keluar atas dasar persetujuan warga Way Hawang. Menurut Zaili, selama menjadi Kepala Desa, tidak pernah ada warga dan pemerintah desa yang terlibat dalam musyawarah terkait Prokimal. Sejak 2012 sampai 2018, pihak Prokimal masih saja mengganggu warga Desa Tanjung Aur. Pada awal Februari 2018, beberapa anggota TNI AL bahkan mendatangi rumah warga satu per satu. Mereka memaksa warga menandatangani surat pernyataan tentang pengakuan mengelola lahan Prokimal. Kesolidan warga memaksa oknum tersebut meninggalkan desa tanpa hasil.

Belum usai persoalan Prokimal, datang lagi persoalan selanjutnya. Wilayah Desa Tanjung Aur seluas 2.405,95 ha diklaim sebagai bagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Kumbang. Penunjukkan HPT Bukit Kumbang dilakukan tanpa melibatkan warga dan pemerintah Desa Tanjung Aur. Pemasangan tapal batas HPT Bukit Kumbang terjadi pada 2007. Dampaknya, proses pembangunan jalan dan fasilitas umum pun terhambat. Pembangunan hanya diperbolehkan untuk pasar dan sekolah. Dengan syarat, mengajukan izin pinjam pakai kawasan.

Menghadapi ancaman pencaplokan wilayah, warga pun membentuk Tim untuk Reforma Agraria (TuRA). TuRA merupakan wadah perjuangan warga untuk mendapatkan

pengakuan wilayah kelola. Selain itu, TuRa juga menjadi alat warga untuk mengorganisir diri. Tak ayal, warga pun secara partisipatif melakukan pemetaan wilayah permukiman, perkebunan, dan administrasi desa. Pada 2018, Tim TuRA bahkan sempat mengajukan dokumen Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada beberapa instansi negara. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perjuangan tersebut mendapatkan hasil. Meskipun hanya 40 hektar atau baru 0,4% dari luas TORA yang diajukan. Keberhasilan tersebut memberi sedikit titik cerah perjuangan.

Selain melalui skema TORA, warga juga mengajukan izin kelola lahan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Bagi warga, mendapatkan legalitas dan akses atas wilayah kelola adalah satu keharusan. Sebab, dari situ kemudian jalan mempertahankan kelestarian alam bermula. Dan dari situ pula, kesejahteraan hidup warga Tanjung Aur tercipta. Selain itu, dengan adanya legalitas atas wilayah kelola, maka ancaman-ancaman lain bisa dihadang. Seperti ancaman tambang biji besi PT. Bumi Resources atau perkebunan sawit PT. Ciptamas Bumi Selaras.

II. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bupati dan DPRD Kaur harus memberikan pengakuan atas peta wilayah administratif Desa Tanjung Aur yang tapal batas wilayahnya telah disepakati dengan desa-desa sekitarnya;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menerbitkan izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) agar masyarakat mendapat kepastian akses dan perlindungan terhadap wilayah kelola; dan

3. Bupati Kaur Harus mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 297 tahun 1999 tentang Penetapan Lokasi atas tanah untuk pembangunan Prokimal Bengkulu seluas 3200 hektar yang terletak di Desa Way Hawang dan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketiga rekomendasi tersebut hanya akan terwujud dengan syarat; adanya kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya.

B. Sinar Mulya

1. Air Bacang: Tapak Sejarah Desa Sinar Mulya

“*Brem...brem...brem....*” Deru suara mesin motor semi trail telah terdengar. Pak Suwondo pun kembali mengingatkan.¹¹⁴ Barang yang akan dibawa ke Dusun Air Bacang harus sudah masuk tas. Karena tas itu akan diikat di atas bangku depan motor. Tujuannya agar seimbang dan meringankan pengemudi ketika melalui jalan curam menuju dusun. Dari Tanjung Aur, kami pun memulai perjalanan menuju Air Bacang. Sebuah dusun di seberang bukit yang menjadi cikal bakal berdirinya Desa Sinar Mulya. Desa ini masuk dalam administrasi Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sepanjang perjalanan, kami melewati jalan tanah sempit nan curam yang berbatasan dengan TNBBS. Setelah berkendara sepanjang lima kilometer, kami pun sampai di perbatasan Tanjung Aur dan Sinar Mulya. Penanda batas kedua desa adalah sungai.

Dusun Air Bacang mulai dirintis sejak tahun 1984. Penduduk awalnya berjumlah 20 Kepala Keluarga (KK). Beberapa tahun kemudian, terjadi penambahan penduduk sebanyak 12 KK. Salah satu keluarga yang pertama bermukim adalah keluarga Mahir.¹¹⁵ Bersama istrinya, Mahir membangun rumah kecil dekat kebun yang mereka kelola. Keluarga lain juga mendirikan rumah-rumah di dekat kebun mereka. Permukiman tersebut pun berkembang dan menjadi kampung bernama Air Bacang. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Air Bacang pun makin bertambah. Banyak pendatang yang kemudian menetap di Air Bacang. Mereka berasal dari beberapa daerah. Namun sebagian besarnya berasal dari Lampung. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pun berjalan baik. Mereka memanfaatkan betul lanskap ekologis Bukit Kumbang. Keresahan warga baru

¹¹⁴ Pak Suwondo merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 10, Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

¹¹⁵ Mahir adalah seorang tokoh masyarakat di Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

muncul pada tahun 1990. Terutama saat terjadinya penetapan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk wilayah Bukit Kumbang.

Air Bacang termasuk perkampungan baru. Pendiriannya terjadi pada 1984. Tak ayal, Dusun Air Bacang sempat menginduk ke desa lain yakni Desa Tanjung Baru. Secara administratif, Desa Tanjung Baru termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Baru pada 2005 Desa Air Bacang mulai menjadi desa definitif sendiri. Wilayahnya masuk ke dalam administrasi Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Perubahan status dari dusun menjadi desa dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemekaran wilayah.¹¹⁶ Pada awal pemekaran, Desa Air Bacang dipimpin oleh seorang pejabat sementara (PJs). Dan berlaku hingga tahun 2007.

Masa kepemimpinan pejabat sementara berlangsung dua tahun. Setelah itu, Desa Air Bacang dipimpin oleh seorang Kepala Desa definitif hasil pemilihan langsung. Dan eksistensi Air Bacang sebagai desa definitif hanya berlangsung hingga 2012. Sebab, saat itu wilayah Desa Air Bacang seluas 760,12 ha dibebaskan dari wilayah HPT Bukit Kumbang. Pembebasan itu didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 643/MENHUT-II/2011. Namun pada tahun yang sama Bupati Kabupaten Kaur, Hermen Malik, menghapus status Desa Air Bacang. Wilayah Air Bacang justru digabungkan dengan sebagian wilayah Desa Arga Mulya. Hasil penggabungan itu adalah desa baru bernama Sinar Mulya.¹¹⁷

Desa Tanjung Aur dan Desa Sinar Mulya menjadi penyangga ekosistem Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kampung yang berbatasan langsung dengan TNBBS adalah Air Bacang. Desa Sinar Mulya adalah desa terluas di Kecamatan Maje dengan wilayah seluas 9.073 ha.¹¹⁸ Desa ini berada pada

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur.

¹¹⁷ Dokumen WALHI Bengkulu tahun 2017. Pernah dipublikasikan di website: walhibengkulu.org

¹¹⁸ Dokumen BPS Kabupaten Kaur, "Kecamatan Maje dalam Angka," 2019.

ketinggian 200-700 meter dari permukaan laut (mdpl). Dan dusun tertinggi di Desa Sinar Mulya adalah Air Bacang. Lokasinya berada pada ketinggian 500-700 mdpl.

Permukiman masyarakat Air Bacang berbeda dari permukiman masyarakat Desa Sinar Mulya pada umumnya. Sebagian besar rumahnya terbuat dari kayu. Lokasinya pun sangat dekat dengan lahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa antara rumah dan lahan merupakan satu kesatuan. Pintu rumah warga Air Bacang tidak pernah dikunci. Mereka sangat percaya jika kampung Air Bacang sangat aman. Selain lingkungan yang aman, Dusun Air Bacang juga diberkahi tanah subur, sungai bersih, serta hutan alam yang rimbun.

Bagi warga Air Bacang, menjaga kelestarian sumber kehidupan memiliki dua manfaat. *Pertama*, sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. *Kedua*, sebagai jalan menyelamatkan diri. Karena, kekayaan alam yang tersedia merupakan sumber penghidupan warga. Tidak heran jika mereka memaknai kerusakan ekosistem adalah juga ancaman bagi 1.338 jiwa penduduknya. Pasalnya, seperti yang dituturkan Asiah

“Kita selama ini aman saja kalau hujan deras. Berbeda dengan warga dusun lain. Mereka itu kalau hujan deras sebagian rumahnya yang di pinggir sungai bisa saja longsor. Makanya harus dijaga hutan ini.”¹¹⁹

Warga menyadari betul jika terjadi bencana ekologis, maka mereka pula yang akan menanggung beban. Baik itu berupa kehilangan kebun atau pun tempat tinggal. Apalagi kebun-kebun itu sudah warga kelola selama lebih dari 35 tahun. Air Bacang memang kampung yang dibentuk oleh pendatang. Akan tetapi, mereka semua telah memantapkan diri untuk hidup dan mati di kampung ini. Mereka semua bekerja keras dan berkomitmen menjaga kelestarian alam. Alhasil mereka

¹¹⁹ Asiah merupakan penduduk Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

pun mampu hidup dan menghidupi keluarga dari kekayaan alam. Menurut salah satu warga, Suwondo, Air Bacang sudah seperti kampung halaman. Di sini warga menetap dan menggantungkan harapan dari hasil kebun.

2. Kampung di Ujung Batas Hutan Bukit Barisan Selatan

Hembusan angin gunung, hawa dingin, dan nyanyian burung menghiasi suasana pagi di Air Bacang. Suara gemericik air dari sungai di belakang perkampungan pun membawa suasana damai—satu hal yang tidak terdapat di perkotaan. Dari sungai-sungai ini pula warga memenuhi kebutuhan air untuk mandi dan memasak. Pagi hari, asap mengepul nyaris dari dapur setiap rumah. Sebuah pertanda bahwa ritual sarapan akan segera tiba. Keindahan bentangan Bukit Barisan Selatan terlihat jelas dari belakang rumah keluarga Pak Mahir. Ketika memutar pandangan ke sisi lain, terlihat pula beberapa rumah dan kebun warga. Di rumah tempat kami menginap, Ibu Asiah sedang memasak makanan untuk sarapan dan makan siang. Sementara Pak Wondo, terlihat sedang sibuk memeriksa hasil stek tanaman kopi. Kebun kopi keluarga Pak Wondo berada persis di depan rumah mereka.



Gambar 3. 2: Bentang Alam Bukit Kumbang dilihat dari Air Bacang. Sumber: Dokumentasi Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Berdasarkan pembagian wilayahnya, Desa Sinar Mulya terdiri dari Hutan Negara, Hutan Produksi Terbatas, dan “klaim” Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Negara yang dimaksud adalah wilayah TNBBS. Sementara Hutan Produksi Terbatas berada di Bukit Kumbang. Kampung Pak Wondo, Dusun Air Bacang, berbatasan langsung dengan punggungan TNBBS dan HPT Bukit Kumbang. Batas wilayah kelola rakyat dengan TNBBS berjarak sekitar 1-2 kilometer. Patok beton berwarna merah di puncak Bukit Kumbang adalah penanda batasnya.

Lanskap ekologis Bukit Kumbang di wilayah Air Bacang relatif masih terjaga kondisinya. Tanaman dengan berbagai jenis seperti akasia, sengon, pasak bumi, sungkai, medang setanan, dan medang gadis tumbuh dengan subur. Selain tanaman kayu, tumbuh juga berbagai jenis bambu dan rotan di pinggiran sungai dan kebun warga. Terjaganya ekosistem hutan dataran tinggi ini bukan hanya karena faktor alam. Namun terdapat peran warga Air Bacang. Mereka menyadari betul pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hutan. Seperti kata seorang warga,

“TNBBS kita ini masih terjaga, tidak ada masyarakat yang mengganggunya. Ada warga sesekali mendekat ke TNBBS tapi hanya ke sungai yang di pinggir saja untuk memancing ikan. Selebihnya tidak ada”.¹²⁰

Menjelang sore hari, salah satu penghuni TNBBS lazim terdengar di Air Bacang. Suaranya cukup berisik dan warga menyebutnya dengan sebutan Siamang.¹²¹ Wilayah jelajah Siamang dengan mudah dapat dipetakan. Mulai dari area TNBBS hingga perbatasan dengan kebun warga. Pak Wondo menjelaskan,

“Di sini banyak siamang. Sore begini bunyi, pagi pasti bunyi. Hutan di sini dihuni Siamang dan jenis kera lainnya. Kalau

¹²⁰ Wawancara dengan Pak Wondo.

¹²¹ Salah satu spesies primata.

yang ukuran kecil itu orang sini memanggilnya Wowo. Selain itu ada juga Beruk.”

Baik Siamang, Wowo, maupun Beruk, sangat menyukai buah kopi. Satwa hutan itu pun kerap mengambilnya. Apalagi jika buah kopi sudah berwarna merah. Maka satwa itu pasti akan segera datang, mengambilnya satu rangkai, mengunyahnya, lalu membuangnya. Kemudian mengambil lagi dan langsung membuangnya lagi. Mereka melakukannya berulang-ulang, sebatas untuk bersenang-senang. Masyarakat mengenali betul pertanda dan kebiasaan kawan hewani ini, terutama dari suara khasnya.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dihuni banyak sekali jenis binatang. Selain kawan primata seperti Siamang, TNBBS juga dihuni fauna seperti landak, ular sanca, kambing hutan, babi hutan, dan harimau Sumatera. Di Desa Tanjung Aur, satwa-satwa ini juga eksis. Warga masih sangat sering menjumpai keberadaannya. Termasuk satwa yang sangat tersohor di seluruh kawasan perbukitan Sumatera, harimau. Satwa ini biasanya berkeliling di pinggiran hutan, sungai, dan perbatasan kebun. Terutama selepas hujan turun. Warga Air Bacang pun kerap menemukan jejak harimau, khususnya di area jelajahnya. Indera penciuman harimau pun terkenal sangat tinggi. Sehingga ia pun dapat mengetahui keberadaan manusia. Ketika ada orang yang berjalan mendekati wilayahnya, maka harimau akan sigap menghindar. Masyarakat sekitar tidak pernah mengusik keberadaan harimau Sumatera. Warga memahami bahwa TNBBS memang tempat harimau hidup.

Masyarakat di wilayah perbukitan Sumatera, terutama Suku Kaur, meyakini bahwa harimau bukan hewan biasa. Mereka meyakini jika harimau Sumatera memiliki kekuatan mistis. Keyakinan seperti itu berlaku juga di lingkungan masyarakat Air Bacang. Kemunculan harimau diartikan sebagai pertanda buruk atau sebuah peringatan khusus. Sebagian masyarakat lain memaknai kemunculan harimau di perkampungan sebagai tanda menyempitnya ruang hidup mereka. Karena itu, warga

Air Bacang memiliki prinsip untuk tidak mengganggu ruang hidup harimau. Sebab, hal itu bisa mendorong terganggunya ruang hidup warga. Dengan begitu, kunci menjaga keseimbangan alam adalah saling menghargai sesama makhluk hidup.

Selain kekayaan fauna, lanskap ekologis Bukit Kumbang juga memiliki keanekaragaman flora. Dua jenis flora yang paling terkenal adalah anggrek tanah dan bunga bangkai. Tidak sesulit bunga bangkai, anggrek tanah masih mudah ditemukan di beberapa tebing. Bahkan ada satu tebing yang memang terkenal menjadi lokasi tumbuh anggrek tanah. Warga menyebut tebing itu dengan nama tebing anjing.

Salah seorang warga, Ibu Saruwiah, bercerita bahwa sebelum tahun 2005, tebing anjing adalah satu-satunya jalur untuk menuju ibu kota kecamatan. Akses keluar masuk dusun hanya melalui jalan tersebut. Kontur tebing anjing berbeda dari tebing lainnya yang curam, bergunduk, dan berkelok. Tebing ini justru lurus menanjak jika dilalui dari arah Desa Tanjung Aur. Sementara jika dilalui dari Dusun Air Bacang, maka jalurnya lurus menurun. Pak Suwondo menambahkan,

“Dulu belum ada motor, baru masuk tahun 2006-an. Jadi kalau mau giling padi harus jalan kaki. Mending kalau datar, ini lurus terus. Apalagi mikul beras habis digiling itu kan panas, rasanya tidak akan sampai.”¹²²

Selain keanekaragaman hayati, lanskap ekologis Bukit Kumbang juga menyajikan keindahan alam. Salah satunya dalam bentuk air terjun. Jumlah air terjun di Air Bacang disyalir lebih banyak dibanding di Tanjung Aur. Sayangnya belum semua air terjun teridentifikasi. Terutama karena sulitnya medan alam. Dari sekian air terjun yang teridentifikasi, satu-satunya air terjun yang mudah diakses manusia adalah air terjun Mayan. Ketinggiannya berkisar 50 meter.

¹²² Wawancara dengan Pak Wondo.

Selain air terjun, TNBBS dan Bukit Kumbang juga memiliki banyak mata air. Hampir seluruh mata air telah dimanfaatkan untuk mencukupi kehidupan masyarakat. Seperti DAS Kolek (DAS lokal), DAS Manula (di TNBBS), DAS Nasal (DAS Nasional), DAS Sawang, dan DAS Sambat (DAS Lokal di HPT Bukit Kumbang).¹²³ Kebutuhan air warga Air Bacang untuk minum, mandi, dan mencuci, disediakan oleh DAS Sawang. Dan itu gratis. Bahkan bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Sebab, kualitas dan kejernihan air memang terjaga. Kandungan mineralnya pun termasuk tinggi. Karunia alam ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga oleh binatang. Sebab, dengan kejernihan, kesegaran, dan kebersihan air sungai, maka itu menjadi ruang hidup yang nyaman bagi aneka jenis ikan, terutama ikan semah.



Gambar 3. 3: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro milik warga Air Bacang.
Sumber: Dokumentasi Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Warga juga memanfaatkan aliran sungai untuk kebutuhan energi listrik. Bentuknya adalah Pembangkit Listrik Tenaga

¹²³ RPIJM Bidang Cipta Karya Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kaur 2018–2022.

Mikrohidro (PLTMH).¹²⁴ Daya yang dihasilkan PLTMH bisa menyentuh angka 2 R atau 900 watt. Dengan daya sebesar itu, maka listrik bisa dialirkan untuk 10 hingga 20 rumah. Biasanya 1 turbin PLTMH bisa mengalirkan listrik untuk 2 rumah. Pemanfaatan sumber daya alam ini menjadi bukti kemandirian warga. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan energi listrik. Adanya PLTMH juga membuat warga bergotong-royong. Mereka sama-sama bergerak dan bergantian menjaga sumber air agar tetap cukup memutar turbin. Terlebih saat musim kemarau.

Inisiatif membuat PLTMH muncul dari seorang warga bernama Pak Jumahir. Pada saat ia berkunjung ke Lampung, ia melihat temannya membuat penerangan dari bahan sederhana. Dengan pengetahuan tersebut, ia pun mencoba menerapkannya di Air Bacang. Pak Mahir menceritakan,

“Dulu melihat teman, terus saya coba di sini. Awalnya cuma pakai magnet, diputar di air, tidak diukur berapa keluar setrumnya. Jadi kapan air sungai besar bisa gosong semua karena sistem pengaturannya belum stabil. Tapi gak apa buat penerangan sementara saat itu.”¹²⁵

Keberadaan PLTMH adalah solusi kebutuhan listrik warga. Apalagi hingga saat ini, warga Air Bacang sama sekali tidak mendapat pasokan listrik dari negara.

Setelah Pak Mahir, satu persatu warga lain pun mulai ikut menggunakan PLTMH. Selain untuk penggunaan pribadi, beberapa warga menginisiasi PLTMH yang dikelola secara komunal. Di kawasan Bukit Kumbang, terdapat 9 titik wilayah yang listriknya bersumber dari PLTMH. Mereka menerapkan sistem iuran sebesar Rp15.000 per lampu/bulan. Iuran bersama dipergunakan untuk biaya perawatan dan perbaikan rutin turbin. Dengan kondisi dusun yang sangat jauh dari pusat kota,

¹²⁴ Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMH). Pembangkit listrik jenis ini memanfaatkan tenaga air yang disediakan oleh sungai.

¹²⁵ Wawancara dengan Pak Jumahir.

maka warga perlu menyimpan stok suku cadang seperti karburator, ring, dan paralon. Suku cadang turbin yang paling sering diganti adalah *ring collector*. Operasional PLTMH dikerjakan secara komunal. Sehingga mendorong kerjasama antar warga untuk menjaga sumber air dan merawat turbin.

Pemerintah Desa Sinar Mulya pun mendukung inisiatif kemandirian air warga Air Bacang. Pihak desa bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.500.000 untuk pembelian setiap unit turbin dan suku cadang. Dengan adanya dukungan tersebut, maka proses pembaharuan teknologi PLTMH pun bisa dilakukan. Menurut Pak Mahir, sebelumnya turbin dibuat dengan ala kadarnya. Sehingga memiliki kelemahan seperti rawan macet dan tidak stabilnya listrik yang dihasilkan. Saat ini hampir semua warga Desa Sinar Mulya sudah bisa menikmati listrik PLTMH secara merata. Karena PLTMH sangat bergantung pada debit air sungai, maka warga pun berkewajiban menjaga sumber air tersebut.

3. Bukit Kumbang Sumber Kehidupan Orang Air Bacang

Warga Air Bacang memiliki hubungan erat dengan ekosistem Bukit Kumbang. Salah satu bentuknya adalah dalam perkara tanah. Di atas tanah tersebut tidak hanya terhampar kerimbunan hutan Bukit Kumbang. Akan tetapi juga permukiman dan perkebunan warga. Kesuburan tanah dimanfaatkan seluruh warga Air Bacang untuk menanam kopi, lada hitam, cengkeh, pala, kenikir, cabe, terong, karet, pinang, sayuran, dan tanaman palawija. Masyarakat menyebut pola tanam seperti ini tumpang sari. Salah seorang warga menjelaskan,

“Saking suburinya ditanam apa saja hidup, asal kebunnya dipagar. Soalnya di sini banyak hewan macam babi dan

beruk. Ya namanya lahan dekat kawasan hutan, hewan-hewan itu ya di sini habitatnya.”¹²⁶

Selain menggantungkan hidup dari berkebun, warga juga mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK). Seperti, misalnya, *uwi*.¹²⁷ Bagian umbutnya biasa dijadikan bahan baku pembuatan makanan. Selain untuk makanan, *uwi* juga dimanfaatkan untuk *bubuh*¹²⁸ dan *kinjar*¹²⁹. Saat senggang, warga juga kerap mencari getah damar hutan, memanen madu, dan mengambil jamur dari pohon. Sementara pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya dilakukan saat perbaikan rumah. Periodenya sekitar 10-15 tahun sekali. Adapun kayu bakar untuk memasak, warga dapatkan dari batang kopi, durian, dan karet. Terutama yang sudah tidak produktif lagi.

Warga Air bacang hanya menebang batang pohon yang memang telah rapuh. Seringkali menggunakan alat bernama *chainsaw*.¹³⁰ Warga memiliki kesepakatan untuk membuat larangan mengambil kayu di area Hutan Lindung TNBBS. Hal ini dilakukan karena warga sadar betul; ketika pohon konservasi semakin habis ditebangi, maka itu berpotensi menimbulkan bencana longsor. Apalagi pada 1987 desa tetangga mereka hancur dihantam banjir. Hal itu diakibatkan oleh aktivitas penebangan yang dilakukan PT. Bengkulu Raya Timber di Bukit Kumbang. Aktivitas perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem yang sedemikian parah. Wilayah yang sudah ditebangi oleh perusahaan juga tidak diperbaiki lagi. Bahkan pada saat perusahaan berhenti

¹²⁶ Wawancara dengan Bu Asiah.

¹²⁷ Istilah masyarakat untuk menyebut rotan.

¹²⁸ Alat menangkap ikan yang terbuat dari anyaman rotan. Bentuknya seperti tabung.

¹²⁹ Keranjang yang terbuat dari anyaman rotan.

¹³⁰ Mesin pemotong kayu.

beroperasi tahun 1997, ditemukan beberapa kayu tebangan di dekat perbatasan TNBBS.¹³¹

Pemulihan sisa kerusakan yang ditinggalkan perusahaan, justru dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman kembali. Terutama tanaman kayu. Hal ini semakin menegaskan kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam. Seorang warga menegaskan,

“Kita ini seperti rangkaian kabel listrik, kalau ada yang putus kabelnya maka tidak bisa hidup, kalau konslet ya kebakaran. Begitu juga hutan. Kita dan hutan itu terhubung. Satu hamparan alamnya. Kalau pohon di hutan habis ditebangi, kalo hujan gak ada akar yang nahan airnya. Nanti imbasnya yang di sini tanahnya tergerus jadi longsoran, yang Sinar Mulya bagian bawah kena banjir”¹³²

Apa yang diungkapkan Pak Suwondo mewakili seluruh pemikiran warga Air Bacang. Relasi antara manusia (warga kampung) dengan hutan (alam) terjalin begitu erat. Warga pun belajar dari pengalaman musibah banjir bandang di desa tetangga. Alhasil warga pun terus berusaha menjaga sumber daya alam yang tersedia di wilayah mereka. Longsor dalam skala kecil memang masih sering terjadi. Namun itu karena topografi Air Bacang yang memang curam. Jembatan penghubung ke Tanjung Aur bahkan sempat putus karena longsor. Karena itu warga hanya memanfaatkan hutan seperlunya. Larangan pembukaan lahan baru pun dibuat. “Kita di sini memanfaatkan hutan seperlunya. Tidak boleh buka lahan baru, yang ada saja dikelola dengan baik. Kita mau selamat makanya alam ini dijaga” tutur Pak Suwondo.

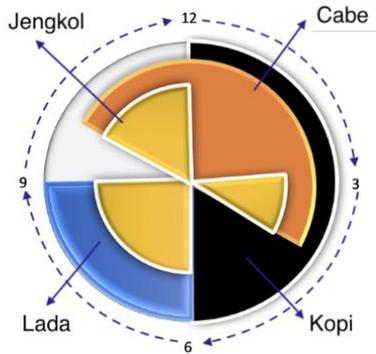
Lahan perkebunan di Air Bacang berasal dari pembukaan semak belukar. Beberapa pohon kecil ditebangi sesuai luasan lahan. Pemothon dilakukan dengan kapak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Semak belukar dibakar

¹³¹ Dokumen WALHI Bengkulu tahun 2018. Tidak dipublikasikan.

¹³² Wawancara dengan Pak Suwondo.

dengan teknik lokal bernama *manduak*. Pembakaran dilakukan secara kolektif. Terutama agar dapat saling menjaga kobaran api tidak meluas. Setelah proses pembakaran selesai, maka lahan siap ditanami. Hal paling utama saat membuka lahan adalah memperhatikan humus tanah. Kalau humusnya tidak ada, air bawah tanah semakin habis. Meskipun sudah menjadi lahan kebun, penanaman pohon pelindung harus dilakukan agar akarnya menyerap air. Salah satu tanaman pelindung yang sering ditanam masyarakat adalah dadap. Selain memiliki fungsi perlindungan, pohon ini juga dapat jadi media rambat *sahang* (ladang).

Sebagian besar kebun warga Air Bacang lebih dari satu petak. Ada yang di sekitar rumah dan ada pula yang berada di hamparan bukit lain. Transportasi utama warga ke kebun adalah motor semi trail yang dimodifikasi sendiri. Terutama agar dapat melintasi jalanan yang sempit dan terjal. Tidak ada mobil yang bisa sampai Air Bacang. Lebar jalan hanya cukup untuk motor. Pada musim penghujan, kondisi akan makin parah karena lembeknya tanah. Alhasil laju kendaraan pun akan terhambat. Oleh sebab itu, motor biasa tidak akan mampu melewati jalan di Air Bacang. Bahkan dengan motor modifikasi pun, jika digunakan berboncengan, sesekali penumpangnya pasti harus turun. Apalagi jika menemui medan menanjak. Namun di balik kengerian jalan menuju Air Bacang, tersimpan keindahan hamparan pegunungan yang indah.



Gambar 3. 4: Kalender musim jenis tanaman utama di Air Bacang, Desa Sinar Mulya. Sumber: Tim Ekonomi Nusantara Walhi.

Dalam pengelolaan kebun, terdapat kolaborasi kerja antara perempuan dan laki-laki. Seringkali kegiatan menanam, merawat, dan memanen dilakukan bersama oleh sepasang suami-istri. Pada proses pengangkutan hasil panen saja yang dilakukan oleh laki-laki. Terutama karena beratnya karung dan sulitnya medan jalan yang ditempuh. Dalam kehidupan sosial-ekonomi sehari-hari, perempuan di Air Bacang termasuk sangat terlibat aktif.

Kegiatan berkebun warga Air Bacang menyesuaikan dengan kalender musim. Kalender tersebut telah digunakan secara turun temurun. Grafik di atas merupakan kalender musim untuk empat jenis hasil utama kebun yakni jengkol, cabe, kopi, dan lada. Musim kopi dimulai pada awal Januari dan berakhir pada bulan Juni. Musim lada berlangsung dari bulan Juni hingga September. Musim cabe dimulai dari masa tanam pada bulan Oktober dan masa panen sejak Februari hingga April. Sementara tanaman selang seperti jengkol dalam setahun memiliki tiga kali masa panen yakni mulai November-Desember, April, dan Juli-September.

Produk perkebunan yang paling terkenal dari Air Bacang adalah kopi petik merah. Kopi ini hanya dipetik ketika memiliki biji merah. Inisiatif kopi petik merah berasal dari interaksi

warga dengan petani kopi di wilayah lain. Harga kopi petik merah terbilang tinggi. Bahkan bisa dua kali lipat dari kopi petik campur. Selain itu, inisiatif kopi petik merah juga dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan. Terutama saat tidak musim panen raya kopi. Setiap hari warga ke kebun dan mengumpulkan kopi petik merah sedikit demi sedikit. Ketika sudah terkumpul lebih dari 10 kilogram, kopi itu bisa langsung dijual ke konsumen. Dan tengkulak, tidak mengambil hasil kopi petik merah. Apalagi dengan jumlah yang terlalu kecil.



Gambar 3.5: Proses pengolahan biji kopi di Air Bacang. Sumber: WALHI Bengkulu.

Pada awal tahun 2020, warga Air Bacang sedang bersiap panen kopi dan lada. Dalam kalender musim, bulan Januari hingga Maret memang jadwal panen rutin masyarakat Bukit Kumbang. Panen kopi dan lada juga menjadi penanda masuknya musim penghujan. Masa panen raya sangat menguras energi petani. Karena itu mereka melibatkan pekerja tambahan dari desa tetangga. Para pekerja diperlakukan secara layak dengan upah dan konsumsi yang cukup. Berkarung-karung kopi dan lada diangkut ke rumah pemilik kebun menggunakan motor. Setiap motor bisa mengangkut dua buah karung. Rata-rata dengan berat total 200 kilogram kopi atau lada.

Setiap keluarga petani di Air Bacang rata-rata memiliki mesin penggiling kopi sendiri. Kondisi ini sangat berbeda

dengan petani di Tanjung Aur. Setelah panen, kopi perlu dijemur selama beberapa hari. Biasanya langsung di halaman rumah mereka masing-masing. Setelah cukup kering, biji kopi pun digiling untuk memisahkan kulit dari biji kopi. Warga menjual kopi ke pedagang dalam dua bentuk: biji kopi mentah (*green bean*) dan kopi matang (hasil *roasting*). Proses *roasting* dilakukan dengan cara tradisional yaitu dibakar di sebuah tungku. Pada umumnya, panen kopi dan lada tidak langsung dijual. Akan tetapi perlu disimpan terlebih dahulu di gudang. Biasanya berada di lantai 2 rumah. Penjualan baru akan dilakukan ketika sudah dalam jumlah yang besar.

Musim tanam berlangsung bersamaan dengan musim penghujan. Kondisi tanah saat musim penghujan cenderung dingin. Karena itu sangat cocok untuk proses tanam. Lahan yang baru dibersihkan, biasanya ditanami padi darat terlebih dahulu. Lama masa tanam padi darat hingga masa panen adalah 7 bulan. Hal itu membuat waktu tanam kopi dilakukan 6 bulan hingga 1 tahun setelahnya. Penanaman kopi yang terlalu cepat justru akan mengalami gangguan pertumbuhan buah. Terutama saat berusia 2 tahun. Dalam satu hektar, terdapat 2.000 batang tanaman kopi. Penanaman kopi dilakukan dengan jarak antara 2,5 x 2,5 meter. Satu batang tanaman kopi bisa menghasilkan 1 kilogram biji kopi. Rata-rata luas kebun kopi warga Air Bacang adalah 2 hektar. Dengan luas lahan tersebut, seorang warga bisa menghasilkan panen sebesar 4 ton. Itu baru dari kopi. Belum dari hasil panen tanaman lain seperti lada atau tanaman selang lainnya.

Kebun kopi membutuhkan perawatan intensif. Terutama agar hasilnya stabil dari masa panen awal (kopi muda) hingga panen akhir (pohon tua). Setiap 5 tahun sekali, tanaman kopi juga harus dilakukan peremajaan. Caranya dengan memotong tunas-tunas kecil yang tumbuh seperti di batang kopi. Tumbuhnya tunas sekilas menunjukkan suburnya kopi. Akan tetapi tunas itu justru menghambat kopi untuk berbuah. Cara mengukur tinggi tunas yang layak potong adalah dengan menggunakan jengkal tangan. Jika tunasnya sudah mencapai 1

jengkal, maka tunas di batang kopi sudah bisa dipotong. Pemotongan tunas bertujuan menumbuhkan tunas inti dan menghindari matinya batang kopi.

Produktivitas panen tanaman kopi terbagi menjadi dua tahap. *Pertama*, disebut dengan *buah pangkal*. Panen kopi pada tahap ini masih belum produktif. *Kedua*, disebut dengan *buah agung*. Tahap panen ini adalah saat usia tanaman lebih dari 3 tahun. Hasilnya pun lebih produktif. Tanaman kopi jika sudah memasuki panen kedua dan ketiga hasilnya pasti berlimpah. Karena telah disesuaikan dengan jumlah ranting yang ada dalam 1 batang kopi. Warga Air Bacang mempelajari budidaya tanaman kopi secara otodidak. Pengalaman berkebun di daerah sebelumnya, serta interaksi dengan petani kopi lain, membuat mereka semakin ahli. Dalam suatu kesempatan, Pak Suwondo mengajak kami melihat secara jelas tanaman kopi. Kami diminta mengamati mulai dari batang, daun, ranting, hingga buah. Dia pun memberikan penjelasan detail bahwa

“Tanaman kopi normal memiliki 12 ranting dan buahnya akan penuh kalau musim bagus. Setiap ranting rata-rata memiliki 4 baris. Kopi Air Bacang rata-rata memiliki 18 gugusan untuk ranting panjang, kalau rantingnya pendek jumlahnya sekitar 12 gugusan. Gugusan itu cincinnya. Dari pangkal sini. Tapi tidak sekaligus mengambilnya, bisa 3–4 kali menunggu lagi, ambil lagi tumbuh lagi, sampai tua lagi. Disini bisa panjang, dalam 1 gugus ini tidak langsung satu keluar satu bulan bersamaan. Kadang 1 bulan lagi keluar tidak semua diambil, yang tua-tua saja. Makanya panjang musim panennya, 1 tahun itu 1 musim. Kalau panen kita jadikan selama 6 bulan itu panen terus. Per bulan ngambil sampai 6 kali. Karena cara perkembangan dan pertumbuhannya tidak serentak. Bulan berikutnya bunga lagi. Makanya banyak yang heran dengan teknik berkebun orang Air Bacang.”

Selain kopi, lada hitam atau biasa disebut *sahang* juga menjadi produk pertanian unggulan Air Bacang. Lada biasanya

ditanam dekat pohon dadap yang berfungsi sebagai rambatan. Lada hitam Air Bacang dianggap berkualitas sangat baik oleh konsumen di Lampung. Pasar utama komoditas kopi, lada, dan hasil panen lainnya di Bukit Kumbang memang Provinsi Lampung. Sebab, secara lokasi, Kabupaten Kaur memang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sehingga memudahkan proses distribusi hasil perkebunan ke sana.

Proses memanen lada berbeda dengan kopi. Lada dipetik dengan cara ditarik serentak dari tangkainya. Sementara kopi dipetik satu per satu. Memanen lada juga memerlukan tangga, karena pohon dadap tempat lada merambat memang cukup tinggi. Lada yang dipanen dibiarkan sampai busuk terlebih dahulu. Kemudian dipisahkan lagi dengan mesin perontok hingga kulit ari terkelupas dan isi di dalamnya terpisah. Setelah itu lada dijemur untuk mengurangi kadar air. Lada yang telah hilang kulit arinya akan berwarna merah saat kondisinya kering. Sejak berabad lalu, eksistensi lada memang tidak pernah hilang. Lada tetap jadi salah satu komoditas utama perdagangan.



Gambar 3. 6: Lada hitam hasil panen kebun Air Bacang. Sumber: WALHI Bengkulu.

Hasil panen Air Bacang dijual oleh petani kepada *toke'* atau tengkulak. Biasanya langsung pada tengkulak yang memang sudah jadi langganan. Relasi antara petani dengan tengkulak di Air Bacang hampir mirip dengan yang terjadi di Tanjung Aur.

Seluruh kebutuhan selama satu tahun mulai dari kebutuhan pokok hingga sarapan pertanian disediakan oleh tengkulak. Ibaratnya mereka menjadi investor dari kegiatan perkebunan warga. Ketergantungan dengan tengkulak memaksa sebagian petani menjual hasil panen ke mereka. Meskipun tidak ada kesepakatan formal, tapi bagi warga kampung, “balas budi” adalah kewajiban.

Penjualan hasil panen kepada tengkulak membawa konsekuensi pada rendahnya harga jual. Sebagai contoh, jika harga kopi adalah Rp12.000 per kilogram, maka tengkulak akan memotong Rp500-1000 per kilogram. Pemotongan itu dianggap sebagai pengganti bunga utang kebutuhan sebelum panen. Selain motif balas budi, penjualan panen ke tengkulak juga disebabkan karena besarnya ongkos angkut. Tarif angkut ke kecamatan untuk kopi mencapai Rp1.200/kg dan untuk lada Rp2000/kg.

Salah satu tantangan utama perekonomian Air Bacang adalah persoalan akses. Terutama dari kampung menuju pusat kecamatan atau kabupaten. Jarak menuju pusat kecamatan, Linau, mencapai \pm 12 km. Sementara ke pusat kabupaten, Kaur, mencapai \pm 40 km. Dengan topografi wilayah berbukit, maka jalanan pun lebih berliku, curam, dan sempit. Ketika musim hujan, kondisinya semakin parah. Jalan licin dan becek ada di mana-mana. Sementara ketika musim kemarau maka jalanan pun berdebu. Inisiatif melakukan perbaikan jalan sudah dilakukan warga. Bertahap secara gotong royong. Setiap usai musim penghujan, dilakukan pemasangan batu dan menambal jalan becek. Caranya adalah dengan menindihnya dengan kayu agar mudah dilalui. Jika hambatan akses teratasi, maka sangat mungkin bagi warga untuk tidak menjual hasil panen kepada tengkulak. Posisi mereka saat ini dilematis. Memilih menjualnya ke tengkulak dengan harga murah atau menjual sendiri ke kecamatan dengan resiko karung bocor.



Gambar 3.7: Jalan dari Air Bacang menuju Linau. Sumber: WALHI Bengkulu.

Pendapatan dari hasil penjualan komoditas kopi dan lada terbilang cukup besar. Praktik beli murah tengkulak memang sedikit mengurangi keuntungan. Bahkan meski telah dikurangi biaya untuk perawatan dan upah pekerja, penghasilan warga tetap termasuk besar. Dari sisa penghasilan itu, biaya tabungan untuk pendidikan anak tetap tersedia. Sebagian besar anak-anak petani di Air Bacang bersekolah di luar dusun. Mereka juga mengalokasikan sisa pendapatan untuk tabungan kesehatan. Selain itu, sebagian warga juga mengalokasikan sisa penghasilan untuk membeli perlengkapan perkebunan. Salah satunya adalah untuk membeli mesin giling kopi. Sedangkan untuk keperluan konsumsi sehari-hari, warga Air Bacang terbilang sangat hemat. Sebab kebutuhan sayur dan bumbu sudah disediakan oleh kebun kecil dekat rumah. Mereka hanya perlu memberi beras, minyak goreng, gula, dan daging. Warga Air Bacang telah mempraktikkan tata kelola ekonomi yang berkelanjutan dan berskala kecil. Warga juga telah membuktikan bahwa mereka bisa mandiri. Baik itu dalam pemenuhan kebutuhan energi, pangan, atau pupuk organik dari sisa kulit kopi.

Kesejahteraan ekonomi memang tidak selalu soal ukuran materi dalam bentuk uang atau barang. Terdapat sekitar 150 keluarga di Dusun Air Bacang. Hampir seluruhnya menanam tanaman pokok dan selang di kebun mereka. Berikut ini

kalkulasi hasil perkebunan warga Air Bacang selama satu musim panen:

No	Tanaman	Jenis	Jumlah (Ton)	Nilai (Rupiah)
1	Kopi	TP	530	13.250.000.000
2	Lada	TP	100,15	1.802.700.000
3	Cengkeh	TS	18,75	1.406.250.000
4	Pinang	TS	15,92	557.200.000
5	Karet	TS	153	765.000.000
6	Durian	TS	65,7	1.971.000.000
7	Jengkol	TS	230,2	2.302.000.000
8	Cabe	TS	10,55	422.000.000
Total				22.536.150.000

Tabel 3.3 : Kalkulasi pendapatan Air Bacang pada musim 2019. Sumber: Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Di dalam tabel tanaman dikelompokkan menjadi Tanaman Pokok (TP) dan Tanaman Selang (TS). Pendapatan masyarakat pada musim panen 2019 dihitung dengan harga terendah. Berdasarkan valuasi ekonomi di atas, rata-rata pendapatan setiap keluarga di Air Bacang adalah Rp12.520.083 per bulan. Ketika dihitung dengan harga tertinggi, maka totalnya mencapai Rp20.578.888 per bulan. Dan jika dikalkulasi dalam satu tahun, maka setiap keluarga rata-rata mendapat Rp37.042.000.000 miliar per tahun. Pendapatan setiap keluarga dalam satu bulan tidak sama. Bahkan bisa berbeda-beda setiap

bulannya. Pada bulan-bulan masa panen, maka nominalnya akan tinggi. Namun akan menurun saat tidak masuk musim panen. Dari hasil tersebut, biaya pendidikan anak-anak Air Bacang dapat tercukupi. Bahkan sebagian besar warga, juga bisa mengirimkan uang bulanan untuk membantu keluarga mereka.

Selain dari penjualan hasil kebun, Air Bacang juga memiliki potensi pengembangan jasa lingkungan. Salah satu bentuknya adalah dengan ekowisata air terjun. Misalnya bisa dilakukan di Air Terjun Mayan. Potensi wisata alam di Air Bacang dapat menambah pendapatan bagi desa atau masyarakat yang mengelola. Hanya saja, sampai hari ini, potensi tersebut belum bisa dikerjakan. Terutama karena faktor akses jalan yang tidak memadai. Selain itu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan, bambu, madu, dan getah, juga masih dimanfaatkan. Bagi warga, tidak semua potensi alam harus diperjual-belikan. Ada kecemasan jika alam dieksploitasi berlebihan, maka justru akan berdampak buruk bagi kebun, sungai, dan hutan mereka.

4. Tumpang Tindih Kawasan dan Pengabaian Negara pada Warga Air Bacang

Permasalahan warga Air Bacang, hampir serupa dengan desa-desa lain di Bukit Kumbang. Secara umum masalah mereka adalah akses jalan yang buruk, pasokan listrik, mahalnya harga sembako, dan ketergantungan dengan tengkulak. Jika satu persatu permasalahan ini bisa dipecahkan, maka ekonomi Bukit Kumbang niscaya akan makin berkembang. Sebab dengan hanya berbekal kemandirian komunitas saja, mereka sudah membuktikan bahwa kehidupan mereka makin membaik. Selain itu, terdapat dua masalah lain yang sedang dihadapi warga Air Bacang. *Pertama*, persoalan rumitnya administrasi desa. *Kedua*, adanya tumpang tindih kawasan.

Masalah tersebut bermula dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011. SK tersebut telah

membebaskan area seluas 760,12 hektar dari luas HPT Bukit Kumbang. Area yang dibebaskan merupakan kawasan permukiman dan perkebunan yang masuk wilayah Air Bacang. Setahun kemudian, Pemerintah Kabupaten Kaur tiba-tiba menghapus status desa definitif Air Bacang. Wilayah Air Bacang pun digabungkan dengan sebagian wilayah Desa Arga Mulya. Bentuk penggabungan tersebut adalah desa baru bernama Sinar Mulya.

Pada awalnya, warga sangat memaklumi terbentuknya Desa Sinar Mulya. Karena dengan itu warga bisa lebih mudah mengakses fasilitas dan layanan publik. Anak-anak mereka pun bisa bersekolah. Sebab gedung sekolah hingga SMP memang hanya ada di Desa Sinar Mulya. Mereka juga bisa mengakses layanan kesehatan, layanan kependudukan untuk mengurus akta kelahiran, buku nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Namun angan-angan itu tidak terlaksana. Kenyataan yang dirasakan warga Air Bacang justru berkebalikan.

Secara hukum wilayah Air Bacang memang telah lepas dari status HPT. Namun setelah pelepasan HPT, fasilitas dan layanan pemerintah untuk masyarakat justru tidak sesuai. Warga Air Bacang tidak mendapat aliran listrik. Energi listrik hanya masuk sampai pusat Desa Sinar Mulya. Warga Air Bacang juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Tuduhannya karena wilayah dusun berada di kawasan HPT Bukit Kumbang. Begitu pula dengan fasilitas umum, sosial, dan infrastruktur. Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kaur, cenderung mengabaikan warga Air Bacang.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan layanan administrasi. Dalam waktu yang relatif singkat, terjadi tiga kali perubahan status desa. Hal ini menghambat warga Air Bacang ketika hendak mengurus urusan perbankan atau melakukan pengajuan dana desa. Meski sudah diubah menjadi Desa Sinar Mulya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mereka bahkan masih sering dianggap tidak sah. Layanan

publik justru lebih mudah diakses dengan identitas desa lama, Air Bacang. Meski pemerintah terkesan mengabaikan Air Bacang, masyarakat tetap kompak bertahan. Beberapa pemenuhan kebutuhan hidup bahkan dikerjakan secara kolektif. Dengan kata lain, tanpa peran serta negara.

Hidup jauh dari pusat kecamatan dan akses yang serba terbatas, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk beraktivitas. Masyarakat tetap memberanikan diri melintasi jalan curam. Baik untuk mengantar anak ke sekolah, pergi ke pasar, menjual hasil perkebunan kepada tengkulak, ataupun berpergian keluar-masuk dusun. Modal utama warga adalah kepiawaian mengendarai motor modifikasi. Dan jika jalan rusak parah dan sulit dilalui, masyarakat pun segera gotong royong. Ramai-ramai mereka meletakkan kayu dan batu di beberapa titik jalan yang licin dan berlumpur.

Selain inisiatif memperbaiki jalan, warga juga berinisiatif menciptakan listrik sendiri. Sumber daya utamanya adalah air. Karena itu warga sangat bersyukur sungai-sungai dari perbukitan memiliki aliran air yang deras. Dari situ air bisa diubah menjadi energi listrik untuk permukiman warga. Kini turbin PLTMH bahkan sudah dibangun di 9 titik. Pada awal pembuatan, masyarakat bergotong royong dan secara swadaya mengumpulkan Rp10.000.000 untuk membangun PLTMH. Bahkan jika dikonversi berdasarkan harga bahan baku sekarang, modal awal tersebut mencapai Rp20.000.000. Namun tidak ada warga yang keberatan. Karena dari situ sumber penerangan rumah warga berasal.

Tidak hanya PLTMH, kini warga pun sedang membuat panel surya (PLTS) sebagai energi alternatif. Energi dari matahari ini akan digunakan sebagai cadangan saat terjadinya musim kemarau. Sebab, ketika musim kemarau panjang ketersediaan debit air tidak lagi cukup untuk kebutuhan PLTMH. Terutama setelah terjadinya perubahan alam akibat ulah perusahaan di sekitar Bukit Barisan Selatan. Sampai saat ini PLTMH dan PLTS masih menjadi sumber energi listrik rumah

tangga. Warga sadar betul jika hanya berpangku tangan menunggu perhatian pemerintah, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.

5. Krisis Sosio-Ekologis dan Masa Depan Bukit Kumbang

Sejak mulai berdirinya perkampungan Air Bacang, warga telah mengalami beberapa kali krisis ekologis. Terutama di kawasan ekosistem Bukit Kumbang. Mulai dari krisis ekologis dalam bentuk banjir bandang hingga tanah longsor. Sebagian besar krisis diakibatkan oleh aktivitas produksi perusahaan kayu. Sebagian kecilnya, disebabkan oleh perambahan hutan dan lahan.

Pada 1987 masyarakat Bukit Kumbang digegerkan dengan musibah banjir bandang. Bencana itu menimpa Marga Sambat di wilayah Desa Talang Awer (sekarang Tanjung Aur). Setelah diselidiki, tutupan hutan penyangga TNBBS di Bukit Kumbang telah mengalami perubahan drastis. Terutama setelah PT. Bengkulu Raya Timber mulai beroperasi. Selain itu, kawasan Bukit Kumbang dan TNBBS di wilayah Desa Muara Dua dan Desa Kulik Sialang, juga mengalami kerusakan. Terutama setelah diekspansi PT. Ciptamas Bumi Selaras, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Ciputra Group. Dengan mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan pun diberi akses untuk membuka kawasan hutan demi perluasan kebun sawit. Masuknya perkebunan sawit, selain merampas wilayah kelola rakyat, juga makin memperburuk kondisi lingkungan Bukit Kumbang.

Sejak 1980 sampai sekarang, telah terjadi perubahan ekosistem yang cukup signifikan di Bukit Kumbang. Salah satu bentuknya adalah makin berkurangnya debit mata air. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas perambahan kawasan secara legal (melalui izin) maupun ilegal (tanpa izin). Berdasarkan penuturan warga, pada tahun 1990, telah terjadi kemarau

panjang selama hampir sembilan bulan. Saat itu, air sungai dan mata air masih berlimpah untuk dimanfaatkan bagi keperluan sehari-hari warga. Belum lama ini, kemarau panjang kembali terjadi selama lima bulan. Hampir semua sungai besar mengalami kekeringan. Lebih miris lagi, mata air yang berada di TNBBS juga mengalami penurunan debit air secara drastis.



Gambar 3. 8: Tanah longsor di Kawasan Bukit Kumbang. Sumber: Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Krisis lingkungan tidak langsung terjadi saat manusia melakukan perusakan hutan. Dampak yang ditimbulkan bertahap dan bergantung pada intensitas perusakan alam yang dilakukan. Ketika alam telah sampai pada titik kritis, pada saat itulah bencana ekologis terjadi. Kemarau diprediksi akan semakin sering karena faktor perubahan iklim. Bersamaan dengan itu, rentang waktu kemarau pun akan semakin panjang. Sementara saat musim penghujan, tingkat curah hujan pun akan makin deras. Dampak krisis ekologis seperti itu sudah dirasakan warga Desa Sinar Mulya. Belum lama ini permukiman dan jalan desa di sana habis diterjang tanah longsor.

Pada awal November 2019, satu-satunya jalan menuju Desa Sinar Mulya mengalami longsor sepanjang satu kilometer. Beberapa tiang listrik pun roboh. Hal itu memaksa PLN mematikan sementara aliran listrik. Tanah amblas terjadi

hampir di setiap 500 meter jalan desa. Satu rumah bahkan terkena longsor dan amblas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sekitar 7 bulan sebelumnya, longsor dan banjir terjadi di Desa Muara Dua dan Desa Air Palawan, Kecamatan Nasal. Dua desa tersebut masih bagian dari kawasan ekosistem Bukit Kumbang. Beberapa rumah di bantaran sungai hanyut. Beberapa kebun warga di lereng bukit mengalami longsor. Bencana yang terjadi di Muara Dua dan Air Palawan makin membuat warga Air Bacang waspada. Mereka cukup bersyukur karena tutupan hutan di sekitarnya masih bagus. Tetapi jika perusakan oleh perusahaan dan individu masih terjadi, tidak menutup kemungkinan jika ruang hidup mereka pun terancam.



Gambar 3.9: Pada 2019 akses jalan menuju Air Bacang sempat terputus karena longsor. Sumber: Tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Dengan semakin intensifnya bencana alam di kawasan Bukit Kumbang, warga Air Bacang pun menjadi lebih siaga. Kejadian-kejadian di tempat lain menjadi bahan refleksi warga. Dalam setiap pertemuan rutin, pesan untuk menjaga kawasan hutan selalu muncul. Salah satu upaya warga adalah melarang penebangan pohon di hutan dan melarang pembukaan lahan demi akumulasi produksi. Kesadaran ini muncul karena selama ini, apa yang terjadi di atas (Air Bacang) akan mempengaruhi warga di bawah (desa lain).

Selain mengalami krisis ekologis, warga Air Bacang juga pernah merasakan krisis ekonomi tahun 1998. Hasil perkebunan, terutama lada dan kopi, mengalami kejatuhan harga. Sedangkan harga kebutuhan pokok meroket naik. Meski demikian, sebenarnya krisis ekonomi 1998 tidak terlalu berimbas bagi warga. Terlebih karena warga mampu bertahan dengan pangan lokal seperti umbi-umbian, padi darat, dan sayuran. Di samping itu, krisis ekonomi skala lokal sesekali acap terjadi. Terutama karena dorongan faktor musim. Dampaknya produktivitas perkebunan menurun drastis. Akhirnya warga pun harus mencari alternatif penghasilan lain.

Saat ini warga juga membudidayakan tanaman selang seperti pinang dan jengkol. Dua tanaman ini memiliki harga yang cukup stabil. Masa panennya pun sepanjang tahun. Sambil terus berkebum, warga pun aktif mencari cara meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka. Salah satunya dalam hal budidaya tanaman kopi. Mereka kini sedang mempelajari dan mempraktekkan metode stek kopi. Dari metode ini alhasil buah kopi pun menjadi lebih bagus dan produktif. Hal ini bisa menjadi penghalang untuk membuka lahan baru demi meningkatkan produksi. Maka slogan “hutan lestari dan rakyat sejahtera” pun secara gamblang tergambar dalam kehidupan warga Air Bacang.

Inovasi lainnya adalah dengan terus memperbaiki kualitas buah kopi. Metode stek berfungsi meningkatkan produktivitas kopi. Dan kini, warga mencoba juga metode petik biji merah.

Metode ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki kualitas. Pak Jumahir dan Pak Wondo menjadi dua pionir tren kopi petik merah di Air Bacang. Perlahan para petani lain pun mengikuti jejak mereka. Proses pemilihan biji kopi petik merah memang membutuhkan kerja tambahan. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama pula. Namun harga yang ditawarkan pun sebanding dengan usaha mereka. Dalam perkembangannya, warga pun pelan-pelan mulai melakukan pemilahan kopi berdasarkan kualitasnya. Dengan proses ini, maka setiap kopi yang dijual ke tengkulak akan dihargai sesuai dengan kualitasnya. Dan ini akan menambah penghasilan para petani kopi di Air Bacang.

6. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi dan pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/MENHUT-II/2009 yang menjadi landasan terbitnya perizinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayah kelola rakyat Air Bacang;
2. Pemerintah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Pusat tidak mengakomodasi perluasan izin perkebunan kelapa sawit untuk PT. Ciptamas Bumi Selaras dan perusahaan lainnya karena lokasinya telah dikuasai dan dikelola masyarakat;
3. Masyarakat segera mengajukan permohonan sertifikasi untuk areal permukiman dan wilayah kelola rakyat seluas 760 hektar yang telah dikeluarkan dari status HPT Bukit Kumbang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011; dan
4. Masyarakat Air Bacang melakukan konsolidasi dengan Desa Induk (Sinar Mulya) untuk mendorong pemenuhan pelayanan publik yang selama ini belum didapatkan.

Berebut Hidup di Rawa Gambut Lebak Rawang



Tim Penulis:

Denny Arian Nando

Abdul Ghofar

Bagas Yusuf Kausan

“Savanakna yam nitanam di sini. Niyur pinam hanau ru. Mviya dnan samisrana yam kayu nimakan vuahna. Tathapi haur wuluh pattum ityevamadi. Punarapi yam parlak vukan. Dnan tavad talaga savanakna yam vuatku sucarita paravis prayojanaka punyana sarvastva sacaracar. Varopayana tmu”

“Hendaknya semua tanaman yang telah ditanam di Taman Sri Ksetra ini seperti kelapa, pinang, Aren, dan sagu serta jenis pohon bambu, seperti bambu haur, bambu (wuluh), dan bambu betung dan sejenisnya. Termasuk pula taman, bendungan, telaga. Semua amal saya berikan hendaknya dipelihara, demi kesejahteraan dan kepentingan seluruh makhluk hidup seperti manusia, binatang dan tanaman. Sebagai tempat yang memberi rasa nyaman”¹³³

¹³³ Penggalan isi Prasasti Talang Tuo yang diterjemahkan oleh Codes. Lihat buku George Coedes, *Kedatuan Sriwijaya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

A. Pesan Prasasti Talang Tuo

Sejak belasan abad lalu, penduduk Nusantara dikenal ahli dalam bidang pertanian (agraris) dan kelautan (maritim). Hal itu dimungkinkan karena mampu hidup selaras dengan alam. Tepatnya, selaras dengan ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai, rawa, danau, dan laut). Kondisi itu semakin diuntungkan karena letak Nusantara yang strategis. Beberapa wilayah bahkan berada di jalur perdagangan utama, salah satunya di sepanjang Selat Malaka. Tidak heran jika di sana bermunculan pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi seperti, misalnya, Kerajaan Sriwijaya.

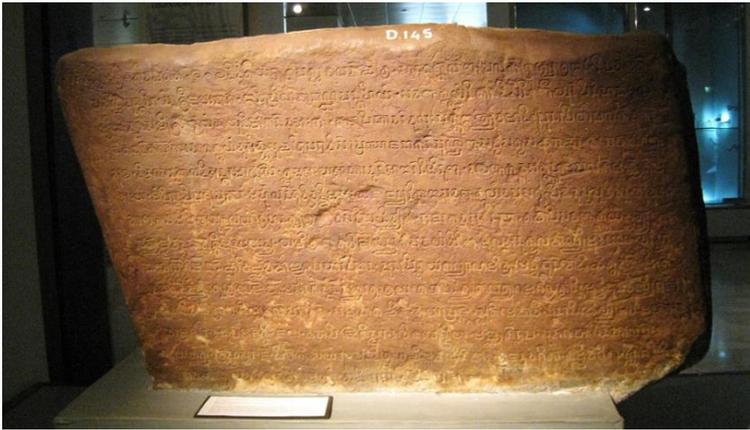
Pada sekitar abad ke-6 M, Kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh besar. Terutama karena keahliannya dalam bidang maritim. Tidak hanya di kawasan Selat Malaka, namun mencakup hampir seluruh Nusantara. Bahkan, pengaruh politiknya sampai pula ke negara-negara yang saat ini masuk wilayah Asia Tenggara. Karena lokasinya yang strategis, Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan penting di Asia. Alhasil segala hasil bumi dari daerah sekitar bisa dipertukarkan dan kemudian dibawa ke berbagai daerah. Begitu pula sebaliknya.

Cerita kebesaran Kerajaan Sriwijaya terekam dalam aneka bentuk peninggalan sejarah seperti, misalnya, naskah dan prasasti. Selain itu, ada pula dari catatan perjalanan para pelancong. Salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang menarik adalah Prasasti Talang Tuo. Sebab, prasasti itu tidak hanya berbicara tentang kedigdayaan Kerajaan Sriwijaya. Namun justru bercerita tentang kehidupan yang selaras dengan alam – satu kearifan hidup yang saat ini makin terpojokkan.

Prasasti Talang Tuo dibuat pada masa Dapunta Hyang Sri Jayanasa (684 M). Prasasti ini bercerita tentang peristiwa pembangunan Taman Śriksetra. Amanat utama raja dalam prasasti itu adalah kemakmuran, tidak hanya untuk manusia, namun juga bagi tumbuhan dan hewan. Sang Raja menginginkan bahwa semua kebun dengan berbagai tumbuhan

dapat hidup subur dan berlebih panennya. Demikian pula ternak-ternak yang dipelihara penduduk agar terus bertambah. Raja pun berkomitmen agar tidak ada lagi orang yang lapar, tidak ada lagi pencuri, pembunuh, atau pezina.

Pembangunan Taman Śriksetra adalah wujud pemenuhan komitmen Sang Raja. Di taman itu, telah ditanam berbagai tumbuhan seperti pohon kelapa, pinang, aren, sagu, bambu haur, wuluh, dan sebagainya. Sementara di sekitarnya, dilengkapi pula dengan kolam dan bendungan. Semua itu untuk kebahagiaan seluruh makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, tanpa terkecuali. Karena itu, pesan Sang Raja dalam Prasasti Talang Tuo jelas yakni agar tercipta kemakmuran bersama, maka lingkungan harus ditata secara arif dan bijaksana.



Gambar 3.10 : Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westenenk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Prasasti ini kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor inventaris D.145.

Sumber: www.pantaugambut.id

Kandungan Prasasti Talang Tuo sangat kontekstual dengan kondisi terkini. Terutama di tengah makin parahny kerusakan lingkungan. Rentetan bencana (sosial-ekologis) seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, polusi, dan yang terbaru pandemi, adalah pertandanya. Kondisi krisis ini berlaku nyaris

di seluruh Indonesia. Termasuk di daerah yang pada masa lalu masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sriwijaya: Sumatera Selatan.

Salah satu bentuk ekosistem yang eksis di Sumatera Selatan adalah rawa gambut. Dengan begitu, maka hidup selaras dengan alam, dapat diartikan sebagai hidup selaras dengan ekosistem gambut. Dan sudah sejak ratusan tahun lalu masyarakat sekitar rawa gambut telah mempraktikkan itu. Alhasil mereka pun menjadi ahli di dalam ekosistem tersebut. Mereka sadar, seperti bunyi pesan Prasasti Talang Tuo, jika alam ditata dengan baik, maka sejahtera dan makmur pula manusia yang hidup di dalamnya.

Kearifan hidup seperti itulah yang hari ini makin terdesak. Bahkan terancam punah karena ketamakan segelintir orang.

B. Gambut dan Kehidupan Masyarakat Lebak Rawang

Indonesia adalah negara urutan kedua dengan lahan gambut terluas di dunia. Peringkat pertama dipegang negara Brazil. Luas lahan gambut di Indonesia berjumlah 22,4 juta hektar. Tersebar di beberapa provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Luas fungsi ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan menyentuh 2,1 Juta hektar atau sekitar 23 persen dari keseluruhan luasan wilayah. Dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan daerah dengan luas gambut terbesar di provinsi tersebut. Luas lahan gambut di kabupaten sebelah timur Sumatera Selatan itu berjumlah 1,03 juta hektar.¹³⁴

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sendiri memiliki wilayah seluas 1,9 juta hektar atau lebih dari 50 persen wilayah OKI merupakan kawasan ekosistem gambut. Kabupaten OKI secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten

¹³⁴ Wahyunto S. Rintung dan H. Subagyo, "Peta Luas Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera," *Wetlands International*: 2003 (hlm. 38).

dan kota yang memiliki ekosistem gambut meskipun dalam skala lebih kecil. Di sebelah Utara, OKI berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Provinsi Lampung. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur. Dan di sebelah Timur berbatasan langsung Selat Bangka dan Laut Jawa.

Sebagian besar wilayah OKI merupakan dataran rendah. Rata-rata memiliki ketinggian 10 meter di atas permukaan laut (mdpl). OKI terletak di jalur Sumatera bagian Timur. Dan hampir 75 persen daerah OKI merupakan lahan basah.¹³⁵ Oleh karena itu, salah satu ciri ekosistem yang dominan adalah hutan rawa gambut. Dari model ekosistem rawa gambut seperti itulah masyarakat OKI menggantungkan sumber penghidupannya.

Sudah sejak lama masyarakat lokal OKI mengelola dan sekaligus menyelamatkan ekosistem rawa gambut. Kekayaan alam yang melimpah itu dikelola masyarakat secara berkelanjutan atau dengan kata lain, selaras dengan alam. Model pengelolaan seperti itu, mengharuskan manusia untuk memperlakukan ekosistem secara arif dan bijaksana. Karena, sejatinya alam telah senantiasa menyokong kebutuhan manusia. Jika kearifan hidup seperti ini terjaga, maka tidak akan ada petaka/bencana yang mengintai. Semua saling menjaga: manusia menjaga alam dan alam melindungi manusia. Dan hari

¹³⁵ Lahan basah terbagi menjadi beberapa golongan seperti rawa-rawa, paya, dan gambut. Ekosistem yang paling unik adalah gambut (dalam Bahasa Inggris, *peat*). Terutama terkait proses pembentukannya. Gambut merupakan akumulasi bahan organik. Sebuah perpaduan sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk dengan sisa-sisa bangkai binatang seperti serangga. Kedua komponen itu terawetkan dan tergenang dalam waktu yang lama. Dan gambut sangat penting bagi sistem hidrologi. Karena pada saat musim hujan, gambut mampu menyimpan air dalam jumlah banyak. Seperti spons, gambut mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobotnya. Sementara pada musim kemarau, gambut akan melepaskan air yang dikandungnya secara perlahan. Selain itu, gambut juga berfungsi sebagai penyerap karbon.

ini, potret kehidupan seperti ini sudah makin asing di telinga. Beberapa yang tersisa kini terus terdesak seperti, misalnya, yang terjadi pada warga di Komunitas Lebak Rawang.

Komunitas Lebak Rawang berasal dari lima desa berbeda yakni Desa Riding, Desa Jerambah Rengas, Desa Penanggoan Duren, Desa Lebung Itam, dan Desa Tulung Seluang. Kelima desa tersebut masuk daerah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Nama “Lebak Rawang” diambil dari nama wilayah kelola masyarakat. Dan kini, wilayah itu terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Padahal masyarakat dari lima desa itu, sangat menggantungkan hidupnya dari ekosistem gambut.



Gambar 3.11 : Foto udara Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Tampak sebagian besar lahannya berupa rawa gambut. Bagi sebagian masyarakat, ekosistem gambut merupakan berkah alam dan sekaligus sumber mata pencaharian. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Sebagian besar masyarakat Lebak Rawang merajut hidup dengan bercocok tanam, berladang, menangkap ikan, dan beternak. Praktik ekonomi tersebut dikerjakan secara kolektif (bekerja sama). Hal itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Kerja kolektif gotong royong terkait erat dengan asal-usul terbentuknya masyarakat Lebak Rawang. Sejarah di sini berasal dari cerita orang-orang tua secara turun-temurun dan

disampaikan secara lisan. Menurut seorang mantan Kerio¹³⁶ setempat, pada waktu itu

ada suku pengembara yang dinamakan guru wakil (istilah saat zaman Belanda). Mereka yang menemukan dusun ini. Kemungkinan guru wakil itu berasal dari Palembang. Mereka orang-orang yang lari dari Palembang. Saat itu Belanda memang hanya ada di Palembang. Meski kemudian bisa masuk ke sini, terutama setelah lepasnya *demang*.¹³⁷

Dusun yang dimaksud Kerio Ambon sebagai Muasal desa-desa Lebak Rawang bernama Bangsal. Dari dusun itu kemudian perkampungan terus berkembang. Terutama setelah Belanda membuat jalan ke arah Tulung Seluang. Alhasil penduduk kampung terus bertambah dan wilayah membesar. Banyak orang yang berpindah dari Dusun Bangsal ke beberapa titik lainnya. Misalnya seperti orang tua Kerie Ambon, berpindah sekitar tahun 1940. Proses perpindahan itu berkait erat dengan asal usul kepemilikan lahan. Masyarakat menyebutnya dengan istilah “tapak tangan.”

Secara sederhana, “tapak tangan” adalah istilah pengakuan hak secara adat atas pengelolaan lahan, dilihat dari siapa yang terlebih dahulu mengusahakan dan merawat lahan tersebut. Dari amanat “tapak tangan” itulah anak cucunya bisa secara sah menguasai secara turun-temurun. Dan terus terbagi-bagi seiring bertambahnya anggota keluarga atau marga. Karena itu, tidak jarang jika penamaan daerah sangat terkait dengan nama marga. Hal itu sangat terkait pula dengan siapa yang pertama membuka lahan baru.

Kini, sekitar 30% lahan di Lebak Rawang sudah menjadi hak milik. Sebagian besar masyarakat memiliki lahan lebih dari 10 kaleng. Dalam arti, 10 kaleng itu bisa untuk satu kwintal bibit.

¹³⁶ Kriyo/Kerio/Kerie setara dengan kepala desa. Fungsi dan cakupan wilayahnya pun sama. Hanya beda penyebutan. Dan pergantian istilah kerio menjadi kepala desa terjadi pada akhir tahun 1970-an.

¹³⁷ Wawancara dengan Kerie Ambon pada 06 Maret 2020.

Maka, kurang lebih, rata-rata lahan masyarakat ialah sekitar tiga hektar. Meski merupakan warisan, kepemilikan lahan di Lebak Rawang bisa berubah-ubah dan berkurang. Misalnya seorang nenek memiliki enam orang anak. Maka lahan 12 hektar miliknya harus dibagi menjadi enam petak lahan. Dengan begitu, masing-masing akan mendapat 2 hektar. Kemudian dibagi lagi jika memiliki anak. Begitu seterusnya.



Gambar 3.12 : Tokoh masyarakat Lebak Rawang kelahiran 10 Oktober 1941, Kerie Ambon. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Jika ditarik dari sejarah adat di Sumatera Selatan, aturan adat seperti tapak tangan merujuk kepada sebuah aturan: Undang-Undang Simbur Cahaya.¹³⁸ Aturan ini berkembang secara lisan

¹³⁸ Simbur Cahaya merupakan perpaduan hukum adat dengan ajaran Islam. Berisi kearifan lokal yang berkembang secara lisan dan menyebar ke pedalaman Sumatera Selatan. Undang-Undang Simbur Cahaya kemudian dibukukan oleh istri penguasa Palembang, Ratu Sinuhun. Dan penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan, berkuasa pada kisaran tahun 1636-1642 M. Lihat: Yusdani, "The Book of Simbur Cahaya The Receptive Theory Point of View," *Jurnal Al Millah* Vol.3 No.2, 2004 (hlm. 235-25).

dan didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah. Di Lebak Rawang, penentuan berdasarkan ketentuan adat tidak hanya berlaku dalam masalah penguasaan lahan. Namun juga terkait penentuan batas wilayah desa. Kerie Ambon menuturkan bahwa

“Pada zaman kerio, batas-batas wilayah ditentukan oleh ciri-ciri alam. Misalnya seperti batu, gundukan, atau sungai. Secara turun-temurun, batas-batas wilayah itu yang dipercaya. Sistem pembagiannya pun hanya kesepakatan antar kerio. Tidak difasilitasi oleh bupati atau kecamatan. Perubahan terjadi setelah perusahaan masuk. Penetapan wilayah versi mereka adalah dengan menggunakan titik koordinat. Sama seperti versi pemerintah kabupaten.”¹³⁹

Kerie Ambon hafal betul. Sebab, dia adalah saksi banyak perubahan yang terjadi. Dia pun sempat merasakan menjadi seorang Kerie atau Kepala Desa pada tahun 1972 hingga 1985. Pada masa kepemimpinan Kerie Ambon, hal pertama yang dilakukan saat menjabat adalah membuat sekolah. Karena saat itu, sekolah masih numpang di rumah-rumah (awang-awang). Pada 1976 mulai jadi satu sekolah. Karena lahan di sana terbatas, maka yang dibangun tiga kelas terlebih dahulu yakni SD kelas 1-3.

Kemudian karena sulitnya akses menuju Rawang, Kerie Ambon mendorong pembersihan dan pelebaran sungai alam. Kurang lebih sepanjang 9 Km. Sehingga bisa membuka akses transportasi sungai dari Lebak Rawang ke Air Sugihan. Waktu tempuhnya adalah sekitar 3-4 jam. Sebelum itu, akses ke Rawang harus ditempuh dari Palembang dengan jalur darat. Dan memakan waktu hingga satu hari.

¹³⁹ Wawancara dengan Kerie Ambon pada 06 Maret 2020.

“Nenek-nenek moyang kamek dulu, gede-gede kamek dulu, bergantung idup dengan rawang inilah. Dari rawang inilah kamek bule permakan, pacak negak rumah, rawang juge pacak nyambung kehidupan kamek ke depan, makenye kamek periare dan jage sampai anak cucong kamek..” – Kerie Ambon

“Nenek moyang kami dulu, tetua-tetua kami dulu, bergantung hidup kepada gambut inilah. Dari gambut inilah kami mendapatkan makan, dari gambut inilah kami bisa mendirikan rumah, gambut juga yang mampu menyambung kehidupan kami ke depan. Oleh karena itu kami akan terus merawat dan menjaga gambut sampai anak-cucu kami..” – **Kerie Ambon**

C. Ekonomi Lokal Lebak Rawang

Dari beragam jenis vegetasi, flora, dan fauna di Lebak Rawang (5 desa), terdapat 58 jenis sumber penghidupan masyarakat yang telah teridentifikasi. Dan terbagi menjadi enam kelompok yakni (1) komoditi dari ikan dan ternak; (2) komoditi dari kayu terkubur; (3) komoditi dari tumbuhan dan kayu panen; (4) komoditi dari buah-buahan; (5) komoditi dari kebun; dan (6) komoditi dari pangan. Kemudian dari keenam kelompok komoditas tersebut, terbagi lagi menjadi 2 klasifikasi: (1) **Ekonomi Lebak** di wilayah perairan rawa gambut; dan (2) **Ekonomi Daratan** di wilayah peternakan dan perkebunan lokal.

Ekonomi Lebak terdiri dari komoditas ikan, komoditas kerbau rawa, komoditas kayu terkubur, komoditas tumbuhan, kayu, dan komoditas lain yang cocok di wilayah perairan. Sedangkan Ekonomi Daratan, terdiri dari komoditas peternakan kambing, sapi, walet, maupun beragam jenis unggas lainnya. Komoditas seperti rerumputan untuk pakan ternak dan komoditas perkebunan lokal untuk bahan pangan seperti buah-buahan, bumbu dapur, dan obat-obatan juga masuk dalam jenis Ekonomi Daratan. Sumber penghidupan inilah yang membuat iming-iming perusahaan perkebunan menjadi tidak masuk akal. Sebab, jika dihitung, kekayaan dan keanekaragaman dari alam jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Fakta seperti itu dapat dilihat dari skema ekonomi perkebunan sawit. Jika bekerja di perkebunan kelapa sawit, maka berlaku hukum tuan dan majikan. Sementara masyarakat terbiasa tidak memiliki tuan, tidak memiliki majikan. Rantai ekonominya pun jelas: berputar di kampung. Misalnya dapat ikan, kemudian dijual, dibelikan beras, dan berasnya pun hasil pangan dari kampung. Atau dengan dibelikan alat rumah tangga yang dijual orang kampung. Otomatis alat itu pun pasti kembali ke kampung. Tak ayal uang pun terus berputar dalam satu kampung. Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Kak Sur, tokoh warga di Jerambah Rengas

“Jadi kaya sama-sama, miskin sama-sama. Beda dengan jika mengikuti alur sawit. Masyarakat paling mendapat upah 70.000/hari. Setelah itu habis uangnya. Sawitnya dibawa ke pabrik, lalu ke Jakarta. Setelah itu masyarakat tidak tahu lagi alamat sawit itu, akan dibawa kemana, siapa yang mengelolanya, duitnya lari kemana, dan seterusnya. Hal itu yang membuat garis kesenjangan terlihat betul.”¹⁴⁰

No	Sumber Penghidupan	Nilai Ekonomi Harga Terendah
1	Ikan dan ternak	Rp27.696.050.000,00
2	Kayu terkubur	Rp206.517.900.000,00
3	Tumbuhan dan kayu panen	Rp56.784.535.000,00
4	Buah-buahan	Rp6.627.156.000,00
5	Hasil kebun (karet,dll)	Rp8.309.778.000,00
6	Tanaman Pangan	Rp5.815.942.000,00
Total		Rp311.751.361.000,00

Tabel 3.4 : Nilai ekonomi hasil komoditi Lebak Rawang dengan harga terendah. Sumber: Survei tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Tabel di atas merupakan perhitungan nilai ekonomi masyarakat dalam satu tahun. Data dihasilkan dari hasil survei terhadap 440 orang masyarakat di 5 desa yang masuk wilayah kelola masyarakat Komunitas Lebak Rawang. Mereka adalah masyarakat yang sampai hari ini masih bertahan dan terus berkomitmen menjaga sehabis demi sehabis tanahnya dari incaran perkebunan kelapa sawit.

Hasil analisa dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam satu tahun, terdapat nilai ekonomi sebesar Rp311.751.361.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Analisa tersebut berpatok pada harga terendah yang berlaku di komunitas dan pasar lokal. Di samping itu, biaya konsumsi masyarakat Lebak Rawang termasuk hemat. Karena beberapa kebutuhan pangan dihasilkan dari pekarangan dan perkebunan masyarakat

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kak Sur pada 5 Maret 2020.

sendiri. Kekayaan seperti inilah yang kini terancam, terutama oleh aktivitas perkebunan monokultur atau satu jenis tanaman seperti sawit.

No	Sumber Penghidupan	Nilai Ekonomi dengan Harga Normal
1	Ikan dan ternak	41.438.525.000,00
2	Kayu terkubur	282.149.100.000,00
3	Tumbuhan dan kayu panen	92.128.250.000,00
4	Buah-buahan	12.181.029.000,00
5	Hasil kebun	11.791.166.000,00
6	Tanaman pangan	8.491.654.400,00
Total		448.179.724.400,00

Tabel 35 : Nilai ekonomi hasil komoditi Lebak Rawang dengan harga normal. Sumber: Survei tim Ekonomi Nusantara WALHI.

Selain dari hasil ikan dan kerbau rawa, masyarakat Lebak Rawang juga bergantung kepada hasil kayu. Ada dua cara untuk mendapatkan kayu. *Pertama*, dengan mengambil kayu yang terkubur atau terbenam di dalam air rawa gambut. *Kedua*, dengan cara mengambil kayu-kayu yang roboh akibat tersambar petir maupun roboh secara alami (faktor usia). Kayu-kayu ini digunakan sebagai bahan bangunan, mebel, maupun sebagai bahan untuk membuat perahu.

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat komoditas kayu terkubur merupakan nilai dominan yang menyokong ekonomi masyarakat. Dalam satu tahun, dengan perhitungan harga normal, nilai ekonomi masyarakat adalah Rp448.179.724.400,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). Itu baru perhitungan nilai ekonomi yang dapat dirupiahkan. Di luar itu, masih ada kearifan lokal serta berkah hidup selaras dengan alam yang tidak akan pernah bisa dihitung nominalnya.

D. Merawat Kearifan Lokal Lebak Rawang

Dalam keadaan terancam oleh aktivitas industri skala besar, masyarakat tetap terus bertahan. Mereka terus mencoba mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan senantiasa mempertahankan kebudayaan. Keduanya, adalah hal yang tidak dapat divaluasikan secara ekonomi. Praktik masyarakat merawat kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa tradisi memang sudah lama hilang, namun beberapa tradisi lain masih terus dilestarikan seperti, misalnya, dalam tata cara bercocok tanam.

Ada dua karakteristik tempat bercocok tanam bagi masyarakat Lebak Rawang: *Talang* dan *Sonor*. *Talang* adalah istilah lokal untuk menyebut ladang. Sementara *sonor* adalah istilah untuk menyebut sawah. Meski antara *sonor* dan sawah (dalam pengertian pada umumnya) memiliki perbedaan cara pengelolaan. Begitu pula dengan cara bercocok tanam padi di *talang*. Masyarakat Lebak Rawang tidak langsung menyebar benih di ladang, namun justru membuat lobang di tanah terlebih dahulu. Alat untuk melubangi tanah dikenal dengan nama *tugal*. Alat ini terbuat dari besi. Sementara gagangnya terbuat dari kayu. Mirip gagang sapu tapi lebih panjang. Sehingga banyak yang dipahat, dikesilkan pada bagian ujungnya. *Tugal* digunakan di tanah-tanah dengan serabut akar yang minim. Jika berserabut banyak, maka alat yang tepat adalah *tumbuk*.

Menanam padi di *talang* tidak melalui proses pembibitan, namun langsung dengan menanam benihnya. Sebelum ditanam, benih tidak direndam terlebih dahulu. Benih langsung ditanam saat keadaan kering. Proses awal berladang dikerjakan secara ramai-ramai. Bapak-bapak membuat lubang menggunakan *tugal*, sementara Ibu-Ibu bertugas memasukan benih ke lubang. Satu lubang terisi sekitar enam sampai sepuluh benih. Dan proses *nugal* atau menabur benih sama-sama dilakukan sambil berdiri. Begitu terus hingga ribuan lubang.

Jika irama tadi gagal, dalam arti ada pihak yang mendahului proses pihak lain, maka berlaku apa yang dinamakan tradisi *segadean*. Pihak yang tersalip akan mendapat coreng oleh arang.

Cara bercocok tanam di *Talang* hanya bisa dilakukan setelah dibakar terlebih dahulu. Proses pembakaran dilakukan secara gotong-royong, bahkan hingga satu Rukun Tetangga (RT). Pembakaran dilakukan dengan aman karena diberi sekat terlebih dahulu. Pembatas atau sekat itu dibersihkan dari tanaman. Dan sebagian masyarakat (sekitar 15-20 orang) lainnya, telah bersiap dengan membawa semprotan air. Pembakaran dikerjakan pada malam hari agar kondisi angin relatif kecil dan kobaran api pun terlihat jelas. Masyarakat Lebak Rawang menyebut proses ini dengan nama *nunubaen*.

Sedikit berbeda, proses tanam padi di *Sonor* cenderung tidak membutuhkan banyak orang, paling satu atau dua orang saja. Pada umumnya *sonor* keras, kaya mineral, sehingga tetap membutuhkan proses *nugal*. Namun prosesnya lebih cepat dan tidak perlu mengadakan gotong-royong. Proses *nugal* di *sonor* bahkan bisa digantikan orang lain, alias mempekerjakan orang. Masyarakat Lebak Rawang menyebutnya dengan istilah *Ngambek Ayian*. Modelnya harian untuk satu paket berupah 150 ribu. Satu paket berisi sepasang suami-istri dan ini memiliki makna bahwa

Kodrat laki-laki adalah tukang *nugal* dan perempuan menabur benih. Para ibu memiliki tangan yang dingin. Sehingga benih dari tangan yang dingin itu akan menjadi tanaman yang subur. Beda dari tangan para bapak.¹⁴¹

Jika pun tidak ada suami atau istrinya, maka satu paket itu bisa dicocokkan sendiri dengan orang lain. Pokoknya satu paket sampai pekerjaan selesai, dari pagi sampai sore. Tepatnya sampai pukul empat sore. Selepas itu harus berhenti, bubar.

¹⁴¹ Wawancara dengan Kak Sur pada 5 Maret 2020.

Sebelum benih ditaburkan, benih pun terlebih dahulu harus dikeramas menggunakan air. Lalu setelah itu dibacakan doa. Keramas benih dilakukan oleh si pemilik saat benih hendak ditabur atau *ditugal*. Campuran dalam proses keramas benih adalah jeringau (tanaman lokal), bunglai, dan kunyit. Semua komponen diiris kecil-kecil. Diletakkan dalam sebuah wadah bernama *cucuan*. Bentuknya segitiga dan berasal dari batang puwo (sejenis batang lengkuas) dan harus ditanam atau ditabur di tujuh lubang. Karena menurut penuturan warga

Tradisinya memang begitu. Harus tujuh lubang agar padi cepat tumbuh dan subur. Kemudian setiap sudut kebun ditabur lagi benih sebanyak sembilan lubang. Kemudian lahan disterilkan selama 3 hari. Pada hari keempat baru menabur benih. Hitungan penaburan benih dihitung menurut tanggal hijriyah. Masyarakat sudah hafal betul. Jika ada yang mulai menabur tanggal satu, maka yang lain tidak boleh lagi menabur sampai lewat tanggal 30 hijriyah. Rata-rata berlangsung pada bulan ke 10 sampai 11. Dan dalam satu tahun hanya satu kali panen.¹⁴²

Setelah melalui proses penanaman, masyarakat menyebut fase perawatan hingga masa panen dengan istilah *ngetam*. Mengusir hama termasuk dalam fase ini. Soal ini masyarakat Lebah Rawang memiliki pengetahuan luar biasa. Caranya ialah dengan membakar sarang madu. Dari proses membakar itu, aroma asap pembakaran mampu memanggil lebah-lebah untuk mendekat. Beberapa masuk ke dalam padi, sehingga di sana terjadi penyerbukan. Alhasil padi lebih bagus dan berisi. Jika dua-tiga hari tidak ada yang mengganggu, maka serangga seperti belalang pun akan pergi dengan sendirinya. Dengan begitu, mengusir hama bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian nutrisi tambahan bagi tanaman.

Bertani di *sonor* tidak setiap tahun, namun tergantung terjadinya kebakaran. Jika hutan terbakar maka jadi *sonor*. Jika

¹⁴² *Ibid.*

tidak terjadi maka tiga, empat, lima tahun tidak ke *sonor*. Setiap terjadinya *sonor* maka tanah itu akan dibagi-bagi. Modelnya menggunakan “tapak tangan”. Setelah dibagi kemudian akan diberi batas, biasanya menggunakan kayu. Sampai masa *sonor* tahun 1997 belum ada larangan. Baru benar-benar ada larangan sejak tahun 2006. Karena itu, sekarang *sonor* banyak hilang. Generasi sekarang bahkan terancam tidak akan lagi punya pengalaman bertanam di *sonor*. Sebab,

“Sekarang kita mau buka ladang, buka lahan, itu tidak boleh membakar. Itu masalahnya. Pada tahun 1961 itu masih bebas bermain api. Belum ada aturan. Belum ada perusahaan. Belum ada larangan. Saat itu zaman Pak Karno (Soekarno). Setelah itu krisis tahun 1961, tahun 1965, dan tahun 1967 terjadi kebakaran hutan hebat. Sehingga terjadi *sonor*. Kemudian tahun 1973 dan tahun 1977. Padi itu hasilnya dimakan. Sebagian dimasukan ke lumbung. Bentuknya kotak dan disimpan di bawah rumah hingga beberapa tahun. Jumlahnya bisa 400-600 kaleng kotak. Pada zaman dahulu padi sebatas untuk dimakan dan bukan untuk dijual. Bisa tahan hingga 3 tahunan. Satu kaleng itu berisi sekitar 10-16 kg.”¹⁴³

Pemerintah memang mengeluarkan larangan membakar lahan gambut. Namun aktivitas masyarakat di ladang sebenarnya tidak memiliki pengaruh terhadap gambut. Sebab, sejak dulu masyarakat sudah terbiasa membakar lahan untuk memulai pembuatan *sonor*. Dengan cara, 3-4 hari mengumpulkan kayu kering untuk membakar lahan dan proses pembakaran pun aman. Maka dari itu, bukan sistem pembakaran lahan atau *nunubaen* yang menyebabkan kebakaran lahan gambut, namun justru kanalisasi. Pengeringan lahan gambut oleh kanalisasi itulah yang membuat lahan gambut menjadi rentan terbakar. Kanalisasi tersebut sangat terkait dengan aktivitas perusahaan.

¹⁴³ Wawancara dengan Kerie Ambon pada 06 Maret 2020.

Alhasil jika musim kemarau tiba, kehidupan masyarakat semakin sulit. Ada pensterilan wilayah, masyarakat tidak boleh memasuki kawasan tertentu. Alasannya karena kebakaran hutan. Jika benar kebakaran terjadi, masyarakat pula yang dijadikan kambing hitam. Bersamaan dengan itu, aktivitas perusahaan juga membuat pola hidup satwa berubah. Karena habitatnya terganggu kanalisasi, bisingnya suara mesin-mesin perusahaan, dan karena kebakaran lahan, satwa seperti kera, monyet, babi, acap bergerak menyerang perkampungan dan kebun masyarakat. Akhirnya produktivitas pertanian masyarakat menurun. Kini masyarakat bahkan sudah mulai mengeluarkan biaya konsumsi tambahan untuk membeli beras.

Selain menggarap lahan pertanian, aktivitas produksi masyarakat selanjutnya adalah mencari ikan. Masyarakat Lebak Rawang menyebut aktivitas ini dengan nama *bekarang*, sementara alat untuk menangkap ikannya disebut *tajur*. Alat ini berbeda dengan pancing. Jika pancing dipegang, *tajur* diletakkan begitu saja. Batang atau tuasnya terbuat dari bambu berukuran sekitar satu meter. Sekali *najur*, butuh hingga ratusan *tajur*. Selain itu, ada pula alat bernama bubu, semacam perangkap dari bambu atau kayu. Penggunaan bubu sangat bergantung pada jenis ikan yang akan ditangkap. Jika hendak menangkap belut, maka bubu ditenggelamkan di dalam air. Jika hendak menangkap ikan, bubu hanya ditenggelamkan setengah bagian, dibiarkan agak terapung dan kemudian ditinggalkan 2-3 malam. Setelah itu baru diambil hasilnya. Dan hampir semua alat tangkap tradisional didapatkan di sekitar perkampungan maupun di wilayah kelola masyarakat.

No	Karakteristik dan Relung Habitat	Jenis Ikan
1	Aliran Sungai Kecil, Anak Sungai	Seni, Seluang, Cepale, Sumpit, Jejulong
2	Lebak dangkal, dengan rerumputan jarang	Sepat Siam, Sepat Mata Merah, Betok

No	Karakteristik dan Relung Habitat	Jenis Ikan
3	Sungai dalam dengan timbunan rumput/tumbuhan mengapung	Ruan, Toman, Bujok, Tembakang, Sapil
4	Lebak/Rawa dangkal dengan rerumputan lebat	Selincah, Serko
5	Air mengalir rerumputan lebat	Lele buntak, Lele panjang
6	Di bawah timbunan, gambut mengapung, tidak Mau terkena matahari	Tapa, Baung
7	Di perairan bersemak dalam Rawang	Belut
8	Di sungai, keluar ketika banjir	Lais

Tabel 3.6 : Pembagian ekosistem gambut berdasarkan habitat ikan. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

No	Jenis Ikan	Makanan Ikan	Bulan												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tapa	6,7,8,12,15,16,17								+	+	+	+	+	
2	Toman	1,3,4,5,6,7,8,10,11,12				+	+	+	+				+	+	+
3	Bujok	6,7,8,10,15,16,17,18	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+
4	Serko	6,7,8,10,15,16,17,18	+	+	+								+	+	+
5	Ruan	1,2,3,4,5,7,8,10,15,16,17,18,20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Selincah	Telur semut, lumut, serangga	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Sepat Siam	Lumut, kompos											+	+	+
8	Sepat Mata Merah	Lumut, kompos	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Betok	3-18,20, anakan	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Sapil	Telur semut, lumut, serangga				+	+	+	+						
11	Tembakang	Telur semut, lumut, serangga	+	+									+	+	+

No	Jenis Ikan	Makanan Ikan	Bulan												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Lele Buntak	5,6,anakan 7, 15,16,17,18,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Lele Panjang	5,6,anakan 7, 15,16,17,18,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Baung	15,16,17	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Seni	Lumut, kompos	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Seluang	Lumut, kompos	+	+	+										
17	Cepale	Lumut, kompos	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Sumpit	Lumut, kompos	+	+											
19	Belut	Sampah ikan						+	+		+	+	+		
20	Jejulung	Lumut, kompos	+	+											+
21	Lais	Sampah, lumut, kompos	+	+				+	+	+				+	+

Tabel 3.7 : Kalender musim ikan di Lebak Rawang. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Aktivitas mencari ikan dikerjakan secara berkelompok. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *melebung* yakni menangkap ikan menggunakan *sanggih* dan *tanggan* bersama-sama. *Melebung* biasanya dilakukan di sebuah *lebung* atau cabang-cabang sungai kecil yang surut ketika musim kemarau. Inilah bentuk kearifan lokal lain yang hidup di Lebak Rawang. Dari kearifan itu maka tumbuh pengetahuan. Misalnya, dengan sangat cermat masyarakat mampu mengidentifikasi ekologi ikan pada ekosistem gambut. Mulai dari penamaan 21 jenis ikan yang ada, periode kemunculannya, karakter habitat masing-masing jenis, dan relasi serta peran masing-masing jenis ikan dalam mata rantai ekosistem. Pengetahuan itulah yang menjadi panduan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembagian area gambut bukan hanya soal penggambaran karakter fisik ekosistem gambut. Namun juga terkait relasi dan peran setiap jenis dalam ekosistem, persebarannya, dan keberagaman relung makhluk hidup atau faktor biotik ekosistem tersebut.



Gambar 3.13: *Lebung* atau cabang anak sungai di dalam rawang (hutan rawa gambut). Dari ekosistem semacam inilah masyarakat mencari sumber penghidupan. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Hutan rawa gambut juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Lebak Rawang. Salah satunya dengan cara *kerawang*. Cara ini termasuk bentuk kearifan lokal. Kayu-kayu yang terkubur di hutan diambil dan dimanfaatkan, bisa untuk menjadi bahan bangunan atau pun untuk bahan perahu. Sementara untuk hasil hutan bukan kayu, biasanya masyarakat menyadap Pohon Kabung. Pohon ini dapat diolah menjadi gula merah kental. Selain itu, masyarakat juga biasa mengambil purun untuk diolah menjadi bahan anyaman. Purun-purun yang tumbuh di wilayah gambut juga terkenal memiliki tingkat keasaman yang tinggi.

Sebenarnya, ragam praktik mengelola ekosistem gambut di Lebak Rawang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Misalnya, pengetahuan lokal bagaimana mereka menabung lewat *ngingun*, beternak kerbau rawa, tidak berlebihan dalam menangkap ikan, dan menerapkan pertanian alami. Pengetahuan tersebut juga gambaran bagaimana masyarakat hidup selaras dengan alam. Namun, setidaknya sejak 20 tahun terakhir, keadaan di Lebak Rawang makin terancam. Wilayah kelola masyarakat makin berkurang, terutama karena ekspansi tiada akhir perusahaan perkebunan monokultur. Misalnya,

pada 2018, sebuah perkebunan sawit seluas 10.550 hektar berencana akan mencaplok lahan gambut di 5 desa yang masuk wilayah Lebak Rawang.

E. Warga Lebak Rawang Melawan Ekspansi Sawit

Komunitas Lebak Rawang terdiri dari 5 desa yakni Desa Jerambah Rengas, Desa Penangoan Duren, Desa Lebung Itam, Desa Tulung Seluang, dan Desa Riding. Wilayah kelola masyarakat di 5 desa inilah yang terancam oleh PT. Bintang Harapan Palma. Terutama setelah pemerintah daerah setempat mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Penerbitan surat izin tersebut, berlangsung persis pada saat kebijakan nasional moratorium izin perkebunan kelapa sawit di lahan gambut sedang berlaku. Dengan demikian, PT. Bintang Harapan Palma seolah sedang membangkangi aturan yang berlaku. Hal ini semakin memperpanjang deretan praktik serupa yang terjadi di berbagai tempat. Meski, tidak jarang, aturan tercipta justru memang untuk memfasilitasi perusahaan.



Gambar 3.14 : Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bintang Harapan Palma (BHP). Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Penerbitan IUP adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan rakyat memanfaatkan potensi. Label tidak produktif pun sering disematkan kepada masyarakat. Begitu pula dengan label pembalok liar dan penyebab kebakaran hutan gambut. Padahal faktanya berkebalikan. Dalam kurun waktu seperempat abad terakhir, kebakaran terjadi karena maraknya izin usaha yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Semua itu didasari oleh kebijakan yang menempatkan perkebunan skala besar macam kelapa sawit sebagai target utama masa depan. Selain itu, ekspansi perkebunan monokultur juga menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan pembukaan lahan gambut. Banyak perusahaan perkebunan yang mengambil langkah pembakaran untuk *land clearing*. Dan itu dikerjakan secara rapi dan sistematis. Bahkan sejak awal kebun telah didesain sedemikian rupa agar proses pembakaran tidak menimbulkan kecurigaan.

Pembangunan kanal-kanal (kanalisasi) sebagai drainase perkebunan juga menimbulkan persoalan: pengeringan lahan gambut secara besar-besaran. Akibatnya, terjadi penurunan muka air tanah pada kawasan bergambut. Kemudian hal itu berdampak pada tingkat kekeringan yang tinggi. Alhasil gambut pun menjadi sangat rentan terbakar. Karena itu, bukan masyarakat yang menyebabkan maraknya kebakaran hutan, namun justru aktivitas perusahaan. Sebab, sudah turun-temurun masyarakat Lebak Rawang hidup di lahan gambut. Dari ekosistem rawa gambut pula masyarakat menggantungkan hidup. Dari bercocok tanam dan berladang, menangkap ikan, beternak, dan mengumpulkan perkakas penopang kehidupan. Semua dikerjakan tanpa merusak. Kini, wilayah kelola rakyat komunitas Lebak Rawang terancam kepunguan perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kebun akasia (tanaman industri).

Semenjak pemerintah melarang pembakaran lahan, budaya pertanian *sonor* terancam hilang. Produksi beras kian menurun. Masyarakat pun bertahan dengan sisa-sisa kekayaan dan tetap

terus menjadikan alam sebagai penopang hidup. Namun kian hari, ekosistem pendukung di sekitar Lebak Rawang makin terkepung konsesi perusahaan. Banyak aktivitas masyarakat yang terganggu seperti, misalnya, mencari ikan. Padahal hari ini produksi ikan sudah tidak begitu menghasilkan. Jumlahnya pun sudah tidak banyak. Salah satunya karena faktor panas kemarau. Faktor lainnya adalah aktivitas perusahaan, terutama karena banyak daerah tangkapan ikan yang kini masuk wilayah perusahaan. Hal itu semakin menyusahakan masyarakat. Padahal, seperti penuturan seorang masyarakat setempat,

“Ini bumi (tanah) kami. Tapi malah ditanya ktp-lah, ditanya ini itu lah, masuk ke lahan ini lah, dan lain sebagainya. Itu yang bikin susah. Padahal masyarakat sadar bahwa bumi yang mereka diami adalah bumi nenek moyang kami. Tapi ketika perusahaan masuk, justru malah aturan perusahaan (asing) itu yang digunakan di bumi kami. Dan kami sedih. Ko malah kami yang harus setor KTP atau kartu pengenalan jika hendak masuk ke wilayah perusahaan. Kadang-kadang kita mau mancing saja harus bawa KTP. Padahal kami mancing di Sungai Baung. Dan nama sungai itu dibikin oleh orang kampung sini. Hak kami pun akhirnya hilang.”¹⁴⁴

Sebelum masuknya perkebunan, dalam satu hari, 390 orang pencari ikan dapat menghasilkan sedikitnya 2 kilogram. Semua dilakukan menggunakan alat penangkap ikan tradisional. Hasil tangkapan tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, bahkan bisa menambah pendapatan sehari-hari. Dan kini, semua berangsur hilang sejak perusahaan mulai mencengkram wilayah Timur Sumatera Selatan. Salah satu perusahaan yang pertama masuk adalah PT. Waitam. Perusahaan itu beroperasi di Air Sugihan sekitar tahun 1977. Keuntungan perusahaan dihasilkan dari memotong kayu (HTI). Namun sekitar tahun 1986-1987, terjadi kebakaran hebat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu bangkrut. Sejak saat itulah

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kak Sur pada 5 Maret 2020.

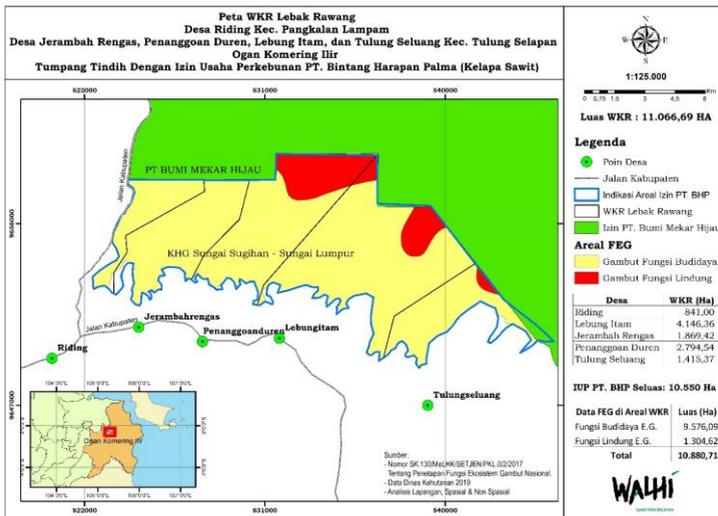
kemudian masuk putaran perkebunan. Perusahaan perkebunan yang merintisnya adalah PT. BMH sekitar tahun 1990an.

Operasi perusahaan perkebunan PT. BMH membawa dampak bagi masyarakat Lebak Rawang. Bentang alam banyak yang rusak. Kehidupan masyarakat pun menjadi sulit. Belajar dari pengalaman itu, akhirnya masyarakat Lebak Rawang sepakat untuk berjuang menolak kedatangan PT. Bintang Harapan Palma (BHP). Apalagi daerah operasi perkebunan sawit PT. BHP berbatasan langsung dengan perkampungan masyarakat. Karena itu, PT. BHP harus ditolak mentah-mentah. Tidak ada negosiasi. Tidak ada perundingan. Sebab,

“Perusahaan BMH yang berjarak puluhan kilometer jauhnya saja sudah membuat kami susah. Kami hendak ke tempat biasa mencari ikan, harus meninggalkan KTP. Aneh. Nyari ikan menggunakan pakaian nelayan saja harus bawa KTP. Itu juga yang menjadi alasan jika KTP orang-orang sini buruk, rusak. Karena rata-rata harus terpaksa dibawa terkena air sebagai jaminan untuk masuk. Padahal ini bumi kami. Kami yang buka, kami yang kenal, dan kami yang berorientasi di sini.”¹⁴⁵

Sebelumnya kehidupan masyarakat Lebak Rawang sempat terancam oleh satu perusahaan lain: PT. Bumi Sriwijaya Sentosa (BSS). Hal itu terjadi pada tahun 2012. Namun gagal karena masyarakat teguh menolak rencana pendirian perusahaan tebu di wilayah mereka. Ancaman lainnya datang pula dalam hal kebakaran lahan. Misalnya pada 2015, kebakaran hutan dan lahan terjadi di area konsesi perkebunan akasia PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Kebakaran tersebut merambat ke wilayah kelola masyarakat Lebak Rawang dan membuat produktivitas tanaman karet masyarakat menurun. Perkara ini sempat dibawa ke meja hijau. Namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru memenangkan pihak perusahaan. Ini semakin menambah bukti ancaman nyata korporasi di Lebak Rawang.

¹⁴⁵ *Ibid.*



Gambar 3.15 : Peta Wilayah Kelola Rakyat Lebak Rawang yang dimanfaatkan masyarakat lima desa. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Sampai hari ini, penolakan masyarakat atas kehadiran perkebunan kelapa sawit dan usaha-usaha yang mematikan budaya lokal (kekayaan komunitas) masih terus dilakukan. Masyarakat Lebak Rawang mencoba mempertahankan budaya *sonor*, *bekarang*, *kerawang*, *melebung*, dan budaya lokal lainnya. Masyarakat pun mulai melakukan kegiatan pemetaan wilayah kelola agar dapat diusulkan dan mendapatkan pengakuan dari negara. Tujuan masyarakat satu: kekayaan ini akan menjadi warisan budaya bagi generasi penerus komunitas yang lahir di kemudian hari. Satu model pengelolaan yang tidak semata melihat besaran rupiah, namun juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan yang selaras dengan alam.

F. Epilog: Masa Depan Lebak Rawang

Menuding masyarakat lokal tidak produktif dalam mengelola rawa gambut jelas salah. Gambaran bagaimana pengetahuan dan pengalaman masyarakat Lebak Rawang (laki-

laki dan perempuan) bisa memaksimalkan ekosistem rawa gambut adalah buktinya. Di tangan masyarakat, ekosistem gambut justru lebih lestari dan menyejahterakan. Berbeda dengan di tangan perusahaan yang justru membuat gambut rusak dan kering. Selain itu, dari segi wataknya pun sudah sangat berbeda. Korporasi atau perusahaan berwatak eksploitatif dan ekspansif demi mengejar keuntungan. Opsi pengelolaan pun sangat minim. Hanya berupa industri perkebunan monokultur skala luas.

Sementara model kelola masyarakat, murni berbasiskan pada kearifan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Kearifan lokal tersebut menyingkap makna dan hubungan yang sangat erat antara manusia dengan alam. Pola atau model pengelolaan yang dilakukan masyarakat di lahan gambut pun terbukti lebih berkelanjutan. Dalam arti, tidak menimbulkan kerusakan, lebih menyejahterakan, dan bisa diwariskan pada generasi yang akan datang. Hal itu sesuai dengan visi keadilan sosial dan kelestarian ekologi. Karena bagi masyarakat Lebak Rawang, gambut adalah hidup mereka itu sendiri. Gambut rusak, maka kehidupan mereka pun ikut rusak. Begitu pula sebaliknya. Dan hari ini, semua kearifan hidup yang ada di Lebak Rawang terancam hilang jika perkebunan kelapa sawit atau perkebunan kayu benar-benar beroperasi.

Upaya perlindungan dan pengelolaan wilayah kelola masyarakat juga membutuhkan pengakuan dari pemerintah. Terutama melalui kebijakan-kebijakan yang memihak kepada komunitas dan lingkungan. Negara pun perlu mulai memunculkan (dan mewujudkan) konsep keadilan secara ekologis dan adil secara sosial. Dapat dimulai dengan cara, membuat kebijakan skala desa yang bertujuan memproteksi kekayaan alam dan budaya lintas generasi yang masih eksis hingga hari ini. Komunitas Lebak Rawang bisa menjadi cermin. Setelah itu, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus menghormati lokalitas tersebut.

Jika bisa begitu, maka model kelola sumber daya alam di kawasan ekosistem rawa gambut oleh masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Dan itu membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sebab, inisiatif masyarakat dalam tata kelola ekosistem rawa gambut dengan gamblang telah menawarkan solusi perubahan. Terutama dari persoalan-persoalan yang mengemuka hari ini seperti krisis lingkungan hidup, bencana ekologis, dan perubahan iklim. Bahkan termasuk soal kesejahteraan masyarakat. Karena sejatinya, ekonomi lokal yang selaras dengan ekosistem gambut adalah jalan mencapai kemakmuran dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Model kelola sumber daya alam oleh korporasi justru berkebalikan. Karena itu adalah sebuah kesalahan jika negara justru menunjuk korporasi sebagai pengelola ekosistem gambut. Namun sayangnya, itu adalah sebuah kesalahan yang terus berulang-ulang, hingga menimbulkan krisis multi dimensi yang makin sulit dipulihkan: kemiskinan, konflik, hingga krisis lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, sekali lagi, lokalitas Lebak Rawang harus diakui, dilihat, dan dilindungi oleh negara. Karena dari situ warisan turun-temurun ini akan melahirkan kemakmuran masyarakat dan kelestarian alam.

G. Rekomendasi

Dari uraian permasalahan di lanskap ekologis rawa gambut Lebak Rawang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kami memberikan rekomendasi penyelesaian konflik sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bintang Harapan Palma (BHP) yang berada di kawasan fungsi lindung gambut dan wilayah kelola rakyat lima desa di Lebak Rawang;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi perizinan dan pencabutan Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHK-HT) PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Perlindungan dan pengakuan ekosistem rawa gambut Lebak Rawang melalui kebijakan khusus dengan tetap memperhatikan akses kelola rakyat atas ekosistem rawa gambut tersebut;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan PT. BMH melakukan restorasi ekosistem atas kerusakan sistem hidrologi gambut Lebak Rawang yang diakibatkan aktivitas pembangunan kanal dan praktik tanam monokultur;
5. Masyarakat lima desa di kawasan Lebak Rawang menggalang persatuan untuk melakukan perlawanan terhadap masuknya perkebunan kelapa sawit PT. BHP yang akan mengancam sumber penghidupan warga di ekosistem rawa gambut Lebak Rawang;
6. Pencabutan pelarangan pembukaan lahan dengan cara *sonor* (bakar lahan). Pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan masyarakat Lebak Rawang dilakukan dengan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan yang dimaksud adalah pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Hidup dan Mati di Lebak Belanti



Tim Penulis:

Puspita Indah Sari Sitompul
Agus Dwi Hastutik

A. Sejarah Desa Belanti

Keresidenan Palembang merupakan bentuk pemerintahan setingkat desa istimewa. Sangat khas daerah Sumatera Selatan dan biasa disebut Zaman Marga.¹⁴⁶ Dalam konteks daerah Sumatera Selatan, marga adalah komunitas asli atau masyarakat adat. Selain itu, dalam keseharian marga juga berfungsi sebagai *self governing community*—sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa hal, mereka bahkan tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar. Pada awal perkembangannya, marga merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bersendi azaz turunan darah. Pemerintahan marga pun menjadi bagian dari adat istiadat. Sehingga masyarakat juga menjadi bagian dari fungsionaris hukum adat. Tak ayal, masyarakat memelihara marga dan adat istiadat dengan penuh kewibawaan.

Pada 1854, lahir satu buku bertajuk “Kitab Undang-undang Simbur Cahaya.” Dalam aturan ini, termaktub aturan mengenai nama jabatan, tata cara pemilihan, serta syarat pemilihan jabatan dalam marga. Karena itu, sistem “pemerintahan” marga di Sumatera Selatan sudah terbentuk jauh sebelum abad 17. Pemerintahan pertamanya adalah Sido Ing Kenayan (1639 – 1650). Adapun beberapa nama jabatan yang berlaku ialah *Pasirah* (kepala marga), *Pembarap* (wakil *pasirah*), dan *Kerio* (kepala dusun). Sistem pemerintah marga di Sumatera Selatan mencapai puncaknya pada masa pemerintah Ratu Sinuhun 1630-1642 M.¹⁴⁷ Struktur perwilayahan marga ini terus berlangsung dan tetap bertahan. Paling tidak, hingga

¹⁴⁶ Sejak era Kemerdekaan Indonesia, marga menjadi unit pemerintahan terendah di dusun atau desa. Marga hanya diletakkan sebagai komunitas adat. Padahal di dalam marga, mengendap berbagai tradisi kepemimpinan dan aturan pengelolaan hubungan sosial masyarakat. Dan ini berperan penting dalam perkembangan sistem sosial masyarakat.

¹⁴⁷ Ratu Sinuhun dipercaya sebagai orang yang Undang-undang Simbur Cahaya.

berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian dilanjutkan melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor 142/KPTS/III1983. Aturan ini menentukan bahwa “Dusun sebagai bagian dari marga di Sumatera Selatan dibentuk menjadi desa sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.”

Desa Belanti masuk wilayah Marga Sirah Pulau Padang. Wilayah Marga Sirah Pulau Padang berdampingan dengan Marga Teloko dan Marga Keman. Pada zaman marga, terdapat banyak pohon bebeti (jambu air nasi). Menurut cerita orang-orang tua, nama Desa Belanti berasal dari keberadaan pohon *Bebeti*. Sampai saat ini, pohon tersebut masih ada di Desa Belanti, akan tetapi jumlahnya sudah makin sedikit. Sampai saat ini, sejarah pembentukan Desa Belanti pun belum begitu jelas. Bermula dari sejarah Kerio yang pertama yakni Kerio Saman.¹⁴⁸ Namun tidak jelas Kerio Saman menjabat berapa lama. Kemudian penggantinya, Kerio Sabtu, menjabat selama 30 tahun sejak 1936.

Sebelum era Kerio pernah pula tercatat pemimpin desa bernama Kucoali Hambali Husman. Kucoali adalah jabatan di atas kepala desa. Setelah era Kucoali baru kemudian masuk era kepemimpinan Kerio. Berikut ini adalah kerio yang tercatat pernah memimpin desa:

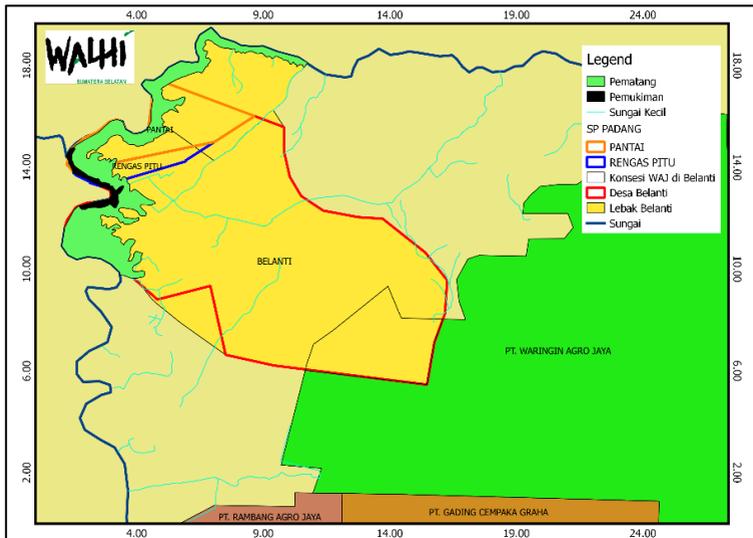
1. Kerio Saman (Tidak diketahui berapa lama)
2. Kerio Sabtu pada tahun 1936 (30 tahun menjabat)
3. Kerio Jair pada tahun 1966 (23 tahun menjabat)

Setelah era Kerio, pemimpin desa dilanjutkan oleh Kepala Desa. Berikut ini Kepala Desa yang tercatat menjabat di Desa Belanti:

1. Hj. Hakedemi pada tahun 1989 (2 periode menjabat, 1 periode 8 tahun)

¹⁴⁸ Kerio juga merupakan jabatan kepala marga.

2. Hefri pada tahun 2005 (3 periode menjabat sampai sekarang)



Gambar 3.16: Peta Daerah Lebak Belanti. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Penduduk Desa Belanti berjumlah 325 KK. Mata pencaharian utama penduduk desa ialah petani dan pencari ikan. Secara administratif, Desa Belanti memiliki luas sekitar 3000 hektar. Sejumlah 150 hektar dijadikan permukiman dan 130 hektar menjadi kebun warga. Sementara luas pekarangan ditaksir mencapai 12 hektar. Di samping itu, Desa Belanti juga memiliki karakter wilayah rawa gambut. Lahan ini dijadikan pertanian padi seluas 2.708 hektar. Secara topografi, Desa Belanti berada di Daerah Aliran Sungai Komerling. Dan secara geografis, desa ini terletak pada garis $3^{\circ}16'23.54''S$ dan $104^{\circ}53'7.25''E$. Sebelah Utara Desa Belanti berbatasan dengan Desa Mangun Jaya. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pampangan. Sementara batas desa Timur dan Barat adalah Rengas Pitu dan Terusan Menang.

Tahun	Penguasaan Lahan
Zaman Marga	Lahan di Belanti dikuasi oleh Marga Sirah Pulau Padang. Berdampingan dengan Marga Teloko dan Marga Keman
1930 – 1939	Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Marga Sirah Pulau Padang sudah membuka setengah lahan Belanti saat ini
Agresi Militer I (1947) – Agresi Militer II (1949)	Masyarakat sudah membuka lahan sampai ujung Rawang Gelam
1963	Terjadi kebakaran besar. Masyarakat menyebutnya “api makan tanah”
1964	Mulai mengambur padi pertama. Tapi belum berhasil
1965	Mulai masuk pendatang dari Jawa Barat dan Jawa Timur
1967	Kembali terjadi kebakaran besar
1971	Masuk pendatang dari Pegagan Ogan Ilir dan melakukan kembali pembukaan lahan bersama
1991	Terjadi kemarau panjang. Gagal panen, karena padi diserang ulat (Hama)
1992, 1994, dan 1997	Terjadi panen raya
2003 – 2006	Masyarakat masih mengalami panen raya
2007	Hasil panen mulai menurun
2008	Masyarakat masih mencoba menanam, tapi gagal
2009	Lahan mulai tidak dapat ditanami. Pertanian gagal total
2014	Masyarakat dari berbagai desa melakukan demo besar. Mereka membuka kanal perusahaan menggunakan cangkul, arit, dan parang. Alhasil air pun mengalir. Pada malam harinya perusahaan kembali menutup kanal menggunakan alat berat

Tabel 3.8 : Penguasaan lahan di Desa Belanti. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

B. Lanskap Ekosistem Gambut

Memasuki Desa Belanti, angin berembus dengan segar. Letak desa cukup jauh dari kota, sehingga udara terbebas dari

paparan polusi. Senyum ramah warga saat menyambut tamu pun menjadi rasa nyaman tersendiri. Terletak di dataran rendah Sumatera Selatan, Desa Belanti masuk dalam lanskap ekosistem rawa gambut. Terdapat dua struktur tanah di desa ini yakni tanah mineral dan rawa gambut. Tanah mineral digunakan untuk permukiman dan pematang kebon atau *talang*, sementara tanah rawa gambut digunakan untuk lahan persawahan di lebak.

Masyarakat di Desa Belanti sudah mengelola lebak sejak zaman marga. Lebak merupakan kawasan rawa yang genangan airnya dipengaruhi air sungai dan air hujan. Karena itu berlaku hukum pasang surut. Pada 1930–1949, masyarakat Marga Sirah Pulau Padang melakukan tebak tebas untuk pembukaan lahan di Lebak Belanti. Pada 1946, masyarakat pun mencoba *mengambur* (menanam) padi pertama. Walau belum mendapatkan hasil maksimal, masyarakat tetap coba menanam padi. Alhasil, seiring berjalan waktu, lahan Lebak Belanti pun dapat dijadikan tempat untuk *behume* atau bertani. Sekitar tahun 1965, para pendatang dari Jawa Barat dan Jawa Timur bersama masyarakat kembali melakukan pembukaan lahan. Masih sama, fungsinya untuk dijadikan lahan persawahan dan tempat tinggal mereka. Setelah kedatangan banyak perantau, Lebak Belanti mulai menjadi salah satu pemasok beras untuk Sumatera Selatan. Sejak tahun 1992, masyarakat berulang kali mengalami panen raya besar. Hal itu membuat Lebak Belanti diberi julukan lumbung padi Ogan Komering Ilir. Tak hanya pertanian, Lebak Belanti juga terkenal menjadi pemasok buah-buahan seperti duku, durian, dan embam.

Lahan pertanian di lebak Belanti sangat subur. Karena terletak di ekosistem rawa gambut dengan *pirit* yang tidak terlalu tebal. Dalam proses pengelolaannya, masyarakat pun tidak menggunakan pupuk, racun, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain mengelola lahan pertanian, masyarakat Lebak Belanti juga mengelola lahan *talang*. Mereka hanya menanam buah-buahan di lahan *talang*. Terutama buah-buahan yang dapat dipanen per tahun dan tidak merusak. Tak ayal, tidak ada

pohon karet atau sawit di *talang* masyarakat. Selain itu, masyarakat juga masih sering mengambil gelam di hutan. Hasilnya dapat digunakan untuk menambah pendapatan ekonomi mereka. Dengan syarat, umur gelam lebih dari 3–4 tahun.

C. Praktik Ekonomi Nusantara dan Kearifan Lokal

“Kalu tuboh/kite tinggalke padi, padi dak nyakoi kite, kalau padi tinggalke kite nyakoi padi”

Sarif, Warga Desa Belanti

Masyarakat Desa Belanti memiliki cara tradisional dalam proses penanaman padi. Meski, sekarang, sudah sedikit orang yang tetap menjalankannya. Proses pertama adalah *Ngelutuh* atau penyemaian bibit selama 2 minggu. Kemudian proses *Nanjar* (turun ke sawah). Pada proses ini padi harus ditunggu sampai 2 minggu kemudian. Setelah itu baru masuk proses *mecah anak padi*. Tujuannya agar padi tubuh lebih besar lagi dengan kedalaman air 30 cm. Lalu padi tersebut dipisah-pisah agar tumbuh tidak kerdil. Peralnya, jika tidak dipisah maka besar kemungkinan padi akan terendam. Selang 2 minggu kemudian baru padi benar-benar siap tanam. Selama padi tumbuh masyarakat tidak memakai pupuk. Sebab, sawah di Lebak Belanti berada di tanah hujan. Sehingga padi yang ditanam dapat tumbuh subur. Masyarakat hanya melakukan pembersihan *tahe* atau galangan sawah. Dan sebelum melakukan *Ngetam* atau mengambil hasil panen, masyarakat perlu melakukan tradisi *Ngantip*. Tradisi ini merupakan kearifan lokal dalam mengekspresikan rasa syukur karena mendapat berkah dari alam.



Gambar 3.17: Tradisi *Ngantip* pada 1997.

Proses *Ngantip* dilakukan pagi hari. Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah beras kuning (beras yang sudah direndam dengan kunyit), nasi *gemuk* atau uduk, telur atau ayam, dan padi *merte* (padi yang digoreng). Setelah semua persiapan selesai, mereka akan bergegas ke sawah selepas solat subuh. Hal pertama yang dilakukan di sawah adalah mengikat 7 rumpun padi yang akan dipanen. Setelah itu menghidupkan api dengan sabut kelapa, lalu membakar kemenyan sambil mengucapkan mantra:

*“Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Menyan
Aku tahu asal mule jadi menyan
Keringat Rasulullah (kemenyan ditiup/ diludahi sedikit)
Bismillahirrahmanirrahim
Asap menyan malur-malur
Asap menyan malur putih
Senderan tombak Rasulullah
Pesan Nabi kepada menyan*

Pesan menyany kepada Nabi

Minta sampaikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Hajatan (berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan)

Setelah berdoa, masyarakat akan menabur padi *merte* dan beras kuning di sekitar panen padi. Kemudian memotong 7 rumpun padi yang diikat. Lalu sajen pun diangkat dan diputar di sekitar asap. Proses selanjutnya adalah menyampaikan permisi *Kepada penghuni yang kasar dan yang halus di tempat ini*. Dan dilanjutkan dengan makan bersama.



Gambar 3.18: Para perempuan sedang melakukan *ngetam* menggunakan tuai (1997).

Masyarakat Desa Belanti cukup percaya bahwa panen pertama harus dikonsumsi oleh keluarga terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa untuk dijual. Kepercayaan semacam itu telah ada sejak zaman nenek moyang, diwariskan turun-temurun. Selain itu, ada pula satu kepercayaan lain. Misalnya, cara menurunkan padi (gabah) yang digotong di pundak tidak boleh kasar. Dengan kata lain, tidak boleh dibanting atau

dijatuhkan begitu saja. Sebab itu dianggap dapat menghambat rejeki. “*Padi jangan dicampakan, nurunke padi dari pundak dengan lembut, dikukur semangat,*” kata seorang warga Belanti, Sudirman (Iyek Bobok). Tradisi adat (marga) semacam ini kaya akan pembelajaran tentang kesabaran dan rasa syukur pada alam. Namun saat ini tradisi *ngantip* sudah makin jarang dilakukan. Bahkan beberapa orang menganggap tradisi tersebut musyrik.

Pada zaman dulu, cara mengambil hasil panen ialah memakai tuai atau sebuah pisau. Dan itu dikerjakan satu demi satu. Tujuannya agar hasil panen padi yang belum matang tidak ikut dipotong. Proses tuai dikerjakan para perempuan. Selain itu, para perempuan juga mengerjakan penyiapan lahan dan menyemai padi. Memasuki tahun 2000an, kegiatan tuai sudah jarang digunakan. Faktornya karena teknologi sudah semakin maju dan berkembang.

D. Lelang Lebak Lebung

Di Lebak Belanti juga ada proses Lelang Lebak Lebung. Proses Lelang Lebak Lebung sudah eksis sejak zaman marga dan dilaksanakan oleh pemerintahan marga. Sampai saat ini, Lelang Lebak Lebung masih tetap dilakukan. Kali ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Lelang Lebak Lebung adalah proses penjualan ikan dengan izin usaha penangkapan ikan. Tradisi ini dibatasi oleh perairan atau *tanah nyurung*. Aktivasinya tidak boleh mengganggu daerah pertanian masyarakat. Lelang dilakukan secara terbuka atau langsung dengan sistem penawaran, mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi. Penawar tertinggi disebut *pengemin*. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah penghasilan daerah dan akan disalurkan untuk pembangunan daerah. Akan tetapi, hasil dari penangkapan ini kian berkurang. Terutama sejak daerah persawahan di Lebak Belanti tidak dapat difungsikan kembali.

Sebelum bentang alam Lebak Belanti berubah, daerah ini memiliki dua musim yakni musim terendam dan musim kering.

Saat ini, musim terendam nyaris berlangsung sepanjang tahun. Alhasil sawah masyarakat pun tidak lagi berfungsi. Hal ini berimbas pada tidak berjalannya aktivitas ternak dan berkurangnya jenis ikan yang hidup di lebak. Pola kehidupan sosial-ekonomi masyarakat juga bergantung pada keberlangsungan dua musim tersebut. Misalnya, saat musim hujan, kawasan persawahan rawa gambut akan terendam. Sehingga pilihan masyarakat adalah dengan beraktivitas mencari ikan. Sementara pada musim kering, kawasan lebak pun turut mengering. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas pertanian padi dan palawija. Pada musim kering, aktivitas mencari ikan juga dilarang. Dan saat peralihan musim, biasanya itu merupakan puncak musim panen ikan.

Boks 2: Sejarah Lelang Lebak Lebung

Secara historis, lelang lebak lebung sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Marga Kesultanan Palembang Darusalam. Laporan Dinas Perikanan Darat tahun 1953 juga membahas ini. Laporan tersebut juga mengutip catatan Residen Pruys vander Hoeven "verteg jaren" (1873-1876). Catatan orang Belanda itu menyebutkan bahwa kebiasaan melelangkan perairan telah dimulai sejak tahun 1850. Kegiatan tersebut bertujuan mendapat uang untuk marga atau "*gemeente fondsen*." Pelaksanaan kegiatan ini kemudian dikukuhkan Pemerintah Hindia Belanda melalui *Inlandche Gemeente Ordonantie voor Palembang* (IGOP), *Staatblad* 1919 No. 814. Aturan tersebut menetapkan beberapa hal. Termasuk susunan kepentingan *gemeente-gemeente* bumiputra di daerah Palembang. Pada 1938 aturan tersebut pun dicabut melalui *Staatblad* 1938 No. 490.

Sampai tahun 1974, Lelang Lebak Lebung masih dilaksanakan oleh Pemerintah Marga. Aturannya pun dibuat oleh Pemerintahan Marga tersebut. Karena itu, masing-masing marga dapat memiliki aturan yang berbeda. Aturan marga dalam pelaksanaan lelang terbagi dua yaitu (1) peraturan yang disusun dan ditetapkan *pasirah* dengan DPR-Marga; dan (2) Bukan berbentuk peraturan (formal) yang disepakati marga. Namun justru berbentuk pengumuman yang disampaikan *pasirah* saat pelaksanaan lelang. Dalam praktiknya, kedua jenis aturan tersebut sangat ditaati masyarakat.

Hasil Lelang Lebak Lebung dapat menjadi sumber pendapatan marga. Beberapa dialokasikan untuk menggaji perangkat dan dewan marga serta untuk pelayanan umum. Pada 24 Maret 1983, Pemerintah Indonesia menghapus sistem pemerintahan marga. Dusun-dusun pun dijadikan desa. Pemerintahan saat itu juga memberikan sejumlah pembiayaan pembangunan untuk Pemerintah Desa. Sampai saat ini, model pembiayaan pembangunan bagi desa terus berlanjut. Sementara pemerintahan Marga harus berusaha mandiri untuk melanjutkan tradisi kebudayaan. Salah satunya melalui tradisi Lelang Lebak Lebung. Sayangnya, hasil penangkapan ikan dari tradisi Lelang Lebak Lebung makin berkurang. Kondisi ini dipengaruhi aktivitas perusahaan kelapa sawit yang merusak ekosistem sungai, gambut, dan lebak.

E. Ancaman dan Inisiatif

“Jika lahan pertanian masyarakat di Lebak Belanti mengalami banjir maka pintu air perusahaan akan dibuka dan sebaliknya jika Lebak Belanti mengalami kekeringan pintu air akan di tutup oleh perusahaan”

Humas PT. WAJ

Lebak Belanti berada di Kawasan Hidrologi Gambut Sungai Sibumbang-Sungai Betok. Sudah 11 tahun daerah ini mengalami banjir, khususnya di daerah persawahan seluas 2.708 hektar. Banjir tersebut kuat kaitannya dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Alhasil gambut pun berubah fungsi. Ia tidak lagi mampu menjadi daerah penyimpanan air. Keadaan ini makin diperparah karena sekat kanal perusahaan sudah menghambat jalan keluarnya air. Sehingga aliran air yang seharusnya mengalir ke Danau Jungkal, justru hanya berhenti sampai di Lebak Belanti. Kejadian yang paling parah terjadi pada 2007. Saat itu, masyarakat Lebak Belanti sedang coba menanam padi. Namun karna air tidak surut, akhirnya masyarakat pun mengalami gagal panen. Pada tahun

berikutnya hal serupa kembali terjadi, bahkan makin parah lagi. Daerah persawahan pun berubah layaknya danau yang luas.



Gambar 3.19: Daerah Lebak Belanti. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Lokasi PT. Waringin Agro Jaya (WAJ) berseberangan langsung dengan Wilayah Kelola Rakyat Lebak Belanti. Luas konsesi perusahaan ini mencapai 26.000 hektar. Hal ini menjadi ancaman bagi setidaknya 16 desa di sekitar Lebak Belanti, karena keberadaan perusahaan berpotensi besar mengakibatkan gagal tanam di areal persawahannya. Perkaranya jelas yakni banjir. Namun, keberadaan perusahaan juga tidak hanya menimbulkan banjir. Banyak pula masyarakat yang kehilangan lahan karena wilayahnya tumpang tindih dengan konsesi perusahaan.

Keadaan banjir terus menerus membuat banyak masyarakat yang beralih profesi. Sebagian besar beralih dari petani menjadi buruh tani di wilayah persawahan lain. Bahkan ada pula yang memutuskan pindah karena tidak lagi memiliki pemasukan. Kini, hanya tersisa 2 Rukun Tetangga (RT) saja yang memutuskan bertahan. Padahal dulu di RT. 6 ada sekitar 60 Kepala Keluarga, RT. 7 ada 80 Kepala Keluarga, dan RT. 8 ada 40 Kepala Keluarga.

Hidup di tengah banjir, memaksa masyarakat untuk terus menyesuaikan diri. Maka menjadi nelayan adalah satu-satunya cara agar dapat bertahan hidup. Aktivitas nelayan dilakukan

sepanjang hari. Masyarakat biasa menggunakan *ketek* (perahu kecil dengan mesin kecil) untuk mencari ikan. Hasil tangkapan tersebut yang mereka gunakan untuk makan sehari-hari. Jika berlebih maka akan dijual ke pengepul. Meski pendapatan kian tak menentu, masyarakat tak kenal putus asa. Mereka masih terus coba bekerja untuk menyambung hidup.

Wilayah Lebak Belanti cukup jauh dari ibu kota pemerintahannya yakni Desa Induk Belanti. Tak ayal, jauh pula dari akses kesehatan dan pendidikan. Satu-satunya fasilitas yang ada hanya posyandu. Itu pun beroperasi satu bulan sekali. Agar dapat memenuhi kebutuhan pokok lain seperti beras, minyak, mereka harus pergi ke daratan. Dan itu memakan waktu sekitar satu jam perjalanan menggunakan *ketek* dari lebak. Masyarakat biasanya akan pergi seminggu sekali, untuk memenuhi kebutuhan satu minggu.



Gambar 3.20: Lahan Lebak Belanti yang sudah ditumbuhi *Setedok*. Sumber: WALHI Sumatera Selatan.

Pada masa lalu, Lebak Belanti adalah wilayah subur. Tidak heran jika Lebak Belanti sempat menjadi daerah lumbung pangan. Namun semua telah berubah. Kini Lebak Belanti justru menjadi lumbung *setedok* atau rumput malu. *Setedok* merupakan jenis tanaman yang berkembang sangat cepat, bahkan kini *setedok* sudah menjalar hingga pematang sawah. Kondisi

tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih. Mereka jadi harus menghilangkan tumbuhan ini yang ketebalannya bisa mencapai 1,5 meter. Salah satu faktor keberadaan gulma ini adalah jalur air yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi wilayah Lebak Belanti kini semakin basah. Musim terendam terjadi nyaris sepanjang tahun. Perubahan bentang alam di Lebak Belanti juga mendatangkan persoalan lain. Sebuah ikan predator muncul dan acap menghabiskan ikan-ikan endemik. Ikan predator tersebut adalah ikan sapu-sapu. Ikan ini pun berbahaya untuk dikonsumsi. Kini populasinya pun makin banyak. Selain itu, perubahan bentang alam di Lebak Belanti juga berdampak pada anak-anak di sana. Misalnya pada Karmila dan Kamanjaka.

Karmila merupakan gadis berusia 20 tahun. Ia tidak seberuntung orang-orang seusianya. Pasalnya, Karmila harus merasakan kepahitan hidup sejak masih berusia 12 tahun. Saat itu, Karmila terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Keluarga Karmila dirundung kesulitan ekonomi. Salah satu penyebabnya ialah banjir yang menggenangi rumah mereka. Karmila lahir tahun 2000. Ia merupakan cucu Pak Sarif, satu dari sedikit warga yang masih bertahan di Lebak Belanti. Saat teman-teman sepekerjaannya sekolah, ia harus membantu orang tua di rumah. Dan Karmila tidak sendiri. Ada sekitar 25 anak bernasib serupa di Lebak Belanti. Mereka sama-sama meninggalkan bangku sekolah karena keadaan ekonomi. Beberapa teman Karmila akhirnya banyak yang memilih menikah dini. Lagi-lagi, penyebabnya adalah ekonomi. Bahkan ada juga menikah sejak umur 14 tahun.

Sebenarnya Karmila sangat ingin kembali sekolah. Akan tetapi, ia terlanjur malu dengan umurnya. Memilih bekerja pun bukan satu perkara mudah. Karmila memiliki keterbatasan akses dan kemampuan. Sehingga ia pun sulit mendapat kerja, selain membantu orang tua dan merawat sang adik, Kamanjaka. Kini Kamanjaka telah berusia 15 tahun dan nasibnya pun sama. Ia pun terpaksa berhenti sekolah setelah tamat dari bangku Sekolah Dasar. Kedua orang tua Karmila dan Kamanjaka tidak

lagi sanggup menyekolahkan anak-anak mereka. Apalagi, akses menuju sekolah pun cukup jauh dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat ini, Kamanjaka berkerja menjadi nelayan bersama ayah dan sang kakek. Ia bekerja pada waktu malam sampai subuh menjelang.

Perubahan bentang alam Lebak Belanti memang membawa dampak parah bagi masyarakat. Banyak hal dalam kehidupan masyarakat hilang. Dan menurut analisis masyarakat, kepiluan itu bermula dari adanya aktivitas perusahaan. Terutama yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit seperti PT. Rambang Agro Jaya, PT. Gading Cempaka Graha, dan PT. Waringin Agri Jaya. Ketiga perusahaan ini berada di hulu Lebak Belanti. Ketiga perusahaan ini pula yang membuat kanal-kanal besar pada tahun 2005. PT. Warigin Agri Jaya adalah perusahaan yang paling dekat dengan wilayah Lebak Belanti. Perusahaan ini memiliki kanal berlapis yang menyekat aliran sungai. Sehingga air yang seharusnya mengalir dari hulu ke hilir pun berhenti di Lebak Belanti.

Pada 2009, pihak perusahaan pernah bertemu dengan masyarakat Belanti. Pada saat itu, masyarakat menuntut perkebunan plasma dengan pembagian sebesar 60:40. Namun pihak perusahaan menolak desakan tersebut. Setelah berdebat alot, akhirnya muncul kesepakatan bahwa pembagian keuntungan perkebunan plasma adalah 80 untuk perusahaan dan 20 untuk masyarakat. Dengan tambahan, perusahaan siap untuk membuka pintu air apabila lahan pertanian masyarakat mengalami banjir. Begitu pula sebaliknya. Jika Lebak Belanti kekeringan maka perusahaan harus menutup pintu air. Namun pada akhirnya, semua janji manis perusahaan kepada masyarakat hanya kebohongan belaka. Tidak ada pembagian plasma yang dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan janjinya soal pintu air. Bahkan sampai sekarang, belum ada hal konkrit yang dilakukan perusahaan untuk meringankan masalah masyarakat.

Pada 2014, masyarakat melakukan inisiatif untuk aksi pembobolan kanal perusahaan PT. Waringin Agro Jaya. Aksi itu dipelopori oleh masyarakat sendiri. Mereka menulis surat kepada sesama masyarakat untuk melakukan aksi pembobolan kanal perusahaan. Akhirnya dengan membawa peralatan sederhana seperti cangkul, arit, dan kapak, masyarakat pun melakukan aksinya. Peserta aksi saat itu tidak hanya dari Lebak Belanti, namun juga dari desa di sekitarnya. Semua kompak berangkat menuju tanggul yang dituju. Aksi tersebut pun berhasil.

Pada malam harinya, perusahaan kembali menutup tanggul menggunakan alat berat. Setelah aksi itu, banyak oknum pemerintahan yang datang ke Desa Belanti. Namun mereka datang hanya melihat saja, tanpa memberikan solusi apapun atas permasalahan di Lebak Belanti. Sampai sekarang, sudah banyak upaya yang dilakukan masyarakat Desa Belanti dan desa-desa sekitarnya. Terhitung, sudah 11 tahun lamanya mereka berjuang. Mereka sudah pernah datang ke pemerintah daerah, nasional, dan membobol kanal perusahaan. Namun itu belum membuahkan hasil signifikan. Meski demikian, hal itu tidak membuat masyarakat surut. Tujuan masyarakat tetap bulat yakni kembali menjadikan Lebak Belanti sebagai lumbung pangan.

Menjaga Surga di Timur Borneo: Praktik Ekonomi Masyarakat adat Lung Isun



Tim Penulis:

Ignasius Hanyang
Boy Jerry Even Sembiring

A. Mengenal Surga Bernama Lung Isun

“Murip Banguuq taq telsaan, Tipang tenangaan nyelibau nyelung.” Begitulah salam dari suku Dayak Bahau Busang Umaq Suling Lung Isun. Salam ini punya makna religi. Kurang lebih, dapat diartikan sebagai “hidup sejahtera dalam kewibawaan adat, Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati.” Namun sejak 1960an, salam ini sudah mulai jarang dipergunakan. Beberapa praktik adat dan ritualnya juga mulai hilang. Terutama setelah mayoritas penduduk berangsur-angsur masuk agama Katolik. Cerita ini kami dapat dari seorang penduduk bernama Kristina Yeq Lawing. Kami biasa memanggilnya *Inai Yeq*.¹⁴⁹ Namun sejak dua tahun terakhir, kesadaran untuk menghidupkan kembali salam, praktik adat, dan tradisi mulai bersemi. Para tokoh sepuh sadar; apabila pengetahuan mereka tidak diwariskan ke generasi muda, maka berpotensi menghilangkan identitas orang Bahau Busang Umaq Suling Lung Isun. *Inai Yeq* menambahkan,

“Jangan sampailah adat yang baik ini hilang, tinggal sejarah, mau jadi apa kampung ini kalau anak mudanya tidak lagi tahu dan tunduk pada adat.”

Sampai saat ini, terdapat beberapa praktik adat dan budaya yang masih eksis. Seperti, misalnya, adat *anaak* dalam ritual kelahiran, adat *hawaq* dalam proses perkawinan, dan adat *patai* dalam proses penguburan. Selain itu, ada pula adat *lumaq* dalam proses perladangan dan beberapa adat lainnya. Beberapa ketentuan hukum adat dalam interaksi sosial juga masih dipertahankan. Salah satu bentuknya adalah masih eksisnya ketentuan mengenai perjanjian dan kelembagaan peradilan lokal. Dan, sebelum masuk lebih jauh, tulisan ini akan membeberkan empat hal secara ringkas terlebih dahulu. Empat hal tersebut ialah asal usul nama, riwayat perpindahan, transisi sistem kehipuian, dan mengapa Lung Isun layak disebut surga.

¹⁴⁹ Istilah dalam Bahasa Bahau untuk menyebut Ibu atau *Emak*.

1. Asal Usul Nama dan Penduduk Lung Isun

Kampung Lung Isun lebih dikenal dengan nama Long Isun. Bermula dari kesulitan pemerintah menulis dan mengucapkan nama 'lung'. Agar memudahkan penyebutan, nama yang digunakan adalah 'long'. Tak ayal, Pemerintah Kutai pun memberi nama kampung tersebut Long Isun. Sementara masyarakat adat tetap lebih mengenal nama Lung Isun Datarah Suling. 'Long' dan 'Lung' dianggap sebagai sinonim, sehingga dianggap tidak memiliki perbedaan makna.

Lung Isun berasal dari Bahasa Bahau yakni *lung* dan *isun*. *Lung* berarti muara dan secara harfiah, *Isun* berarti asap. *Isun* juga menjadi nama anak sungai utama di kampung tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya Lung Isun merupakan nama anak Sungai Melaseh. Sementara menurut versi lainnya, Lung Isun merupakan nama orang yang pertama kali menetap di kampung. Versi ini berasal dari penuturan beberapa tokoh kampung. Namun sampai saat ini, belum ada cerita lengkap tentang orang pertama yang dimaksud dalam frasa Lung Isun.

Alur Pertautan Suku Dayak = Apo Kayan Group



Gambar 3.21: Alur Pertautan Suku Dayak. Sumber: Nomaden Institute.

Penduduk asli Kampung Lung Isun adalah Suku Dayak Bahau Umaaq Suling. Asal usul keturunan Dayak Bahau Umaaq Suling ini sangat terkait dengan riwayat perpindahannya. Bermula dari kampung induk bernama Kampung Balui di Malaysia. Berdasarkan cerita beberapa tokoh kampung, Dayak Bahau Umaaq Suling merupakan keturunan dari Dayak Apo Kayan. Cerita ini terkonfirmasi dengan data Perkumpulan Nurani Perempuan. Dan riwayat perpindahan penduduk Kampung Lung Isun terbagi menjadi empat fase. Detail cerita setiap fase perpindahan adalah sebagai berikut:

a. Fase 1

Sejarah penduduk Kampung Lung Isun berawal dari penduduk Balui. Tidak ada yang mengetahui pasti siapa dan kapan tepatnya waktu perpindahan tersebut. Kampung Balui kini disebut Belaga. Lokasinya berada di wilayah Serawak, Malaysia. Saat itu, cikal bakal penduduk Lung Isun menyebut diri mereka Suku Kayan Balui. Proses perpindahan dimulai ketika mereka menyeberang Sungai Jengayan di wilayah *ulu* Sungai Mahakam. Mereka pun membuat jembatan penyeberangan dari *jait* (rotan). Ketika mulai menyeberang, *Jait* terdengar seperti suara anjing menggonggong. Warga yang sudah berada di seberang berteriak "*jaga payau.*" Sementara warga yang belum menyeberang mendengar teriakan berbeda. Mereka justru mendengar "*ayau*" yang berarti ada musuh. Sehingga warga pun berinisiatif memotong jembatan penyeberangan.

Warga yang belum menyeberang kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menetap di Sungai Balui/Belaga (Malaysia), sehingga disebut Kayaan Balui. Sementara warga yang sudah menyeberang juga melanjutkan perjalanan sampai di Apau Kayaan, sehingga mereka disebut Kayaan Mekaam (bahasa Kayaan Mekaam dengan Kayaan Balui memiliki kesamaan). Alasan mereka pindah dari Balui/Belaga ke Apau Kayaan ialah karena ada serangan *Ayau*. Di samping itu, tempat asal mereka juga tidak bagus untuk bercocok tanam, karena itu mereka perlu mencari wilayah baru.

b. Fase II

Fase kedua bermula ketika mereka menetap di Apau Kayan. Saat itu mereka menyebut dirinya sebagai Suku Kayaan Mekaam. Selama menetap di Apau Kayaan mereka melakukan kegiatan bercocok tanam seperti membuat ladang, berburu, dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, mereka juga memelihara kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Terutama dengan membuat kebun buah-buahan hutan, mengambil madu hutan, damar, rotan, sarang walet, serta mencari gaharu.

Suku Kayaan Mekam memiliki kepercayaan yang kuat terhadap roh-roh leluhur. Hal itu terungkap dalam pelbagai kegiatan ritual adat. Pemaknaan pada kondisi atau tanda-tanda alam juga memengaruhi kepercayaan lokal masyarakat. Kepercayaan itu sering menjadi pertimbangan melakukan perpindahan kampung (*umaaq*). Karena itu, sebelum memilih tempat bermukim, perlu diawali dengan mencari pertanda alam yang baik (*alaaq yoq*).

Pertanda alam (*yoq*) juga berpengaruh terhadap jangka waktu masyarakat menetap. Misalnya dari *Yoq* yang diperoleh, terdapat yang seusia jagung dan ada juga seusia *para*.¹⁵⁰ Apabila usia kampung dianggap sudah cukup, maka masyarakat harus pergi mencari *yoq* selanjutnya. Setelah itu baru mendapat lokasi perkampungan baru. Setelah sekian lama menetap di Apau Suling, masyarakat pun bergeser, pindah. Setelah sebelumnya mendapat pertanda tidak baik dari *Yoq*, mereka kemudian pindah ke Sungai Gelaat, cabang Sungai Oga Kiri. Sungai tersebut adalah anak Sungai Yung Keliman (Mahakam).

c. Fase III

Sekian lama menetap di Sungai Gelaat, mereka masih menyebut diri Kayaan Mekam. Namun karena tidak mendapat hasil cocok tanam yang baik, para tetua adat pun kembali melihat *Yoq*. Mereka pun mulai berjalan hingga memasuki Sungai Boh dan terus menyusuri sebuah anak sungai tanpa

¹⁵⁰ Alat untuk menyimpan persediaan makanan untuk babi, ikan, dan lain-lain. Biasanya terletak di atas tungku api di dapur.

nama. Perjalanan dilanjutkan lagi hingga Apau Suling (Bukit). Di perbukitan itulah kemudian mereka menetap. Alasan membuat perkampungan di bukit ialah agar cepat mengetahui keberadaan musuh atau *Ayau*. Perkampungan baru ini dinamakan Batoq Masaan atau Batoq Palaaq. Di tempat inilah mereka mengubah nama menjadi Bahau Umaq Suling. Sebab, kampung mereka saat itu memang berada di Apau Suling. Dan karena tidak mengetahui nama sungai dekat perkampungan, mereka pun melakukan ritual adat Mela (mebersihkan). Ritual tersebut menggunakan kayu bernama *Seh*, sehingga nama sungai tersebut pun menjadi Sungai Melaseh.

Setelah menetap lama di Apau Suling, para tetua adat pun kembali melihat *Yoq*. Terutama setelah mulai merasakan kurang produktifnya hasil bercocok tanam. Berdasarkan pesan *Yoq*, mereka harus berpindah ke hilir Apau Suling. Lokasi baru tersebut kelak bernama Kampung (*Luvung*) Lung Isun. Posisinya di sebelah kiri Sungai Melaseh—anak Sungai Mahakam. Selang beberapa waktu, terjadi kebakaran di Kampung Lung Isun. Hal itu mendorong masyarakat bermusyawarah (*pepetang kenap*). Dari hasil musyawarah, mereka bersepakat pindah ke Lulau Pakuq. Namun setelah sekian lama menetap di wilayah tersebut, mereka pun kembali pindah ke Lung Isun. Tidak lama kemudian, hasil bercocok tanam di Lung Isun kembali tidak produktif. Alhasil para tetua adat pun kembali melihat *Yoq*. Hasilnya adalah mereka perlu mencari perkampungan baru.

Tempat bermukim selanjutnya adalah Lulau Siraang. Sekian lama menetap, wabah penyakit menerjang Lulau Siraang. Warga pun sepakat untuk kembali pindah ke Lulau Pakuq. Di Kampung Lulau Pakuq terdapat 4 Hipui: Hipui Umaq Paloq atau Kuleh, Hipui Umaq Suling atau Belareq Karong, Hipui Laden, dan Hipui Luhut Ului. Namun setelah bermukim lama, terjadi sebuah kejadian aneh di Lulau Pakuq. Banyak warga meninggal dunia tanpa sebab. Para Hipui pun bersepakat untuk meninggalkan kampung Lulau Pakuq dan membuat

perkampungan baru. Beberapa kembali ke Lung Isun dan beberapa mencari tempat lain.

Para Hipui telah membuat kesepakatan bahwa mereka akan pindah secara bertahap. Terutama agar tidak terjadi tabrakan antar warga. Bunyi kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pindahan pertama tahun 1914. Batoq Ketut pindah ke Umaq Baleh. Saat ini disebut Long Pahangai 1.
- 2) Pindahan kedua tahun 1915. Buaq Bekilat dan Laing membuat *luwung*/rumah singgah di Gah Luvung.
- 3) Pindahan ketiga tahun 1916. Luhut Ului membuat *luwung*/rumah singgah di Letang Lung, sebelah kanan Mudik.
- 4) Pindahan keempat tahun 1917. Laden membuat *luwung*/rumah singgah di Karangang Letang Lung.

Pada 1918, terjadi satu pertemuan besar para raja atau Hipui di seluruh Sungai Mahakam. Pertemuan tersebut berlangsung di Lung Pahangai. Dalam pertemuan itu, Bang Juk terpilih sebagai raja di seluruh Sungai Mahakam. Selain itu, pertemuan juga menghasilkan Boven Mahakam—suatu tempat yang dibuat oleh Belanda (Tuan Baat). Sejak saat itu mereka membuat batas seluruh tanah di Kecamatan Lung Pahangai, mulai dari Ujoh Bilang sampai Kasoh (Long Apari).

d. Fase IV

Fase terakhir merupakan fase mereka menetap di Kampung Lung Isun. Pada fase ini, karena terdapat banyak Hipui di dalam Kampung Long Isun, terjadi pemisahan kelompok. Hipui Hang Lasah (Gelar Bataang Arung) membawa pengikutnya membuat kampung baru bernama Naha Aruq. Selanjutnya, warga yang menetap di Batoq Ketut dan Letang Lung melakukan perundingan. Hasilnya mereka sepakat untuk bersatu membuat Kampung Lung Pahangai. Dengan catatan, warga Letang Lung tinggal di Naha Saklat dan Batoq Ketut tinggal di sebelah hilir.

Setelah menetap sekian lama, pada 1991 Pemerintah Kutai melalui program *regrouping* desa, menyatukan kampung-kampung itu. Mulai dari Kampung Datah Naha, Lirung Ubung, Naha Aru, Lung Isun di Lulau Liaang, hingga Datah Suling. Namun program *regrouping* tersebut tidak semudah yang dipikirkan pemerintah. Sebab, program itu dilakukan tanpa berdasarkan kesepakatan masyarakat. Alhasil saat perpindahan ke Datah Suling, terjadi perbedaan sikap antar masyarakat. Dampaknya pun tetap terasa sampai saat ini. Masyarakat Lung Isun akhirnya terbagi ke dalam 2 kampung yakni Kampung Melaseh yang berada di dalam Sungai Melaseh dan Lung Isun Datah Suling yang berada di tepi Sungai Mahakam. Secara administratif Kampung Lung Isun Datah Suling memiliki Surat Keputusan Kampung definitif, sementara Lung Isun Melaseh sebagai dusun (Daleh).

Kebijakan *regrouping* juga mendorong pendatang masuk ke Kampung Lung Isun. Namun itu tidak membuat penduduk Lung Isun mengambil posisi eksklusif. Mereka tetap menghargai para pendatang, meski sama sekali tidak mempunyai darah keturunan Dayak Bahau Umaaq Suling. Mayoritas pendatang berasal dari Suku Dayak Busang, Dayak Aoheng, Dayak Kalteng, Jawa, Banjar, dan Batak. Sebagian besar mata pencaharian para pendatang yang berdarah Dayak adalah petani. Sementara mata pencaharian pendatang dari suku lainnya ialah pedagang, tukang, dan aktivitas wiraswasta. Sikap terbuka penduduk asli Kampung Lung Isun merupakan cermin dari pepatah adat: "*Asoq Lingoq tuaaq an makan, makin pejuai kelunan.*" Secara harfiah, pepatah tersebut berarti: "anjing sesat yang sampai ke rumah kita saja dikasi makan, apa lagi manusia." Pepatah ini dimaknai sebagai pesan bijak para leluhur Kampung Lung Isun: menjaga keutuhan suku dan menjalin hubungan baik dengan suku lain adalah sebuah kebaikan.

2. Perubahan Sistem Kehipuan

Pada masa lalu, masyarakat Dayak Bahau Umaaq Suling mengenal tiga kategori pengelompokan sosial masyarakat. *Pertama*, kelompok bangsawan (*hipui*). *Kedua*, kelompok masyarakat biasa (*panyin*). Terakhir, *ketiga*, kelompok budak (*dipan*). Namun kini hanya ada dua pengelompokan yakni *hipui* dan *panyin*. Kelompok *ketiga*, *dipan*, sudah dihapus. Pengelompokan *Hipui* dan *Panyin*, secara umum dibedakan atas dasar silsilah keturunan. Perbedaan ini memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan adat dan peran serta seseorang dalam masyarakat.

Dalam struktur masyarakat Dayak, peranan *Hipui* sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. *Hipui* dianggap sebagai orang yang paling mengetahui adat. Ia pun dipersepsikan sebagai orang yang baik hati dan tidak pilih kasih. Singkatnya, *Hipui* adalah figur panutan masyarakat. Ketika terjadi sengketa antar anggota masyarakat, para penggawa yang akan turun tangan. Namun apabila penggawa tidak dapat menyelesaikan, maka *Hipui* turun tangan. Terutama untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekaligus memutuskan penyelesaian perkara.

Dalam perkara perladangan, *Hipui* berhak menentukan kapan harus memulai kegiatan berladang. Begitu pula untuk penetapan lokasi perladangan. Selain itu, *Hipui* pula yang menentukan besaran sewa yang akan diberikan kepada kampung. Terutama apabila ada orang luar hendak berladang atau melakukan usaha di wilayah kekuasaannya. Singkatnya, *Hipui* adalah tokoh yang paling “berkuasa” di kampung. Sementara kelompok masyarakat biasa (*Panyin*), harus menaruh rasa hormat terhadap *Hipui*. Petunjuk *Hipui* dalam hal adat dan tata cara kehidupan ibarat nyala obor di tengah kegelapan. Dengan kata lain, sejauh *Hipui* melaksanakan fungsinya sesuai norma, maka petunjuknya selalu dilaksanakan.

Sistem pemerintahan saat ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya segala urusan pemerintahan—baik administratif

maupun adat—dijalankan oleh *Hipui*. Namun sejak 1970an, perkara administratif telah dipegang oleh Kepala Kampung. Sementara perkara adat, kini dipegang oleh Kepala Adat. Karena itu, kini terjadi pergeseran peran *Hipui* dalam masyarakat. *Hipui* tidak lagi dipandang sebagai tokoh sentral. Meski begitu, keturunan *Hipui* masih tetap dihormati. Inai Yeq menjelaskan,

“Kami pilih keturunan yang cakap, arif, cerdas, dan bijak. Garis keturunan *Hipui* semata dalam kepemimpinan adat berbahaya. Terutama apabila keturunan tersebut tidak cakap. Sebaiknya ada pengaturan tegas, keturunan *Hipui* yang cakaplah yang sebaiknya dapat menjadi kepala adat. Tidak apa-apa kalau tidak turunan raja, kalau tidak ada lagi turunan raja yang baik.”

Dalam konteks saat ini, pemilihan langsung pemimpin adat berjalan cukup baik. Dan hanya Lung Isun yang secara konsisten memilih Ketua Adat secara langsung.

3. Lung Isun adalah Surga



Gambar 322: Dokumentasi Hutan Lung Isun. Sumber: Nurani Perempuan.

Masyarakat Kampung Lung Isun percaya bahwa kampungnya merupakan surga dunia. Tutur leluhur sudah sejak lama menyebut Lung Isun sebagai surga. Penyebutan ini bermula ketika mereka mulai menetap di kampung. Bagi mereka, Lung Isun mampu memberi kecukupan hidup. Tidak sekadar secara sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu, Lung Isun memberikan kecukupan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan ritual di wilayah adat mereka. “Tidak ada yang bisa mati kelaparan di sini. Babinya banyak, ikannya banyak. Padi tanam sendiri,” ujar Kepala Adat Kampung Lung Isun, Lusang Arang. Kecukupan hidup di Lung Isun juga dibenarkan oleh Kepala Permusyarawatan Kampung, Yonas Tigang Jalung. Ia bercerita bahwa krisis di kota yang ia lihat di televisi, tidak pernah berpengaruh pada kondisi kehidupan orang kampung. Sebab, segala kebutuhan telah disediakan oleh alam. Ia pun menambahkan bahwa “Krisis pangan, kata orang krisis moneter di Jakarta pada 1998, tidak terjadi di sini. Semua ada di sini, disediakan alam.”

Sebagian besar rumah di Lung Isun terbuat dari kayu. Bahan bakunya diambil dari hutan di sekitar kampung. Begitu pula dengan kebutuhan pakaian adat dan ritual. Hampir semua didapatkan dari hasil hutan dan alam secara gratis. “Manik-manik juga kami buat sendiri dari batu atau bijian. Sekarang, manik-manik dibeli dari pengrajin. Cara membelinya dari hasil jual hasil hutan atau pertanian,” tutur Mak Yek.

Selain itu, hutan Lung Isun juga menyediakan kebutuhan medis bagi penduduk. Sebelum mereka mengenal dokter, kebutuhan obat-obatan sepenuhnya diambil dari hasil hutan bukan kayu (HHBK). Menurut hasil identifikasi masyarakat dan Perkumpulan Nurani Perempuan, sampai saat ini masih terdapat 5 HHBK yang digunakan untuk perawatan tubuh. Sebagian besar bermanfaat untuk pengobatan luar. Di samping itu, terdapat 9 HHBK yang menghasilkan aroma sehingga bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan obat. Dan sekitar 41 HHBK untuk kebutuhan medis.

Lung Isun tidak hanya kaya akan sumber daya yang mampu mencukupi penduduknya, namun juga menyimpan keindahan. Ketika lelah melakukan aktivitas, warga bisa minum langsung dari sungai. Ini adalah nikmat dan karunia alam tiada tara. Lung Isun bahkan tidak sekedar indah, namun juga menyimpan sejarah penting. Seperti, misalnya, cerita perang antara Jepang dan Belanda. Salah satu lokasinya, berada di Gunung Sariq, Air Terjun Tingang, Air Terjun Nuyung, dan beberapa goa di sana.

B. Lanskap Hutan Hujan Tropis di Lung Isun

Secara administratif, Kampung Lung Isun berada di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung ini berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Ia berjarak sekitar 650 km dari Ibu Kota Samarinda. Posisi Lung Isun berada pada koordinat 114°31'22.253" Bujur Timur dan 1°2'40.603" Lintang Utara. Luas indikatif wilayah administrasi Lung Isun ialah ± 80.433 hektar. Luas tersebut menjadi satu kesatuan dengan wilayah adat dan batas administratif Lung Isun adalah sebagai berikut:

1. Utara : Kampung Long Tuyuq dan Kecamatan Long Apari
2. Selatan : Kampung Naha Aruq, Datar Naha, Lirung Ubing
3. Barat : Kampung Long Lunuk Baru dan Long Pakaq
4. Timur : Kampung Long Tuyuq

Sementara menurut tuturan leluhur, sebenarnya batas wilayah kampung merujuk pada batas alam. Dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kanan Mudik Sungai Melaseh berbatasan dengan Naha Aruq, Datar Naha, Lirung Ubing, Lung Lunuk, dan Long Apari.**

Muara Sungai Takung (ada pohon Durian Buq Upoq), mudik sampai hulu Sungai Takung (Ull Hungai), naik menyusuri punggung gunung antara Sungai Takung dan Sungai Lunuk dan turun ke hulu Sungai Lunuk. Mudik Sungai Lunuk sampai muara Sungai Barap Putiq, naik mengikuti punggung gunung Sungai Barap Putiq dan Sungai Lunuk sampai di Ngalang Aking Lenganan, turun mengikuti punggung gunung sampai Muara Sungai Se'e anak Sungai Danum Buaq bekas ladang, kebun Umaq Paloq. Selanjutnya dari Lung Se'e mudik Sungai Danum Buaq sampai di Sungai Uki, naik mengikuti punggung gunung sampai di Letang Se'e/Pekaq Se'e, naik antara punggung gunung sampai di antara Sungai Perai dan Sungai Nuyung, mudik Sungai Perai Kiri, naik punggung gunung sampai di gunung, mudik mengikuti punggung gunung sampai di Sungai Semuai Ilir (Tiong Ohang), naik mengikuti punggung gunung sampai di Sungai Seratah (Tiong Ohang), mudik mengikuti punggung gunung sampai di ulu Sungai Danum Nunyang anak Sungai Lungai dan sungai Seratah, naik mengikuti punggung gunung sampai di Naha Sa'an, naik mengikuti punggung gunung sampai di Liang Pran sebelah ulu milik Long Apari dan sebelah ilir milik Lung Isun.

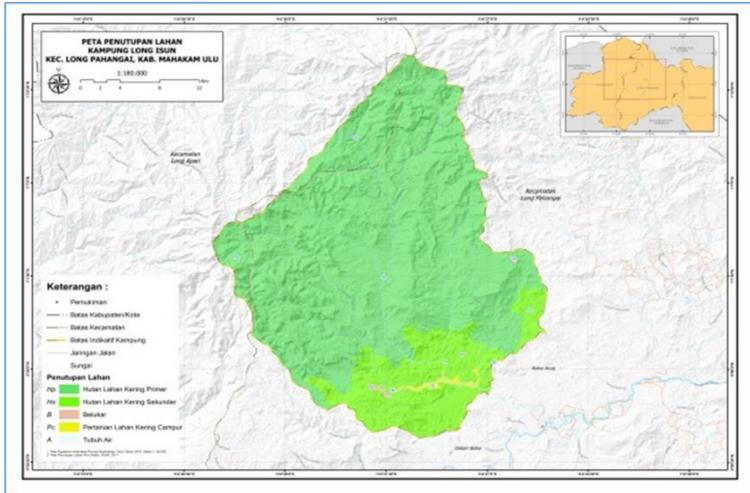
2. Kanan Mudik Melaseh adalah batas antara Lung Isun, Naha Aruq, dan Long Tuyuq.

Mudik Sungai Sadaan sampai ke hulu Sungai Sadaan, naik sebelah kiri Sungai Sadaan mengikuti punggung gunung antara Sungai Samling Uk dengan Sungai Tevusai terus mengikuti punggung gunung antara Sungai Samling Ayaq dengan Sungai Ha'an, naik gunung Sungai Lunun terus mengikuti punggung gunung antara Sungai Sangai (membelah Hulu), Sungai Batoq Luvil, naik gunung Tingang terus mengikuti punggung gunung sampai hulu Sungai Palaang

Nyivung, mudik menyusuri Sungai Palaang Nyivung sampai Sungai Metingang, nyeberang Sungai Metingang masuk Sungai Danang naik punggung gunung turun Muara Sungai Bun (sebalah kanan Liuq Mulang dan sebelah kiri Lung Isun), naik mengikuti punggung gunung Sungai Bun (Ngalaang Ha'ang) sebalah kanan Liuq Mulang, Long Tuyoq, dan sebelah kiri Lung Isun.

Wilayah Kampung Lung Isun dapat dirinci dengan memasukan data status dan fungsi kawasan. Rincian luasnya adalah sebagai berikut: area penggunaan lain seluas ± 2.490 hektar; hutan lindung seluas ± 40.263 hektar; hutan produksi ± 3.047 hektar; hutan produksi terbatas sekitar ± 34.503 hektar; dan tubuh air sekitar ± 128 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kampung Lung Isun adalah kawasan hutan. Dan berdasarkan hasil citra satelit Desember 2019, tutupan hutan di lokasi ini masih terjaga dengan baik. Hutan di Lung Isun masuk ke dalam kategori hutan hujan tropis. Secara lanskap ekologis, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat hutan hujan tropis dengan kondisi baik di Indonesia, wabil khusus di Pulau Kalimantan.

Kampung Lung Isun berada pada medan lokasi yang berbeda-beda. Ada lokasi dengan medan dataran rendah, menengah, hingga dataran tinggi. Kampung Lung Isun berada pada ketinggian sekitar 150-900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Medan dataran tinggi berada di bagian Barat dan Utara kampung, dengan ciri berkontur curam. Karena medan yang berbeda-beda, maka kami pun akan memotretnya dalam tiga pendekatan ekologi lanskap. Metode tersebut dipilih sebagai cara mengenal secara lebih baik dan detail wilayah Kampung Lung Isun. Adapun ketiga pendekatan yang dimaksud ialah struktur, fungsi, dan perubahan.



Gambar 3.23: Peta wilayah adat Lung Isun. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Secara struktur, fragmen lanskap ekologi yang berada di Lung Isun terdiri dari kelompok hutan alam, perladangan, perkebunan, perbukitan, sungai, dan goa. Dua ekosistem sungai tersebut ialah Sungai Malaseh dan Danum Buaq. Sungai Melaseh memiliki banyak percabangan anak sungai, sementara Sungai Danum Buaq hanya mempunyai 6 anak sungai. Kedua sungai bermuara pada satu titik yang sama: Sungai Mahakam. Fragmen yang mendominasi lokasi ini adalah hutan alam. Beberapa jenis kayu endemik di wilayah itu adalah ulin, meranti, kapur, dan batu atau pohon madu. Seluruh lanskap ekologis tersebut masuk ke dalam wilayah adat Kampung Lung Isun.

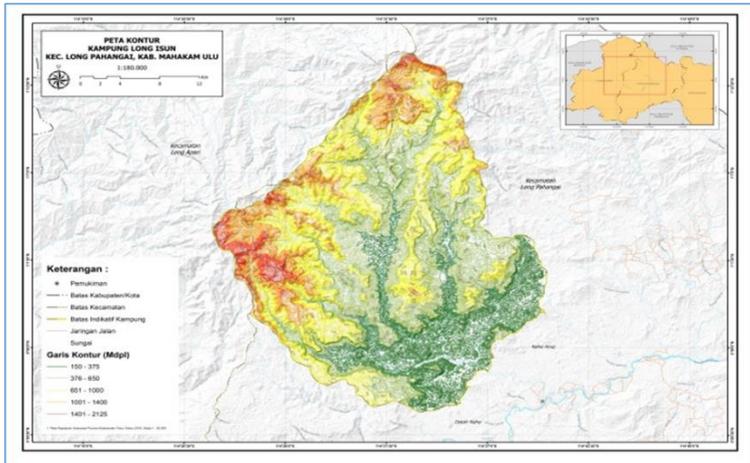
Sebenarnya, beberapa peta yang terlampir hanya menggambarkan sebagian kecil saja. Sebab, pola ruang masyarakat adat Kampung Lung Isun jauh lebih kompleks lagi. Misalnya dalam hal jenis ordo tanah di wilayah Kampung Lung Isun. Tanah di Lung Isun terbagi ke dalam dua jenis ordo: ultisols dan oxisols. Ordo yang paling dominan adalah ultisols. Varian jenis tanah, kontur, kelerengan, dan lainnya menjadi

dasar masyarakat menentukan pola ruang. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan pola ruang sangat mempertimbangkan faktor ekologis dan keselamatan. Berikut ini kategori tanah berdasarkan peruntukannya:

1. *Tanaaq Umaaq*. Jenis tanah ini digunakan untuk kawasan perkampungan.
2. *Tanaaq Lepu'un Lumaq*. Jenis tanah bekas kawasan perladangan yang ditanami dengan buah-buahan.
3. *Tanaaq Lepu'un Umaaq*. Jenis tanah bekas perkampungan yang berisi dengan sejumlah tanaman buah-buahan dan/atau tanaman lainnya.
4. *Tanaaq Dioq*. Jenis tanah kawasan yang dikelola masyarakat. Namun saat terjadi musibah, tanah itu ditinggalkan. Orang baru bisa menggarap tanah tersebut. Dengan syarat mengadakan upacara adat tertentu.
5. *Tanaaq Kasoq*. Jenis tanah yang dicadangkan untuk masyarakat adat sebagai tempat berburu.
6. *Tanaaq Tanam*. Jenis tanah yang digunakan untuk kawasan pekuburan. Tempat kotak/lungun dimasukan ke dalam tanah.
7. *Tanaaq Salung*. Jenis tanah yang digunakan untuk kawasan pekuburan. Namun kotak/lungun tidak dimasukan ke dalam tanah. Akan tetapi ditinggalkan di dalam goa.
8. *Tanaaq Berahan*. Jenis tanah yang digunakan sebagai kawasan tempat berusaha. Terutama dalam hal pengumpulan hasil hutan untuk mencari nafkah.
9. *Haang Tanaaq*. Batas tanah adat. Berlaku baik untuk pihak internal maupun eksternal keluarga.
10. *Tanaaq Peraaq*. Jenis tanah yang difungsikan sebagai kawasan hutan cadangan.
11. *Tanaaq Pukung Buaaq*. Kawasan untuk mengambil ramuan obat-obatan, buah-buahan, dan sebagainya.
12. *Tanaa Jakah*. Kawasan bekas terjadi pertumpahan darah. Seperti kejadian peperangan atau kematian

tidak wajar. Masyarakat dapat mengolah kawasan ini setelah melakukan ritual adat *Tutung Urip*.

13. *Tanaa Nah*. Kawasan yang tidak pernah habis air walaupun musim kemarau. Beragam binatang biasa mendatangi tempat ini minum karena rasanya asin.

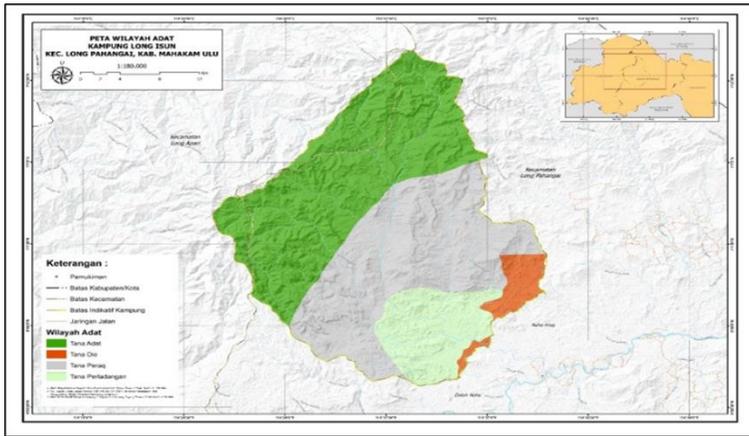


Gambar 3.24: Peta kontur wilayah adat Kampung Lung Isun. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Secara fungsi, lanskap Lung Isun memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya, maupun secara ekologis. Hutan dan keseluruhan keanekaragaman hayati di lanskap tersebut mempunyai fungsi beragam. Bagi masyarakat adat Kampung Lung Isun, sumber daya hutan telah memberikan kecukupan kebutuhan. Tidak hanya sandang, namun juga kebutuhan pangan, papan, hingga energi. Karena itu bagi masyarakat, lanskap Lung Isun memiliki nilai kesakralan. Tidak heran jika beberapa tempat ritual berada di hutan, kawasan perbukitan, goa, atau sungai. Kebutuhan perlengkapan ritual adat pun sudah tersedia di sana.

Lanskap Lung Isun juga menjadi habitat bagi banyak sekali makhluk hidup. Beberapa flora dan fauna di sana bahkan termasuk endemik seperti jenis burung enggang, rangkong, dan

kuau raja. Dalam konteks global, keberadaan hutan hujan tropis seperti ini juga berelasi dengan perubahan iklim. Terutama terkait fungsinya sebagai alat menahan tambahan lepasan karbon. Sementara dalam konteks lokal, masyarakat percaya bahwa menjaga lingkungan hidup sama artinya dengan menjaga keberlanjutan adat. Apalagi dari alam pula masyarakat mencari nafkah. Dan dari kelestarian alam pula masyarakat merasakan karunia alam yang tersedia secara gratis.



Gambar 3.25: Peta wilayah adat Kampung Lung Isun. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Namun dalam beberapa dasawarsa terakhir, terjadi banyak perubahan struktur dan fungsi lanskap di Lung Isun. Perubahan terjadi karena aktivitas ekonomi yang destruktif. Alhasil kesakralan adat dan fungsi ekologis lanskap pun mulai tersisih. Terutama untuk memenuhi kebutuhan *economic growth* dengan empat ciri utama: *faster, higher, further, dan competitive*. Dalam 25 tahun terakhir, laju deforestasi di wilayah adat Lung Isun terjadi jauh lebih cepat. Beberapa penyebab utamanya adalah aktivitas izin usaha perkebunan kelapa sawit, izin usaha pembalakan kayu alam, dan *illegal logging* oleh penduduk asli dan kampung sekitar. Laju deforestasi dan pembukaan lahan skala luas juga berpengaruh pada fragmen lainnya seperti Daerah Aliran Sungai (DAS).

Aktivitas penebangan yang dilakukan PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT) bisa menjadi contoh. Akibat aktivitas perusahaan, struktur lanskap mengalami kerusakan parah. Dan berpengaruh pula pada fungsi pelayanan barang dan jasa, habitat hewan, dan adat di Lung Isun. Seorang Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung Lung Isun, Tigang, bercerita bahwa

“Habitat hewan-hewan rusak, sungai dan anak sungai Besangaq keruh, dan ikan mati. Lalu ada penangkapan Tekwan. Adat kami pun terancam, kayu yang jadi simpanan kebutuhan habis ditebang perusahaan.”

Cerita Tigang dibenarkan oleh Lusang Aran, Kepala Adat Kampung Lung Isun. Ia pun menambahkan,

“Selama perusahaan kerja ambil kayu, Sungai Besangaq¹⁵¹ keruh, waktu terjadi pencemaran tidak ada ikan lagi. Mungkin mata ikan juga tidak enak liat air kotor. Kalau sekarang sudah mulai ada ikan dan babinya. Terutama sejak berhentinya aktivitas perusahaan pada 2015. Sudah lebih dari tiga tahun jadi mungkin sudah pulih sungainya.”

Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, keberadaan perusahaan juga mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat terganggu. Lahir konflik horizontal antar masyarakat. Baik antara keluarga dengan keluarga atau pun antara penduduk Lung Isun dengan Kampung Naha Aruq. Lusang Aran menuturkan bahwa masyarakat terpecah karena janji-janji tertentu. Seperti, misalnya, “*fee* kayu, saya tidak tahu alasan masyarakat setuju, tapi ceritanya mereka dijanjikan *speed boat*, mobil, dan motor. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti,” ujar Lusang Aran. Seiring berjalannya waktu, konflik pun perlahan mereda. Akan tetapi, kondisi psikologis antar masyarakat belum sepenuhnya pulih.

¹⁵¹ Sungai Besangaq merupakan salah satu anak Sungai Melaseh.

C. Temuan Ekonomi Nusantara

1. Sejarah Kejayaan Surga Borneo Timur

Kampung Lung Isun adalah surga. Tidak ada alasan untuk meragukan pernyataan itu. Jauh sebelum Indonesia lahir, Kampung Lung Isun telah hidup dalam kelimpahan yang disediakan oleh alam. Namun kelimpahan itu tidak membuat masyarakat serakah. Mereka hanya mengambil sesuai kebutuhan. Secukupnya, tidak berlebih. Kehidupan mereka pun tidak terjebak dengan pola hidup individual dan konsumtif. Mereka memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijak. Inilah satu model kehidupan yang selaras dengan alam.

Sudah sejak lama, sistem ekonomi, sosial, dan politik di Lung Isun dikerjakan secara komunal. Walau dalam banyak hal masih dipengaruhi watak feodal seperti dalam perkara sistem kehipuan dan stratifikasi sosial. Akan tetapi pemberlakuannya pun terbatas. Dalam arti, tidak masuk ke seluruh sektor kehidupan. Hipui dan keturunan bangsawan memang mendapat keistimewaan dan beberapa hak khusus. Namun itu berbeda dengan praktik sistem monarki. Setiap putusan Hipui bahkan hampir selalu berdasar musyawarah dengan *panyin*.

Hipui mendapatkan hak khusus terhadap akses sumber daya, namun tetap tidak berlebih. Luas area yang dikuasainya pun tidak berbeda dengan *panyin*. Hanya saja, Hipui bebas menentukan lokasi yang jadi miliknya dan dibantu proses penggarapannya. Selain itu, Hipui juga mendapat sejenis upeti dari *panyin* – semacam upah kerja menjadi pimpinan adat. Satu kewenangan Hipui yang paling menonjol ialah penentuan kapan harus memulai kegiatan perladangan, termasuk penetapan lokasi perladangan tersebut. Selanjutnya, Hipui juga berwenang mengizinkan atau tidak orang di luar *panyin* membuat ladang atau melakukan usaha. Ia pula yang menentukan berapa besaran harga sewanya.

Bagi masyarakat adat *Bahau Umaaqq Suling*, sosok Hipui bukan pimpinan yang menakutkan. Hipui digambarkan sebagai

tokoh paling tahu tentang adat, baik hati, dan tidak pilih kasih. Ia menjadi figur panutan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai norma adat yang berlaku. Sehingga perintah dan petunjuknya selalu dilaksanakan dengan baik.

Corak ekonomi komunal berlaku di masyarakat *Bahau Umaq Suling* dan suku-suku lain di wilayah adat Lung Isun. Kepemilikan pribadi tetap diakui. Akan tetapi, dalam proses pengerjaan tetap dilakukan secara bersama dan saling berbagi. Transaksi jual beli tidak dikenal, semua kebutuhan diambil gratis dari alam. Apabila ada ladang yang gagal panen, maka masyarakat lain akan memberikan sebagian hasil panennya. Pemberian diberikan secara cuma-cuma. Bantuan seperti ini disebut *nyahaq*. Ketika ada yang dapat binatang buruan, maka semua binatang itu pun dibagi kepada seluruh masyarakat kampung. Atau, dalam istilah orang Lung Isun, disebut dengan *ngebiah*. Sampai saat ini, sistem barter pun masih sering dilakukan. Misalnya ketika satu keluarga tidak memiliki beras, maka dia berangkat ke keluarga lain dengan membawa pisang atau ubi kayu. Proses ini disebut dengan *Petuyuuq*.

Kebahagiaan orang Lung Isun juga tidak semata berdasar ekonomi. Kebahagiaan justru diukur secara lebih luas seperti dari alam yang serba berkecukupan, sikap saling berbagi, hidup rukun, dan turut aturan adat. Mereka percaya bahwa adat telah mengajarkan semua kearifan ini. Adat pula yang mengajarkan mereka untuk memperlakukan alam dengan baik. Karena dengan melakukan kebaikan terhadap alam, maka leluhur pun akan tetap hidup bersama mereka, termasuk memberikan perlindungan. Bahkan pada masa lalu, kemewahan utama masyarakat adalah melaksanakan upacara adat seperti *Hudoq* (Adat Nanam Padi), *Laliq Parai/Ubak* (Buat Emping padi baru), *Nevukoq* (Pesta Panen), dan lain-lain.

a. Masih Berjaya dengan Batasan Otoritas

Pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Tanpa sadar, masyarakat adat kampung pun menjadi bagian dari republik yang baru berdiri. Terintegrasinya Lung Isun membawa banyak

perubahan baik secara positif maupun negatif. Seperti, misalnya, mulai tergantikannya sistem kehipuan. Selain itu, secara formal kepercayaan adat pun berganti menjadi Katolik. Manusia modern yang cenderung serakah mulai berinteraksi bebas dengan masyarakat Lung Isun. Secara perlahan, perubahan watak ekonomi juga mulai menguasai alam bawah sadar mereka. Begitu pula dengan cara hidup bijak dan arif. Beruntungnya, masih terdapat generasi seperti Lusang Aran, Mak Yeq, Nyuk Anyek, dan beberapa tokoh sepuh lainnya. Walau telah beragama Katolik, para tokoh masyarakat tersebut masih sadar tentang ikatan dengan leluhur, alam, dan sesama manusia. Karena kesadaran itu merupakan bagian dari identitas orang Bahau Umaaqq Suling.

Perubahan sistem pemerintah adat berlangsung sejak 1974. Sistem Hipui telah berganti menjadi kepemimpinan Kepala Kampung dan Kepala Adat.¹⁵² Meski, menurut Lusang Arang, sistem Hipui sebenarnya masih eksis hingga 1986. Ia bercerita bahwa Hipui pada saat itu dihadapkan pada pilihan sulit. Terutama ketika investasi tebang kayu sedang masif terjadi. Pemerintah dan oknum lainnya memberikan dua pilihan kepada masyarakat: membiarkan perusahaan menebang kayu atau ikut dengan skema banjirkup.¹⁵³ Dalam skema kedua, banjirkup, masyarakat akan dijadikan pekerja penebang kayu secara manual menggunakan kapak. Lalu menjual hasilnya kepada pos-pos penampung yang ada di kampung. Lusang Arang menambahkan,

“Para Hipui berkumpul dan musyawarah dengan *payin*. Kemudian diputuskan ikut bekerja banjirkup. Alasannya sederhana: *banjirkup* tidak merusak hutan. Kita hanya pilih

¹⁵² Lihat misalnya: M. Ghofar, “Kampung Metalibaq Telusuri Sejarah Berdirinya,” dalam <https://kaltim.antaranews.com/berita/48901/kampunng-matalibaq-telusuri-sejarah-berdirinya> (diakses pada 20 April 2020).

¹⁵³ Banjirkup merupakan sebutan masyarakat dalam proses penjualan kayu. Prosesnya dimulai dari aktivitas *tebang* menggunakan kapak dan parang. Selanjutnya kayu ditepikan dan dikeluarkan dari hutan ke arah sungai. Dan ketika banjir, kayu pun biasa dihanyutkan menuju lokasi penjualan.

pohon yang bisa kita tebang. Kan kalau *pakai* kampak itu pohon besar tidak bisa ditebang yang ditebang itu hanya diameter 60 – 70 centimeter. Susah gulingnya, istilah tradisional mereka guling sendiri, ga *pake* alat gitu.”

Sekitar tahun 1986, masyarakat pun mulai dikenalkan dengan *chainsaw*. Alat ini dikenal masyarakat kampung dari mereka yang ke hilir jadi pekerja kayu. Setelah program *regrouping*, penggunaan *chainsaw* semakin marak. Pekerjaan mengambil kayu pun tidak lagi semata untuk kebutuhan pribadi dan/atau kampung, tapi untuk dibawa ke luar. Akhirnya aktivitas berkebun dan berladang mulai tercampuri aktivitas kayu. Pada awalnya, nilai tukar kayu sangat jauh dari harga pasar. Masyarakat pun diperdaya oleh peralatan elektronik dan uang. Mereka telah dimanfaatkan orang-orang serakah dari kota untuk memabat hutan. Namun perlahan akhirnya mereka pun sadar dengan harga.

Perubahan tersebut juga mendorong pergeseran cara hidup komunal menjadi individualistik. Meski begitu, pertalian sistem kekerabatan masih kental. Sehingga harga jual kayu ke luar dan sesama anggota masyarakat berbeda. Bahkan untuk kebutuhan kampung dan adat disediakan secara gratis. Saat ini ada sekitar 30 KK yang beraktivitas mengambil kayu di hutan. Pemanfaatannya masih dipantau Lembaga Adat Kampung, dengan aturan maksimal mengambil dua batang. Ukuran dan lokasi menebang pun telah ditentukan oleh zona adat. Proses terintegrasinya Lung Isun juga membawa dampak positif. Sistem pemerintahan pun menjadi lebih demokratis yakni tidak lagi semata-mata berdasarkan trah keturunan.

Namun hal tersebut juga membawa dampak negatif. Perubahan sistem Hipui telah mengakibatkan otoritas adat tereduksi. Hutan dan seluruh sumber daya yang berada di wilayah adat tidak lagi mutlak milik masyarakat. Penetapan kawasan hutan, telah membuat sebagian besar wilayah adat beralih menjadi milik negara. Negara menjadi lebih dominan dibanding masyarakat adat. Meski secara historis, masyarakat

telah lama menetap dan mengklaim lokasi tersebut. Pada awalnya, penetapan ini hanya berlaku secara *de jure*. Karena itu tidak menciptakan persoalan berarti. Bahkan secara faktual, masyarakat masih dapat beraktivitas normal di kawasan hutan.

Masyarakat baru merasakan dampak pengalihan hak melalui hukum formal setelah masuknya investasi. Kekuatan adat pun terabaikan dan terpecah. Masyarakat baru merasakan ancaman industri ekstraktif sejak 2012. Saat itu telah terbit izin perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Kalimantan Green Persada. Operasi perusahaan ini berhasil dicegah. Sejak awal sosialisasi, masyarakat telah bulat melakukan penolakan. Perusahaan tidak berdaya dan memutuskan tidak beraktivitas di Lung Isun. Lusang Aran menyebut bahwa,

“Alasan masyarakat menolak perusahaan ini karena mereka meyakini apabila satu perusahaan sawit masuk, akan masuk perusahaan sawit lainnya, bahkan bisa lima puluh perusahaan masuk. Kalau dibiarkan rusak sungai, habis tanahnya.”

Ancaman selanjutnya datang dari izin perusahaan kehutanan atas nama PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT). Perusahaan ini memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau HPH (Hak Pengusahaan Hutan) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.217/MENHUT-II/2008. Izin ini terbit pada 9 Juni 2008 dengan cakupan lahan seluas 82.810 hektar. Sebagian lahan masuk wilayah Kecamatan Long Pahangai (12.395 hektar). Sebagian lainnya masuk wilayah adat Lung Isun. Setelah izin terbit, muncul skenario jahat untuk melancarkan aktivitas PT. KBT. Bermula dengan memecah kekerabatan masyarakat Lung Isun dan Kampung Naha Aruq. Selanjutnya, memecah kampung yang hidup rukun dalam satu sistem hukum adat Bahau Umaaq Suling.

Perpecahan antar kampung dilakukan dengan perubahan tapal batas. Saat itu Lung Isun masih berada di Kabupaten Kutai Barat. Bupati Kabupaten Kutai Barat pun menerbitkan

Keputusan Nomor 136.146.3/K.917/2011 (SK 2011) tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Wilayah Kampung di Kecamatan Long Pahangai. Secara administratif, keputusan ini mengakibatkan sebagian wilayah kampung/adat Lung Isun masuk menjadi wilayah Naha Aruq. Pengesahaan peta lampiran keputusan dilakukan dengan cara memaksa kepala BPK dan Kepala Adat. Para tokoh masyarakat tersebut dipaksa menandatangani berita acara pemasangan patok lama (Peta 1966) dengan tapal batas baru (2011). Dari peta itulah PT. KBT mempengaruhi warga Naha Aruq. Persaudaraan Dayak Bahau Busang Umaq Suling antara masyarakat Lung Isun dan Naha Aruq pun terpecah. Tidak hanya itu, sebagian kecil masyarakat Lung Isun juga mendukung perusahaan. Menurut kesaksian Inai Yeq, Lusang Arang, Nyuq Anyek, Yonas Tigang Jalung, mereka dipengaruhi janji perusahaan dalam bentuk *fee* kayu, uang, mobil, dan lainnya.



Gambar 3.26: Bekas tebangan kayu PT. KBT. Sumber: Dokumentasi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat.

Pada 2014 sampai 2015, PT. KBT telah melakukan penebangan sekitar ± 2.000 hektar. Seluruhnya berada di wilayah Lung Isun. Protes resmi dan tuntutan untuk terlebih dahulu melakukan tata batas pun tidak digubris. Alhasil pada 20 Mei 2014, warga pun marah dan menghentikan aktivitas alat berat perusahaan.

Kejadian ini mengakibatkan beberapa warga diproses di Polres Kutai Barat. Bahkan seorang pejuang masyarakat adat, Theodorus Tekwan, ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun ditahan selama 110 hari. Hingga kini status Tekwan pun masih tersangka. Namun derita dan berbagai ancaman tidak membuat masyarakat menyerah. Semangat juang masyarakat justru berlipat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah adatnya.

Bekas aktivitas tebang PT. KBT meninggalkan kerusakan lingkungan. Tempat masyarakat biasa mengambil ikan di Sungai Besangaq keruh dan berlumpur. Sembari tertawa Lusang Arang menjelaskan,

“waktu itu ga dapat ikan. Mungkin ikannya pindah dari Besangaq ke Melaseh. Ga tahan juga mata ikan itu dengan keruh air. Tapi sekarang ikannya sudah ada lagi, airnya mulai jernih dan babinya juga mulai ada di situ. Babinya enak aja jalan di lokasi itu.”

Selain membawa dampak kerusakan lingkungan, aktivitas perusahaan juga merusak keeratan sosial masyarakat. Dampak ekonomi PT. KBT memang tidak begitu signifikan. Setelah korporasi ini berhenti beraktivitas, warga masih melakukan kegiatan harian secara normal. Mereka berladang, berkebun, dan memungut hasil hutan. Prinsipnya tetap sama: secukupnya dan tidak berlebih. Namun ancaman berikutnya datang dari hegemoni negara. Tutupan hutan Lung Isun yang sangat luas dilihat secara ekonomi belaka. Kayu-kayu tersebut dilihat sebagai komoditi dan terus dibidik untuk melayani kebutuhan investasi. Apalagi investasi tersebut sah karena disertai dokumen perizinan legal. Selain izin HPH PT. KBT, di Utara Lung Isun juga terdapat izin HPH lain. Luasnya sekitar 8.753 hektar atas nama PT. Roda Mas Timber. Dari luas lahan konsesi tersebut, sebagian besar masuk wilayah adat Lung Isun, seperti hutan alam atau kebun cokelat masyarakat.

Sampai saat ini, masyarakat masih berjuang mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat hukum adat. Salah satunya dengan mengajukan permohonan penerbitan

keputusan bupati dan/atau peraturan daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pengakuan ini akan menguatkan otoritas mereka untuk mengatur wilayah adatnya secara otonom. Selain itu, produk hukum tersebut juga dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik dengan PT. KBT. Sehingga lahan konflik pun bisa diusulkan menjadi hutan adat. Skema pemulihan hak warga melalui hutan adat merupakan salah satu poin kesepakatan penyelesaian konflik. Kesepakatan tersebut lahir dari pertemuan di Samarinda pada 6 Februari 2018.

Kisah jaya Lung Isun dengan kearifan pemanfaatan sumber daya alam kini terus terancam. Bahkan berpotensi hilang apabila corak negara masih tetap pada ekonomi kapitalisme. Kondisi saat ini memang tidak mencekam seperti dahulu. Hampir semua kebutuhan pokok pun masih diperoleh secara gratis dari alam. Saat ini praktik ladang dan kebun tradisional juga telah ditopang praktik ekonomi non adat. Seperti, salah satunya, kebun cokelat. Terutama setelah terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu. Karena saat itu, cokelat memang menjadi komoditas utama. Dan kini, cokelat sudah tidak sekedar komoditi mentah. Masyarakat juga mengolahnya menjadi produk bubuk.

Kombinasi antara kelimpahan alam Lung Isun dan praktik ekonomi modern terbukti mampu menghidupi masyarakat. Namun ekspansi perusahaan justru menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Perusahaan sekedar menganggap hutan dan kekayaan di dalamnya sebagai komoditi. Hal ini sangat berbahaya bagi kelestarian alam. Sebab jika hutan dan sungai rusak, maka identitas sosial dan adat masyarakat terancam. Kerusakan itu pada akhirnya tidak hanya membuat masyarakat kehilangan nafkah, namun juga kehilangan identitasnya sebagai orang Dayak Bahau Umaa Suling.

2. Hubungan Lanskap Ekologis dengan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Praktik ekonomi masyarakat adat Kampung Lung Isun adalah gambaran umum masyarakat adat Dayak. Terutama tentang bagaimana masyarakat adat Dayak memenuhi kebutuhannya. Mereka memanfaatkan hasil hutan, berburu, berladang, dan hidup di sekitar aliran sungai. Mereka sangat bergantung pada kelestarian hutan. Tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan perumahan, namun juga untuk kebutuhan medis dan ritual adat. Dengan begitu, memastikan lanskap ini lestari dan terjaga sangat berhubungan dengan keberlanjutan nafkah hidup dan sosial budaya.

Lanskap ekologis yang terjaga dengan baik, terbukti mampu memberikan kecukupan bagi semua. Pemanfaatannya dilakukan secara arif dan bijaksana berdasarkan kepercayaan adat. Karena itu, masyarakat memaknai kampung mereka sebagai satu kesatuan surga yang tidak dapat terpisahkan: tanah, sungai, dan hutan adalah satu kesatuan dengan kehidupan orang Bahau Umaag Suling. Bagi masyarakat, “tanah adalah jantung.” Mereka percaya tanpa tanah mereka tidak bisa hidup. Tanah dimaknai sebagai tempat kehidupan dan tempat untuk meninggal dunia. Bahkan di tanah itu pula bersemayam para dewa pelindung dan roh para leluhur. Sementara “sungai adalah darah.” Fungsi sungai adalah menjadi sarana utama lalu lintas. Sungai menghubungkan hulu dan hilir, ladang, dan kampung. Di sungai pula masyarakat mencari lauk pauk dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, bagi masyarakat “hutan adalah tubuh.” Di sana tempat masyarakat mencari banyak hal. Mulai dari mencari obat-obatan, kayu bangunan, binatang, serta sumber kehidupan lainnya.

Pemanfaatan tanah, sungai, dan hutan dilakukan secara bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil secukupnya dan sesuai kebutuhan. Tidak berlebih, apa lagi hingga merusak ekosistem. Inilah bentuk kearifan yang diterapkan secara turun temurun. Masyarakat percaya jika merusak alam sama artinya

dengan merusak surga kecil bernama Lung Isun. Sebuah surga yang memberi mereka kecukupan hidup. Masyarakat pun yakin apabila tanah hilang, hutan dan sungai rusak, maka mereka akan kehilangan identitas. Di samping itu, menyelamatkan Lung Isun dari praktik tebang kayu skala besar juga diyakini mampu mempertahankan kelestarian kawasan hulu. Terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Tentu saja, hal ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah bencana. Sehingga daerah hilir Sungai Mahakam pun tetap aman.

a. Kebutuhan Ritual Adat dari Hutan

Masyarakat Adat Dayak Bahau Busang Umaq Suling memiliki berbagai macam ritual adat. Beberapa diantaranya adalah adat *Lumaq* (Perladangan), *Nevukoq* (Pesta Panen), adat *Anaak* (Adat Anak), adat *Pu'un Urip*/adat *Hawaq* (Perkawinan), adat *Patai* (Kematian), *Ngaping Umaq* (Bersihkan Kampung), adat *Nyatoh Beluan* (memanggil kembali roh yang hilang), *Tutung Urip* (Membersihkan tempat kejadian yang mengeluarkan darah), dan ritual adat lainnya. Ritual rutin yang dilakukan setiap tahun adalah ritual adat perladangan dan pesta penen.

Ritual adat perladangan atau tanam padi membutuhkan beberapa bahan dan perlengkapan. Seperti kayu ulin untuk tambur (*tuwung*), rotan untuk ikat tambur (*tuwung*), kulit rusa atau payau, dan bulu ekor burung enggang untuk hiasan (kepala topeng *hudoq* bagi laki-laki dan hiasan tangan bagi perempuan). Saat ritual berlangsung, masyarakat pun membutuhkan kayu kawit. Jenis kayu ini diyakini dapat menarik jiwa dan roh-roh padi. Dan bisa pula untuk mengundang roh kemasyuran dan kemakmuran.

Bahan baku yang dibutuhkan lagi adalah pohon buah maritam/*Avung*. Ukurannya sebesar ibu jari kaki. Dirangkai memanjang hingga 1,5-2 meter. Kemudian ada pula bahan penghut. Bahan ini diambil 8 potong sepanjang 50 cm. Selain itu ada pula *hugul/savang* (belalang sembah), daun pisang ambon

tempat menaruh beras sejumlah 8 ikatan kecil, daun sirih, daun pisang hutan (*Isai*) muda (rokok dalam persembahan ritual adat), *itun bakoq* (daun tembakau), dan akar kecil yang berada di hutan.

Sementara dalam ritual *Nevukoq*, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beras ketan, daun pisang ambon, bambu, kayu bakar untuk *luku*, *lamang*, *dinu lohoq*, *belukut*, *usuq adok*, dan *keltap*. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kayu yang mulai sulit didapat seperti kayu ulin dan daun tembakau. Penyebabnya karena penggunaan yang berlebihan oleh masyarakat. Jika pun ada, kini lokasi untuk mendapatkannya makin jauh. Di samping itu, beberapa binatang endemik juga mulai punah seperti, misalnya, rangkok. Binatang ini banyak diburu masyarakat setempat atau pun orang luar. Terlebih rangkok termasuk bintang yang cukup mahal ketika dijual.

3. Kekuatan Ekonomi Lokal

a. Varian Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi mayoritas masyarakat Kampung Lung Isun adalah berladang dan berkebun. Padi lokal termasuk tanaman ladang. Di Lung Isun, terdapat beberapa jenis padi yaitu (1) *parai telun lasaq*; (2) *parai beteng a'a*; (3) *parai murung/pekaaq apau*; dan (4) *parai tavaan*. Sementara dalam aktivitas berkebun, masyarakat menanam berbagai jenis buah lokal seperti durian, langsung, dan mata kucing. Selain itu mereka juga menanam kelapa, tebu, karet, tembakau, kapuk, dan kopi. Hasil panen ladang dimanfaatkan untuk sendiri dan sebagiannya dicadangkan untuk dijual terutama saat acara-acara besar di kampung. Sedangkan hasil buah-buahan benar-benar hanya untuk konsumsi sendiri. Keterbatasan sarana transportasi membuat masyarakat tidak bisa menjualnya keluar kampung. Dan pembeli pun enggan untuk mengambil sendiri. Karena itu, buah-buahan bebas diambil oleh siapa pun. Dari luar kampung pun bebas untuk datang mengambil, bahkan

tidak perlu mendapat izin pemiliknnya. Ketimbang busuk di tanah, maka semua orang bebas mengambil. Hasil berkebum buah sering kali diolah juga menjadi makanan. Contohnya adalah dodol durian/*lempuk*, *laksam*, dan bentuk olahan lainnya. Tidak jarang, ketika sedang melimpah, masyarakat pun sengaja memanen untuk makanan babi ternak, anjing, dan hewan peliharaan lainnya.

Aktivitas ladang dan kebun ini dilakukan secara arif dan bijak. Ia dilakukan sesuai dengan zona-zona yang telah diatur dalam hukum adat. Ketentun ini berlaku pula untuk pemanfaatan lain. Kondisi ini dilakukan guna memastikan alam Lung Isun tetap terjaga dan mereka bisa tetap hidup selaras dengan alam. Dengan begitu, maka identitas orang *Bahau Umaaq Suling* pun tetap bertahan. Ikatan spritual dengan leluhur juga bisa terpelihara. Selain menanam padi dan buah lokal, kini masyarakat Lung Isun juga melakukan aktivitas pertanian modern. Salah satunya dalam bentuk budidaya cokelat. Budidaya ini bermula sekitar tahun 1990-an. Tanaman ini dibawa oleh pendatang Bugis bernama Semunteq. Saat itu, ia menetap di Kampung Long Lunuk. Melihat tanah yang subur, Semunteq pun mencoba menanam cokelat.

Seiring berjalannya waktu, tanaman cokelat tumbuh subur dan bernilai ekonomi. Pendatang Bugis lain akhirnya mengikuti jejak Semunteq. Salah satunya adalah Sanusi. Ia mulai menanam cokelat dan menyebarkan bibitnya kepada masyarakat lain. Pada awalnya, banyak masyarakat yang tidak mau menanam. Sebagian besar karena trauma dengan program penanaman karet dari pemerintah. Saat itu, ketika umur karet cukup dan dapat diambil getahnya, justru tidak ada pembeli/pengepulnya. Namun Sanusi meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah pembelinya. Setelah yakin, masyarakat pun mulai menanam cokelat pada tahun 2008. Hingga saat ini, aktivitas menanam cokelat masih berlangsung.

Saat itu, Lung Isun masih menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kutai Barat. Kampung Lung Isun pun

menjadi satu dari beberapa kampung yang sukses membudidayakan tanaman cokelat. Alhasil pemerintah setempat pun mendukung dengan memberikan bantuan bibit. Setelah Kabupaten Mahakam Ulu terbentuk, bantuan bibit masih tetap datang. Bahkan pemerintah daerah juga memberikan bantuan pengolahan cokelat menjadi produk bubuk. Alasan pemberian bantuan didasarkan pada pertimbangan bahwa harga cokelat relatif stabil. Pada 2012, luas tanaman cokelat di Lung Isun adalah 76 hektar. Dalam rentang waktu enam tahun (2018), luas kebun cokelat meningkat hingga mencapai 156 hektar. Dengan lahan seluas itu, masyarakat menanam 32.186 pohon cokelat. Saat panen hasilnya bisa mencapai 23.352 kg biji kakau kering per tahun. Lokasi kebun cokelat berada di sepanjang Sungai Melaseh, Besangaq, dan Lengasah.

Kini cokelat makin menjadi idola masyarakat. Lokasi tanamnya pun menyebar hingga di Sungai Danum Buaq dan Se'e. Kebun-kebun cokelat masyarakat biasanya ditanam pada bekas ladang padi yang sudah dipanen. Namun itu hanya di tanah-tanah bekas padi yang subur dan cocok. Selain itu, masyarakat juga sengaja tidak mengubah semua ladang padi menjadi ladang cokelat. Sebab, menanam padi ladang adalah warisan para leluhur sehingga harus dipertahankan sebagai bentuk identitas orang *Bahau Umaaqq Suling*. Selain berkebun dan berladang, masyarakat juga melakukan aktivitas berburu, mengumpulkan hasil hutan kayu, dan menangkap ikan di sungai. Aktivitas tersebut dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi utama, tapi untuk kebutuhan sehari-hari atau saling berbagi antar masyarakat. Ketiga aktivitas hanya dilakukan secukupnya, sehingga tidak merusak lingkungan.

Ada banyak sekali Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari wilayah adat Lung Isun. Menurut catatan Perkumpulan Nurani Perempuan, HHBK yang sudah teridentifikasi berjumlah 134. Semua berada di wilayah hutan Lung Isun. Berdasarkan manfaatnya, HHBK terbagi menjadi 5 kelompok: (1) HHBK dengan manfaat makanan/minuman dan bumbu (38 jenis); (2)

HHBK dengan manfaat obat-obatan (41 jenis); (3) HHBK dengan manfaat bahan kerajinan dan pewarna alam (18 jenis); (4) HHBK dengan manfaat bahan perawatan tubuh (28 jenis); dan (5) HHBK dengan manfaat menghasilkan aroma kayu (9 jenis).

No	Sektor	Nilai Ekonomi/tahun
1	Pertanian	Rp9.493.710.714
2	Daging Hewan Buruan, Hewan Ternak dan Ikan	Rp983.160.000
3	Olahan Bahan Kayu Bangunan	Rp195.500.000
4	Kayu Bahan Bangunan	Rp1.178.000.000
5	Kerajinan Rotan	-
6	Kerajinan Tangan Bahan Manik dan sejenis	Rp10.930.000
Total		Rp11.861.300.714

Tabel 3.9 : Valuasi ekonomi Kampung Lung Isun tahun 2018. Sumber: Perkumpulan Nurani Perempuan.

Pada awalnya tidak ada aktivitas ekonomi masyarakat yang merusak. Namun kemudian muncul beberapa masyarakat yang menjadikan tebang kayu sebagai mata pencaharian. Penebangan kayu bermula pada 1956-1960an. Masyarakat Lung Isun berbondong-bondong ikut kerja *banjirkap* (nebang kayu) di luar kampung. Mereka menebang menggunakan alat-alat tradisional berupa *asai* (kapak) dan *malat* (parang). Kemudian pada akhir 1980-an hingga awal 1990an, masyarakat baru menggunakan alat modern bernama *chainsaw*. Kini aktivitas tebang kayu telah diawasi secara ketat oleh Kepala Kampung dan Kepala Adat. Terutama setelah muncul kesadaran bahwa aktivitas tersebut mengancam keberlanjutan adat. Pada 2018, Perkumpulan Nurani Perempuan sempat melakukan valuasi ekonomi dari pola konsumsi dan produksi masyarakat. Namun valuasi tersebut belum memasukan hitungan hasil kerajinan dan hasil hutan bukan kayu. Tabel di atas merupakan valuasi ekonomi masyarakat dalam satu tahun.

Melakukan valuasi ekonomi bukan cara yang baik untuk mengukur kekayaan. Sebab, hitungan tersebut tidak akan bisa

mengalkulasi apa yang sudah disediakan alam Lung Isun. Praktik ekonomi masyarakat, tidak dapat berlangsung jika kondisi lingkungan rusak. Belum lagi jika menghitung kontribusi hutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan ritual adat masyarakat. Keberhasilan masyarakat menjaga dan memanfaatkan lingkungan pun sudah terbukti. Saat terjadi krisis moneter 1998, masyarakat Lung Isun sama sekali tidak merasakan dampak. Berbeda dengan daerah lain yang tidak menggantungkan hidupnya pada kelestarian alam.

b. Praktik Ekonomi yang Adil dan Manusiawi

Luas lahan pertanian dan perkebunan tiap masyarakat berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelas: (1) sebanyak 43 kepala keluarga memiliki lahan pertanian 0,5–1 hektar; (2) sebanyak 18 kepala keluarga memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar; dan (3) sebanyak 34 kepala keluarga memiliki lahan lebih dari 1–8 hektar. Sejumlah 17 kepala keluarga lainnya, tidak melakukan aktivitas pengolahan lahan pertanian. Sebab, sebagian besar dari mereka merupakan pendatang sehingga tidak mempunyai tanah pertanian. Akhirnya, mata pencaharian mereka banyak sebagai pedagang, tukang, dan pencari gaharu. Walaupun mereka tidak memiliki tanah, tapi mereka dipinjamkan tanah untuk membangun rumah dan melakukan aktivitas pertanian sederhana. Karena itu mereka tidak boleh menanam tanaman keras. Sedangkan seluruh masyarakat asli Lung Isun mempunyai tanah. Selain tanah yang dimiliki secara individu, seluruh masyarakat asli dilibatkan dalam pengelolaan *tanaaq* adat. Pengelolaannya dilakukan secara komunal dan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Sebenarnya masyarakat juga diperbolehkan membuka lahan garapan baru. Namun harus sesuai dengan pola ruang adat. Misalnya, apabila ada penduduk yang baru menikah, maka mereka akan mendapatkan tanah dari Lembaga Adat Kampung. Selain itu, biasanya mereka juga mendapat tanah

dari keluarganya. Di luar aktivitas kebun, pertanian, dan ladang, masyarakat juga mengumpulkan hasil hutan. Masyarakat biasa mengembangkan hasil hutan menjadi produk kerajinan. Umumnya produk ini terbuat dari rotan dan daun biru. Produk akhirnya adalah *seraung*, *anjat*, dan topi. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga mengembangkan pengolahan bubuk coklat dan mengolah gula merah. Pengolahannya dilakukan dengan menggunakan alat sederhana. Seperti, misalnya, alat pemeras yang terbuat dari batang besar (batang keraq). Beberapa masyarakat di Lung Isun juga melakukan pekerjaan sebagai buruh, tukang, dan aktivitas wiraswasta lainnya. Tabel berikut ini mencoba merinci jenis dan pendapatan masyarakat tersebut:

No	Jenis Biaya Tenaga Kerja	Satuan	Harga (Rp)
1	Kerja ladang/kebun harian	Per orang	100.000
2	Menebang dengan <i>Chainsaw</i> harian	Per orang	300.000
3	Borongan kerja ladang/kebun	Per 1 ha	1.000.000
4	Borongan menebang dengan <i>Chainsaw</i>	Per 1 ha	1.500.000
5	Upah tukang ahli (kepala tukang)	Per hari	150.000
6	Upah tukang biasa (buruh)	Per hari	100.000
7	Upah pembantu pekerja tukang	Per hari	50.000
8	Upah tukang perahu ketinting	Paket	1.000.000-1.500.000
9	Upah tukang perahu long boat	Paket	17.000.000-23.000.000

Tabel 3.10 : Daftar upah pekerja di Kampung Lung Isun. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Pembagian tugas laki-laki dan perempuan dilakukan secara adil. Kegiatan menebang pohon untuk bangunan rumah, kayu bakar, *belahan*, mengumpulkan madu, dan berburu umumnya dilakukan laki-laki. Sementara perempuan melakukan kegiatan kerajinan tangan seperti *anjat*, *lanjung*, *tikar*, *lampit*, *seraung*, dan

topi laki-laki (*lavung*). Sebagian besar bahan baku kerajinan adalah rotan, daun biru, dan bambu. Para perempuan melakukan pekerjaan itu di sela-sela waktu berladang dan berkebun. Hasil kerajinan pun bisa menjadi sumber ekonomi tambahan keluarga. Sedangkan kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh laki-laki dan perempuan antara lain: mengumpulkan obat-obatan, mengumpulkan rotan, menanam padi, merumput, membersihkan ladang, berkebun karet, cokelat, gaharu, dan berternak babi atau ayam. Selain itu, memasarkan hasil kerajinan tangan juga dilakukan bersama-sama.

Pada umumnya, perempuan juga bertanggung jawab mengatur, mengelola, dan menyajikan makanan sehari-hari. Alhasil perempuan pun memiliki beban ganda. Selain harus melakukan aktivitas di dalam rumah, ia pun terlibat di ladang, kebun, dan dalam proses membuat kerajinan tangan. Karena itu waktu kerja perempuan jauh lebih panjang. Dalam pertemuan atau rapat kampung (*paptang umaaq*), laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat. Perempuan juga terlibat aktif dalam pertemuan untuk pengembangan pertanian. Pertemuan itu biasanya diinisiasi oleh kelompok tani.

c. Berbasis Pengetahuan Lokal

Masyarakat Lung Isun tetap mempertahankan tradisi menanam padi ladang. Bagi mereka, menanam padi bukan sekadar persolan pangan dan nafkah hidup. Akan tetapi menjadi identitas selaku orang *Bahau UmaaQ Suling*. Ketika menanam padi ladang, mereka pun berusaha memastikan berlangsungnya seluruh ritual adat perladangan. Terutama agar tidak punah dan generasi yang lebih muda bisa mempelajarinya. Karena itu, tuduhan bahwa praktik padi ladang merusak dan menambah alih fungsi hutan menjadi tidak relevan. Sebab, sistem perladangan justru menerapkan konsep hilir balik. Misalnya, dalam kurun waktu 5 tahun, masyarakat biasa membuat ladang di seputaran wilayah ladang tahun

sebelumnya. Dan 5 tahun kemudian, mereka balik lagi ke ladang awal. Dengan begitu, meski tiap tahun ladang berganti, tidak terjadi penambahan lahan ladang.

Pengetahuan lokal masyarakat juga dipraktikkan dalam proses berburu. Aktivitas ini biasanya dilakukan sendiri atau secara bersama-sama, baik dua orang atau lebih. Tradisi berburu biasanya memperhatikan tanda-tanda binatang seperti bunyi dan melintasya burung hisit. Bisa pula dengan memperhatikan kemunculan sejenis belalang atau kumbang *tiling/tonggeret* secara tiba-tiba. Apabila sebelum berburu mereka mendapatkan tanda tersebut, masyarakat akan membatalkan rencana keberangkatan. Bahkan ketika sudah dalam perjalanan pun, mereka akan segera pulang. Apabila memaksa untuk melanjutkan, masyarakat percaya jika akan terjadi sesuatu yang buruk seperti terluka, tidak dapat buruan, tersesat, atau bahkan hingga meninggal dunia.

Proses menugal juga kaya akan pengetahuan lokal. Masyarakat biasanya akan mempersiapkan lauk pauk dan bahan nugal seminggu atau tiga hari sebelumnya. Serupa dengan berburu, proses menugal pun dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda dari binatang. Seperti, misalnya, apabila mereka menemukan burung hisit, *tal'u/kijang* kecil, atau ular dalam perjalanan, maka mereka harus segera pulang. Jika dilanjutkan maka marabahaya akan mengancam mereka. Namun jika tidak ada pertanda dari binatang, maka mereka bisa melanjutkan.

Binatang hasil buruan seperti babi atau ikan tidak boleh dibawa pulang. Karena itu, mereka pun mengasap dan membuat rak penyimpanan di dalam hutan, biasanya ada di dalam goa. Sehari sebelum menugal, mereka akan berangkat mengambil salai agar minyak binatang tidak menetes di badan. Sebab, tumpahan minyak ikan atau binatang akan mendatangkan hama di ladang. Kemudian pada malam sebelum nugal, masyarakat pun biasa berkumpul di rumah orang yang menugal. Mereka masak air, masak lemag, dan

masak sayur untuk persiapan esok hari. Tradisi ini disebut *nguraang*. Pada zaman dulu, setiap orang yang datang pada saat *ngurang*, wajib menugal keesokan harinya.

Proses menangkap ikan juga sarat akan pengetahuan lokal. Masyarakat Lung Isun kerap menyebut dirinya sebagai nelayan air tawar. Kegiatan menangkap ikan di sungai biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Tradisi nelayan air tawar juga mengenal tanda-tanda binatang seperti kemunculan hisit atau *tiling/tonggeret*. Sama seperti uraian sebelumnya, apabila mendapatkan tanda ini, maka mereka harus membatalkan rencana menangkap ikan. Selain itu, nelayan *Bahau Umaaq Suling* juga percaya apabila mendengar suara kodok besar (*ga'ai*), maka itu pertanda baik. Sebab mereka akan menemukan kerumunan ikan yang sedang bertelur. Meski demikian, masyarakat tidak biasa menangkap seluruhnya namun hanya mengambil secukupnya. Masyarakat memang percaya jika ikan yang bertelur baik untuk kesehatan, tapi itu tidak baik untuk kelestarian.

Menjelang acara ritual adat, seluruh aktivitas berat masyarakat akan dihentikan. Apabila ada masyarakat kampung yang melanggar, maka musibah bagi diri dan keluarganya akan datang. Seluruh masyarakat meyakini betul kepercayaan tersebut. Karena itu mereka tidak pernah melanggar. Setelah ritual adat dilaksanakan, maka aktivitas pun akan kembali normal. Secara umum, praktik kearifan lokal—baik secara ekonomi atau lainnya—di Kampung Lung Isun, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan/Mata Pencaharian	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Mata Pencaharian													
1	Berladang/padi		x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x
2	Kebun kakao	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Berburu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Nelayan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5	Kebun sayur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Mencari emas						x	x	x				x
7	Membuat perahu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Gaharu												x
9	Jual daun sirih dkk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Burak (minuman tradisional)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Usaha kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acara Kampung													
1	Hudoq Kawit kampung (pesta tanam)											x	xx
2	Hudoq kecamatan/Hudoq Pekayang												xx
3	Hudoq Kabupaten/Hudoq Pekayang Kabupaten												xx
4	Lemali Parai (Buat Ubak/Emping)	x											
5	Nebuko (Pesta Panen)				x								
6	Pesta libur sekolah, Nikah, Adat Anak, Nyemen Kuburan.						x	x					

Tabel 3.11 : Tabel pencaharian dan acara kampung berdasarkan bulan. "Angka Romawi" = bulan dalam tahun kabisan, "x" = dilakukan suami atau istri, dan "xx" = dilakukan bersama (suami dan istri). Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

4. Ancaman dan Inisiatif Perlawanan Lung Isun

Secara ekonomi masyarakat Lung Isun tidak pernah masuk pada fase krisis. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah disediakan alam secara gratis. Dengan lingkungan hidup yang baik, maka mereka pun bisa memastikan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara cuma-cuma. Kebutuhan ritual dan

upacara adat juga tersedia. Aktivitas pengumpulan kebutuhan dari hutan atau sungai dilakukan secara bersama-sama, sehingga mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Namun sayangnya, surga di Lung Isun kini sedang terancam oleh praktik investasi industri ekstraktif.

Praktik industri ekstraktif tidak hanya merusak lingkungan, namun juga merusak ketersediaan kebutuhan masyarakat dan merusak hubungan sosial. Sejauh ini, terdapat tiga perusahaan yang secara legal mempunyai izin di Lung Isun: PT. KBT, PT. Roda Mas Timber, dan PT. Kalimantan Green Persada. Detail dari ketiga perusahaan tersebut dapat disimak melalui tabel berikut ini:

Perusahaan	Legalitas	Jenis Izin	Irisan dengan Wilayah Adat (Ha)	Keterangan
PT. Kemakmuran Berkah Timber	SK. 217/Menhut-II/2008	IUPHHK-HA (tebang kayu)	12.359, 41	Sempat beraktivitas
PT. Roda Mas Timber	SK. 59/Menhut-II/2014	IUPHHK-HA (tebang kayu)	8.753, 06	Gagal beraktivitas
PT. Kalimantan Green Persada		Kelapa Sawit	421, 30	Gagal beraktivitas

Tabel 3.12 : Daftar dan luas izin industri ekstraktif di wilayah adat Kampung Lun Isun. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

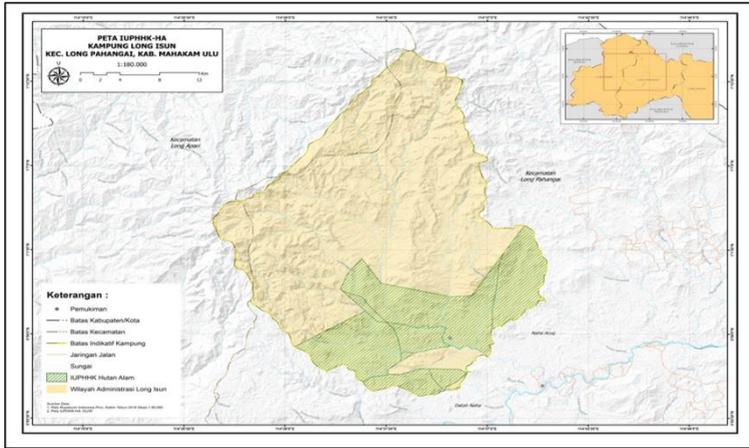
Sekitar 26,77% dari total luas wilayah adat masuk ke dalam luas perizinan industri ekstraktif. Masyarakat Lung Isun pun merasa cemas. Sebab, apabila satu perusahaan dibiarkan menguasai lahan di kampung mereka, maka itu bisa menjadi preseden untuk menerbitkan izin lainnya. Mereka sadar betul jika dominasi korporasi, sangat bisa merusak lingkungan hidup. Termasuk merusak mata pencaharian dan hubungan sosial mereka. Karena itu, sejak 1980-an, mereka lebih memilih mengambil kayu sendiri. Selanjutnya, pada 2012 mereka pun menolak perizinan kelapa sawit. Satu-satunya perusahaan yang

ngotot mengambil kayu besar-besaran di Lung Isun adalah PT. KBT. Kondisi inilah yang menjadi ancaman nyata masyarakat adat Lung Isun.

Bagian ini fokus pada konflik dengan PT. KBT. Adapun irisan lokasi perizinan industri di kampung Lung Isun, dapat dilihat dari olahan beberapa peta. Selain PT. KBT, meski perizinannya masih eksis, ia belum begitu memberikan dampak. Karena itu, perusahaan yang paling meresahkan adalah PT. KBT. Persoalan bermula pada 2008 ketika izinnnya terbit. Saat itu, tidak ada satu pun masyarakat yang mengetahui jika PT. KBT memperoleh izin HPH di Lung Isun. Dan proses perubahan tata batas Kampung Lung Isun dan Naha Aruq, menjadi jalan agar PT. KBT dapat beroperasi.

Proses perubahan batas kampung bermula pada tahun 2001. Namun dari kedua kampung, Lung Isun dan Naha Aruq, sama-sama belum menyepakati perubahan tapal batas. Masyarakat Lung Isun cenderung tidak sepakat dengan perubahan batas. Sebab, perubahan itu membuat luas wilayah adat menjadi berkurang. Pada 11 Januari 2015, masyarakat pun membuat pernyataan sikap tentang penolakan tata batas tahun 2001. Selain itu, masyarakat juga tegas menolak kesepakatan pada tahun 2005.

Kesepakatan pada 2005 merupakan prakarsa Camat Long Pahangai, Drs. Thomas Higang. Camat tersebut membuat perubahan batas secara sepihak. Batas lama di Muara Sungai Sadaan dipindahkan ke Muara Sungai Besangaq. Konflik semakin meluas saat pihak luar ikut terlibat. Saat itu, PT. Roda Mas Timber Kalimantan dan PT. Kemakmuran Berkah Timber melakukan pertemuan “tata batas partisipatif” dengan difasilitasi TNC. Pertemuan itu dihadiri perwakilan masyarakat dari 13 Kampung di Kecamatan Long Pahangai. Namun masih terdapat empat kampung yang belum menyatakan sepakat. Keempat kampung tersebut ialah Lung Isun, Naha Aruq, Lirung Ubing, dan Long Lunuk Baru. Keempat kampung itu tidak menyepakati perubahan batas.



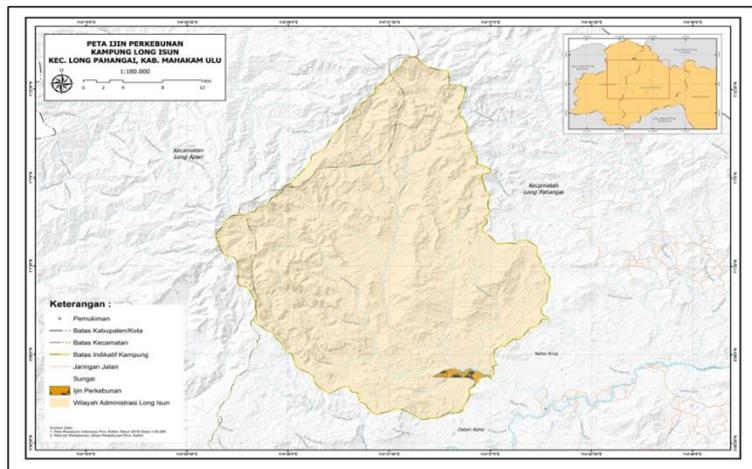
Gambar 327: Peta Izin IUPHHK yang berada dalam wilayah Lung Isun. Kanan sungai adalah PT. KBT dan kiri sungai adalah PT. Roda Mas Timber. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Namun anehnya, hasil pertemuan tersebut justru dijadikan dasar menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.136.146-3/K.917/2011 tentang Tapal Batas kampung se Kecamatan Long Pahangai (Liu Mulang, Long Tuyuq, Long Pahangai I, Long Pahangai II, Long Isun, Naha Aruq, Lirung Ubung, Datah Naha, Long Lunuk, Long Lunuk Baru, Long Pakaq Baru, Long Pakaq dan Delang Krohong). Melalui SK tersebut, maka batas 4 kampung yang belum sepakat disahkan secara sepihak oleh pemerintah Kutai Barat. Sehingga hal tersebut memicu konflik antar masyarakat Lung Isun-Naha Aruq dan Lirung Ubung-Long Lunuk Baru. Masyarakat yang menolak, tetap bertahan dengan batas lama. Rujukan utama mereka adalah peta lama yang diterbitkan pada 1966.

Pada 2014, konflik pun semakin meluas. PT. KBT mulai masuk ke dalam wilayah Kampung Lung Isun sehingga konflik antar masyarakat pun terjadi. Padahal mereka memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Terutama saat masyarakat Naha Aruq menyetujui aktivitas tebang kayu yang dilakukan PT. KBT. Alhasil hutan yang dijaga masyarakat pun menjadi rusak. Tanah dan anak sungai menjadi tercemar dan

keruh. Sepanjang 2014-2015, kurang lebih terdapat sekitar 2000 hektar hutan alam Lung Isun yang dirusak.

Kondisi ini membuat warga Lung Isun marah. Meskipun tetap ada segelintir orang yang setuju dengan keberadaan PT. KBT. Menurut warga yang menolak, mereka yang setuju adalah orang-orang yang termakan janji pemberian uang, mobil, dan fasilitas lain. Menyikapi hal ini, pada 17-20 Mei 2014, pemerintah Kampung Lung Isun pun mengutus tim untuk mengecek lokasi dan aktivitas tebangan PT. KBT. Ketika sampai di Sungai Paking Aruq dan anak Sungai Kesoai, tim menemukan fakta bahwa perusahaan melakukan penebangan kayu di dalam wilayah adat. Seketika masyarakat pun menghentikan aktivitas penebangan. Para operator traktor dan pekerja PT. KBT pun ikut berhenti. Proses penghentian tidak menimbulkan bentrokan. Sebab, masyarakat pun mengenal beberapa operator dan pekerja. Mereka pun istirahat bersama sembari ngobrol, nyirih, dan merokok.



Gambar 3.28: Peta izin perkebunan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Green Persada dengan Luas wilayah 421 hektar. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Tidak lama kemudian, Tekwan Ajat mengeluarkan surat tugas dari kampung kepada pekerja. Surat itu berisi permintaan

pertanggungjawaban perusahaan karena telah melakukan aktivitas di dalam wilayah Lung Isun. Para pekerja pun mengajak tim untuk bertemu di kantor perusahaan. Namun masyarakat menolak. Mereka justru meminta agar perwakilan perusahaan datang sendiri ke Kampung Lung Isun.

Selanjutnya, para pekerja sepakat untuk menyerahkan kunci dua unit traktor kepada tim dari Lung Isun. Satu unit traktor lainnya, dipergunakan pekerja PT. KBT untuk pulang ke kantor di Long Nyan. Selain itu, masyarakat juga menahan 1 unit *chainsaw*. Masyarakat sengaja menahan alat-alat perusahaan untuk alat bukti. Terutama untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah masuk dan menebang hutan di wilayah adat mereka. Sebelum para pekerja kembali ke kantor, tim kembali mengulang pesan agar pimpinan datang sendiri ke Lung Isun. Tim juga memastikan bahwa peralatan yang mereka tahan dalam kondisi aman. Apabila terjadi kerusakan, maka masyarakat siap bertanggung jawab.

Niat baik masyarakat untuk mengundang PT. KBT ke kampung tidak dipenuhi. Bahkan masyarakat sudah mengirim surat lebih dari dua kali untuk mengundang PT. KBT. Namun surat itu selalu diabaikan. PT. KBT justru tetap bertahan pada argumen mereka bahwa ia tidak bersalah. Sebab, ia merasa telah beraktivitas sesuai dengan izin yang berlaku. Alhasil PT. KBT tetap beraktivitas. Mereka tidak mau duduk satu meja dengan masyarakat. Bahkan perusahaan justru menganggap masyarakat Lung Isun sebagai penghalang aktivitas mereka. Bahkan tuduhan pun berkembang menjadi perampasan. Para tokoh kampung akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, Polres Kutai Barat menindaklanjuti laporan PT. KBT tersebut.

Pihak kepolisian mengirim Surat panggilan I pada 23 Juni 2014. Kemudian mengirim lagi surat panggilan II pada 2 Juli 2014. Kedua surat panggilan tersebut ditujukan kepada Lusang Aran (Kepala Adat Kampung Long Isun), P. Djuan Hajang (Petinggi Kampung Long Isun), dan Teodorus Tekwan Ajat

(Tokoh Pemuda Kampung Long Isun). Ketiga orang itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimuat dalam 368 KUHP subsidi Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menyikapi surat panggilan tersebut, masyarakat Lung Isun pun sepakat untuk tidak menghadirinya. Mereka yakin jika yang mereka lakukan adalah kebenaran. Sebab, mereka sedang melakukan upaya penyelamatan lingkungan, menyelamatkan kelanjutan sumber mencari nafkah, dan menjaga marwah mereka sebagai orang *Bahau Umaa*q Suling. Selanjutnya, pada panggilan ke III, Polres Kutai Barat menjemput paksa Lusang Aran, Djuan Hajang, dan Theodorus Tekwan Ajat.



Gambar 3.29: Theodorus Tekwan Ajat ketika di Polres Kutai Barat. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.

Petinggi Kampung, Djuan Hajang, dijemput paksa pada 28 Agustus 2014, pukul 14.00 di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu. Saat itu ia sedang mengikuti undangan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rapat Pembahasan Anggaran Dana Kampung (ADK). Tanpa pemberitahuan kepada keluarga, ia pun dibawa ke Polres Kutai Barat di Barong Tongkok. Djuan Hajang ditempatkan di ruangan sel khusus. Sementara Lusang Aran dan Tekwan,

dijemput paksa pada 29 Agustus 2014. Polisi datang dengan senjata lengkap. Sama seperti Djuan Hajang, Lusang Arang dan Tekwan pun dibawa ke Polres Kutai Barat dan ditempatkan di ruang tahanan khusus.

Akhirnya, ketiga tokoh masyarakat Lung Isun menjalani pemeriksaan dan hanya Tekwan yang ditetapkan sebagai tersangka. Tekwan pun ditahan di Polres Kutai Barat selama 107 hari. Setelah empat kali mengajukan permohonan penangguhan penahanan, pada 15 Desember 2014 Tekwan dikeluarkan dari Polres Kutai Barat. Keluarnya Tekwan bukan buah dari kebaikan polisi atau PT. KBT. Namun buah dari perjuangan panjang masyarakat bersama koalisi pendukungnya. Beberapa upaya mengeluarkan Tekwan sempat dilakukan seperti mengirim Surat Somasi kepada PT. KBT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Kutai Barat, dan PJ. Bupati Mahakam Ulu. Selain itu, upaya juga dilakukan dengan kampanye media dan demonstrasi. Beberapa kali, ratusan warga Dayak hadir memadati Kantor KBT Samarinda untuk menuntut pembebasan Tekwan.

Saat tertekan oleh demonstrasi warga Dayak, PT. KBT sempat bersedia membebaskan Tekwan dari tahanan. Namun itu hanya muslihat karena KBT tetap tidak mau mencabut laporannya. Bahkan Polres Kutai Barat sempat tiga kali menolak permohonan penangguhan penahanan Tekwan. Alasan Polres Kutai Barat adalah karena proses penegakan hukum masih dalam tahap penyidikan. Melalui Dwi Partanto, PT. KBT juga sempat menawarkan opsi damai dan bersedia mengeluarkan saudara Tekwan. Namun itu dengan satu syarat: masyarakat harus menyerahkan wilayah dan tidak menghalangi aktivitas perusahaan di Lung Isun. Opsi tersebut jelas ditolak masyarakat. Bahkan ketika Tekwan mendengar informasi tersebut, Ia pun tegas menolak. Dengan perjuangan dan tekanan terus menerus, akhirnya masyarakat bersama koalisi berhasil mengeluarkan Tekwan. Ia pun dilepaskan pada permohonan penangguhan penahanan keempat.

a. Titik Terang Mendapat Kedaulatan

Bebasnya Tekwan dari tahanan, makin menguatkan masyarakat untuk berjuang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Kehadiran PT. KBT telah mengakibatkan kegaduhan, konflik internal antar masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Karena itu mereka sepakat terus berjuang dan mendapatkan kedaulatan atas wilayah adatnya. Cara-cara untuk mencapai kedaulatan itu telah mereka tempuh. Mulai dari konsolidasi warga, hingga ke berbagai ruang pertemuan. Misalnya, pada 06 Februari 2018, warga pun ikut pertemuan di Hotel Aston Samarinda. Penginisiasi pertemuan tersebut adalah Direktorat Penyelesaian Konflik dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak yakni warga Lung Isun, PT. KBT, dan warga Naha Aruq menyepakait empat hal:

- 1) Menghentikan konflik terkait tata batas antara Kampung Lung Isun dan masyarakat Naha Aruq dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber;
- 2) Tata batas wilayah kampung Naha Aruq yang berlaku adalah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136.146.3/K.917/2011 tentang Pengesahan atas Wilayah Kampung Long Pahangal Kabupaten Kutai barat Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat Lung Isun dengan masyarakat Naha Aruq akan melakukan musyawarah dan mufakat secara adat di kampung yang difasilitasi oleh Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWMU);
- 3) Wilayah konsesi PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT) yang masuk wilayah Kampung Lung Isun ditetapkan status quo dan akan diproses menjadi Hutan Adat;
- 4) Proses penetapan hutan adat melibatkan Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWMU), Aman Kalimantan Timur, Nurani Perempuan, WALHI

Kaltim, Pokja 30, jaringan Advokat Lingkungan Hidup, dan Pokja PPS Kalimantan Timur.

Konflik memang berakhir, namun kedaulatan atas wilayah adat belum berhasil direbut. Alhasil masyarakat pun sadar bahwa perjuangan masih panjang. Hasil kesepakatan itu, setidaknya, telah memberi modal baik untuk merebut kedaulatan. Masyarakat Lung Isun bersama koalisi (WALHI Kalimantan Timur, Perkumpulan Nurani Perempuan, Pokja 30, dan JAL) pun mulai menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pengusulan hutan adat.

Salah satu kebutuhan yang paling diperlukan adalah produk hukum Kabupaten Mahakam Ulu. Produk hukum tersebut bisa menjadi dasar legalitas pengakuan dan perlindungan masyarakat Lung Isun sebagai masyarakat Adat. Upaya-upaya persiapan pun dilakukan, salah satunya dengan mulai menyiapkan berbagai dokumen. Proses tersebut berlangsung selama sembilan bulan. Pada 19 September 2018, masyarakat resmi mengajukan permohonan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam proses ini, Ketua DPRD Mahakam Ulu, Novita Bulan, setia mendampingi masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, surat permohonan diserahkan kepada Ketua Panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jabatan tersebut dipegang oleh Sekertaris Daerah. Setelah itu, tembusan surat permohonan itu akan diserahkan langsung kepada bupati.



Gambar 3.30: Pertemuan pada 06 Februari 2018. Pertemuan ini mengasilkan kesepakatan damai antara PT. KBT, Long Isun, dan Naha Aruq. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.

Sejak awal koalisi telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam praktik di lapangan, proses permohonan penerbitan keputusan tidak akan terlalu efektif. Sebab, sebagian besar wilayah adat Lung Isun berada di kawasan hutan. Dan wilayah ini kini menjadi lokasi konflik. Sehingga apabila keputusan bupati terbit, maka ia akan dibatasi oleh ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.



Gambar 3.31: Pertemuan dan penyerahan dokumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.



Gambar 3.32: Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.

Selain itu, koalisi juga menyarankan agar masyarakat menyusun draft peraturan daerah sesuai ketentuan UU Kehutanan. Masyarakat pun setuju dan kembali meminta koalisi untuk mendampingi. Proses ini sudah berlangsung sejak awal 2019. Dan pada Mei 2019, proses formal telah dimulai. Penyusunan naskah akademik dan draft Ranperda bermula dari sebuah *workshop*. Acara tersebut melibatkan jaringan CSO Kaltim, nasional, ahli hukum, dan Ketua DPRD Mahakam Ulu. Setelah 6 bulan bekerja, pada 29 November 2019, koalisi bersama masyarakat mengajukan usulan naskah akademik dan Ranperda tersebut ke Ketua DPRD Mahakam Ulu.

Dalam perkembangannya, Ranperda usulan masyarakat Kampung Lung Isun masuk dalam Prolegda 2020 Kabupaten Mahakam Ulu. Sampai saat ini, masyarakat bersama koalisi masih menunggu pembahasan dan pengesahan Ranperda ini. Masyarakat pun tidak sebatas menunggu secara pasif. Namun terus aktif mengingatkan bupati dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu agar segera mengesahkan Ranperda usulan mereka.



Gambar 3.33: Pertemuan antara masyarakat dengan koalisi saat menyusun draft Ranperda usulan masyarakat. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.

Hampir enam tahun proses advokasi berlangsung. Oleh masyarakat Lung Isun, semua orang yang terlibat dianggap menjadi orang “Dayak.” Mereka pun disambut upacara adat, diangkat sebagai anak, dan diberikan nama Dayak. Masyarakat Lung Isun percaya jika ritual ini, bisa mempererat hubungan. Sebab, pada akhirnya semua menjadi saudara dan merupakan bagian dari orang *Bahau UmaaQ Suling*.

Tentu saja, harapan besar dari proses perjuangan ini adalah kemenangan. Dalam arti, masyarakat Lung Isun mampu merebut kedaulatan mereka sendiri dan masyarakat pun bisa kembali menjaga wilayah kampung mereka. Karena itu, Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bisa menjadi satu pijakan kuat. Termasuk menjadi dasar penciptaan izin perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Proses panjang ini juga menjadi pelajaran penting untuk tetap tunduk pada kearifan. Tidak hanya bagi masyarakat Lung Isun, namun juga bagi semua orang yang terlibat.



Gambar 3.34: Penyerahan dokumen usulan Raperda kepada Ketua DPRD Mahakam Ulu. Sumber: WALHI Kalimantan Timur.

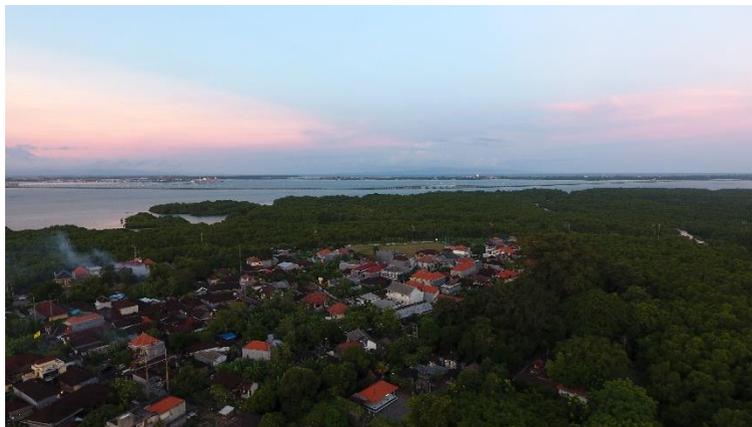
D. Rekomendasi

Perjuangan masyarakat Lung Isun dalam menghalau ekspansi industri ekstraktif layak diapresiasi. Mereka bertahan dari situasi konflik dan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan. Meski begitu, masyarakat pun memiliki persoalannya sendiri. Konflik horizontal dan tawaran pengambilan kayu untuk mengejar nilai ekonomi juga harus diselesaikan. Konflik ini bisa menjadi sarana masyarakat untuk mengonsolidasikan ulang perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, aturan adat mengenai proses tebang tanam dan batasan ekspansi kebun cokelat perlu diterapkan. Karena dengan itu pula kerekatan sosial masyarakat bisa kokoh kembali. Dan kearifan hidup yang selaras dengan alam bisa bertahan. Selain memberikan rekomendasi bagi masyarakat, tulisan ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada instansi pemerintahan. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengambil tindakan dan mengeluarkan kebijakan:
 - a. Segera mencabut atau paling tidak menciutkan keseluruhan perizinan kehutanan yang beada di wilayah adat Kampung Lung Izin;

- b. Menyederhanakan proses permohonan hutan adat sekaligus memberikan fasilitasi penyelesaian dokumen usulan, khususnya syarat produk hukum sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat;
2. Menteri ATR/BPN harus mencabut atau menciutkan perizinan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah adat Lung Isun. Kebijakan ini juga harus diikuti dengan pencabutan dan penciutan lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Mahakam Ulu;
3. Bupati dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu harus segera membahas, menyetujui, mengesahkan, dan menerbitkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Lung Isun. Perda ini dibutuhkan untuk memastikan pengakuan masyarakat kampung Lung Isun sebagai satu subjek hukum yang berdaulat dan mempunyai otoritas terhadap wilayah adatnya;
4. Pemerintah Pusat dan Daerah tidak boleh lagi menerbitkan perizinan industri ekstraktif di wilayah adat Kampung Lung Isun;
5. Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat harus terus mendampingi masyarakat Lung Isun dan saling belajar untuk saling menguatkan dalam proses advokasi yang panjang.

Kearifan Adat Desa Kedonganan



Tim Penulis

Suriadi Darmoko

I Putu Juli Sastrawan

Azzumar Adhitia

Boy Jerry Even Sembiring

“Di Sepanjang Jalan Legian - Kuta

Proyek itu selalu ada

Proyek ini proyek itu lah

Masyarakat dibikin stres”

- The Hydrant - Hati-Hati Ada Proyek

A. Profil Desa Adat Kedonganan

Sepenggal lirik lagu di atas berasal dari sebuah grup musik asal Bali. Lagu itu menggambarkan maraknya proyek di Pulau Dewata. Aneka proyek itu manifestasi dari keserakahan investasi di Bali. Para pemodal yang datang, biasa melakukan apa saja untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli investasi itu merusak alam. Tidak peduli investasi itu mengikis budaya masyarakat setempat. Demi akumulasi, aneka proyek harus tetap berjalan.

Bali terus berbenah. Wajahnya selalu dipoles demi menarik wisatawan, baik dari dalam negeri atau pun mancanegara. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kedatangan wisatawan ke Provinsi Bali pada bulan November 2018 mencapai 407.213 kunjungan.¹⁵⁴ Nyaris seluruh wisatawan datang melalui bandara. Jumlahnya menyentuh angka 407.167 wisatawan. Sementara sebanyak 46 kunjungan, datang melalui pelabuhan. Jika disandingkan dengan laporan bulan November 2017 (*year on year*), maka jumlah wisatawan ke Bali mengalami peningkatan sebesar 12,80%. Di sektor pariwisata, angka-angka tersebut merupakan peluang bisnis yang menggiurkan.

Ibarat gula, Bali adalah daerah yang disesaki para wisatawan. Hal ini mengundang para pebisnis untuk berinvestasi di Bali. Tak ayal, aneka bentuk proyek penunjang wisatawan berdiri di banyak titik. Mulai dari hotel, kafe, sampai bisnis pantai privat. Namun di tengah kepekaan bisnis

¹⁵⁴ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali per Januari 2019.

pariwisata para investor besar, masih terdapat satu desa yang bertahan. Desa itu menolak mengikuti logika bisnis arus utama yang banyak menimbulkan kerusakan. Desa tersebut adalah Kedonganan. Desa Adat ini justru memilih menjalankan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Konsep ini mengedepankan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Melalui konsep CBT, diharapkan industri pariwisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih menyejahterakan masyarakat. Di kancah konsep global, CBT tidak sekadar pengembangan pariwisata semata. Namun juga sebagai bagian dari program penanggulangan masalah kemiskinan.

Implementasi konsep CBT di Desa Adat Kedonganan bermula dari pembangunan 24 kafe.¹⁵⁵ Seluruh kafe berada di pesisir pantai dan merupakan hasil menata 67 kafe sebelumnya. Pembangunan tersebut sama sekali tidak melibatkan investor besar. Pengelolaan dan manajemen kafe dikerjakan oleh masyarakat adat sendiri. Karena itu, masyarakat merasakan betul keuntungan yang dihasilkan. Bahkan dari hasil keuntungan tersebut, masyarakat bisa mandiri mendanai banyak hal seperti pembangunan Pura, pembiayaan upacara adat, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penyediaan fasilitas umum, dan penataan lingkungan di Desa Adat Kedonganan.

Wilayah Desa Adat Kedonganan tidak begitu luas, kurang lebih hanya 1 km². Jarak antara batas Selatan (Jalan Bantas Desa Adat Jimbaran) dengan batas Utara (Jalan Segara Madu Desa Adat Kelan) kurang lebih 1 km. Begitu juga jarak antara pantai Timur dengan pantai Barat yang juga sekitar 1 km. Secara administrasi adat, wilayah desa terbagi menjadi 6 (enam) *banjar*: Banjar Kubu Alit, Ketapang, Anyar Gede, Pasek, Kertayasa, dan Pengenderan. *Banjar* merupakan pilar desa adat yang memiliki tempat, *kulkul*, *krama*, aturan/*awig*, dan juga pengurus.

¹⁵⁵ Istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut rumah makan dengan menu utama makanan laut.

Sampai tahun 2009, jumlah *krama*¹⁵⁶ di Desa Adat Kedonganan mencapai 5.097 jiwa dengan 1.072 kepala keluarga (KK). *Krama Lanang* (laki-laki) berjumlah 2.512 jiwa. Sementara *krama istri* (perempuan) berjumlah 2.585 jiwa. Selain itu, Kedonganan juga dihuni *krama tamu* (penduduk pendatang). Dengan kehadiran *krama tamu*, maka jumlah total penduduk tetap menjadi 5.639 jiwa atau 1.257 KK. Dengan luas wilayah yang sempit dan berpenduduk banyak, tidak heran jika Kedonganan menjadi sangat padat.

1. Sejarah Desa Kedonganan

Ada banyak versi mengenai asal-usul Desa Adat Kedonganan. Salah satu versi menyebutkan jika Kedonganan merupakan desa yang sudah ada sejak tahun 1324 (Isaka warsa 1246). Namun saat itu masih dengan nama Kedongayan. Versi ini terungkap dalam Babad Ularan. Eka Ilikita kemudian mengutip babad tersebut dan mencuatkan nama Desa Adat Kedonganan.¹⁵⁷ Di dalamnya termaktub kisah saat Bali diperintah Dhalem Bedahulu yang memiliki pusat kerajaan di Pejeng, Gianyar, Bali. Ki Ularan pernah singgah di sejumlah desa pesisir Selatan Bali seperti Tuban, Kelahan, dan Kedongayan. Dalam masa invasi Gajah Mada ke Bali, nama Kedongayan juga disebut sebagai tempat pendaratan tentara Majapahit. Selain di Kedongayan, tentara Majapahit juga mendarat di Kuta Mimba, Kelahan, dan Tuban. Dari cerita tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nama Kedonganan, berasal dari nama Kedongayan. Paling tidak sampai era kepemimpinan Bedahulu.

Versi lain sejarah Kedonganan berasal dari buku monografi Desa Tuban tahun 1980 dan monografi Kelurahan Tuban tahun 1990. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Kedonganan masih

¹⁵⁶ Penduduk dalam bahasa Bali.

¹⁵⁷ Teks dan karya sastra yang berhubungan dengan sejarah Desa Adat Kedonganan.

satu desa atau kelurahan dengan Tuban. Nama desa itu berasal dari kata *gedong*, yang berarti ‘tempat bersujud’ atau ‘mengheningkan cipta’. Kata itu berasal dari kisah I Gusti Agung Maruti. Patih ini merupakan orang yang berhasil memberontak dan menjadi penguasa di Gelgel selama lebih dari 30 tahun. Namun ia pun balik diserang dan kalah oleh pasukan I Dewa Agung Jambe. Setelah kalah dalam pertempuran di Gelgel, I Gusti Agung Maruti pun melarikan diri ke Selatan Bali. Di salah satu daerah, Patih ini pun mengenang nasibnya, kekalahannya, *swadharma*-nya, dan kemudian mengheningkan cipta. Semua dalam rangka meninggalkan *angga sarira* dan *atma sarira*. Kemudian memantapkan diri memuja kebesaran Ida Sang Hyang Widhi. Akhirnya, tempat tersebut pun disebut *Gedongan*. Seiring berjalannya waktu, nama itu berubah menjadi Kedonganan.

Sampai saat ini, belum jelas versi sejarah mana yang paling benar. Keberagaman versi tersebut justru makin meyakinkan bahwa Kedonganan adalah desa kuno. Proses pembentukannya telah berlangsung sejak lama. Tak ayal, di Kedonganan terdapat Pura Penataran. Di Bali, Pura ini hanya ada di beberapa desa-desa kuno. Hal ini juga berdampak pada kemunculan adat tradisi. Praktiknya, tidak jarang sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing wilayah. Begitu pula dengan yang terjadi di Kedonganan.

2. Kekhasan Masyarakat Desa Kedongan

Sisi Timur dan Barat desa berhadapan langsung dengan laut. Di sisi Timur, pantai ditumbuhi mangrove dan berlumpur. Sementara di sisi Barat, terdapat pantai berpasir putih. Kondisi geografis ini secara langsung berpengaruh terhadap tradisi di Kedonganan. Masyarakat Adat Kedonganan memiliki tradisi khas yakni *mebuug-buugan*. Tradisi ini dilaksanakan satu hari

setelah Hari Raya Nyepi. Bandesa Adat Kedonganan,¹⁵⁸ I Wayan Mertha, menjelaskan

“Jadi masyarakat datang ke pantai Timur Kedonganan, kemudian melumuri tubuhnya dengan lumpur. Sebelum dilakukan itu ada upacara. Kemudian, setelah jalan ke pantai Barat, di pantai membersihkan dirinya setelah itu diperciki Tirta. Memohon pembersihan lahir batin. Lahirnya dibersihkan di laut kemudian batinnya diperciki Tirta. Itu tradisi lama yang disakralkan dan menjadi ciri khas Kedonganan.”

Tradisi *mebuug-buugan* hanya terdapat di Kedonganan. Sebagaimana tradisi *omed-omedan* yang hanya ada di Desa Adat Sesetan. Persamaan dari kedua tradisi ini terletak pada waktu pelaksanaannya yakni satu hari setelah Hari Raya Nyepi.

B. Lanskap Ekologis Desa Adat Kedongan

Wilayah Kedonganan sering disebut sebagai “leher kuta” (*Kuta Isthmus*). Daratan “leher kuta” mempunyai lebar 1–2 km. Menghubungkan bukit dengan daratan Pulau Bali paling utama. Lahan “leher kuta” terbentuk oleh aktivitas *marine*. Terutama karena adanya *fringing reef* (hamparan terumbu karang tepi) dan *barrier* (penghalang).¹⁵⁹ Sisi Timur dan Barat Kedonganan langsung berhadapan dengan laut, sehingga memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan “leher kuta” pada umumnya.

Pesisir Timur Kedonganan, merupakan satu kesatuan dengan kawasan Teluk Benoa. Kawasan ini berekosistem lumpur sehingga memungkinkan sebagai tempat

¹⁵⁸ Bandesa Adat adalah Kepala Desa Adat.

¹⁵⁹ Ketut Sudiarta dkk, “Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) dalam Jejaring KKP Bali,” <https://drive.google.com/file/d/0B-OM5Nlm3dkzLXdfUGFwQUxmMmM/edit> (Diakses pada 26 Juni 2020).

berkembangnya hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove di Teluk Benoa adalah suatu hal yang maha penting—baik ditinjau dari aspek fisik, ekologi, maupun ekonomi. Di Teluk Benoa, terdapat setidaknya 64,5 hektar hutan mangrove.

Menurut Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Unda Anyar (2008), dalam satu hamparan hutan mangrove dari Tanjung Benoa hingga Sanur, terdapat vegetasi pohon mangrove sejumlah 9 jenis. Jenis yang paling dominan adalah *Sonneratia alba*.¹⁶⁰ Berdasarkan indeks nilai penting vegetasi, secara berurutan jenis mangrove adalah *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora stylosa*, *Avicennia marina*, *Xylocarpus granatum*, *Excoecaria agalocha*, dan *Avicennia lanata*.

Sementara menurut data *Mangrove Information Center* (MIC), di kawasan hutan mangrove Teluk Benoa, terdapat 60 jenis krustase. Dua diantaranya adalah kepiting dan udang. Beberapa masuk ke dalam kategori yang dapat dimakan (*edible species*), seperti kepiting bakau (*Scylla serrata*) dan rajungan (*Portunus spp.*). Selain itu, terdapat pula 22 spesies moluska. Termasuk yang memiliki nilai ekonomis seperti kerang dan tiram.¹⁶¹

¹⁶⁰ Dalam Bahasa Bali disebut dengan *Prapat*. Sehingga kawasan hutan ini disebut hutan Prapat Benoa.

¹⁶¹ Ketut Sudiarta dkk., *op.cit.*



Gambar 3. 35 : Keramaian Pantai Barat Desa Adat Kedonganan pada sore hari. Sumber: Dokumentasi Moko 2018.

Pesisir Barat Kedonganan berhadapan dengan laut lepas. Karakteristik utama pantainya adalah berpasir putih dengan garis pantai sepanjang 1020 meter. Wilayah lautnya menjadi rumah bagi beberapa jenis ikan. Seperti ikan layang, makarel, lemuru, tongkol kecil, cakalang, dan lainnya.¹⁶²

Wilayah Barat desa terbagi menjadi empat zona. Masing-masing zona memiliki peruntukan yang berbeda-beda.¹⁶³ Zona I diperuntukan sebagai *Beach Club* dan pengembangan bangsal nelayan. Aktivitas yang ada di zona ini antara lain adalah *cafe*, *fishing trip*, *sunbathing*, dan *massage*. Zona ini juga dimanfaatkan sebagai bangsal kelompok nelayan putra Bali. Anggota kelompok nelayan ini berjumlah sekitar 53 kepala keluarga. Sementara Zona II merupakan lokasi 24 kafe di desa ini. Kafe-kafe tersebut membawa pengaruh positif. Baik secara kualitas perekonomian masyarakat atau pun adat secara umum. Zona

¹⁶² Lihat: Luh De Suriyani, "Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali," <https://www.mongabay.co.id/2018/12/15/kedonganan-kampung-nelayan-yang-bertahan-di-pusat-turisme-bali/> (Diakses 26 Juni 2020).

¹⁶³ Wawancara dengan Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Mertha.

ini pun dikelola dengan sangat baik. Kebersihan di zona ini senantiasa selalu terjaga.

Zona berikutnya, Zona III, adalah kawasan pantai Utara Kedonganan. Di zona ini terdapat pasar ikan segar higienis. Di zona ini pula para nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Selain menjadi lokasi pasar ikan terbesar se-Bali Selatan, di zona ini juga terdapat pasar sembako. Pasar ini memasok kebutuhan hotel dan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat pula beberapa warung jasa pemanggangan ikan.

Sedangkan zona terakhir, Zona IV, merupakan *offshore* yang memiliki keindahan luar biasa. Terutama saat matahari tenggelam. Kawasan ini pun memiliki perairan yang cukup tenang. Tak ayal, di sana banyak aktivitas perahu nelayan tradisional. Zona ini sangat berpotensi untuk pengembangan wisata air non-mesin. Seperti *sunset tour*, *fishing trip*, *canoeing*, *win surfing*, dan lain sebagainya. Selain itu, kawasan ini juga menjadi jalur penyeberangan Kedonganan-Banyuwangi dengan waktu tempuh sekitar 2,5-3 jam.

Namun kini Bali banyak berubah. Seorang Ketua Program Studi Pemandu Wisata, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Dr. I Ketut Sumadi, juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, perubahan lanskap Bali sedang marak terjadi terutama yang diakibatkan oleh sektor pariwisata. Hal ini pun menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius.¹⁶⁴ Seperti, misalnya, air di Bali mengalami pencemaran—baik air tanah maupun air permukaan. Hamparan lahan pertanian yang subur pun banyak berubah. Sebagian besar menjadi bangunan fisik seperti hotel dan villa. Pada gilirannya, perubahan lanskap juga mengancam Desa Adat Kedonganan baik secara sosial, ekonomi, atau budaya.

¹⁶⁴ Lihat misalnya: <https://bali.antaranews.com/berita/9647/bali-hadapi-masalah-lingkungan-dampak-pariwisata> (Diakses 26 Juni 2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh musisi asal Bali, JRX. Dia memaparkan bahwa

“Saya bukannya tidak pro pembangunan. Tidak anti kemajuan. Namun saya hanya anti pembangunan yang *ngawur*, tidak merata. Dan hanya mementingkan kepentingan jangka pendek investor. Kalau Bali lama-kelamaan seperti Bali Selatan semua, maka kita hanya bisa menjadi budak di tanah sendiri. Nah jika itu yang terjadi, berarti kita sebagai manusia sudah tidak bernurani. Lebih mementingkan kapital saja. Jadi jangan sampai kapital menjadi Tuhan. Bali kan Pulau Seribu Pura dan Pulau Seribu Dewa, tapi kenapa seolah-olah Bali ini Tuhannya hanya satu saja yaitu uang. Jadi jangan sampai kapitalisme menjadi Tuhan di Bali.”¹⁶⁵

Musisi asal Bali itu berbicara dalam konteks yang cukup spesifik: Reklamasi Teluk Benoa. Beberapa tahun terakhir, ancaman perubahan lanskap ekologis di Benoa memang sedang hangat dibicarakan. Pasalnya, PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) milik konglomerat Tommy Winata, berencana menyulap kawasan Teluk Benoa menjadi ikon pariwisata baru. Dalam masterplannya, PT. TWBI akan merancang pulau reklamasi seluas 700 hektar, dari keseluruhan revitalisasi seluas 2800 hektar.¹⁶⁶

Reklamasi Teluk Benoa merupakan manifestasi dari masifnya investasi di Pulau Dewata. Sebagian besar memiliki satu mantra yang sama yakni mendulang keuntungan dari bisnis pariwisata. Namun ibarat penyakit yang menggerogoti tubuh, kerusakan yang disebabkan keserakahan investasi tidak semata merusak alam. Namun juga menggerogoti sektor lain seperti budaya dan praktik ekonomi masyarakat setempat. Dan

¹⁶⁵ Lihat: Tommy Apriando, “Jerinx SID: Jokowi Harus Batalkan Reklamasi Teluk Benoa,” <https://www.mongabay.co.id/2014/09/12/jerinx-sid-jokowi-harus-batalkan-reklamasi-teluk-benoa/> (Diakses 26 Juni 2020).

¹⁶⁶ Lihat misalnya: <http://twbi.co.id/index.php?page=concept> (Diakses 29 Juli 2020).

Desa Adat Kedonganan ada di tengah ancaman seperti itu. Karena itu, inisiatif model pengelolaan ekonomi di Kedonganan harus diperhitungkan sebagai sebuah narasi tanding. Apalagi, praktik CBT di Desa Adat Kedonganan sudah terbukti makin meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi. Bahkan, pada saat yang sama, mampu juga menghidupkan adat setempat.

C. Temuan Ekonomi Nusantara

1. Kejayaan Masa Lalu dan Konteks Masa Kini

Kedonganan telah eksis sebagai *pakraman* jauh sebelum Indonesia merdeka. *Pakraman* merupakan istilah yang lazim pada era kekuasaan Belanda. Istilah tersebut pun melekat cukup lama. Sebelum akhirnya muncul Peraturan Daerah (Perda) yang mengganti istilah tersebut menjadi Desa Adat. Sejak saat itu Kedonganan lazim disebut sebagai Desa Adat. Mayoritas orang-orang *krama* yang bermukim di *pakraman* Kedonganan bermata pencaharian sebagai nelayan. Seorang pemuda setempat yang akrab kami sapa *Jero*,¹⁶⁷ I Wayan Mertha, menceritakan bahwa

“Pada zaman kakek saya hasil tangkapan perikanan di Kedonganan cukup tinggi. Dan itu terjadi sepanjang tahun. Kalau pantai Barat tidak panen karena angin Barat, maka dia pindah ke Timur. Di sana gantian panen. Jadi mereka sangat amat mudah untuk mendapatkan ikan. Berlimpah. Sehingga kekurangan, kelaparan, gak pernah terjadi itu. Sepanjang yang saya tahu, kakek-kakek saya sejahtera.”

Namun *Jero* pun cukup tegas. Dia tidak tahu persis apa makna sebenarnya dari nama Kedonganan. Menurutnya, ada yang bilang nama Kedonganan berasal dari *gedong* yang berarti tempat penyimpanan. Nama itu dikaitkan dengan banyaknya

¹⁶⁷ Secara sederhana *Jero* berarti utama. Istilah ini dimaknai sebagai panggilan untuk orang yang melakukan tugas khusus dan terhormat guna mengabdikan kepada masyarakat.

Pura di Kedonganan yang digunakan untuk menyimpan prasasti. Ada pula yang bilang berasal dari *Kadohiyang*. Begitu pula dengan kepastian tentang kapan Kedonganan mulai eksis. Namun berdasarkan cerita yang digali *Jero Mertha* dari para *pelingsir*,¹⁶⁸ Kedonganan telah ada sejak abad ke-17. Keberadaannya sangat terkait dengan kerajaan-kerajaan besar di Bali. Terutama Kerajaan Klungkung.

Sampai saat ini, *Jero Mertha* sedang terus menggali masa lalu Kedonganan. Dalam proses penggalian tersebut, *Jero Mertha* juga mendapat cerita dari *pelingsir* lain. Terutama tentang kesahihan eksisnya Kedonganan sejak abad ke-17. Beberapa *pelingsir* menceritakan padanya bahwa ada tanda yang dapat membuktikan kebenaran tersebut yakni keberadaan sebuah Pura. Sayangnya, *Jero Mertha* lupa nama Pura tersebut. Di Pura itu ditemukan tanda pendirian pada abad ke-18. *Pelingsir* lain membenarkan bahwa tanda atau *candra* memang menandakan Pura berdiri pada sekitar tahun 1750-an. Namun saat ini, kondisi Pura sudah tidak lagi asli. Pura telah banyak berubah bentuk. Begitu juga dengan arahnya. Dan *Jero Mertha*, baru sebatas mendengar cerita tersebut. Dia belum pernah melihat langsung *candra* yang dimaksud.

Eksistensi Kedonganan pada masa lalu bisa juga ditinjau dari keberadaan Pura. Misalnya di Kedonganan terdapat sebuah Pura Penataran, Pura Tri Heyang. Keberadaan Pura ini mengindikasikan bahwa Kedonganan sudah ada sebelum kedatangan Mpu Kuturan ke Bali. Mpu Kuturan merupakan salah satu Panca Pandita yang tiba di Bali pada tahun 923 Caka (1001 M).¹⁶⁹ Dengan demikian, keberadaan Pura menjadi satu indikasi bahwa pada saat itu masyarakat Kedonganan sudah eksis jauh sebelum era kemerdekaan Indonesia.

¹⁶⁸ *Pelingsir* adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat. Istilah tersebut berlaku juga untuk menyebut pemimpin Puri di Bali.

¹⁶⁹ Lihat misalnya: Anonim, "Sejarah dan Jasa-Jasa Mulia Mpu Kuturan di Bali," dalam <http://hindudamai.blogspot.com/2014/05/sejarah-dan-jasa-jasa-mulia-mpu-kuturan.html> (diakses pada 7 Juli 2020).

Setelah Indonesia merdeka, Kedonganan masuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil. Ibu kota provinsi tersebut ialah Singaraja. Kota ini pun masih berada di Pulau Bali. Pascakemerdekaan, kehidupan *krama* Kedonganan tidak jauh berubah. Mayoritas masih berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun, sekitar tahun 1970-an, terjadi banyak praktik jual beli lahan kepada orang-orang luar Kedonganan, terutama yang berada di sekitar pantai. Di Kedonganan, hampir semua keluarga mempunyai tanah yang cukup luas. Sebagian besar alasan mereka menjual tanah adalah untuk kebutuhan upacara seperti, misalnya, *ngaben*. Sayangnya, jumlah yang dijual kerap lebih banyak dari kebutuhan untuk upacara. “Contohnya, kita butuh sekian, dijual sekian. Padahal butuhnya seratus dijual seribu sembilan ratus,” sebut *Jero Mertha*.

Pada akhirnya, praktik jual beli tanah telah menurunkan tradisi agraris masyarakat. Kehidupan ekonomi pun makin tergantung pada aktivitas melaut. Pada awalnya, alat produksi pada sektor ini masih dikuasai masyarakat. Namun karena tradisi melaut membutuhkan kondisi fisik prima, maka aktivitas itu tidak begitu menarik bagi generasi 1990-an. Tidak heran jika hanya sebagian kecil masyarakat saja yang tetap melaut secara tradisional. Sebagian besar masyarakat lainnya, mulai menjadi pengusaha ikan. Dalam arti, dia tidak lagi menjadi nelayan namun memperkerjakan orang dari luar Desa Kedonganan. Kondisi tersebut muncul bersamaan dengan meledaknya industri wisata pada sekitar tahun 1995. Alhasil, pariwisata pun mulai menarik perhatian masyarakat lokal. Lambat laun, kondisi ini melahirkan kesemrawutan dan juga menciptakan iklim kompetisi antar para *krama*.

Meski demikian, eksisnya Desa Kedonganan sejak zaman dulu tidak bisa dinafikan. Bahkan bukan hanya eksis, tapi juga berjaya. Hal tersebut diperoleh dari aktivitas nelayan dan petani tegalan. Laut di sekitar Kedonganan telah menyediakan hasil tangkapan yang luar biasa. Bahkan menurut cerita *Jero Mertha*, dari penjualan hasil laut itu pula leluhur membeli lahan atau tanah tegalan. Kejayaan tersebut juga ditopang oleh kehidupan

ekonomi masyarakat yang minim kompetisi. Hampir semua kebutuhan pangan juga diperoleh dari hasil sendiri. Padi dan sayur dari hasil pertanian, sementara ikan didapat dari hasil melaut. Di samping itu, hampir semua kebutuhan upacara agama juga diambil dari hasil tanam masyarakat. Biasanya dikerjakan di sela-sela tanam pertanian *krama* seperti buah segar dan daun kelapa. “Semua terpenuhi. Karena alam memang memberikan atau memenuhi kebutuhan itu,” sebut *Jero Amertha*.

Kejayaan Kedonganan makin terlihat dari aspek tradisi turun-temurun seperti, salah satunya, tradisi *ngujur*. Tradisi ini bisa eksis karena masyarakat tidak saling berkompetisi dan terbiasa hidup saling membantu. Tradisi *ngujur* biasa dilakukan saat nelayan pulang melaut. Ketika *jukhong* atau perahu masuk ke pantai, orang-orang biasa membantu mengangkatnya ke darat dan membersihkannya. Dan masyarakat yang membantu diberi ikan secukupnya sebagai tanda terima kasih. Dalam konteks hari ini, ketika wabah COVID-19 terjadi dan melemahkan ekonomi, tradisi *ngujur* menjadi salah satu pembantu para *krama* terlepas dari krisis. Masyarakat saling bantu dan saling memberi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dalam kondisi COVID-19, *ngujur* menjadi tradisi yang menyimbolkan solidaritas sesama *krama*. Apalagi di tengah berhentinya aktivitas pariwisata.

2. Transformasi Ekonomi

Perubahan haluan ekonomi bermula sejak tahun 1990-an. Kedonganan berdampingan dengan daerah Jimbaran.¹⁷⁰ Karena itu, Kedonganan pun mulai terjamah pariwisata. I Wayan Mertha menuturkan bahwa

“Pada tahun 1990an sudah ada hotel di sini. Mulai dari pertama itu Hotel Puri Batu, Bali Segara Resort, dan beberapa yang dibangun tapi tidak selesai. Hotel besar

¹⁷⁰ Pada masa itu, Jimbaran sudah terkenal sebagai daerah kunjungan wisata.

dimiliki oleh orang luar. Mereka melihat peluang itu, lalu menyewa tanah masyarakat. Tahapannya dulu nggak ada sosialisasi dengan masyarakat. Dulu ketika sudah ada ijin dari pemerintah udah langsung bangun. Tapi sekarang saya tidak mau begitu.”¹⁷¹

Sejak tahun 1995, telah berdiri lima kafe di pesisir Pantai Kedonganan. Pemilik dari kelima kafe tersebut adalah masyarakat adat Kedonganan sendiri. Karena posisi Kedonganan yang strategis,¹⁷² alhasil kelima kafe itu pun meraup untung besar. Kesuksesan kelima kafe tersebut, memantik keinginan masyarakat lain untuk turut membuka kafe. Terhitung sejak tahun 1995, satu per satu kafe pun berdiri di sepanjang Pantai Kedonganan. Kafe-kafe tersebut menyediakan menu makanan laut dan segala variasinya.

Dengan makin menjamurnya kafe, maka banyak perseorangan yang secara sepihak mengklaim kawasan pantai. Baik yang dilakukan oleh warga Kedonganan atau pun warga yang menjadi perpanjangan tangan investor. Mereka serentak melakukan klaim sepanjang Pantai Barat Kedonganan. Kurang lebih, dengan ukuran 5 meter per kafe. Tanpa kontrol, kafe-kafe tersebut pun makin bertambah. Dari hanya 5 kafe pada tahun 1995, menjadi sekitar 67 kafe pada tahun 2006. Alih-alih memberikan dampak positif, keberadaan puluhan kafe tersebut justru lebih banyak mendatangkan dampak negatif. Terutama pada aspek lingkungan hidup, sosial, budaya, dan bahkan ekonomi Kedonganan.

¹⁷¹ Wawancara dengan I Wayan Mertha.

¹⁷² Kedonganan sangat dekat dengan bandara, Jimbaran, dan juga Nusa Dua.



Gambar 3.36: Transformasi ekonomi masyarakat Kedonganan. Sumber: Wawancara dengan Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Mertha, pada 29 Oktober 2019.

Pada 2005, dampak buruk pengelolaan kafe di Desa Adat Kedonganan dievaluasi. Saat itu, unsur Pemerintahan Desa Adat Kedonganan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kedonganan, bersinergi melakukan evaluasi dan studi secara menyeluruh. Proses evaluasi melibatkan Sekolah Tinggi pariwisata (STP) Nusa Dua Bali dan STP Badung. Dari hasil evaluasi, muncul satu konsep yang coba diterapkan: *Community Based Tourism* (CBT). Akhirnya, perombakan total di sektor pariwisata pun terjadi. Setelah melalui proses panjang,

enam puluh tujuh kafe yang ada ditertibkan. Dan sejak itu, berdiri 24 kafe baru yang sepenuhnya dikelola secara komunal. Pengelolaan 24 kafe ini diserahkan kepada enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan. Artinya, setiap banjar mengelola 4 kafe.

Sampai Bulan September 2018, aset dan kas yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan berjumlah Rp382.479.285.000. Pada 1990, jumlah aset mereka berjumlah Rp67.824.000. Dengan begitu, terjadi kenaikan nilai aset yang cukup signifikan.¹⁷³ Begitu pula dengan jumlah pengunjung. Berdasarkan data dari Bagian Administrasi BPKP2K, jumlah pengunjung ke kawasan pariwisata pesisir Kedonganan tahun 2018 berjumlah 507.390 orang untuk wisatawan dari Indonesia dan sekitar 557.024 untuk wisatawan dari mancanegara. Sehingga, total pengunjung per 2018 menyentuh angka 1.064.414 orang. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 952.598 orang.

¹⁷³ Laporan keuangan tahunan LPD Kedonganan.

3. Hubungan Lanskap Ekologis dengan Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Gambar 3.37: Deretan kafe di Desa Adat Kedonganan sebelum penataan.
Sumber: Dokumentasi Desa Adat Kedonganan tahun 2006.

Dari sisi ekonomi, laut merupakan ruang nelayan lokal Kedonganan beraktivitas. Dari situ nelayan mendapatkan ikan dan hasil tangkapan laut lainnya. Hasil tangkapan kemudian dibawa ke daratan. Setelah itu, ikan-ikan dijual di pasar, dijadikan bahan baku kafe, atau disantap bersama keluarga di rumah.

Lokasi desa berada di wilayah pesisir karena itu memiliki pantai yang sangat indah. Jika laut memberikan ikan bagi warga, maka pantai bisa menjadi primadona untuk menarik wisatawan datang. Dengan demikian, keramaian wisatawan adalah peluang secara ekonomi.

Peluang tersebut tidak disia-siakan masyarakat. Mereka kemudian mendirikan 24 kafe yang dikelola secara komunal. Pengelolaannya turut memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Kehadiran kafe-kafe tersebut bertujuan tidak hanya meraup untung, melainkan bertanggung jawab

memastikan budaya serta adat tetap terjaga dan berlangsung dengan baik.

Alam pun tak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya masyarakat. Pantai menjadi lokasi dari berlangsungnya beberapa upacara di Bali, termasuk di Kedonganan.¹⁷⁴ Salah satu upacara yang berlangsung di pantai adalah kegiatan *Melasti*. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri manusia secara lahir batin.¹⁷⁵ Selain itu, bertujuan untuk membersihkan kotoran alam dengan air kehidupan. Di dalam kepercayaan Hindu, sumber air seperti air danau serta laut merupakan air kehidupan, atau disebut sebagai *tirta amerta*. Upacara *Melasti* dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi.

Oleh karena banyak kegiatan yang berlokasi di pantai, maka masyarakat sangat membutuhkan akses ke sana. Dengan begitu, karena akses tertutup akibat keberadaan 67 kafe, maka masyarakat pun kesulitan mengakses pantai. Hal tersebut jelas mengganggu keberlangsungan budaya setempat. Belum lagi gangguan dari aktivitas di kafe terhadap kesucian upacara. Hingar-bingar musik kafe, pakaian wisatawan yang bertentangan dengan norma kesopanan setempat, dan aktivitas di bibir pantai adalah beberapa diantaranya.

4. Keragaman Ekonomi Lokal

Seorang warga, Ketut Madra, menceritakan bahwa

“Dulu, masyarakat mencari kerang, batu karang itu diambil oleh masyarakat, untuk kapur, dan pasirnya pun dapat

¹⁷⁴ Lihat: <http://www.balipost.com/news/2019/10/24/90817/Kembalikan-Pantai-di-Bali-sebagai...html> (Diakses 01 Juli 2020).

¹⁷⁵ Lihat misalnya artikel berikut ini: Nabila Ramadhian, “Melasti dan Pengerupukan, Upacara Sebelum Melakukan Nyepi,” dalam <https://travel.kompas.com/read/2020/03/24/223300227/melasti-dan-pengerupukan-upacara-sebelum-melakukan-nyepi?page=all> (Diakses 01 Juli 2020).

dijual. Di pantai Timur, mangrove dipotong untuk kayu bakar, dibuka lahan untuk penggaraman.”¹⁷⁶

Kedua sisi Barat dan Timur Desa Adat Kedonganan memang berupa lautan. Hal ini berpengaruh terhadap profesi warganya. Tercatat hingga tahun 1990, sekitar 90% warga Kedonganan berprofesi sebagai nelayan. Saat itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) Kedonganan masih tertinggal. Jumlah sarjana, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih dapat dihitung dengan jari. Mayoritas penduduk Kedonganan hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Bahkan tak sedikit yang buta huruf. Kondisi semacam ini membuat Kedonganan masih tertinggal jauh dibanding daerah-daerah lain di Kecamatan Kuta. Karena itu, Kedonganan tidak bisa ikut menikmati ‘kue’ pariwisata seperti di daerah sekitarnya.

Padahal, Kedonganan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Pantai Barat di desa ini berpasir putih dengan teluk yang tenang dan damai. Suasana damai itu semakin sempurna dengan pemandangan matahari tenggelam dari pantai sebelah Barat. Sementara pantai Timur, memiliki keunggulan karena mudah dijangkau. Lokasinya berdekatan dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sehingga sangat mudah bagi siapa saja untuk mengaksesnya.

Kemudian pada tahun 1995, muncul inisiatif warga untuk membangun resto ikan bakar. Ketut Madra menambahkan bahwa,

“Pada saat itu ada 9 pionir yang mau menggunakan pesisir pantai. Saya tidak setuju karena khawatir pesisir juga akan rusak. Tapi saya bersyukur karena warga tidak lagi mengambil batu karang, tidak lagi memotong mangrove, karena posisi Pura Dalem yang kita bangun pertama itu

¹⁷⁶ Data ini bersumber dari wawancara bersama Ketut Madra. Ketut Madra merupakan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat kedonganan.

letaknya dekat dengan hutan mangrove. Orang sadar dari situ. Ini hebatnya. Sekali kita ngomong jangan ngambil kayu di hutan mangrove, dekat Pura Dalem, langsung takut dan nggak berani lagi menebang. Benar, bukti Pura bisa selesai dan orang percaya. Kita hubungkan itu.”¹⁷⁷

Lokasi Kedonganan sangat strategis dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal itu mendorong pendirian kafe di pinggir pantai. Kafe-kafe tersebut pun meraup untung besar. Karena itu, banyak warga lain yang tergiur turut mendirikan kafe. Tak ayal, jumlah kafe pun makin banyak, bahkan hingga berjumlah 67 kafe. Namun, setelah melakukan evaluasi, Desa Adat Kedonganan menetapkan bahwa kafe-kafe yang ada hanya membawa masalah. Oleh sebab itu, penataan pun harus dilakukan. Dan kini, jumlah kafe di Desa Adat Kedonganan hanya tersisa 24 kafe.

Masing-masing kafe memiliki lebar depan 17 m, panjang 25 m, dan teras 6 m. Semua kafe memiliki tempat parkir/area publik sendiri seluas 8-10 m. Kafe-kafe itu dikelola secara komunal. Desa Adat Kedonganan memiliki 6 banjar, sehingga masing-masing banjar mengelola 4 kafe. Proses pembangunannya memakan biaya yang tidak sedikit. Persis pada momen itu LPD Desa Adat Kedonganan berperan besar. LPD Desa Adat Kedonganan, menyalurkan kredit total senilai Rp12.000.000.000 untuk investasi awal. Masing-masing kafe mendapat fasilitas kredit senilai Rp500.000.000. Sementara setiap *krama*, juga diberikan fasilitas kredit tanpa agunan senilai Rp5.000.000–Rp10.000.000.

LPD Desa Adat Kedonganan sangat mendukung program penataan Pantai Kedonganan. Program tersebut sebenarnya telah dirancang sejak lama. Tujuannya adalah untuk mendorong iklim usaha di kalangan masyarakat Desa Adat Kedonganan. Dengan harapan, jika iklim usaha terbentuk, maka akan terjadi *multiplayer effect*. Kondisi itu akan berdampak pula

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ketut Madra.

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat terangkat, otomatis akan berpengaruh pula kepada perkembangan LPD Desa Adat Kedonganan.

Oleh karena berwujud kafe, maka jumlah kedatangan tamu sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Dalam keadaan normal, setiap kafe bisa meraup keuntungan rata-rata Rp500.000.000 sampai Rp700.000.000 per bulan. Namun jika sedang *high seasons*, maka keuntungan yang didapat bisa jauh lebih banyak. Namun di Kedonganan, pendirian kafe tidak semata hanya untuk meraup untung. Aspek lingkungan pun menjadi perhatian dalam pengelolaan kafe. Bahkan sejak awal, Lembaga Adat Kedonganan, kelurahan, dan LPM telah membentuk organisasi pengelola Kawasan Pantai Barat bernama Badan Penataan Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BP-KP2K). Organisasi ini memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban kawasan. Selain itu, BP-KP2K juga bertanggungjawab dalam hal kebersihan lingkungan.

Organisasi BP-KP2K juga membuat standarisasi untuk masing-masing kafe. Seperti yang dituturkan Kepala Pengelola Kafe “The Cuisine,” Wayan Adi Minarta,

“Masing-masing kafe harus membangun *septic tank* untuk menampung limbah. Sebelum era penataan, limbah biasa langsung dibuang ke laut melalui pipa di bawah tanah. Sampah padat secara rutin diambil setiap hari pada pukul 4 pagi oleh pengelola kawasan. Dengan demikian pantai ini terjaga kebersihannya.”

Kafe “The Cuisine” merupakan satu dari 24 kafe yang terbentuk setelah penataan ulang. Oleh sebab itu, kafe tersebut sangat menaati aturan yang berlaku di Desa Adat Kedonganan. Wayan Adi Minarta menambahkan,

“Kita ada di sini ada jasa pembersihan. Itu tanggung jawab masing-masing kafe. Jadi ada jasa pembuangan sampah. Jam 4 pagi mereka ambil sampah karena perhari itu kan banyak

sekali sampahnya. Belum lagi batok kelapa dan tulang ikan. Biaya sampah sekitar 600 ribu per bulan. Itu pengeluaran untuk menjaga lingkungan. Kalau di dunia pariwisata, tidak bisa bersih berarti bisa kalah kita dengan pesaing. Syukur kemarin pas festival, di sini kita menang juara satu sanitasi. Jasa sedot *septic tank* itu yang sebenarnya banyak menghabiskan. Nyaris 300 ribu sekali sedot. Dan itu dalam 2 minggu sekali.”



Gambar 3.38: Proses pembersihan Pantai Barat Kedonganan oleh seluruh warga. Setiap warga adalah juga pemilik 24 kafe yang ada. Proses pembersihan dilakukan setiap satu minggu sekali. Sumber: Dokumentasi I Wayan Mertha.

Selain itu, pemilihan lokasi pembangunan kafe pun tidak sembarangan. I Wayan Mertha menjelaskan,

“Ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak boleh dibangun kafe. Seperti tempat untuk *melasti*. Jadi harus ada ruang kosong untuk melaksanakan aspek adat sosial budaya. Kemudian ada lokasi yang memang tidak boleh ada aktivitas. Misalnya karena *nganyud* (prosesi melarung abu ke laut setelah *ngaben*) termasuk kegiatan adat dan agama yang terhubung langsung ke laut.”

Keberadaan kafe di Kedonganan juga berperan memberdayakan para pemuda. Seperti penjelasan I Wayan Mertha bahwa,

“Dulu masyarakat itu nelayan. Tapi sekarang tidak lagi karena tangkapan sedikit. Wilayah tangkapan pun makin jauh. Sehingga perlu biaya yang lebih ketika ingin menangkap ikan. Dengan adanya kafe sekarang, anak-anak muda bisa ikut di dunia pariwisata. Kita menetapkan 49 persen (pekerja) harus orang lokal. Selain itu, 100 persen kepemilikan kafe pun dimiliki oleh orang lokal. Namun pertanyaannya kenapa 49? Karena tidak mungkin semuanya bekerja di kafe. Secara ekonomi, manfaat kafe bagi masyarakat memang luar biasa. Selama kafe ini ada, pendapatan ekonomi mereka meningkat luar biasa. 1 dia sebagai pemilik, 2 sebagai pekerja, 3 dia punya kendaraan untuk mengangkut. Kemudian dia bisa jualan udang, cumi, buah, sayur, jualan canang, dan lain-lain. Coba berapa usaha yang bisa dibangun dengan keberadaan itu? Luar biasa efeknya untuk Kedonganan sendiri. Kalau dibilang baik, baik sekali. Pada akhirnya, nelayan hanya digunakan sebagai hobi. Beda dari zaman dulu. Memang, kalau dulu masyarakat hidup dari sana, nelayan.”

Bagi masyarakat, keberadaan 24 kafe jelas berperan sangat signifikan. Sebagai pemilik atas tanahnya sendiri, masyarakat mendapat 2 manfaat: manfaat individu dan manfaat komunal. Manfaat individunya adalah keuntungan dari kafe. Di “Bali Beach Café” misalnya, keuntungan dibagi menjadi 2: 30% untuk pengelola dan 70% untuk *owner*.¹⁷⁸ Ada juga yang menerapkan pembagian keuntungan 25%:75%.¹⁷⁹ Besar kecil keuntungan yang diterima pemilik kafe berbeda di setiap kafe. Ada kafe yang memberlakukan kebijakan penanaman saham rata. Ada juga penanaman saham sesuai kemampuan. Misal, “Bali Beach Café” menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan jumlah

¹⁷⁸ Wawancara dengan Kepala Pengelola “Bali Beach Café,” Made Giri,

¹⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Pengelola “Cafe Jukung,” Mayun Gede Artama.

saham yang ditanam. Sementara di “Cafe Jukung,” pembagian dilakukan secara merata. Sebab, saham awal yang ditanam memiliki jumlah yang sama.

Secara komunal, perkembangan ekonomi desa digunakan untuk membangun aspek sosial dan budaya. Semua itu dilakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan adat, budaya, serta agama. Manfaat komunal dari keberadaan kafe juga meliputi pembangunan Pura, pembiayaan *yadnya*, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penyediaan fasilitas umum, dan penataan lingkungan. Di samping itu, keberadaan kafe turut pula memberikan sumbangan bagi *banjar*. Dalam satu bulan, kafe bisa menyumbang uang sejumlah Rp2.000.000 untuk *banjar* dan Rp1.500.000 untuk desa. Sehingga total sumbangan per bulan bisa mencapai Rp3.500.000. Bahkan setiap 5 tahun, ada sumbangan lain sejumlah Rp100.000.000. Di luar itu, kafe-kafe juga biasa memberikan sumbangan sukarela pada saat kegiatan adat di Desa Adat Kedongan.

Dengan putaran uang yang cukup kencang, kini masyarakat Kedongan tidak lagi menanggung beban memikirkan biaya pembangunan atau perbaikan Pura. Sementara pada zaman dulu, ekonomi masyarakat masih cenderung lemah. Jangankan untuk membangun atau memperbaiki Pura, untuk upacara (*piodalan*) saja masih harus menunggu penjualan hasil bumi. Begitu pula dengan urusan pembiayaan *yadnya*. Kini masyarakat tidak lagi dikenai *peturunan* (uang patungan) untuk mendukung upacara di Pura. Saat upacara *piodalan* atau saat ada karya di Pura, *krama* hanya datang untuk sembahyang atau *ngaturang* ayah. Setiap *Penampahan* Hari Raya Galungan pun rutin diadakan acara pembagian daging babi. Setiap 6 bulan, bisa mencapai 7 ton daging babi.

Dari aspek pendidikan, melalui LPD Desa Adat Kedongan, anak-anak memperoleh Tabungan Beasiswa (TaBe) Plus. Program ini dirancang sebagai persiapan dana pendidikan bagi anak-anak Desa Adat Kedongan. Sehingga tidak ada lagi angka putus sekolah hanya karena kekurangan

biaya. Beberapa anak juga mendapatkan beasiswa prestasi dan beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Setiap Hari Ulang Tahun (HUT), LPD Desa Adat Kedonganan juga kerap memberikan beasiswa melalui lomba cerdas cermat. Sejak 2009, juga telah dilaksanakan *workshop* dan lomba menulis bagi siswa dan guru. Selain itu, untuk memajukan pendidikan, LPD Desa Adat Kedonganan juga membentuk Taman Kanak-Kanak dan Lembaga Pendidikan Desa Adat Kedonganan. LPD menanggung seluruh pembiayaannya.¹⁸⁰

Manfaat keberadaan kafe juga dirasakan mereka yang ditinggalkan anggota keluarganya. Setiap *krama* Desa Adat Kedonganan yang meninggal, akan mendapat uang santunan kematian. Rentang tahun 2002 hingga 1 Oktober 2008, nilai santunan yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Akan tetapi, sejak 4 Oktober 2018, nilai santunan kematian meningkat menjadi Rp2.000.000. Manfaat penting lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah program *ngaben* dan *nyekah masa*. Program ini dilaksanakan Desa Adat Kedonganan setiap tiga tahun sekali. Kini para peserta *ngaben* dan *nyekah masa* tidak lagi dikenai kewajiban membayar biaya upacara.

Kini keberadaan kafe pun tidak lagi menjadi gangguan bagi keberlangsungan budaya dan adat. Hal tersebut merupakan buah dari pengelolaan yang dilakukan secara komunal dengan tetap menyertakan aturan-aturan adat. Berikut ini adalah daftar larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi:

- a. Dilarang melakukan cun timbangan terhadap materi/produk yang dijual kepada pelanggan;
- b. Dilarang membangun di luar tempat yang telah ditetapkan;
- c. Dilarang membuang limbah ke jalan;
- d. Dilarang parkir sembarangan;

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ketut Madra.

- e. Kafe-kafe dilarang menampilkan hiburan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat Bali;
- f. Pedagang acung dilarang beroperasi di Pantai Kedonganan;
- g. Kafe-Kafe dilarang untuk menutup lorong di masing-masing kanan kiri kafe yang telah ditetapkan. Sehingga tidak menutup akses masyarakat untuk melakukan upacara di pantai;
- h. Dilarang mengganti nama kafe tanpa seizin BPKP2K;
- i. Dilarang memberi komisi yang melebihi komisi yang ditetapkan (25%) dan juga tambahan-tambahan kepada sopir, guide, pelanggan baik berupa uang/barang. *Krama* dilarang mengelola lebih dari satu kafe;
- j. Dilarang adanya penanaman modal dari pihak luar kecuali oleh *krama* banjar pada kelompok kafe yang bersangkutan;

Jika melanggar aturan-aturan tersebut, terdapat beberapa sanksi yang berlaku. Seperti dilaporkan kepada pihak berwajib, penutupan kafe selama 1-7 hari sesuai bobot ancamannya, dan dikenakan sanksi yang tercantum dalam *awig-awig* (aturan-aturan) Desa Adat Kedonganan.

Pada akhirnya, keberadaan 24 kafe di Desa Adat Kedonganan tidak hanya memberikan manfaat kepada desa semata. Manfaatnya juga dirasakan oleh Kabupaten Badung dalam bentuk pajak. Artinya, keberadaan 24 kafe ini pun turut berkontribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Bahkan setiap kafe telah menggunakan *cash register online*. Hal tersebut membuat uang yang masuk langsung terdaftar dan dikenakan pajak sebesar 10%. Pajak ini dikenakan pada tamu yang berkunjung langsung tanpa melalui *travel agent*. Made Giri pun menambahkan,

“Tapi kalau *travel agent*, kalau kita naikkan 10% kadang *travel agent* itu banyak yang tidak mau. Takut kemahalan. Kalau *group* beda sedikit saja harganya itu sudah pindah mereka.”

Sebelum diterapkannya *cash register online*, sebenarnya warga sudah memiliki NPWPD. Hanya saja, kita masih membayar dan membukukan secara manual. Namun pada akhir November 2018, “*di-launching* lah *cash register* itu. *Jero Bendesa* (Kepada Desa Adat) pun menghimbau (agar) tidak ada satu pun kafe yang tidak menggunakan *cash register*” ujar Made Giri.

5. Kemajuan Desa Adat Kedonganan dalam Sudut Pandang LPD

LPD Desa Adat Kedonganan diresmikan pada 9 September 1990. Tepatnya, 6 tahun setelah LPD resmi berdiri di Bali. Pada awal pendirian, modal LPD Kedonganan tidak begitu besar. Hanya sekitar Rp4.600.000. Modal ini bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I Bali. Kurang lebih senilai Rp2.000.000. Kemudian ada pula bantuan dari Pemda Tingkat II Badung senilai Rp2.600.000. Pada masa-masa awal, LPD Desa Adat Kedonganan belum memiliki kantor yang cukup representatif. Bendesa Adat Kedonganan kala itu, I Wayan Gandil, akhirnya meminjamkan *wantilan* Banjar Anyar Gede sebagai kantor LPD Kedonganan.

Pada masa itu, keterbatasan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasi LPD Desa Adat Kedonganan. Tidak hanya terbatas pada modal, tetapi juga terbatas pada dukungan *krama*. Pada awalnya, *krama* ragu bahwa lembaga ini bisa eksis dan berlanjut. Akibatnya, peresmian LPD Kedonganan pun hanya dihadiri sebagian *prajuru* dan segelintir warga. Keraguan itu dijawab oleh perkembangan yang pesat. Modal awal Rp4.600.000 berkembang menjadi Rp55.000.000. Hasil tersebut dibagi untuk *parahyangan*, *pawongan*, maupun lingkungan.

Krisis mulai terjadi ketika menjamurnya kafe di desa. Dari sebelumnya hanya terdapat 5 kafe, berkembang menjadi sekitar 67 kafe. Namun, berkembangnya jumlah kafe tidak berdampak positif terhadap desa, malah justru sebaliknya. Seperti kata Ketut Madra,

“Sebelum tahun 2006 (lokasi kafe) dempet itu. Lalu saya lihat, ini banyak *kok* nggak ada pengaruh ke Desa Adat. Dulu 5 kafe saja ada pengaruh. Ketika menjadi banyak, kenapa tidak? ini siapa yang punya? Saya teliti dan analisis. Terus saya minta *jero bendesa* untuk menata ini. Limbah dan lingkungan tidak terkontrol. Desa adat tidak bisa kontrol. Akhirnya saya buat analisis itu. Ini bukan orang Kedonganan. Manfaat untuk orang Kedonganan tidak ada. Saya bilang seperti itu, karena di LPD itu kan bisa dilihat.”

Naas. Saat itu warga Kedonganan hanya diperalat. Ketut Madra menambahkan jika

“Orang kita dipakai alat oleh orang luar. Dipakai alat. Saya tahu siapa mereka. Ada satu orang punya 8 (kafe). Terjadi sistem kapitalis di situ. Dari semua itu kita coba bangun. Kita coba rapat. Akhirnya kami tata menjadi dua 24 kafe.”

Pengelolaan 24 kafe dijalankan berdasarkan satu konsep bernama CBT. Sebuah konsep pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat sendiri. Sebagai regulator, maka dibentuklah BPKP2K. “Untuk mengatur kelompok itu kita bentuk BPKP2K. Ketuanya Pak Merta,” lanjut Ketut Madra.

Penataan tersebut berbuah manis. Aspek lingkungan menjadi lebih terpelihara. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga terjaga dengan baik. Secara ekonomi pun justru menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan dari LPD, aset pun turut berkembang. “Sekarang jumlahnya sudah mencapai 383 miliar, ada pengaruh positifnya di situ” ujar Ketut Madra. Peningkatan di banyak sisi tersebut menjadi awal yang sangat bagus. Dan pada akhirnya menciptakan multi efek seperti,

misalnya, efek pada lingkungan. Kini kondisi lingkungan lebih terjaga. Makin minim pula orang yang merusak lingkungan.

Keuntungan LPD Desa Adat Kedonganan didistribusikan kepada beberapa sektor: 60% untuk menambah permodalan, 20% untuk Desa Adat, 10% untuk jasa produksi (pengelola, pengurus, dan karyawan), dan 5% untuk dana sosial. Alokasi untuk dana sosial ditujukan untuk aneka kebijakan sosial seperti, misalnya, bedah rumah, beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, untuk *prajuru*, dan lain-lain. Sementara 5% sisanya, digunakan untuk dana pembinaan, terutama penguatan LPD.

Selain itu, ada juga alokasi untuk *Banjar* sejumlah Rp25.000.000 per tahun. Kemudian untuk STT sebesar Rp10.000.000, dan untuk *pamistri* sejumlah Rp5.000.000. Dalam satu tahun, terdapat pula dana sekitar Rp40.000.000 di luar dana rapat *Banjar*. Dana rapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota *Banjar*. Setiap peserta rapat, rata-rata mendapat Rp20.000. Insentif rapat tersebut ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar mau datang. Sehingga mereka dapat mendengar aneka rencana program desa dan *banjar*. Di samping itu, ada juga *punia* yang diberikan kepada *pura sanak*.¹⁸¹

6. Kondisi Krisis dan Dimensi Pemulihan

Kepemilikan kafe yang individualistik dan semata hanya mencari keuntungan terbukti justru hanya melahirkan masalah. Tidak hanya di satu sektor, namun di banyak sekali sektor. Dari sektor lingkungan misalnya. Sebelum penataan, setiap kafe tidak memiliki *septic tank* untuk limbah. Sehingga muncul pencemaran lingkungan dan kondisi kekumuhan. Limbah dari kafe langsung saja dibuang ke pantai menggunakan pipa. Alhasil Pantai Kedonganan pun tercemar. Padahal keindahan pantai merupakan daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, laut

¹⁸¹ Pura yang dimiliki oleh keluarga besar.

pun ikut rusak. Akhirnya nelayan desa semakin sulit mendapatkan ikan.¹⁸²



Gambar 3.39: Tampak depan satu dari 24 kafe hasil penataan di Kedonganan.
Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Berkembangnya Pantai Barat Kedonganan sebagai destinasi wisata tidak diikuti dengan standarisasi bentuk bangunan. Saat itu, setiap bangunan berdiri seenaknya. Hal itu justru menghilangkan estetika dari pantai itu sendiri. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses atas pantai karena sebagian besar pintu masuk ke area pantai terhalang oleh kafe. Contoh buruknya tata kelola lingkungan itulah yang coba diubah saat penataan.

Selain menghilangkan hak warga untuk mengakses pantai, keberadaan puluhan kafe juga tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan. Ketua LPD kedonganan, Ketut Madra, mengatakan, “tidak adanya pengaruh signifikan dari keberadaan kafe merupakan dampak dari penguasaan kafe

¹⁸² Wawancara dengan I Wayan Mertha.

yang sangat individualistik.” Puluhan kafe hanya dimiliki segelintir warga. Bahkan sebagian besar dimiliki investor dari luar Kedonganan. Keuntungan pun hanya dinikmati segelintir orang. Tidak jarang keuntungannya justru lari keluar desa.

Konsentrasi keuntungan hanya untuk segelintir orang, pada akhirnya menciptakan ketimpangan ekonomi. Perputaran uang yang besar di desa, tidak dinikmati masyarakat Kedonganan. Mereka pun hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri. Dengan begitu, ada atau tidaknya kafe, hal itu tidak berarti apa-apa bagi masyarakat.¹⁸³

Belum lagi, keberadaan 67 kafe justru menjadi gangguan bagi kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Di Desa Adat Kedonganan, rutin dilaksanakan kegiatan *Melasti*¹⁸⁴ dan berbagai upacara lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung di pantai. Namun karena tidak adanya jarak antara satu kafe dengan kafe lain, maka masyarakat pun kesulitan mengakses bibir pantai. Aktivitas kafe seperti musik dan keriuhan, lalu lalang wisatawan, praktis mengganggu serangkaian upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat.

Jengah dengan kondisi tersebut, akhirnya masyarakat Kedonganan pun tidak tinggal diam. Bersama dengan beberapa lembaga, masyarakat Kedonganan mencetuskan konsep CBT. Konsep tersebut pun mendapat dukungan dari Pemkab Badung. Alhasil, melalui surat rekomendasi nomor 603 tahun 2006, Bupati Badung memberikan keleluasaan bagi Desa Adat Kedonganan untuk melakukan penataan. Atas rekomendasi Bupati Badung tersebut, maka setiap banjar di wilayah Desa Adat Kedonganan diberikan 4 kafe untuk dikelola oleh *Krama Banjar*. Setelah penataan, perlahan-lahan aneka masalah pun dapat diselesaikan. Karena berbasis komunal, maka tidak ada lagi ketimpangan ekonomi di desa. Masyarakat tak lagi menjadi

¹⁸³ Wawancara dengan Ketut Madra.

¹⁸⁴ Upacara penyucian diri untuk menyambut Hari Raya Nyepi.

budak di tanahnya sendiri. Kebutuhan adat pun bisa terpenuhi. Semua dari hasil keuntungan 24 kafe.

Boks 3: Strategi Jitu Bertahan dari Pandemi COVID-19

“Kamu tidak pernah memelihara. Kamu tidak pernah menanam.

Kamu hanya menangkap saja. Dan Tuhan memberi rejeki yang luar biasa melimpah. Sekarang ayo kita berbagi.”

Bendesa Adat Kedongan, I Wayan Mertha

Pandemi COVID-19 meruntuhkan aktivitas ekonomi pariwisata. Sekitar penghujung Maret 2020, semua kafe makanan yang dikelola Desa Adat Kedonganan berhenti beraktivitas. Tidak ada lagi rupiah yang masuk ke kocek para *krama* dan orang-orang yang bergantung pada usaha tersebut. Namun muncul satu konsep yakni: Minawisata. Konsep ini mencoba penggabungan aktivitas perikanan dengan pariwisata. Akhirnya, konsep ini menjadi penyelamat. Runtuhnya aktivitas ekonomi yang satu (pariwisata), ditopang oleh aktivitas ekonomi nelayan. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan Desa Adat yang menyelamatkan *krama* lepas dari krisis pangan dan ekonomi.

Saat pandemi, Bendesa Adat Kedonganan tetap memperbolehkan nelayan melakukan aktivitas di Pantai Utara. Tentu saja, aktivitas tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dan seperti biasa, hasil tangkapan nelayan pun tetap besar. Kondisi inilah yang akhirnya mengingatkan Bendesa Adat Kedonganan, *Jero Mertha*, pada tradisi *ngajur*. Ia pun kemudian memanggil dan meminta Kepala Pasar Perikanan dan sekaligus pemilik kapal, Wayan, untuk mempraktikkan kembali tradisi *ngajur*. Setiap masyarakat Kedonganan yang turun ke pantai, akan diberikan ikan secara gratis. Selama itu ditunjukkan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Pada awalnya, hanya dua puluhan warga yang terlibat. Kemudian perlahan-lahan, ketika kondisi ekonomi makin sulit, tradisi *ngajur* pun diikuti lebih banyak warga. Bahkan hingga mencapai lima puluh orang.

Kebijakan lain yang ditempuh Desa Adat Kedonganan adalah mengalokasikan keuntungan LPD Kedonganan. Alokasi tersebut

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh *krama*. Jumlahnya sekitar 1300 Kepala Keluarga. Akhirnya, selama tiga bulan (April-Juni 2020), setiap Kepala Keluarga mendapat paket sembako senilai sekitar Rp550.000. Seorang *krama* bertanya tentang dasar kebijakan tersebut. Jero pun menjelaskan bahwa keuntungan tahun 2019, berjumlah lebih dari 9 miliar. Keuntungan LPD tersebut diperoleh dari sektor pariwisata. Dan masyarakat sangat berperan besar menyukseskan sektor tersebut. Karena itu, saat kondisi masyarakat sedang sulit, maka sudah seharusnya LPD turut membantu masyarakat menghadapi krisis. Alhasil, Desa Adat Kedonganan pun mengalokasikan 3,5 milyar untuk masyarakat. Kebijakan selanjutnya, LPD Kedonganan memberikan keringanan kepada *krama* yang mempunyai pinjaman. Mereka diberi kesempatan untuk tidak mencicil pembayaran selama tiga bulan. Mulai dari April sampai Juni 2020.

Pandemi COVID-19 telah meredakan kejayaan ekonomi pariwisata. Namun kondisi tersebut juga dimanfaatkan Jero Mertha untuk membangun kembali rasa kebersamaan. Terutama setelah dibombardir nafsu kompetisi akibat sistem ekonomi kapitalistik. Karena itu, merekatkan kembali kebersamaan adalah pekerjaan rumah paling utama yang dilakukan Jero Mertha. Ia pun mengajarkan sesama pemilik kafe, sesama *krama*, untuk tidak memosisikan temannya sebagai kompetitor. Sebaliknya, teman harus didudukkan sebagai partner. Situasi sulit selama pandemi, telah membuktikan bahwa kebersamaan adalah penyelamat. Selanjutnya, ia mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan praktik ekonomi lokal dan tradisi baik yang diwariskan leluhur. Memilih aktivitas ekonomi modern, tidak berarti harus sepenuhnya meninggalkan tradisi dan ekonomi para leluhur.

D. Rekomendasi

Desa Kedonganan telah berhasil menjalankan konsep CBT. Mereka sukses terlepas dari jeratan kapitalisme bisnis pariwisata. CBT yang dijalankan pun berdampak positif terhadap keberlangsungan budaya, kehidupan sosial masyarakat, maupun lingkungan setempat. Tidak heran jika

masyarakat, masih terus berkomitmen untuk menjalankannya. Dan masyarakat, harus terus menjaga api semangat dalam menjalankan praktik ekonomi yang selaras dengan alam tersebut. Sebab, kelak, anak cucu mereka pula yang akan menikmati warisan alam dan budaya para pendahulu.

Sementara negara, harus melihat keberhasilan praktik ekonomi seperti ini. Sebab, tidak mustahil pula jika praktik “ekonomi nusantara” semacam ini direplikasi di lokasi wisata lain. Karena itu, pertama-tama, negara harus berhenti memberi perhatian dan fasilitas kepada investor. Negara justru harus kembali menengok amanat konstitusi untuk mendistribusikan kesejahteraan secara adil. Kemudian memastikan kondisi sosial dan lingkungan berjalan dengan baik.

Mengembalikan Desa yang Hilang



Tim Penulis

Ridho Saipul
Azzumar Adhitia

A. Desa yang Hilang itu Bernama Sendi

“Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.” Salam itu akan sering terdengar saat berada di kawasan Sendi. Terutama saat masyarakat sedang melakukan kegiatan adat. Makna salam pembuka tersebut adalah “selamat berkat keagungan dan restunya kita semua menjadi.” Dan setiap pasang telinga yang mendengar, serentak akan menjawab, *“Rahayu!”*.

Desa Sendi berada di lereng Utara Gunung Welirang. Luas wilayahnya sekitar 265.352 hektar. Dengan ketinggian, kurang lebih, 1089 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu rata-rata di kawasan Sendi adalah 19-27°C. Namun pada saat tertentu, bahkan bisa menyentuh angka 4°C.

Kesejukan Desa Sendi tidak bisa dilepaskan dari kondisi hutan di sekitarnya. Masyarakat sekitar memang menjaga betul kondisi tutupan hutan. Sebab, seperti penuturan Ketua Adat Desa Sendi, Ki Demang,¹⁸⁵

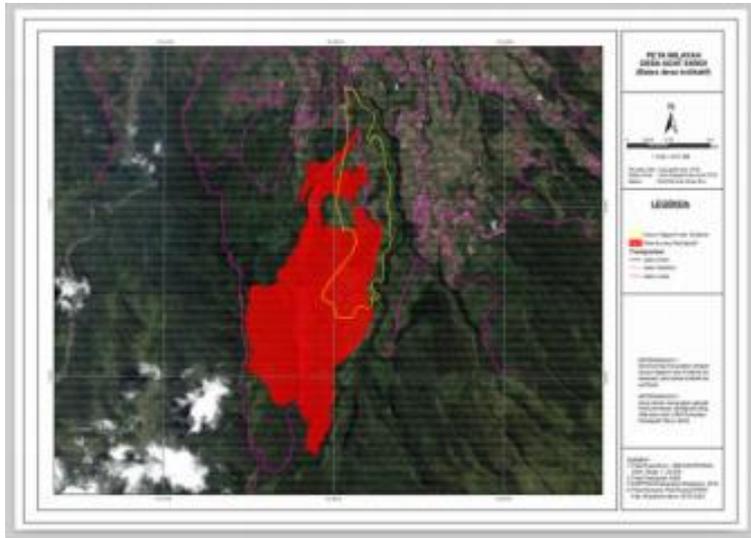
“menjaga hutan berarti menyelamatkan diri dari bencana. Bukan semata untuk Sendi, namun termasuk untuk daerah Mojokerto dan sekitarnya. Dan masyarakat adat harus turut serta memikul tanggung jawab.”

Desa Sendi berbatasan dengan beberapa bentuk lanskap ekologis. Bagian Selatan berbatasan dengan satu tempat bernama “Kutukan Sendi.” Wilayah tersebut berupa jurang dan lembah. Masyarakat meyakini “Kutukan Sendi” sebagai batas antara wilayah profan dengan wilayah produktif. Sebelah Barat berbatasan dengan Bon Kaji dan Kucur Tabut. Keduanya merupakan sebuah mata air. Sementara sebelah Utara berbatasan dengan Lembah Gotehan. Dan di sebelah Timur, Desa Sendi berbatasan dengan Alas Sanggar.

Kekuatan Desa Sendi terletak pada kemampuannya hidup selaras dengan alam. Namun naas, negara justru

¹⁸⁵ Nama asli Ki Demang adalah Mbah Toni. Ki Demang merupakan nama gelar sebagai Ketua Adat Desa Sendi.

memperlakukannya secara berkebalikan. Bahkan, keberadaan Desa Adat Sendi pun tidak pernah diakui secara administrasi. Sejak 1989, kependudukan dan aset tanah Desa Sendi dititipkan ke Desa Pacet. Kondisi ini membuat sekitar 51 Kepala Keluarga (KK) terancam kehilangan asal usul dan haknya sebagai masyarakat adat.¹⁸⁶



Gambar 3.40: Peta wilayah Desa Adat Sendi. Sumber: Dokumen WALHI Jawa Timur.

1. Asal-Usul Desa Adat Sendi

Terdapat cerita turun temurun mengenai asal usul nama Sendi. Secara kosmologi, Sendi dimaknai sebagai “*Sendiko Dadi*” atau “memasrahkan pun jadi.” Sebagai Ketua Adat, Ki Demang memiliki pemaknaan tersendiri tentang hal tersebut. Bagi Ki

¹⁸⁶ Penduduk Desa Sendi berjumlah sekitar 143 orang (83 laki-laki, 60 perempuan). Namun terdapat beberapa anggota masyarakat adat yang bermukim di luar desa. Seperti di Kampung Ngeprih dan Gutehan. Jika mereka turut dihitung, maka anggota masyarakat adat Sendi berjumlah sekitar 600 orang (236 KK).

Demang, “*Sendiko Dadi*” merupakan sebuah bentuk semangat. Terutama untuk mewujudkan kembali kejayaan masa lalu. “Konon cerita, Sendi merupakan desa yang hilang. Jika kembali hidup, maka Sendi akan kembali berjaya. Sesuai dengan konteks zamannya,” tambah Ki Demang.

Desa Adat Sendi memiliki riwayat yang cukup panjang, bahkan merentang jauh sebelum era Republik Indonesia. Berdasarkan pembacaan atas Prasasti Trailokyaputri, pada 1468 masehi, Kerajaan Majapahit memberikan sebidang tanah bernama Sendi. Karena itu, Sendi kerap dipercaya sebagai bekas Desa Perdikan. Satu peninggalan yang masih dapat dijumpai adalah Situs *Putuk Kursi*. Situs ini dipercaya sebagai titik persilangan antara Gunung Kelud dan Gunung Pawitra (sekarang disebut Penanggungan). Sampai saat ini, Situs *Putuk Kursi* masih dianggap tempat sakral. Masyarakat percaya jika situs tersebut adalah tempat bersemayamnya para roh leluhur yang menjaga, merawat, dan memberikan energi kehidupan bagi masyarakat Adat Sendi.

Pada era kekuasaan Belanda, Desa Sendi sudah cukup eksis. Pada 1915, secara administratif, Desa Sendi masuk ke dalam *District Djaboeng, Regentschap Mojokerto, Residente Soerabaja*. Saat itu, Desa Sendi dipimpin oleh seorang *Lurah* (Kepala desa) bernama Singo Joyo. *Lurah* tersebut dibantu oleh beberapa orang seperti *Carik* (sekretaris Desa) bernama Kek Joyo dan *Kepetengan* (Kepala Dusun) bernama Munaji. Pada 1925 terjadi perubahan kepemimpinan. Posisi *Lurah* digantikan seorang pamong desa bernama Singo Setro. *Carik* diganti seseorang bernama Rasban, *Kepetengan* bernama Ngariyo, dan dan *Kebayan* bernama Sopyan.¹⁸⁷

Kehidupan masyarakat Sendi benar-benar berubah ketika Jawatan Kehutanan Belanda (*Boschweezen*) datang. Mereka merampas tanah dan memaksa masyarakat menanam tanaman

¹⁸⁷ Cerita ini terus diturunkan kepada generasi masyarakat Sendi yang lebih muda. Cerita tersebut berasal dari penuturan almarhum Mbah Saim. Beliau lahir sekitar tahun 1800an.

serai.¹⁸⁸ Peristiwa itu terjadi pada 1932 dan membuat masyarakat Sendi kehilangan 72,55 hektar lahannya. Pada 1935 eksistensi Desa Sendi semakin terpojokkan. Pasalnya, secara sepihak, Pemerintah Belanda menetapkan wilayah Desa Sendi sebagai kawasan hutan. Alhasil masyarakat Desa Sendi pun terusir dari tanah mereka sendiri. Banyak warga yang kemudian mengungsi ke desa-desa di sekitarnya.

Selama masa agresi militer Belanda, desa-desa di sekitar Sendi menjadi target sasaran pasukan kolonial. Wilayah itu pun dibombardir dari segala arah. Hal ini membuat masyarakat kembali mengungsi ke beberapa lokasi. Seperti yang diceritakan Ki Demang, “Orang Sendi dulu waktu diserang Belanda, Jepang, terpecah ke lima desa. Mayoritas ada di Desa Pacet Selatan, Ngeprih, dan Gutehan. Itu mayoritas.” Momen pengusiran demi pengusiran membuat orang-orang Sendi trauma. Alhasil mereka pun takut untuk kembali. Wilayah Desa Sendi pun akhirnya terlantar bertahun-tahun. Hingga akhirnya, pada 1967, wilayah Desa Sendi diklaim menjadi milik Jawatan Kehutanan (Perhutani).

Oleh karena wilayah (asli) Desa Sendi lama ditinggalkan, maka struktur pemerintahan desa pun mati. Hal ini melatarbelakangi penghapusan administrasi desa. Momen ini terjadi pada 1989, ketika rezim Soeharto sedang berkuasa. Sekitar tahun 2000, masyarakat adat Sendi mencoba kembali ke wilayah asli mereka. Dengan gigih mereka pun kembali melacak asal-usul leluhurnya, mencoba kembali ke desa, dan berjuang mendapatkan pengakuan dari negara. Tujuan mereka satu: membangun sistem kehidupan yang harmonis antar sesama manusia dan antara manusia dengan alam.

¹⁸⁸ Perampasan yang dilakukan Belanda berdalih tukar menukar dan ganti rugi. Simak artikel berikut ini: Adib Dian Mahmudi, “Klaim Para Penjarah,” http://kpa.or.id/media/baca2/opini/7/KLAIM_PARA_PENJARAH/ (Diakses pada 26 Juli 2020).

2. Kekhasan Identitas Masyarakat Sendi

Masyarakat Adat Sendi memiliki beberapa identitas khas yang menjadi suatu keunikan atau suatu karakteristik khusus. Beberapa kekhasan tersebut meliputi salam khas, doa khusus, serta pakaian adat. Salam khas Desa Sendi adalah “*Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi*”. Salam ini tidak diucapkan dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Namun khusus diucapkan ketika membuka sebuah kegiatan adat. Ketua Adat Sendi pun menjelaskan,

“Salam itu tidak dilakukan dalam keseharian. Kenapa? Menghormati keadaan sekarang. *Kan*, keislaman. Namun jika ada pertemuan kasepuhan, salamnya semua itu, *Rahayu*. Termasuk waktu dinas atau ritual. Semua ucapannya ya itu.”

Beberapa hal memang dilakukan secara eksklusif. Jika salam khas hanya diucapkan ketika masyarakat melakukan ritual adat, maka pembacaan doa khas sifatnya lebih eksklusif lagi. Tata cara pengajaran dan pewarisan doa ini pun tidak sembarangan. Seseorang harus memiliki cucu terlebih dahulu agar dapat melafalkan. Doa khas masyarakat Desa Sendi dipanjatkan setiap kali mengakhiri sebuah hajatan, pertemuan, atau pembahasan penting. Pembacaan doa dipimpin oleh Kasepuhan Adat. Kalimat doa diawali dan diakhiri dengan ucapan yang diyakini dapat membawa kebaikan, terhindar dari kejahatan, dan harapan untuk senantiasa dilimpahkan keselamatan.

Masyarakat Desa Adat Sendi juga memiliki kekhasan pada pakaian adat. Warga Sendi meyakini bahwa alam, ketika digelar, memiliki bermacam-macam warna. Namun ketika semua warna dikumpulkan, maka warna yang beragam akan berubah menjadi hitam (*gulung*). Alhasil warna hitam pun menjadi warna bagi busana adat pria di Desa Adat Sendi – baik untuk busana bagian atas atau bagian bawah. Pakaian adat itu dilengkapi dengan penutup kepala berupa ikat. Sementara pakaian adat perempuan, berupa satu stel kebaya berwarna kuning. Lengkap beserta selendang dengan warna serupa.

Warna kuning melambangkan harapan, keberlanjutan, dan lahirnya kehidupan di Desa Sendi.

B. Gambaran Lanskap Ekologis

Kabut nyaris selalu menyelimuti desa sepanjang waktu. Karena itu, iklim di Sendi pun sangat sejuk. Desa Sendi berada di lanskap ekologis dataran tinggi Jawa. Jenis lanskap semacam itu, mirip dengan beberapa daerah lain di tanah Jawa. Sebut saja, misalnya, daerah Tengger dan Kota Batu. Namun, tentu saja, masing-masing daerah memiliki karakteristik, kondisi alam, dan pengelolaan yang berbeda.¹⁸⁹ Dan masyarakat Sendi memanfaatkan betul anugerah pemandangan alam tersebut. Salah satunya untuk mengembangkan potensi wisata alam. Meski begitu, “Kami *tetep* mengedepankan lingkungan alamnya. Jangan sampe wisata merubah ekosistem,” ujar Sokeh, tokoh Forum Perjuangan Rakyat (FPR) dan sekaligus pengelola wisata alam Sendi.¹⁹⁰

Selain menjadi wilayah kelola masyarakat, kelestarian hutan di Sendi juga menjadi rumah bagi satwa dan tumbuhan. Beberapa satwa yang acap ditemukan ialah kijang, trenggiling, monyet, budeng, babi, maupun ular. Di samping itu, hutan di Sendi pun ditumbuhi pula oleh aneka macam pohon besar seperti beringin, angrung, dan juga bambu. Dari ketiganya, pohon bambu termasuk tumbuhan yang paling banyak ditemukan. Sebab sudah sejak lama masyarakat Sendi aktif menanam bambu. Selain bermanfaat sebagai bahan baku

¹⁸⁹ Di Tengger beberapa warga telah menjual tanahnya kepada orang luar Tengger. Lihat misalnya artikel berikut ini: Hussein Ahmad, “Erosi Kultural Bromo Tengger Semeru,” dalam: <https://www.kompasiana.com/fixiegreen/55c56f824f9773b810eb9caf/erosi-kultural-bromo-tengger-semeru> (Diakses pada 27 Juli 2020). Sementara di Batu lihat: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/169948/investasi-di-kota-batu-capai-19-triliun> (Diakses pada 27 Juli 2020).

¹⁹⁰ FPR merupakan wadah perjuangan masyarakat Sendi untuk merebut kembali haknya. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2001.

bangunan, bambu juga berfungsi sebagai sabuk gunung. Selain itu, keberadaan pohon bambu merupakan penanda batas antara tanah miring dengan tanah datar. Penanda seperti itu penting. Pasalnya, hampir 60 persen tanah di Sendi merupakan tanah lereng dengan kemiringan beragam, mulai dari 10 derajat hingga 90 derajat.

Di kawasan Desa Sendi, terdapat satu jenis tumbuhan yang tidak direstui tumbuh yakni pinus. “Masalahnya, pinus itu terlalu banyak menguras air. *Nyedot* air. Jadi warga malah ga kebagian air,” jelas seorang warga, Sunari. Pasokan air di Sendi sangat bergantung pada kelesatarian lanskap hutan. Sumber utamanya berasal dari dua aliran sungai dan beberapa titik mata air. Menurut penuturan Pak Syubur,

“sejauh ini baru tiga sumber mata air yang digunakan. Satu sumber mata air merupakan milik Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo. Dua sumber mata air lainnya merupakan milik desa yakni sumber Ponkaji dan Tabut.”

Keseluruhan lanskap ekologis Sendi dapat dilihat dari tiga aspeknya: struktur, fungsi, dan perubahannya. Pada aspek struktur, lanskap hutan dataran tinggi Sendi termasuk dalam kategori hutan hujan tropis. Tak ayal, di Sendi banyak ditemui beberapa jenis pohon tegakan. Pohon bambu termasuk yang paling dominan. Proses penanamannya berlangsung terutama saat terjadinya *reclaiming*.¹⁹¹

Sebagai kawasan hutan, lanskap ekologis di Sendi memiliki luas sebesar 265.352 hektar. Warga Desa Sendi pun telah membuat rencana tata guna lahan untuk membagi besaran kawasannya. *Pertama*, untuk lahan Agroforestri seluas 86.443 hektar. *Kedua*, untuk kawasan konservasi dan wisata alam seluas 97.999 hektar. *Ketiga*, untuk lahan permukiman seluas 11.014 hektar. Dan terakhir, *keempat*, untuk lahan kolektif (fasilitas umum) seluas 12.896 hektar. Pembagian peruntukan

¹⁹¹ *Reclaiming* merupakan bentuk upaya masyarakat merebut kembali hak atas tanahnya. Proses ini telah berlangsung sejak tahun 2000.

lahan di lanskap ekologis Desa Sendi penting. Sebab, hal itu bisa memastikan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengalokasian area konservasi juga menjadi satu poin penting. Dengan begitu, maka masyarakat pun bisa meminimalisir ancaman bencana ekologis.

Secara faktual, lanskap ekologis Desa Sendi masuk dalam wilayah adat. Namun dengan berpatok pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (selanjutnya disebut PP 72/ 2010), pemerintah memasukan wilayah Desa Adat Sendi ke dalam area kerja Perhutani. Pasal 3 ayat (1) PP 72/ 2010 menyebutkan:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.”

Ketentuan di atas makin memperkuat kuasa Perhutani atas kawasan hutan di Pulau Jawa. Luas kawasan hutan yang dikuasai Perhutani berjumlah 2.445.201 hektar. Hampir setara dengan 74% kawasan hutan Jawa yang luas totalnya 3,3 juta hektar.¹⁹² Dengan begitu, penguasaan lahan oleh Perhutani nyaris mencapai 18% dari luas total Pulau Jawa. Tidak jarang, kondisi inilah yang mengakibatkan konflik tenurial di banyak kawasan hutan. Sebagian besar melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan pihak Perhutani. Masyarakat Adat Sendi merupakan salah satu contohnya.

Dari segi fungsi, lanskap ekologis Sendi terbagi menjadi dua: kawasan hutan dan area penggunaan lainnya. Kawasan hutan pun terbagi lagi: hutan produksi dan hutan lindung. Sementara

¹⁹² Simak tulisan berikut ini: Profil Perum Perhutani 2019, https://drive.google.com/file/d/15G_Pudd0q5WiN0i-b8VUblk90Vb8yEPR/view (Diakses Pada 16 Februari 2020).

area penggunaan lainnya, sejauh ini masih berupa permukiman dan wisata alam. Secara faktual, penataan yang dikerjakan masyarakat Sendi lebih baik dibanding negara. Bahkan masyarakat Sendi pun membuat model penataan sebagai berikut:

- a. Lahan dengan kemiringan diatas 40° dijadikan kawasan lindung dan konservasi;
- b. Radius 200 meter persegi di kawasan sumber mata air harus dilindungi;
- c. Menjaga serta melestarikan situs peninggalan sejarah sebagai cagar budaya;
- d. Bangunan rumah tinggal harus semi permanen. Meski kini terdapat pula bangunan permanen di desa, namun sebagian besar bangunan masih semi permanen;
- e. Menanam Tanaman Umur Panjang (TUP) yang produktif (buah buahan) di setiap masing masing pemilik lahan;

Masyarakat Sendi sangat menjaga kelestarian alam. Karena itu, alam pun memberikan banyak kebutuhan hidup secara gratis. Misalnya pakis, lalu rerumputan untuk pakan ternak, atau humus untuk kompos, semua didapatkan secara cuma-cuma dari hutan. Termasuk bunga-bunga yang dipergunakan dalam ritual adat. Begitu pula untuk kebutuhan utama kehidupan seperti air. Masyarakat pun memerolehnya secara gratis dari alam. Selain itu, kesejukan udara juga merupakan anugerah alam yang menguntungkan masyarakat. Seperti kata Sunari, “karena di sini hawanya, alamnya, masih sejuk. Itu yang sering dicari orang. Sehingga mereka berwisata ke sini.”

Upaya masyarakat Sendi melestarikan alam memang menuai hasil. Kini Desa Sendi terkenal sebagai daerah ekowisata. Pengelolaannya dilakukan secara komunal oleh masyarakat. Alhasil masyarakat pun mendapat pemasukan tambahan. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat Sendi yang memang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata. Kondisi

itu tidak bisa dilepaskan dari buah kearifan masyarakat menjaga alam. Tanpa alam yang terpelihara, tidak ada ekowisata. Kearifan menjaga alam juga turut berkontribusi mencegah bencana ekologis. Tidak hanya untuk kawasan Desa Sendi, namun juga untuk daerah di sekitarnya. Namun untuk mempertahankan hutan Sendi tetap lestari dan indah bukan pekerjaan mudah. Bahkan, perjuangan itu telah dilakukan sejak zaman kolonial. Selepas masa penjajahan pun perjuangan masih berlanjut, sampai sekarang.

Satu aspek lain dari lanskap ekologis Sendi adalah perubahannya. Salah satu pertanda perubahan terbesar lanskap ekologis Sendi terjadi pada 1971. Saat itu, Perhutani melakukan penebangan hutan besar-besaran. Tindakan tersebut membuat lanskap hutan di Sendi menjadi gersang. Pepohonan pun menjadi jarang. Hal ini membuat naiknya suhu udara. Memasuki era tahun 2000an, hal serupa kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh masyarakat dari luar Desa Sendi. Mereka berbondong-bondong datang menggunakan truk untuk menebang pohon. Beruntung masyarakat Desa Sendi segera mencegah. Ancaman kerusakan lanskap ekologis pun bisa dihindari. Seorang warga, Sunari, mengenang masa-masa itu:

“Waktu lahan ini dipegang Perhutani memang sangat gersang. Waktu itu (1970-1980an) saya masih kecil. Saya ingat betul jika di sini gersang. Sama sekali tidak ada pepohonan hijau. Namun begitu dikuasai masyarakat (*reclaiming* tahun 2000an), lahan itu pun langsung berubah total. Banyak pohon buah-buahan. Lahan tertata, penggarapnya pun bahagia.”

Semangat mempertahankan hutan dan identitas adat menjadi simbol perlawanan Masyarakat Sendi. Kerusakan akibat praktik penebangan pohon yang dilakukan Perhutani pun dapat dipulihkan. Dan Perhutani pun tidak dapat berbuat banyak. Setelah dikelola masyarakat, Perhutani tidak bisa lagi menggunduli dan merusak hutan. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Sendi memandang hutan. Bagi

masyarakat Sendi, hutan adalah sumber kehidupan. Di dalamnya terkandung mata air dan segala jenis energi kehidupan. Karena itu, bagi masyarakat Sendi, hutan tidak hanya memiliki fungsi sosial, namun juga berfungsi sebagai tempat sakral.

Sejak tahun 2000an masyarakat memang melakukan pengambil-alihan kembali lahan. Semua dilakukan untuk menjaga hutan dan mendapatkan tanah. Proses pengambil-alihan, atau *reclaiming*, dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sejak saat itu, masyarakat mulai menanam sedikitnya 365.000 jenis tanaman tegakan. Sekitar 2.000 di antaranya merupakan rumpun bambu. Seorang warga, Sokeh, menceritakan bahwa

“Saat itu Perhutani menebangi pohon sampai ratusan hektar. Pohon pinus saja ditebangi sudah hampir sekitar seratus hektar. Menurut Perhutani itu panen. Tapi justru masyarakat yang melakukan reboisasi.”

1. Hubungan Lanskap dengan Kehidupan Adat

Seorang Kepala Adat Sendi, Ki Demang, pernah berkata jika “alam rusak, maka adat pun rusak. Tapi jika alam subur, maka adat pun ikut maju.” Ungkapan tersebut menggambarkan keselarasan kehidupan masyarakat Sendi dengan alam. Tak ayal, di Desa Sendi tumbuh filosofi seperti “*Ibu Pertiwi Bopo Angkoso*.” Filosofi ini memiliki makna bahwa tanah adalah ibu, sementara langit adalah bapak. Dan manusia, mendapatkan kehidupan dari kedua orang tuanya. Dengan begitu, merusak alam sama dengan menyakiti kedua orang tua.

Hampir seluruh masyarakat Sendi mengerti tentang filosofi “*Ibu Pertiwi Bopo Angkoso*.” Filosofi tersebut juga erat kaitannya dengan adat yang berkembang di Sendi. “Masyarakat bisa melaksanakan adat karena keberadaan alam. Karena itu, alam kita jangan sampai rusak,” ujar Ki Demang. Dengan begitu, pada akhirnya tujuan adat adalah untuk mengembalikan fungsi

ekosistem. Adat turut bertanggung jawab untuk memastikan fungsi-fungsi alam bekerja sebagaimana mestinya. Ki Demang menambahkan,

“Alam jangan sampai rusak. Baik hutannya, baik manusianya, baik pun lingkungannya. Semua harus benar terjaga. Apalagi airnya. Itu harus terjaga. Karena kebutuhan adat itu semua dari alam.”

Kegiatan dan situasi yang ada di hutan merupakan tugas Ki Jogowono. Salah satu tugas utama Ki Jogowono adalah mengintai, terutama jika ada yang hendak mencuri kayu. Seperti kayu pohon buah-buahan atau pohon lain yang terdapat di Hutan Sendi. Sementara untuk urusan air, masyarakat mempercayakannya kepada Ki Jogotirto. Sama seperti Ki Jogowono, Ki Jogotirto pun bertugas menjaga dan mengawasi titik-titik sumber mata air. Di luar tugas itu, masyarakat secara kesadaran pribadi maupun kolektif turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem. Seluruh masyarakat dituntut untuk dapat menerapkan pola kehidupan yang bersahabat dengan alam. Tidak heran, di pinggiran permukiman, masyarakat serentak menanam bambu. Tidak semata karena itu merupakan aturan adat, namun karena bambu memiliki fungsi sebagai penangkal angin dan juga resapan air. Karena itu, masyarakat pun dilarang memanen *rebung* atau anak bambu.

C. Temuan Ekonomi Nusantara

Desa Sendi terletak di dataran tinggi. Dari Desa Pacet, jalanan akan terus menanjak. Sehingga setiap kendaraan harus menggunakan gigi terendah. Tidak heran jika di sepanjang jalan, banyak papan peringatan mengenai hal itu. Selain papan peringatan, sebenarnya terdapat satu papan petunjuk lain yang sering muncul: informasi menuju WET Sendi. WET Sendi adalah singkatan dari Wisata Edukasi Terpadu Sendi – sebuah

situs wisata alam yang didirikan dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat Sendi.

“Selamat Datang di Sendi *Adventure*.” Begitulah kalimat yang tertulis di gerbang wisata alam ini. Setelah melewati gerbang, akan terlihat tenda-tenda pengunjung yang sedang *camping* di bumi perkemahan Sendi. Di belakang deretan tenda, terdapat *spot* menarik untuk berfoto. Jika tidak berkabut tebal, dari kejauhan Gunung Welirang pun tampak sedang berdiri gagah. Suasana semakin mantap dengan suguhan kuliner dari warung-warung milik masyarakat.



Gambar 3.4i: Tempat berkemah dengan latar Gunung Welirang. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

1. Sejarah Kejayaan dan Kondisi Faktual

Sejarah Desa Sendi sangat berkaitan dengan era Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, satu lokasi di Sendi, Alas Sanggar, pernah menjadi tempat ksatria Majapahit berlatih dan mendapat pendidikan. Selain itu, satu tempat lain, *Putuk Kursi*, merupakan tempat para petinggi kerajaan melantik ksatria. Sampai saat ini, *Putuk Kursi* masih menjadi lokasi sakral.

Beberapa kegiatan adat masyarakat Sendi pun berlangsung di sana.

Beberapa abad kemudian, Belanda menginjakkan kakinya di Desa Sendi. Mereka merampas kebun kopi milik masyarakat. “Kami dulu yang menanam kopi. Belanda datang lalu merampas. Jadi kopi itu bukan tanamannya Belanda, tapi tanaman masyarakat,” jelas Ki Demang. Belanda menjadikan persil kopi itu sebagai komoditas mereka. Meski kini kekuasaan Belanda telah runtuh, namun tanaman kopinya masih bertahan. “Khas. Kopi hutan. Peninggalan Belanda. Masih banyak warga yang menanam,” tambah Pak Subur.

Suramnya masa penjajahan membuat banyak warga mengungsi. Mereka pergi dan bermukim di beberapa lokasi di luar Desa Sendi. Hingga akhirnya administrasi desa pun dihilangkan. Tak hanya itu, Jawatan Kehutanan (Perhutani) pun menduduki lahan warga dan mengelola hutannya. Alhasil masyarakat Sendi pun kehilangan hak atas tanahnya.

Sadar akan hak tanah dan asal-usul leluhurnya, masyarakat Sendi pun melakukan *reclaiming*. Mereka kembali ke tapak desa dan kembali menghidupkan adat leluhur. Mengenang kisah awal perjuangan warga Sendi, Pak Syubur menceritakan,

“Sebenarnya gini. FPR melakukan langkah yang sangat cantik. Pada awal pendirian, FPR mendorong pembukaan lahan. Sembari membuka lahan, FPR juga menginisiasi penanaman bambu. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan nyaris hingga mengelilingi desa. Dari situ awal mula kebangkitan perekonomian masyarakat.”

Kehidupan masyarakat benar-benar tumbuh bersama bambu yang mereka tanam. Dari bambu masyarakat bisa membangun rumah, membangun warung, juga membangun wisata alam desa. Pak Syubur menambahkan,

“Dulu harus ke hutan dan lain sebagainya. Sekarang di rumah aja sudah dapat menghasilkan pendapatan. Bahkan

kini, perekonomian masyarakat Sendi sudah mulai menyalip perekonomian masyarakat desa lain.”

Kemajuan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Sendi. Tidak ada satu pun warga yang tidak turut merasakan dampak. Kondisi ini jelas berkebalikan dengan apa yang terjadi sekitar 20 tahun lalu. Saat itu, sekitar tahun 1999, “Desa Pacet Selatan masuk desa termiskin di Jawa Timur,” kenang Sokeh. Begitu pula dengan tingkat pendidikan warga. Setelah *reclaiming* itu, mulai terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Para generasi awal saat *reclaiming*, banyak yang tidak sekolah. Atau, maksimal, hanya tamatan SD dan SMP. Namun kini makin banyak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. “Sekarang rata-rata SMA. Bahkan ada yang kuliah. Mungkin faktor peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Sokeh.

Kondisi faktual ini sesuai dengan cita-cita pendirian FPR. “Paling utama adalah mengangkat harkat, martabat, dan ekonomi masyarakat,” ucap Sokeh. Meski begitu, perjuangan masyarakat belum berakhir. Masih ada satu persoalan lain yang harus diperjuangkan yaitu pengakuan negara atas hak tanah dan asal-usul leluhur masyarakat Sendi.

2. Hubungan Lanskap Ekologis dengan Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sendi memang bukan satu-satunya dataran tinggi di Pulau Jawa. Ada banyak daerah dataran tinggi lain yang juga menjadi basis pariwisata. Tak jauh dari Sendi, ada Kota Batu. Meski secara lanskap mirip, Sendi memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah terkait model tata kelola wisatanya. Bentuk pengelolaan wisatanya murni swadaya masyarakat. Karena itu, di Sendi tidak ada investor dari luar. Bahkan, jangankan investor, tenaga kerja pun tidak ada yang berasal dari luar desa. Semuanya dikerjakan dari, oleh, dan untuk masyarakat Sendi. Meskipun itu pada akhirnya cukup “menyulitkan” juga.

“Sekarang malah kesulitannya ya mencari karyawan. Warung-warung makin *rame*, tapi warga *udah* kerja semua. Hahaha,” ujar Pak Subur setengah bercanda.

Orang luar desa memang tidak boleh bekerja di Sendi. Apalagi hingga memiliki tanah dan bertempat tinggal. Tanah di Sendi hanya boleh dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat setempat. Apabila mereka hendak meninggalkan desa, maka tanah itu harus dikembalikan ke adat. Semua itu semata untuk menjaga kemurnian adat. Apalagi dulu, saat warga tak memiliki akses terhadap tanahnya, banyak dari mereka yang mencari penghidupan ke luar kota. Beberapa ke Surabaya dan Bali. Hal itu membuat keberlangsungan adat terganggu. Saat itu “semua luntur karena lahan terus dikuasai Perhutani. Hilang segala-galanya. Bukan ekonominya *tok*,” tandas Ki Demang.

Belajar dari pengalaman, para sesepuh pun melarang tanah di Sendi diperjualbelikan. Apalagi kepada orang luar desa. Tujuan para sesepuh satu yakni “ingin anak keturunan hidup sejahtera dari rumahnya sendiri. Karena itu tidak boleh diperjualbelikan,” ucap Sunari. Namun, kemurnian adat juga sangat bergantung kepada kondisi hutan. Jika hutan lestari, adat pun lestari. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, bersahabat dengan alam adalah satu kemutlakan bagi masyarakat Sendi. Hutan bisa memberi masyarakat makan, karena itu masyarakat harus menjaga hutan.

Bagi masyarakat adat Sendi, hutan bukan semata sebuah objek. Ia hidup. Ia adalah teman. Seperti kata Ki Demang,

“kita ini hidup tidak sendirian. Mulai dari rumput kecil sampai pohon besar, *kan* itu juga hidup. Teman manusia. *Toh* kita tanpa pohon *kan* tidak bisa hidup. Makanya *ngudo roso nebuse*. Karena itu disakralkan, diritual, dan disuguhi. Secara adat, masyarakat memang yang memiliki keahlian itu.”

Aktivitas penebangan hutan yang dilakukan Perhutani memang terbukti merusak. Masyarakat merasa betul dampak

tersebut. Misalnya, masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan air karena tanah tandus. “Ga melimpah *blas*, Mas. *Blas*. Wong malah sumber air di sini itu *ngambil* dari irigasi. Masyarakat kesulitan betul,” kenang Sunari.

Selain memenuhi kebutuhan adat dan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat juga bergantung pada lanskap ekologis. Dari alam masyarakat dapat menanam, dapat beternak, dan dapat membuka warung. “Karena kelesatrian alam itu pula yang membuat Sendi memiliki potensi ekowisata,” tambah Pak Syubur.

3. Keragaman Ekonomi Lokal

Pada umumnya, kegiatan ekonomi masyarakat Sendi adalah menggarap lahan, beternak, berdagang, dan mengurus warung kuliner. Ki Demang menjelaskan,

“Ibu-ibu juga punya peran membantu masalah ekonomi. Maka dari itu, saya putuskan ibu-ibu harus *ngewarung*. Dan bapak-bapak harus mulai aktif budidaya. Baik itu ternak atau menanam.”

Selain itu, beberapa masyarakat juga ada yang beraktivitas mengelola wisata alam desa. Pak Syubur dan Pak Sokeh dua diantaranya. Karena itu, tidak sulit menjumpai keduanya di kawasan WET Sendi. Mereka sehari-hari memang menjadi pengelola wisata. Saat ini, ekonomi Sendi semakin membaik. Wisata alam semakin ramai. Terutama sejak pembukaan *rest area* dan pusat kuliner tradisional. Bahkan, salah satu daya tarik wisata Sendi memang dari makanan yang disajikan. Seperti, misalnya, nasi jagung, ikan asin, lalapan, selada air, dan sambal. Dalam satu minggu, total pengunjung warung kuliner bisa mencapai 4000 orang. Potensi ini kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat. Pak Syubur mengisahkan,

“Setelah membuka warung, pengunjung memang menjadi sangat *rame*. Karena itu kita mengembangkan wisata lain.

Dari situ akhirnya pengelola dapat mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dalam satu minggu, rata-rata jumlah pengunjung itu sekitar 500-600 orang. Hal itu yang menyebabkan kehidupan masyarakat Sendi berkembang pesat.”

Pada 2006-2007, masyarakat melihat potensi lain. Akhirnya dibangun bumi perkemahan. Hal itu membuat ekowisata Sendi makin ramai. Kemudian sekitar tahun 2016, tim Dewan Adat dan *pawengku* merancang ulang lokasi. Akhirnya beberapa *spot selfie* dari bambu pun berdiri. Pembinaan itu sekaligus menambah beberapa sarana pendukung salah satunya adalah perbaikan toilet. Semua menggunakan bahan “*pring petung*.” Bahan bakunya diambil dari hutan bambu yang ditanam dan dirawat masyarakat. Seluruh proses pembinaan dikerjakan sendiri oleh masyarakat.

Pada akhirnya, ekowisata Sendi menjadi salah satu ikon desa. Selain memberikan kebahagiaan kepada wisatawan, ekowisata juga memberikan sumbangsih terhadap desa. “*Kemaren*, dalam satu tahun total hasil yang masuk ke kas desa sekitar 50an (juta),” terang Pak Syubur. Pengelola ekowisata mengalokasikan keuntungan tersebut untuk beberapa hal seperti untuk fakir miskin dan para pemangku adat.

Kehadiran WET Sendi membuka kesempatan warga untuk membuka warung. Ibu Susana menyambut betul kesempatan tersebut. Sudah satu tahun beliau membuka warung. Ia pun bercerita, “*Alhamdulillah* sekarang ada pemasukan. Dulu *ndak* bisa dipenuhi, sekarang bisa.” Sampai tahun 2019, total warung di area WET berjumlah 88. Pada tahun sebelumnya, jumlah warung adalah 81. Dengan begitu, terjadi pertambahan jumlah sebanyak 7 warung.

Kegiatan perekonomian di Sendi dijalankan sesuai dengan hukum adat. Dengan berpegang pada hukum adat pula proses pembagian tanah dilakukan. Komposisi pembagiannya adalah 20 m x 12 m untuk permukiman dan 20 m x 80 m untuk lahan garapan. Proses pembagian dilakukan dengan cara diundi

seperti arisan. Masyarakat menyebutnya, 'dilotre'. Ki Demang menjelaskan,

"Jadi pembagiannya itu sesuai dengan nasib. Kalo nasibnya baik, ya mendapat baik. Kalo nasibnya ga *baik* ya dapat ga *baik*. Karena tanah memang ada yang rata, ada pula yang miring. Dan sudah ada perjanjian untuk tidak boleh menuntut."

Masyarakat Sendi juga memiliki kalender tanam. Kalender ini digunakan warga sebagai pedoman untuk menentukan waktu dan jenis tanaman. Bagi Sunari, kehadiran kalender tanam sangat membantu. "Bikin orang itu ga *ngawur*. Minimal jadi lebih hati-hati," ucapnya. Ketika hendak menanam, masyarakat juga terbiasa untuk meminta doa kepada sesepuh. Dan saat panen, masyarakat juga biasa mengadakan syukuran dengan tumpengan. Setiap tahun, pertanian di Sendi cenderung mengalami peningkatan. Masyarakat terus belajar dari masa lalu. Sehingga pedoman kalender tanam adat pun konsisten mereka gunakan. Alhasil produk pertanian pun terus membaik.

Kesuburan lahan menjadi pendukung kisah sukses pertanian di Desa Sendi. Proses penanaman pun bisa dilakukan secara alami. Karena itu, masyarakat tidak membutuhkan bantuan bahan kimia. Sunari mengatakan,

"Memang sudah sejak era orang tua, di sini tidak pernah pake yang aneh-aneh (bahan kimia) itu. Obat-obatan atau pupuk juga tidak pakai yang aneh-aneh. *Toh*, kondisi dan hasilnya malah bagus-bagus aja. Di sini kebanyakan *ya* menggunakan pupuk kandang itu."

Relasi masyarakat Sendi dengan alam berjalan selaras. Masyarakat memanfaatkan, namun tidak merusaknya. Begitu pula dengan relasi antar manusia di dalam masyarakat Sendi – saling membantu, saling menghargai. "Kalo di sini, bangun warung *ae* gotong royong," tegas Sunari. Hal itu terjadi juga dalam penghargaan masyarakat Sendi terhadap tenaga kerja. Seperti cerita Pak Syubur, "Karyawan saya tuh ada yang *ga* bisa

baca. Tapi sebulan gajinya 4 juta. Mereka itu kerja, meski tidak bisa baca.” Berikut adalah valuasi ekonomi masyarakat Sendi:

No	Sektor	Nilai (Rupiah)
1	Tanaman Pokok	630.000.000,-
2	Umbi-umbian	173.650.000,-
3	Sayur	1.049.200.000,-
4	Bambu & Buah	2.082.000.000,-
5	Aneka Pisang	65.500.000,-
6	Wisata Alam	243.900.000,-
7	Warung Kuliner	38.400.000,-
8	Kelola Parkir	95.400.000,-
9	Retribusi Air Bersih	6.000.000,-
10	Iuran Warung Kuliner	13.500.000,-
11	Kotak Amal	31.200.000,-
12	Potensi Bambu	1.740.000.000,-
13	Potensi Aset Air	9.434.880.000,-
Jumlah Total		15.603.630.000,-

Tabel 3.13 : Valuasi Ekonomi Masyarakat Sendi. Sumber: Tim Peneliti Ekonomi Nusantara WALHI.

Alam membuat masyarakat sejahtera. Tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tapi juga secara sosial dan budaya. Alam terjaga, maka adat pun terpelihara. Ki Demang berujar,

“Dengan alam terjaga, maka bisa terus membangun kebudayaan atau peritualan. Kemudian bisa juga membangun situs-situs. Hal itu merupakan *soko guru* dalam

adat. Dari situ kemudian bisa kembali memunculkan asal-usul orang Sendi.”

Selain itu, alam juga banyak memberi pasokan kebutuhan hidup secara gratis. Masyarakat Sendi tidak pernah membeli air. Alam sudah menyediakannya dengan sangat melimpah. Kesejukan dan pemandangan yang indah pun dua diantara kebaikan alam lainnya. Terkait apa yang diberikan alam, Ki Demang menuturkan,

“Hasil apa dari hutan adat? Banyak sekali. Sumber utama kehidupan, air, juga berasal dari situ. Kemudian warung, wisata, pertanian, dan peternakan. Semua itu penjelmaan dari kawasan hutan adat Sendi.”

Tanah Sendi menumbuhkan pepohonan. Dari situ kemudian tumbuh pohon bambu. Akhirnya, dari situ juga kehidupan tumbuh. “Kita menjaga pohon, karena kita membutuhkan air,” tambah Pak Syubur.

Adat memang benar-benar menekankan kelestarian alam. Salah satu bentuknya adalah dengan membuat aturan-aturan. Misalnya, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas penggarapan atau mendirikan tempat tinggal dalam radius 100-200 meter dari sumber mata air. Termasuk pula larangan untuk menggarap lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 40 derajat. Adat melarang karena lahan tersebut memang diperuntukkan sebagai resapan dan konservasi.

Penebangan pun tidak boleh sembarangan. Adat melarang masyarakat untuk memanen *rebung* atau anak bambu. Penggunaan kayu juga benar-benar diatur, Ki Demang menjelaskan

“Sekarang memang sudah saya putuskan. Jika hendak membangun, tidak bisa *motong* kayu seenaknya. Perlu kesepakatan. Apalagi kalo pohonnya besar. Tapi *kalo* tidak ada kesepakatan, dalam arti kayunya tidak ada, maka terpaksa harus beli. Saya pun akhirnya beli ke toko. Saya ga berani pake kayu yang masih muda.”

Ketimbang menebang, masyarakat justru lebih aktif menanam bambu. Selain berfungsi sebagai resapan, masyarakat juga memiliki tujuan lain: menangkal angin. “bambu ditanam di sekeliling permukiman penduduk. Dulu, itu tujuannya untuk menangkis angin. Kadang-kadang angin di sini memang besar,” jelas Sokeh. Masyarakat Sendi menyukuri betul segala kekayaan dan kebaikan yang diberikan alam. Masyarakat menganggap jika semua ini adalah titipan Sang Khalik, karena itu harus dijaga untuk keberlangsungan hidup bersama. “Sebetulnya sangat bahagia. Apalagi jika sampe diakui negara,” pungkas Sunari.

4. Dimensi Pemulihan dan Kondisi Krisis

Sudah sejak lama anak keturunan Lurah Singojoyo dihilangkan, dimiskinkan, dikriminalkan, dan diancam terus menerus. Kalimat itu mewakili keberadaan sekitar 265 Kepala Keluarga generasi saat ini. Semua bermula dari masa pendudukan Belanda dan Jepang. Mencekamnya penjajahan membuat warga menyelamatkan diri dan mengungsi ke desa-desa terdekat. Kosongnya desa beserta hutan-hutannya, membuat Perhutani menduduki wilayah warga. Tak ayal, FPR menganggap Perhutani sebagai ancaman utama. Sejak 1971, Perhutani melakukan penebangan hutan besar-besaran. Aktivitas tersebut makin membuat kondisi alam rusak. Ki Demang mengatakan,

“Kalo bicara zaman dulu, kawasan hutan di sini ditumbuhi pohon-pohon besar. Seperti pohon sawangan, sengan, wangkal, dan lain sebagainya. Kemudian datang Perhutani. Mereka memotong pohon-pohon raksasa itu dan menggantinya dengan pinus. Kerusakan pun terjadi.”

Kemudian masyarakat Sendi pun melakukan perlawanan dengan menanam. Sejak tahun 2000, masyarakat aktif menanam kembali hutan yang rusak. Sebagian besar dengan tanaman-tanaman tegakan, salah satunya adalah bambu. Proses

itu berlangsung bertahun-tahun. Namun upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan masyarakat justru berbuah ancaman. Pada 2006-2007, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto melakukan kriminalisasi terhadap 11 orang warga. Sekda menuduh masyarakat melakukan penyerobotan tanah Perhutani.

Ketika proses penyidikan, Ki Demang pun berbicara kepada Kapolres bahwa dirinya adalah Ketua FPR. Sehingga dia pula yang seharusnya bertanggung jawab. Kemudian, Ki Demang pun bertanya kepada pihak kepolisian apakah warga yang sedang diproses bisa dibebaskan? Menurut cerita Ki Demang, Kapolres tersebut pun mengiyakan. Setelah itu, Ki Demang pun mengajak Kapolres bersalaman sembari berujar, “Pak Kapolres, berarti ini permainan. Ini bukan kasus hukum. Kenapa saya bisa bilang begini, karena sejak kapan yang namanya subyek hukum bisa diwakilkan?”

Dalam proses kriminalisasi, masyarakat Sendi sempat mengadukan nasibnya ke DPRD Kabupaten Mojokerto. Aduan masyarakat melahirkan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian kasus. Pansus tersebut mulai bekerja sejak tahun 2007 dan menghasilkan keputusan yang menegaskan bahwa pemerintah harus menghormati konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat (1 dan 2). Di samping itu, Pansus pun meminta kepada pemerintah untuk memulihkan keberadaan Pemerintahan Desa Sendi. Termasuk mengembalikan hak atas tanah beserta asal-usul adat Desa Sendi.

Pada 2017, sempat muncul satu titik terang. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan. Perbup tersebut mengatur beberapa hal, termasuk soal pengangkatan seorang *Lurah* pejabat sementara. *Lurah* tersebut bekerja dalam rangka transisi saat menyiapkan Desa Adat Sendi. Namun sayang, Perbup ini tidak berhasil. Sokeh menjelaskan,

“Perbup itu kan soal pembentukan desa, desa adat. Nah sementara di undang-undang desa, khususnya di Pulau Jawa, pembentukan desa adat atau desa biasa memiliki syarat. Salah satunya harus berpenduduk minimal 6000 orang. Nah di sini, cuma sekitar 600an orang.”

Meski begitu, perjuangan masyarakat tidak surut. Sampai saat ini, masyarakat masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan status masyarakat hukum adat. Sokeh menambahkan bahwa masyarakat selalu siap melawan karena

“Kami ini kan berdomisili di sini, membuat tempat usaha di sini. Karena itu kami (semua) berani melawan. Ketika ada serangan dari musuh, kami *ya* sudah siap. Siap perang. Siap mengambil resiko.”

D. Rekomendasi

Masyarakat Adat Sendi perlu kepastian dalam mengelola wilayah kelola rakyat. Karena itu, diperlukan satu konsep pengakuan “subyek” dan “obyek” di wilayah Sendi. “Subyek” yang dimaksud adalah Lembaga Masyarakat Hukum Adat. Sementara “obyek” yang dimaksud adalah Pengakuan Hutan Adat Komunal. Pengakuan negara bisa membuat masyarakat lebih tenang dalam mengelola wilayah kelola rakyat. Sejauh ini, pengelolaan masyarakat sudah terbukti mampu membawa kesejahteraan. Kelestarian alam pun dapat terjaga.

Pihak Tahura juga mengakui keberhasilan masyarakat Sendi. Dalam satu forum, Sunari mendengar sendiri apresiasi dari petinggi Tahura tersebut. “Tahura bilang sendiri. Beruntung ada masyarakat Sendi. Sehingga hutan di sini bisa terjaga,” Dengan begitu, rekam jejak keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan memang sudah terbukti. Maka, sudah saatnya Perhutani berhenti melakukan ancaman. Bahkan, sudah saatnya Perhutani menghentikan aktivitas usahanya. Sebab aktivitas tersebut hanya mendatangkan kerusakan dan

kesengsaraan. Lagi pula, upaya perbaikan kerusakan itu pun justru dilakukan masyarakat, bukan oleh perusahaan.

Masyarakat Sendi percaya jika alam terjaga, maka adat pun akan ikut terjaga. Dan karena adat terjaga, maka keberlangsungan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pun akan ikut terpelihara.

BAB EMPAT

Narasi Tanding Ekonomi Nusantara

A. Visibilitas Ekonomi Nusantara

Hegemoni kapitalisme dengan ekonomi pertumbuhannya telah mengantar Indonesia ke jurang krisis yang tidak berkesudahan. Kuasa rezim Soeharto—yang berlangsung sangat panjang—merupakan awal penanaman hegemoni ini. Tujuannya untuk merasuki pemikiran awam (*common sense*). Menurut Gramsci, pemikiran awam menunjukkan cara orang yang tidak kritis dan tidak sadar dalam memahami dunia.¹⁹³ Kondisi ini membuat anggapan bahwa ketidakadilan dan penindasan merupakan hal biasa. Apabila merujuk pendapat Foucault, maka hegemoni yang terjadi tidak lepas dari otoritas pengetahuan milik penguasa.

Berangkat dari kritik di atas, WALHI menyusun narasi tanding (*counter discourse*) dalam bentuk wacana lain terhadap hegemoni ekonomi pertumbuhan. Narasi tanding ini disebut sebagai wacana lain, karena ia tidak sekedar menemukan irisan aspek sosial, alam (lingkungan), dan ekonomi. Lebih luas, narasi tanding ini menaruh ketiga aspek tersebut dalam satu lingkaran. WALHI menggunakan frasa “ekonomi nusantara” untuk menggambarkan praktik baik tersebut. Praktik “ekonomi

¹⁹³ Roger Simon, *op.cit*, hlm. 27.

nusantara” dibatasi pada pemenuhan empat indikator berikut: (1) hubungan sejarah kejayaan masa lalu dan saat ini; (2) hubungan praktik ekonomi dengan ragam lanskap ekologis di nusantara; (3) integrasi praktik ekonomi dengan kehidupan sosial dan lingkungan; dan (4) berdimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.

Setelah mengumpulkan temuan daerah di tujuh lokasi, tim peneliti menyadari bahwa temuan ini mempunyai kesamaan dengan gerakan anti ekonomi pertumbuhan, *degrowth*. Oleh karena itu, analisis visibilitas “ekonomi nusantara” pun diperluas. Sehingga tidak hanya berhenti pada visibilitas empat indikator, namun sekaligus berupaya melihat visibilitas praktik ini dengan gerakan *degrowth*.

Berangkat dari uraian di atas, maka bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, mengurai dan menganalisis visibilitas “ekonomi nusantara”. *Kedua*, menganalisis dan menggambarkan relasi “ekonomi nusantara” dengan gerakan *degrowth*. Lalu pada bagian *ketiga*, kami juga akan coba menggambarkan sejauh mana kemampuan narasi ini dapat bertanding dan menjadi wacana lain terhadap ekonomi pertumbuhan.

1. Visibilitas dari Tujuh Lokasi Penelitian

Bagian ini akan dimulai dengan tabel pemenuhan indikator pada masing-masih lokasi penelitian. Berangkat dari tabel tersebut, tim peneliti akan melakukan analisis visibilitas dan selanjutnya mengklasifikasikan temuan berdasarkan tingkatan (gradasi) pemenuhan indikator.

Lokasi	Kejayaan	Relasi Lanskap	Keragaman Ekonomi	Daya Pulih
<p>Tanjung Aur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak abad 16 orang Sambat hidup dari aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Terutama komoditas perkebunan warisan Belanda (rempah-rempah). - Masyarakat Tanjung Aur bergantung pada keberadaan hutan. Mereka diwarisi pola perkebunanumpang sari oleh para nenek moyang. - Pada masa krisis (1997-1998) warga Tanjung Aur sempat gencar 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan budidaya hutan tanaman keras di Tanjung Aur sangat menentukan keberhasilan persawahan di hilir. - Menjaga kelestarian hutan berarti menjaga habitat binatang yang memiliki makna kultural yakni Harimau Sumatera (<i>Puyang</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang Sambat di Tanjung Aur diwarisi kebiasaan bermukim di dekat mata air. Sesuai dengan arti "Sambat" yakni mata air hidup. Dekat mata air maka dekat dengan sumber kehidupan. - Memegang prinsip Larangan Jurai yang berarti secukupnya dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan hasil hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kelestarian sumber air dengan membuat aturan tentang jarak rumah harus kurang dari 100m dari bibir sungai. - Menanam tanaman bambu dan rotan di sekitar sungai untuk menjaga ketersediaan air. - Melarang pembukaan lahan baru di kawasan <i>Ulu Tulung</i> dan <i>Tulung</i> (kawasan keramat di sekitar aliran sungai).

	<p>menanam nilam. Dan hasilnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - cukup menguntungkan. - Sampai saat ini, komoditas utama masyarakat Tanjung Aur adalah kopi. Masyarakat cukup berjaya dengan komoditas ini. 			
Sinar Mulya	<ul style="list-style-type: none"> - Pada masa - Komoditas perekonomian utama warga Sinar Mulya adalah kopi dan lada. Ini baru bermula sejak tahun 2000an. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat bergantung pada keberadaan sungai - Menjadi kawasan penyangga untuk daerah hilir sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengibaratkan relasi manusia dengan hutan seperti kabel listrik. Saling terhubung. Jika ada yang putus maka akan mati. - Pola berkebudan campuran/tumpang sari, sehingga lebih selaras dengan alam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menanam kembali kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas perusahaan. - Menjaga hutan di daerah hulu sungai. Karena jika hutan rusak, maka pembangkit listrik mikro hidro tidak dapat beroperasi.
Lebak Rawang	<ul style="list-style-type: none"> - Secara turun-temurun hidup dari bercocok 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum perusahaan masuk, batas-batas wilayah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan hak pengelolaan lahan 	

	<p>tanam, berladang, menangkap ikan, dan beternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai ekonomi terbesar warga adalah kayu terkubur. 	<p>berdasarkan ciri-ciri lanskap ekologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada ekosistem gambut. Baik itu di rawa gambut atau gambut daratan. 	<p>dilakukan secara adat yakni “tapak tangan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tradisi memperkerjakan orang saat proses menanam padi <i>Sonor</i> yakni <i>Ngambek Ayian</i>. - Terdapat tradisi keramas benih sebelum ditanam. Salah satu campuran proses keramas adalah tanaman lokal yakni jeringau. - Metode mengusir hama dengan membakar sarang madu. - Memiliki kalender musim dan pengetahuan ikan di ekosistem gambut. 	
Lebak Belanti	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Lebak Belanti eksis sejak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ekonomi sangat berkaitan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selain bertani, warga juga berkebun buah- 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sepakat menolak kehadiran

	<p>zaman Karesidenan Sriwijaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempat menjadi daerah lumbung pangan. - Pada 1960an, banyak pendatang yang mulai bertani di Lebak Belanti. - Sempat menjadi penghasil buah-buahan terbesar di Sumatera Selatan. 	<p>dengan lanskap rawa dan dataran gambut. Seperti aktivitas pertanian di gambut dan mencari ikan di rawa.</p>	<p>buah dan mengambil hasil hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memiliki proses penanaman padi sendiri. Proses tersebut berelasi dengan tradisi turun-temurun. 	<p>perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kembali memperbaiki tata kelola air dari lebak ke danau.
Lung Isun	<ul style="list-style-type: none"> - Leluhur orang Lung Isun hidup berpindah dari satu tepi sungai ke satu tepi sungai lainnya. Mereka hidup dari berburu dan berladang. - Masyarakat sempat beralih ke aktivitas penebanhgan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sangat bergantung terhadap lanskap ekologi wilayahnya. Bahkan tidak hanya untuk aspek ekonomi. Tapi juga untuk aspek sosial dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lokasi bercocok tanam tergantung pada hasil pembacaan tetua adat terhadap pertanda alam (<i>yoq</i>). - Menganggap hutan, sungai, dan tanah sebagai satu kesatuan dengan masyarakat. Sungai adalah jantung, 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Adat Kampung membuat aturan pemanfaatan kayu hutan (ukuran dan lokasi). Jumlahnya pun maksimal hanya dua batang. - Membuat aturan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum adat untuk

	<p>penjualan kayu. Namun kini aktivitas ini sudah diawasi ketat Lembaga Adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai saat ini mayoritas perekonomian masyarakat adalah berladang, berkebun, dan beternak. 		<p>sungai adalah darah, dan hutan adalah tubuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan tradisi hilir-balik (5 tahunan) saat menanam padi ladang. Dengan tradisi ini, maka meski ladang berpindah-pindah, tidak terjadi penambahan lahan baru. Karena per 5 tahun akan kembali ke lahan semula. 	<p>memastikan alam Lung Isun tetap terjaga.</p>
Kedonganan	<ul style="list-style-type: none"> - Leluhur orang-orang Kedonganan sudah hidup dari aktivitas nelayan. - Pada 2006 mulai terjadi transformasi ekonomi, dari aktivitas nelayan ke pariwisata. Namun, aktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelestarian pesisir sangat menentukan aktivitas ekonomi (pariwisata). - Kegiatan keagamaan dan adat berlangsung di pesisir pantai. - Aktivitas ekonomi lain seperti 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ekonomi tunduk pada aturan adat. Sehingga keberlanjutan lingkungan sangat menjadi perhatian. - Aktivitas ekonomi lebih melibatkan masyarakat setempat. Sebab, 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil tangkapan ikan makin berkurang. Aktivitas masyarakat bergeser menjadi pariwisata. Apalagi setelah Bali menjadi tujuan utama wisata. - Masyarakat menyadari bahwa kepemilikan

	<p>melaut tidak sepenuhnya hilang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pariwisata dikelola secara kolektif melalui kelembagaan adat. Sebagian keuntungan juga dialokasikan untuk kepentingan bersama seperti upacara adat, fasilitas umum, dan lain-lain.	<p>menangkap ikan, penginapan, warung, juga berelasi dengan lanskap pesisir.</p>	<p>pengelola dan pemilik aktivitas ekonomi ada di tangan lembaga adat.</p>	<p>perseorangan dari aktivitas pariwisata justru merusak. Hal ini mendorong lembaga adat untuk mengambil-alih dan mengelola ekonomi pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga adat kemudian menerapkan konsep CBT untuk pariwisata di Kedonganan. Hasilnya alam lebih terjaga dan keuntungan terbagi merata.
--	---	--	--	--

Sendi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada masa lalu merupakan daerah perdikan. Menurut temuan (prasasti), sudah eksis sejak zaman Majapahit. - Pada zaman Belanda merupakan wilayah penghasil kopi. Lalu ditinggalkan warga pada masa perang kemerdekaan. - Kemudian warga kembali ke tempat semula dan melangsungkan aktivitas ekonomi (perkebunan, pariwisata, pertanian). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ekonomi cocok dengan lanskap pegunungan. Aktivitas masyarakat bertumpu pada perkebunan dataran tinggi. - Tata guna lahan ditujukan untuk menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi bencana. - Aktivitas ekonomi lain warga di sektor pariwisata juga sangat terkait lanskap pegunungan. Warga membuka usaha tempat kemping dan wisata alam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan ekonomi pariwisata berkonsep ekowisata. - Memiliki kalender musim tanam sendiri. - Menjadikan warisan sejarah bendawi dan non bendawi sebagai potensi wisata budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk perangkat adat yang bertugas khusus menjaga hutan dan air. - Memiliki falsafah hidup yang berelasi dengan kelestarian alam yakni "<i>Ibu pertiwi, Bapak angkoso</i>". - Melarang penjualan lahan untuk orang luar desa. - Menanam kembali lahan yang dibabat habis Perhutani untuk diambil kayunya. - Menanam tanaman tegakan dan bambu untuk mejaga pasokan air dan menghindari bencana.
--------------	---	--	---	---

Tabel 4.1: Hasil Pemenuhan Indikator Ekonomi Nusantara

Berdasarkan tabel di atas, kami menemukan tiga gradasi eksistensi “ekonomi nusantara”. **Gradasi pertama**, praktik “ekonomi nusantara” berhasil berdiri kokoh di tengah ancaman investasi. Faktor utama yang membuat masyarakat mampu atau kembali berjaya ialah kekuatan institusi lokal. **Gradasi kedua**, praktik “ekonomi nusantara” tetap eksis, namun terus digerus oleh berbagai ancaman (internal dan eksternal). **Gradasi ketiga**, praktik “ekonomi nusantara” berada dalam posisi kritis atau terancam punah. Detail masing-masing gradasi akan diurai pada bagian selanjutnya. Pada bagian akhir, kami juga akan memberi analisis singkat terkait visibilitas “ekonomi nusantara”. Seperti faktor apa yang membuat ia bertahan, berada di persimpangan, atau bahkan diambang kepunahan.

a. Berdiri Kokoh dalam Kepungan Investasi

Tiga lokasi yang memenuhi empat indikator “ekonomi nusantara” ialah Kedonganan, Sendi, dan Lung Isun. Ketiga lokasi tersebut mempunyai sejarah kejayaan yang masih eksis hingga saat ini. Sebelum bertransformasi ke sektor pariwisata, Kedonganan berjaya dengan praktik ekonomi lokal. *Krama* Kedonganan hidup sejahtera dari aktivitas tangkap ikan (nelayan laut) dan pertanian. Di sela tanaman pertanian, masyarakat Kedonganan juga menanam tanaman lain. Hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan upacara adat. Kini, sejarah kejayaan di Kedonganan telah bertransformasi ke sektor pariwisata. Meski tidak sepenuhnya meninggalkan mata pencaharian asli mereka yakni nelayan. Sampai saat ini, dengan bantuan para pendatang, kapal tangkap ikan masyarakat Kedonganan masih terus beroperasi. Hasil tangkapannya dijual ke kafe-kafe yang dikelola secara komunal di bawah Desa Adat.

Model pengelolaan komunal dan praktik ekonomi yang tidak sepenuhnya beralih telah terbukti mampu menyelamatkan mereka dari krisis saat pandemi. Selain itu, bagi *Krama Kedonganan*, menjaga laut dan pesisir pantai bukan

sekadar dalam rangka menjaga keberlanjutan ekonomi. Namun sekaligus untuk memastikan ritual adat dan keagamaan dapat terus berlangsung. Titik balik kebangkitan Kedonganan terjadi saat fase krisis yang diakibatkan oleh model pengelolaan pariwisata individual. Tata kelola yang individual sangat mengedepankan kompetisi dan tidak banyak memberi manfaat. Kemudian masyarakat bangkit dengan menerapkan praktik ekonomi komunal dan hasilnya ternyata lebih menyejahterakan.

Sama halnya dengan Kedonganan, Lung Isun dan Sendi pun masih tetap berjaya. Hanya saja Lung Isun sedikit lebih beruntung. Fase krisis yang mereka hadapi tidak sesulit dan sepanjang yang dihadapi masyarakat adat Sendi. Keberhasilan Lung Isun menjaga stabilitas kejayaannya tidak dapat dilepaskan dari praktik kepercayaan adat. Bagi mereka, *“tanah adalah jantung, sungai adalah darah, dan hutan adalah tubuh.”* Walau tidak lagi sepenuhnya melakukan praktik ekonomi tradisional, masyarakat adat Lung Isun percaya bahwa mengambil secukupnya adalah kunci menyelamatkan kehidupan. Sehingga walau tetap melangsungkan praktik ekonomi modern, seperti budidaya cokelat, hal itu tidak dilakukan dengan cara-cara rakus. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan tanaman cokelat tidak berlangsung dalam skala besar. Namun kini terdapat satu pintu masuk hegemoni ekonomi pasar ke Lung Isun. Hegemoni tersebut berpotensi melunturkan praktik ekonomi lokal. Wujud hegemoni itu ialah dorongan dan insentif khusus dari pemerintah daerah untuk menggenjot produktivitas cokelat.

Masyarakat adat Lung Isun sangat belajar dari peristiwa krisis pada pengujung 1990an. Saat itu negara sedang mengalami krisis moneter. Namun masyarakat Lung Isun tetap sejahtera, tidak ada yang kelaparan. Hampir semua kebutuhan tersedia gratis dari alam. Kunci mempertahankan kejayaan tersebut ialah institusi sosial dan adat yang kuat. Bahkan kekuatan institusi pula yang mampu membuat Lung Isun lepas dari beragam ancaman krisis. Salah satunya saat

mendapat serangan korporasi penebang kayu, PT. KBT. Namun sayangnya, mereka hanya mampu terbebas dari satu krisis. Belum benar-benar terbebas dari ancaman korporasi. Pasalnya, areal konsesi perusahaan HPH ini masih eksis di wilayah adat Lung Isun.

Berbeda dengan Lung Isun, fase krisis yang dialami masyarakat adat Sendi jauh lebih dahsyat. Bahkan melebihi situasi yang dihadapi oleh *krama* Kedonganan. Masyarakat Sendi kehilangan hak atas tanah, dihapus secara administratif (desa), dan bahkan hampir kehilangan identitas lokalnya. Pada mulanya Belanda merampas dan mengusir masyarakat. Setelah Indonesia merdeka tanah adat tetap tidak kembali. Kemudian hadir Perhutani dengan segala tindak laku yang kurang lebih sama dengan Belanda: mereka sama-sama menghancurkan hutan masyarakat adat Sendi. Akhirnya dengan semangat memulihkan identitas dan adat leluhur, masyarakat pun melakukan *reclaiming*. Kemudian masyarakat bertani skala kecil, menanam bambu, menyelamatkan hutan alam yang tersisa, dan memulihkan hutan yang telah diluluh-lantahkan Perhutani. Setelah itu, secara perlahan-lahan, adat dan alam masyarakat pun pulih. Bahkan hingga bisa menopang kemandirian ekonomi masyarakat adat Sendi. Salah satunya melalui pariwisata alam yang dikelola secara komunal. Keberhasilan ini turut memulihkan nama besar Sendi.

Persoalan Sendi dan Lung Isun sama. Secara formal, kedua lokasi ini belum mendapat pengakuan sebagai entitas masyarakat hukum adat. Tumpang tindih wilayah adat dengan areal kerja (konsesi) korporasi kehutanan pun jadi masalah serius lainnya. Sangat berbeda dengan Kedonganan yang diakui secara formal oleh negara sebagai Desa Adat. Namun perlu diingat, kejayaan Kedonganan pun bukan tanpa ancaman. Wilayah Kedonganan juga berada di bawah ancaman investasi. Apalagi Kedonganan memiliki paras pantai yang menakjubkan. Sampai saat ini, sudah banyak pelaku bisnis pariwisata skala besar yang menawarkan suntikan modal ke Kedonganan.

b. Berjalan di bawah Beragam Ancaman

Pada bagian ini, praktik “ekonomi nusantara” memang masih eksis, namun berada di bawah beragam ancaman. Bahkan skala keberadaan ancaman tersebut masih terlalu besar. Ada dua penyebab kemunduran praktik “ekonomi nusantara”. *Pertama*, kebijakan yang tidak memihak masyarakat. *Kedua*, intervensi pihak ketiga yakni korporasi atau penguasa (kecil) di tingkat lokal. Kondisi ini yang menentukan tiga lokasi penelitian masuk gradasi kedua. Tiga lokasi tersebut adalah dua lokasi yang berada di Bengkulu dan satu lokasi yang berada di Sumatera Selatan.

Dua lokasi di Provinsi Bengkulu ialah Desa Tanjung Aur dan Sinar Mulya. Sebagian besar wilayah kedua desa ini berada di lanskap ekologis Bukit Kumbang yang berada di deretan Bukit Barisan. Praktik ekonomi yang berjalan di Tanjung Aur dan Sinar Mulya termasuk tidak merusak lingkungan. Masyarakat bahkan membuat aturan wilayah larangan untuk melindungi fungsi ekologis. Masyarakat juga memulihkan lokasi-lokasi yang rusak akibat praktik industri ekstraktif. Distribusi sumber daya alam pun dilakukan cukup adil. Rata-rata kepemilikan lahan masyarakat berkisar antara 1,5 sampai dengan 4 hektar per kepala keluarga. Sepintas, khususnya Tanjung Aur, tampak lebih layak masuk gradasi pertama tinimbang kedua. Namun sayangnya, indikator pertama, sejarah kejayaan masa lalu, yang memaksa kedua lokasi tersebut lebih tepat ditaruh di gradasi kedua. Beberapa hal penting berikut ini yang menjadi dasar pertimbangan kami.

Pertama, Tanjung Aur merupakan kampung asli penduduk marga Sambat di Karesidenan/Suku Kaur. Kejayaan Tanjung Aur sudah terjadi jauh sebelum Indonesia eksis. Namun sayangnya, kejayaan ini perlahan terkikis dan berujung pada fase krisis. Pada 1987, terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kehancuran luar biasa. Seluruh perkampungan rusak dan warga terpaksa pindah, berpencar ke wilayah lain yang relatif aman. Bencana ekologis ini terjadi karena maraknya penebangan skala besar di bagian lanskap ekologis Bukit

Kumbang sejak 1980an. Aktivitas legal penghancuran lanskap ini dilakukan oleh korporasi pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yaitu PT Bengkulu Raya Timber (BRT) dan PT Bengkulu Tama Raya Timber (BTRT).

Pascakejadian banjir, perlahan sebagian besar penduduk asli marga Sambat berpindah dan berganti dengan penduduk pendatang dari Jawa, Lampung, dan beberapa wilayah lain. Gelombang besar masuknya penduduk baru terjadi sekitar tahun 1995. Suku Sambat yang tersisa di Tanjung Aur menerima mereka dengan baik. Namun sayangnya, penerimaan tersebut tidak diikuti proses akulturasi budaya lokal dengan baik. Sehingga pergantian penduduk pun justru berpotensi mengakibatkan hilangnya identitas lokal dan sekaligus praktik adat marga Sambat. Walau sampai saat ini, upaya untuk melestarikan tradisi asli tersebut tetap ada.

Lain lagi dengan Desa Sinar Mulya. Kami sangat sulit menemukan sejarah kejayaan desa ini pada masa lalu. Namun ini wajar. Sebab, sejarah pendirian Dusun Bacang pun baru terjadi pada 1984. Bahkan hampir seluruh penduduknya merupakan pendatang. Meski demikian, praktik ekonomi di kedua desa ini dilakukan tanpa banyak merusak lingkungan. Masyarakat kedua desa bahkan turut memulihkan serta menjaga alam. Mereka sangat belajar dari peristiwa banjir bandang pada 1987. Inisiatif untuk turut memulihkan dan menjaga hutan yang tersisa menuai hasil. Mereka selamat dari kejadian longsor pada 2019. Meski akses jalan tertutup akibat peristiwa tersebut. Selain itu, penduduk Sinar Mulya juga menjaga alam agar dapat memastikan ketersediaan kebutuhan air. Mereka belajar dari krisis air akibat kemarau panjang dan aktivitas pembukaan hutan skala besar oleh korporasi pada 1990.

Kedua, tradisi mandiri secara ekonomi di Tanjung Aur perlahan terkikis. Pasalnya, mereka sangat ketergantungan pada tengkulak. Hal serupa terjadi di Sinar Mulya, bahkan jauh lebih parah. Ketergantungan pada tengkulak mulai terjadi pada kisaran tahun 1997 s/d 2000, saat terjadi kemarau

berkepanjangan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana transportasi juga membuat warga bergantung pada tengkulak. Menurut kami, ketergantungan pada tengkulak tidak terlepas dari watak ekonomi individual yang dilakukan warga. Sehingga ketiadaan dan/atau telah luntarnya corak kolektif menjadi pintu masuk para tengkulak. Para *toke* ini tidak memberi bantuan secara tulus, tapi berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomi. Solusi terbebas dari tengkulak dengan BUMDes pun tidak tepat karena dapat memicu peningkatan kuantitas produksi. Hal ini malah mengancam batasan ekosfer (daya dukung dan daya tampung lingkungan) di Tanjung Aur. Sementara di Sinar Mulya, upaya meningkatkan kualitas kopi masih tetap mengandalkan peran tengkulak. Sehingga ini hanya membantu meningkatkan harga dan ketergantungan terhadap tengkulak terus terpelihara.

Ketiga, Desa Sinar Mulya dan Tanjung Aur berada di bawah ancaman legalitas penguasaan ruang. Kedua lokasi ini terancam oleh legalitas kawasan hutan. Tanjung Aur berada di bawah ancaman proyek pemukiman angkatan laut. Sementara Sinar Mulya ada di bawah ancaman perluasan izin perkebunan kelapa sawit untuk PT. Ciptamas Bumi Selaras (PT. CBS) dan beberapa perusahaan lainnya. Selain itu, masyarakat belum mendapat akses mengelola secara legal melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hal ini menambah satu ancaman lain bagi masyarakat. Praktik “ekonomi nusantara” di lanskap ekologis Bukit Kumbang memang berada di bawah ancaman. Padahal praktik ekonomi di kedua desa sudah dilakukan dengan cukup selaras dengan alam. Namun apabila negara terus menggenjot investasi dan masyarakat gagal memperkuat institusi lokalnya, maka fase krisis yang jauh lebih dahsyat akan segera tiba.

Pada gradasi kedua ini, kami juga menaruh Lebak Rawang di dalamnya. Lebak Rawang merupakan lokasi tempat bergantung masyarakat lima desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ekonomi dan sosial penduduk di lima desa sangat bergantung

dengan kelestarian alam. Karena itu, praktik ekonomi dilakukan selaras dengan alam. Namun sayangnya, praktik ekonomi yang berdasar kearifan yang baik ini justru dijawab oleh negara dengan penerbitan perizinan. Berawal dari izin HPH, lalu diikuti dengan izin HTI, hingga akhirnya izin perkebunan kelapa sawit. Aktivitas perusahaan skala besar, khususnya HTI, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut di Lebak Rawang. Hal ini mengakibatkan sejarah kejayaannya mulai memudar. Misalnya, kerusakan ekosistem gambut (akibat kanalisasi rawa gambut oleh perusahaan) yang membuat budaya *sonor* mulai menghilang. Dan kondisi ini diperparah dengan larangan praktik tanam bakar oleh pemerintah. Padahal praktik *sonor* dilakukan berdasar kearifan lokal dan kemungkinannya untuk mengakibatkan kebakaran sangat kecil. Pada masa lalu, tradisi *sonor* justru dilakukan pascakebakaran hutan secara alamiah. Bukan kebakaran karena sengaja dibakar seperti yang biasa dilakukan perusahaan.

Konsekuensi hilangnya tradisi *sonor* ialah masyarakat kini beralih menjadi pembeli beras, bukan penghasil beras. Meski begitu, masyarakat tetap masih mampu mempertahankan kesejahteraannya. Beberapa praktik ekonomi lokal seperti menangkap ikan, berladang tradisional (plus ladang pekarangan), menganyam, mengambil kayu terpendam, dan beternak masih dilakukan. Beberapa kegiatan pun dilakukan secara kolektif. Bahkan lebak masih dijadikan sumber ekonomi komunal masyarakat. Namun sayangnya, praktik ekonomi lokal ini mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Penyebabnya adalah pembangunan kanal perusahaan, penebangan skala besar, sekaligus alih fungsi ekosistem gambut menjadi kebun kayu atau kelapa sawit.

Masyarakat Lebak Rawang juga berinisiatif untuk memulihkan ekosistem gambut. Hanya saja upaya pemulihan tersebut terus dibatasi legalitas perusahaan. Salah satunya oleh PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Pada 2015, aktivitas korporasi pemasok bahan baku *pulp and paper* ini justru mengakibatkan kebakaran besar seluas 20.000 hektar. Maka, alih-alih

memulihkan, justru aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan. Sebenarnya masyarakat telah belajar dari masa lalu. Pada 2012, masyarakat sempat berhasil menolak izin dan rencana perkebunan tebu PT. Bumi Sriwijaya Sentosa (BSS). Namun sayangnya, ancaman dari penerbitan izin terus terjadi. Akhirnya setengah dari ekosistem gambut pun hampir rusak. Belum lama ini, negara kembali hadir dengan menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Bintang Harapan Palma (BHP).

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa kami menaruh Lebak Rawang pada gradasi kedua yaitu (1) kerusakan yang sulit dipulihkan; (2) kehilangan beberapa praktik ekonomi lokal; dan (3) terancam ekspansi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Lebak Rawang memang masih mampu berjaya melalui praktik ekonomi lokal yang tidak merusak. Hal itu yang membuat praktik “ekonomi nusantara” masih eksis di lokasi ini. Namun kemampuannya untuk bertahan seolah terus diuji dengan penerbitan izin baru. Maka tidak menutup kemungkinan jika praktik di sini makin mundur dan terkikis habis. Terutama, apabila masyarakat setempat tidak mampu menguatkan diri agar dapat membalik dan memulihkan ekosistem yang rusak.

c. Berada di Ujung Kepunahan

Praktik “ekonomi nusantara” masih eksis, tapi berada di ujung kepunahan. Tradisi dan praktik baik, hampir habis digerus korporasi. Pada gradasi ketiga ini kami menaruh lokasi penelitian di Lebak Belanti. Pada era Nusantara, lokasi ini sangat berjaya. Pada awal era kemerdekaan Indonesia, desa ini juga sempat menjadi lumbung pangan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Namun kejayaan tersebut cepat berganti menjadi krisis. Bermula dari tahun 2007 hingga saat ini.

Berbagai praktik ekonomi yang selaras dengan alam dan sekaligus menjadi identitas lokal hampir punah. Penyebab utamanya adalah penerbitan izin perkebunan kelapa sawit PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ). Sekat kanal perusahaan ini mengakibatkan ekosistem gambut tidak lagi mampu menahan air. Sungai pun disekat, sehingga lajunya terhenti di Lebak Belanti. Maka saat terjadi hujan, dapat dipastikan bahwa banjir besar pun akan merendam Lebak Belanti. Hal ini mengakibatkan sawah masyarakat gagal panen sejak 2007. Bahkan tidak hanya itu, areal kerja/perizinan PT. WAJ juga bertumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat. Bukan hanya Lebak Belanti yang dirugikan, tapi termasuk 16 desa lainnya.

Kini Lebak Belanti berubah dari lumbung pangan menjadi lumbung *setedok* (rumpuk malu), satu jenis gulma dan/atau hama yang berkembang biak dalam jumlah besar. Kerusakan ekosistem rawa gambut di Lebak Belanti juga membawa petaka lain. Sebuah ikan predator berkembang biak dengan cepat. Ikan ini banyak memangsa ikan endemik di Lebak Belanti. Banyak ikan tangkapan masyarakat yang turut dilahap sang predator, ikan sapu-sapu. Predator ini merajalela di Lebak Belanti dan tidak dapat dikonsumsi. Populasinya meningkat pada bulan Juli dan menjadi hama yang sulit ditanggulangi masyarakat.

Kerusakan ekosistem juga mendorong masyarakat bertransformasi. Kini banyak masyarakat yang dulunya petani, beralih menjadi buruh persawahan di daerah lain. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Lebak Belanti karena kehilangan sumber penghidupan. Saat ini, yang tersisa di Lebak Belanti hanya dua Rukun Tetangga (RT) dari sebelumnya tiga. Otomatis jumlah kepala keluarga pun berkurang. Jika dulu berjumlah 180, kini hanya tersisa 80 kepala keluarga. Masyarakat yang masih bertahan, mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pasalnya, hanya pekerjaan itu yang dapat dilakukan di tengah kehancuran ekosistem rawa gambut. Ikan hasil tangkapan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya dijual.

Merespon kerusakan ini, sebenarnya masyarakat sempat melakukan beberapa perlawanan. Mereka bahkan sempat menjebol sekat perusahaan. Selain itu, aksi demonstrasi dan audiensi juga dilakukan. Namun sayangnya, suara mereka hanya didengar tanpa pernah diberi solusi. Akhirnya praktik “ekonomi nusantara” pun hancur oleh operasi logika kapitalisme. Taklid buta terhadap investasi (dalam hal ini perkebunan) telah mengorbankan ekosistem gambut dan masyarakat Lebak Belanti. Kini sumber penghidupan masyarakat Lebak Belanti telah banyak hilang. Praktik dan identitas lokal hampir sepenuhnya hanya menjadi dongeng masa lalu. Sejarah kejayaan sirna, lalu datang krisis sosial-ekologis. Kondisi itulah yang saat ini terjadi di Lebak Belanti.

d. Catatan Tambahan

Hasil analisis visibilitas menunjukkan bahwa “ekonomi nusantara” merupakan konsep dan sekaligus praktik yang menaruh aspek sosial, alam (lingkungan), dan ekonomi dalam satu lingkaran yang sama. Sehingga tidak sekadar menemukan irisan dari ketiganya. Namun dalam praktiknya, “ekonomi nusantara” terus berada di bawah ancaman kebijakan negara yang pro investasi. Alhasil perlahan-lahan logika kapitalisme pun dipaksa masuk ke tengah cara hidup masyarakat. Bahkan termasuk di wilayah seperti Bali, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Ketiga wilayah penelitian itu terindikasi juga masuk jebakan ekonomi pasar. Dalam bentuk, misalnya, mengejar produksi secara besar dan didorong melakukan praktik akumulasi semaksimal mungkin.

Di Desa Kedonganan, rencana penciptaan 67 kafe menjadi 12 terpaksa berubah menjadi 24. Sebenarnya hal ini malah memeruncing kompetisi antar *krama* dan banjar. Bahkan sempat terjadi upaya saling merebut pengunjung dengan cara memberikan tip di luar ketentuan. Namun upaya ini berhasil dicegah melalui aturan adat. Sementara di Kalimantan Timur, cokelat sebagai praktik *dual economic* juga menjadi ancaman

apabila tidak dikontrol dengan baik. Bisa saja suatu waktu, insentif pemerintah daerah malah mendorong perluasan kebun coklat monokultur di wilayah adat Lung Isun. Lain lagi dengan kasus di Sendi. Dunia luar justru mendorong masyarakat melakukan praktik pariwisata artifisial. Dalam arti, banyak membangun beberapa spot foto ciamik untuk unggahan media sosial. Apabila terus dibiarkan berkembang tanpa kontrol, tentu saja ini mengkhawatirkan. Sebab identitas wisata alam dan adat justru berpotensi tergantikan.

Uraian gradasi di atas juga memperlihatkan bahwa praktik “ekonomi nusantara” di seluruh lokasi penelitian tidak sepenuhnya aman, termasuk di lokasi yang berada di kategori gradasi pertama. Sebagian besar lokasi, kecuali Kedonganan, terus terancam investasi berbasis lahan. Penyebabnya ialah keberpihakan negara pada investasi dan logika kapitalisme. Kedua hal ini berpotensi mendorong peningkatan produksi serta layanan jasa yang akan mengakibatkan masyarakat lupa atas identitas lokal dan praktik baik yang telah dilakukannya. Kelangsungan praktik “ekonomi nusantara” juga bergantung pada kemampuan dan kemauan institusi lokal untuk mempertahankan praktik tersebut. Di samping itu, praktik baik ini membutuhkan pula dukungan pengetahuan dari para akademisi. Terutama untuk menguatkan logika “ekonomi nusantara” dari rongrongan logika kapitalisme. Apalagi logika kapitalisme hanya mengenal tiga hukum besi yakni akumulasi, ekspansi, dan sentralisasi. Ketiganya jelas hanya fokus pada aspek ekonomi makro dan abai pada aspek sosial dan alam (lingkungan).

2. Ekonomi Nusantara dan Gerakan *Degrowth*

Pada bab 2 telah disinggung bahwa konsep “ekonomi nusantara” memiliki kemiripan dengan konsep dan gerakan *degrowth*. Terutama dalam konteks *degrowth* sebagai praktik ekonomi ekologis yang dicetuskan kelompok *ecological justice*. Karena itu, pada bagian ini kami akan coba merefleksikan

seberapa jauh kesesuaian praksis (praktik dan konsep) “ekonomi nusantara” dengan *degrowth*. Secara umum, tujuh wilayah penelitian “ekonomi nusantara” memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bahkan wilayah yang masuk gradasi pertama (Kedonganan, Sendi, Lung Isun) terindikasi sangat memenuhi indikator *degrowth*. Meski Sendi belum menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan ekspansi ekonomi mereka. Lebih lengkapnya dapat disimak pada tabel berikut ini.

Aspek	Indikator	Lokasi						
		Tanjung Aur	Sinar Mulya	Lebak Rawang	Lebak Belanti	Lung Isun	Kedonganan	Sendi
Sosial	Partisipasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nilai Solidaritas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Praktik ekonomi terikat aspek budaya, kepercayaan, dan identitas lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Distribusi keuntungan untuk kepentingan bersama	x	x	x	x	✓	✓	✓
Alam	Praktik ekonomi skala kecil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komitmen melestarikan alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Praktik ekonomi sesuai karakteristik lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Memiliki komitmen pemulihan	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
	Kondisi lingkungan menentukan keberlanjutan praktik adat dan identitas lokal	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
Ekonomi	Praktik ekonomi tidak merusak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengambil secukupnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Minim ekspansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Minim kompetisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Kepemilikan komunal	x	x	x	x	x	✓	✓
	Pembagian keuntungan adil	x	x	✓	x	✓	✓	✓
	Menggabung praktik ekonomi lokal dan pasar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Memastikan standar kualitas dan kuantitas produk/jasa secara jujur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4.2 Penilaian SSED dari Praktek dan Pengetahuan Ekonomi Nusantara

Dalam studi ini, pemaknaan dari para pelaku “ekonomi nusantara” digunakan untuk mengonseptualisasikan tiga hal berikut: (1) apa sebenarnya nilai ekonomi yang masyarakat maksud; (2) kesejahteraan seperti apa; dan (3) bagaimana relasinya dengan aspek sosial-ekologis sekitarnya. Ketiga hal ini penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengupayakan keseimbangan (aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial) tetap terjaga, di tengah derasnya tantangan nilai dan praktek kapitalisme. Baik itu dengan aktor negara atau korporasi. Nilai kapitalisme yang dimaksud ialah individualis, egois, kompetitif, ekspansif, hanya berorientasi pada untung, dan lain sebagainya. Karena itu, masyarakat yang kokoh (lihat gradasi pertama) adalah mereka yang mampu mempertahankan moral ekonomi komunal dan tidak semata mengedepankan pemuasan kepentingan pribadi. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana mereka mempertahankan relasi ekonomi berbasis relasi sosial-ekologis—baik itu dengan medium adat atau kepercayaan lokal—untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Masyarakat Kedonganan, Sendi, dan Lung Isun memang berelasi dengan pasar dalam praktik ekonominya. Akan tetapi, mereka masih mengutamakan moral ekonomi komunal. Sehingga mereka mampu untuk mengatur pasar agar tunduk sesuai aturan perilaku yang mereka anut. Mereka juga masih mampu untuk menghidupkan nilai-nilai kolektif berupa praktik saling berbagi dan/atau membantu. Selain itu, mereka pun senantiasa untuk mendorong generasi selanjutnya agar mampu menjaga dan memulihkan lingkungan. Karena dari situ pula kesejahteraan bersama mereka berasal. Pangkalnya, berasal dari kemauan untuk belajar dari sejarah krisis pada era sebelumnya. Hasil belajar dari masa lalu ialah dengan memilih model pengelolaan kolektif saat berelasi dengan pasar (menjual) dan saat memenuhi (dengan membeli) kebutuhan pangan mereka. Oleh sebab itu, di sini aspek sejarah menjadi sangat krusial. Aspek ini menjadi basis pengetahuan “ekonomi nusantara”,

yang mana praktek moral ekonomi komunal coba dirawat dan diuji melalui berbagai macam krisis.

Praktik dan pengetahuan “ekonomi nusantara” di tujuh lokasi penelitian membawa satu hal penting. Ia mendorong refleksi tentang cara pikir kapitalisme yang telah mempersempit manusia hanya sekadar menjadi *homo economicus*. Ciri utamanya ialah hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Refleksi “ekonomi nusantara” membuktikan bahwa cara pikir semacam ini keliru. Sebab telah terbukti bahwa itu bukan satu-satunya perilaku yang eksis di tengah masyarakat. Refleksi ini mengingatkan kami kepada para pendukung *degrowth*. Cikal bakal kelompok ini sudah terbentuk sejak mencuatnya gerakan anti utilitarian, *Reveu de Mauss*, pada 1981. Gerakan ini dipelopori beberapa pemikir sosial Perancis seperti Alan Caille, Marcel Mauss, dan Karl Polanyi. Bersama para ahli sosial lainnya, mereka mengemukakan bahwa dalam praktik ekonomi lokal, *self-interest* hanya menjadi salah satu alasan. Selain itu ada beberapa alasan lain seperti empati, kewajiban, dan kebebasan kreatif.

Para pemikir dan aktivis *degrowth* coba melawan cara pikir kapitalisme tentang *homo economicus*. Mereka coba menggunakan pemahaman yang lebih holistik. Seperti, misalnya, memosisikan manusia sebagai *homo sustinen*, yang memiliki karakter sosial. Lalu *homo politicus*, yang memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan etika. Kemudian *homo ecologies*, yang berelasi dengan alam secara tidak instrumental dan tidak utilitarian. Beberapa konsep tersebut memang bertujuan menantang konsep manusia dari pendukung ekonomi neoklasik. Para pendukung neoklasik selalu mereduksi kebahagiaan manusia hanya sebatas dalam bentuk material. Karena itu, perlu ditantang dengan pemahaman bahwa bentuk kebahagiaan juga berasal dari yang bukan material seperti spiritualitas dan keindahan.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Marjolijn Bloemmen Dkk, *op.cit.*, hlm. 111.

Dalam konteks gradasi pertama (Kedonganan, Sendi, Lung Isun) “ekonomi nusantara”, hal semacam itu juga terjadi. Misalnya, masyarakat juga mengalokasikan keuntungan hasil berelasi dengan ekonomi pasar untuk kepentingan ritual dan kehidupan sosial kolektifnya. Hal ini disebut dengan *depense* yakni menghabiskan keuntungan untuk sesuatu yang tidak menguntungkan secara moneter. Proses menghabiskan keuntungan tersebut juga terjadi di tengah masyarakat kapitalis. Akan tetapi, bedanya, keuntungan tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial kolektifnya. Menurut Giorgos Kalis, proses tersebut merupakan salah satu ciri pengorganisasian masyarakat a la *degrowth*.¹⁹⁵

Beberapa gerakan anti kapitalisme, termasuk *degrowth*, banyak menggunakan cara pandang moral ekonomi ala Mauss. Graeber juga meminjam pendekatan Marcel Mauss untuk membagi tiga moral ekonomi.¹⁹⁶ Terutama dalam konteks hubungan ekonomi berdasarkan konsep *the gift* atau pemberian. Sepanjang sejarah hidup manusia, bahkan sampai saat ini, terkenal tiga moral ekonomi yakni komunalis, pertukaran, dan hierarki. Maksud komunalis ialah bagaimana masyarakat memiliki rasa berhutang satu sama lain dan itu bersifat kekal. Hutang tersebut pun hanya dapat dibayar secara sosial. Dalam hubungan semacam ini maka hutang bersifat sosial permanen. Oleh karena itu, pembatalannya pun hanya dapat dilakukan secara sosial. Sementara moral pertukaran, maksudnya adalah tentang timbal balik untuk mencapai ekuivalensi. Sifatnya sangat impersonal. Artinya hutang bukan sesuatu yang permanen. Proses pembatalan hutang tersebut dapat diperantarai oleh uang. Adapun maksud moral hierarki adalah bagaimana kepatuhan terjadi akibat perbedaan status sosial. Moral hierarki sangat terkait dengan bagaimana proses

¹⁹⁵ Giorgos Kallis, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁹⁶ David Graeber, “On the moral grounds of economic relations: A Maussian approach” dalam *Journal of Classical Sociology* 2014 14:65, hlm. 67-73.

pemberian terjadi dengan sangat minim rasa solidaritas. Selain itu hubungannya pun didasari oleh rasa takut.

Dalam keseharian, praktik moral ekonomi ini saling berkelindan dan umumnya masyarakat harus melakukan kombinasi. Tetapi ada satu yang hampir tidak pernah dapat dihapuskan yakni moral komunalis. Pada dasarnya, masyarakat di berbagai tempat memiliki jenis moral ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya relasi untuk saling berbagi dengan kelompoknya. Relasi tersebut terjadi karena adanya hutang permanen yang hanya dapat dibatalkan secara sosial. Secara lebih tersirat, poin ini juga disampaikan oleh Mauss. Salah satunya melalui karya muridnya, Georges Bataille, tentang pengeluaran dan konsumsi. Pada masanya, Gramsci juga membicarakan ini, namun dengan lebih terang-terangan. Pada dasarnya, konsumsi merupakan inti logika kapitalisme untuk menghancurkan ritual dan bukan justru sebaliknya.

Selama ini, jenis moral ekonomi yang dapat mempertahankan masyarakat dari hantaman krisis adalah moral komunalis. Salah satunya melalui praktek ritual dan rasa memiliki hutang permanen kepada sesama anggota kelompok dan/atau yang dianggap bagian dari kelompoknya. Dengan pemahaman demikian, Mauss sampai pada ide revolusi politik untuk mewujudkan model (institusi baru) kooperativis revolusioner sebagai alternatif di luar kapitalisme. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh pemikir feminis J.K. Gibson-Graham (1996, 2006) dan aktivis gerakan *the commons*, Massimo De Angelis (2007).¹⁹⁷ Poin ini penting untuk menjelaskan: (1) bagaimana masyarakat di tiga lokasi (gradasi pertama) mampu mengalokasikan keuntungan mereka untuk kepentingan komunal dan ritual; dan (2) bagaimana masyarakat di tiga wilayah tersebut saling terikat satu sama lain secara sosial. Pasalnya, keterikatan itulah yang terbukti menguatkan mereka pada masa krisis. Bahkan sejak era kolonialisme sampai saat ini,

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

ritual dan moral komunalis itu pula yang melindungi mereka dari hantaman krisis akibat sistem kapitalisme. Begitu pula selama krisis akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Tradisi berbagi mampu menjadi juru penyelamat mereka dari ancaman krisis pangan.

Aspek kedua dari “ekonomi nusantara” juga sangat penting. Ia menunjukkan bagaimana praktek ekonomi lokal berkaitan langsung dengan lanskap ekologis dan dengan relasi kapitalisme. Sebagai contoh adalah lanskap ekologis pesisir di Bali. Praktik ekonomi (utama) yang dijalankan ada di sektor pariwisata, namun dengan tetap memegang prinsip “ekonomi nusantara”. Alhasil Kedonganan dapat menjadi potret bagaimana *degrowth tourism* berhasil dipraktikkan. Pasalnya, nyaris seluruh kriteria wisata non-kapitalis yang disuarakan *degrowth* terjadi di Kedonganan. Beberapa kriteria tersebut ialah mendorong rezim kepemilikan komunal, bentuk produksi tidak berdasarkan pengerukan keuntungan dari hasil pribadi, bentuk pertukaran tidak bertujuan untuk akumulasi modal, memasukkan harga produksi sosial dan lingkungan, tidak mempromosikan komodifikasi, dan beberapa lainnya.¹⁹⁸ Meski begitu, praktik “ekonomi nusantara” di Kedonganan juga masih perlu perbaikan. Salah satunya dengan mendorong agar lebih menekankan pada nilai non-kompetisi dan non-moneter.

Perkembangan keputusan terakhir untuk beralih ke minawisata di Kedonganan juga menarik. Keputusan ini coba kembali menempatkan cara hidup subsisten dengan menjadi nelayan dan pegiat wisata. Pada mulanya profesi nelayan hampir sepenuhnya ditinggalkan. Namun saat mewabahnya pandemi, tradisi di kehidupan nelayan yakni *ngujur* atau berbagi kepada sesama justru yang menyelamatkan Kedonganan dari krisis. Kenyataan itu makin menunjukkan pentingnya model perjuangan “ekonomi nusantara” dengan berbasis kesesuaian lanskap ekologis. Apalagi jika hendak sepenuhnya mewujudkan masyarakat *degrowth* dan anti

¹⁹⁸ Robert Fletcher Dkk, *op.cit.*, hlm. 1.754.

kapitalisme. Maka Kedonganan juga perlu memasukkan agenda pemulihan ekosistem lingkungan pesisir dalam skema minawisata. Tentu saja, selain tetap perlu senantiasa merawat praktik ideologis *degrowth* yang penting yakni non-kompetisi dan non-moneter (contohnya untuk kepentingan ritual dan komunal).

Dalam studi ini, praktik swakelola di tujuh lokasi penelitian bukan menunjukkan rendahnya kesadaran. Tetapi justru menunjukkan tingginya ancaman bagi praktik ekonomi masyarakat dari kekuatan negara dan korporasi. Karena itu, bahkan di wilayah terkokoh sekalipun (gradasi pertama), masyarakat masih dibayangi ancaman sistem kapitalisme yang dioperasikan negara dan korporasi. Bentuk ancamannya pun beraneka ragam seperti, misalnya, ketiadaan pengakuan dan/atau *enclosure*. Selain itu, ada juga ancaman tindakan represif tentara saat mengklaim wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat. Contoh ini terjadi di Tanjung Aur dan Sinar Mulya. Maka tidak heran jika kedua wilayah ini termasuk paling terancam di aspek lingkungan dan keberlanjutan identitasnya.

Kaca mata “pendekatan benih” menunjukkan bahwa praktik dan pengetahuan “ekonomi nusantara” sejalan dengan *degrowth*. Atau dengan kata lain, “ekonomi nusantara” adalah *degrowth* ala Indonesia. Dengan berpegang pada empat elemen “ekonomi nusantara”, semua lokasi sama-sama memperlihatkan bagaimana masyarakat coba melawan cara pikir kapitalisme plus logika *economic growth* sebagai satu-satunya cara hidup. Namun seperti yang diingatkan para pengusung gerakan anti kapitalisme, hegemoni *growth* memang sangat mencengkeram kuat. Saking kuatnya, ancaman dari dua aktor kapitalisme—negara dan korporasi—hadir dalam kenyataan sehari-hari. Salah satunya dalam bentuk ancaman pencaplokan wilayah kelola rakyat dan ancaman kebijakan pembangunan modern. Ancaman tersebut tidak saja akan menghabisi ruang hidup masyarakat, tapi juga akan menghabisi praktik dan pengetahuan “ekonomi nusantara”.

Beberapa lokasi “ekonomi nusantara” yang masuk gradasi kedua dan ketiga bisa menjadi contoh. Ancaman dalam keseharian yang dilakukan negara dan korporasi memang nyata adanya. Hal ini yang membuat mereka paling sedikit memenuhi indikator SSED. Bahkan hal ini juga masih membayangi wilayah yang masuk gradasi pertama. Karena itu, agar dapat memperkuat ideologi anti kapitalisme, “ekonomi nusantara” perlu melakukan penambahan indikator SSED, khususnya di aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya agar dapat mengintegrasikan praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan (aspek ke-3) dari SSED seperti indikator kepemilikan komunal dan distribusi keuntungan secara adil. Dua indikator ini penting untuk meningkatkan praktik nilai non-kompetisi dan non-moneter.

Saat terjadi krisis, nilai non-kompetisi dan non-moneter juga terbukti menjadi basis pertahanan “ekonomi nusantara” di Kedonganan. Jika itu dapat dilakukan, maka pengorganisasian sosial model *degrowth* yang mengutamakan nilai *limit*, *care*, dan *depense* dapat terwujud. Maksud nilai *limit* ialah pengelolaan kolektif skala kecil agar dapat mengurangi emisi dan jejak karbon. Selain itu, skala kecil juga lebih kompatibel untuk demokrasi. Sementara maksud *care* yaitu ekonomi berbasis reproduksi di tingkat keluarga yang tidak ekspansif. Adapun maksud *depense* ialah mengalokasikan keuntungan untuk kebutuhan kolektif (non-produktif) seperti untuk kesejahteraan sosial. Hal ini sudah dilakukan masyarakat Kedonganan. Mereka mengalokasikan keuntungan untuk merawat *Pura* dan mencukupi kebutuhan ritual.¹⁹⁹ Dengan demikian, penambahan dua indikator *non-monetary* dan *non-competition* di tubuh “ekonomi nusantara” akan makin memperkuat praktik *limit* dan *depense* dari “ekonomi nusantara” itu sendiri.

¹⁹⁹ Giorgos Kallis, “The Degrowth Alternative,” *Great Transition Initiative* (February 2015), hlm. 2.

B. Mengarusutamakan Ekonomi Nusantara sebagai Model Penolakan Ekonomi Pertumbuhan

Analisis temuan penelitian ini memperlihatkan fakta bahwa praktik “ekonomi nusantara” masih eksis. Praktik ekonomi ini menaruh kepentingan ekonomi selaras (sama pentingnya) dengan aspek sosial dan alam. Namun sayangnya, beberapa praktik tersebut tidak lagi eksis kejayaannya. Bahkan ada juga yang sedang dan/atau akan terjebak krisis. Terdapat dua faktor yang memengaruhi kemampuan komunitas untuk mempertahankan kejayaannya sekaligus lepas dari krisis. *Pertama*, kemampuan dan kemauan institusional lokal mempertahankan praktik “ekonomi nusantara.” *Kedua*, kemampuan menggalang dukungan sekaligus mengelola ancaman dari negara, maupun aktor non-negara.

Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hanya dengan berpegang pada kekuatan institusi lokal saja tidak cukup. Ia tetap tidak mampu membuat praktik “ekonomi nusantara” terus eksis dan melampaui hegemoni ekonomi kapitalistik. Karena itu, ia harus ditunjang kemahiran komunitas dalam mengelola ancaman, sekaligus menggalang dukungan. Contohnya kekuatan institusi lokal di komunitas Sumatera Selatan. Tetap saja, itu tidak mampu melepaskan mereka dari fase krisis. Sementara di Bengkulu, kemampuan mengelola ancaman dan dukungan sudah ada, namun tidak diikuti dengan kekokohan pengetahuan dan institusi lokal. Sehingga tetap mengantar mereka masuk dalam jerat tengkulak atau ‘paksaan’ untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Disadari atau tidak, ancaman hingga krisis yang terjadi di lokasi penelitian “ekonomi nusantara” merupakan buah dari hegemoni kapitalisme. Komodifikasi alam dan manusia melahirkan logika pertumbuhan tanpa batas. Logika ini acap hadir bersamaan dengan pengabaian keselamatan rakyat (manusia) dan lingkungan. Sebab yang dikejar logika ini selalu

peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Logika semacam inilah yang dipertahankan, walau sama sekali tidak menghadirkan kesejahteraan. Akhirnya logika itu pun menjadi status quo dan terus memastikan dominasi kelompok *the haves* (baca kapitalis) tetap berlanjut.

Sajian krisis dan ancaman yang eksis di lokasi penelitian ini sejalan dengan apa yang disampaikan Giorgos Kallis. Sejalan dengan pendapat para *enviromentalist*, Kallis menyebut bahwa ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pemisahan manusia dengan manusia lainnya dan sekaligus memisah manusia dengan entitas ekologis non-manusia.²⁰⁰ Corina Burkhart Dkk juga mengatakan mantra *higher, further, faster* dalam pertumbuhan ekonomi melahirkan persaingan permanen di semua bidang kehidupan.²⁰¹ Mantra dan fakta ini menjadi bukti bahwa ekonomi pertumbuhan hari ini telah memisahkan ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. Misalnya pada kasus pariwisata di Bali (Jimbaran).

Pada mulanya, logika ekonomi pertumbuhan sempat merusak relasi sakral masyarakat adat Kedonganan Bali dengan wilayah pesisirnya. Semua berkompetisi untuk mengakumulasi keuntungan. Akhirnya lupa pada identitas lokal, serta relasi sosial-ekologis dengan wilayah adatnya. Lalu apa yang menyelamatkan praktik “ekonomi nusantara” di Kedonganan? Adalah transformasi ekonomi tradisional ke ekonomi modern, seraya tetap mendapat pembatasan dari adat. Selain itu, ada dukungan dari institusi lokal serta insentif kebijakan. Alhasil Kedonganan pun kembali berjaya dan pulih dari masa krisis.

Pada bagian awal bab ini juga dijelaskan bahwa investasi merupakan kata kunci dan sekaligus ancaman paling utama. Legalitas perizinan telah melanggengkan praktik akumulasi

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁰¹ Corinna Burkhart dkk, “Degrowth In Movement, Strengthening Alternatives and Overcoming Growth, Competition and Profit”, <https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/degrowth/> (Diakses pada 30 Maret 2020).

dan ekspansi tiada akhir yang mengancam praktik “ekonomi nusantara.” Dengan kata lain, di hadapan rezim gila investasi, tidak ada satu lokasi penelitian yang sepenuhnya aman. Semua berada di bawah bayang-bayang investasi. Mantra utamanya ialah mengakselerasi produksi dan konsumsi agar menaikkan perhitungan PDB. Bersamaan dengan itu, lagi-lagi, rakyat dan lingkungan hidup yang harus dikorbankan. Dengan demikian, simpulan bahwa logika kapitalisme dengan model ekonomi pertumbuhannya telah masuk di semua ruang kehidupan menjadi benar belaka.

Dalam melanggengkan dominasinya, logika pertumbuhan ekonomi acap mengubah tampilan, tapi tidak dengan wataknya. Misalnya dalam ide “pembangunan berkelanjutan” atau yang terbaru, “pertumbuhan hijau.” Kallis pun menyebut bahwa para ‘*developers*’ hanya menjadikan persoalan lingkungan menjadi lebih teknis dan menjanjikan solusi yang saling menguntungkan.²⁰² Tentu saja hal ini mustahil. Sebab, merusak lingkungan adalah prasyarat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di bawah kendali kapitalisme.

Bagi para penganut ekonomi pertumbuhan, keberhasilan ‘pembangunan’ hanya berpusar soal pertambangan, pengeboran, pertanian skala besar, dan manufaktur. Tidak heran, ekspansi merupakan watak dan sekaligus praktik yang menubuh di dalamnya. Karena itu, komitmen *private sector* seperti RSPO, FCP APP, SMFP dan lainnya hanya kedok semata. Fungsinya sebatas untuk meyakinkan pasar, sembari terus melanggengkan perusakan alam. Lagi-lagi tujuan utamanya tetap satu yakni akumulasi.

Dalam sengkarut semacam ini, praktik yang dilakukan di akar rumput (lokasi penelitian “ekonomi nusantara”) dapat diposisikan sebagai laboratorium pembelajaran dan sekaligus bentuk tawaran perubahan. Bukan hanya pada aras ekonomi, namun termasuk dalam konteks transisi politik menuju

²⁰² Giorgos Kallis, *op.cit.*, hlm. 1 dan 2.

Indonesia yang adil dan lestari (tanpa pertumbuhan). Pasalnya, mengutip sebuah poster dalam tulisan Kallis, “*the only sustainable growth is degrowth*.” Perkataan tersebut juga sejalan dengan apa yang kami temukan dalam “ekonomi nusantara.” Namun untuk dapat menunjukkan tautannya dalam konteks Indonesia, kami akan memulainya dengan menyodorkan analisis dari beberapa perspektif. Dan ini menjadi cara dan/atau jalan untuk melakukan pengorganisasian “ekonomi nusantara.”

Analisis pertama akan dilakukan dengan pendekatan historis. Selanjutnya, secara berturut-turut, masuk dalam perspektif konstitusional dan hukum. Berangkat dari situ, maka kami pun coba menawarkan strategi dan cara pengorganisasian “ekonomi nusantara.” Tidak hanya sebagai praktik, namun sekaligus sebagai pengetahuan tanding dari hegemoni pertumbuhan ekonomi. Tawaran ini akan lebih maju dari tawaran sosialisme abad-20.²⁰³ Pasalnya, tidak sekedar menggantikan hubungan produksi kapitalis, namun sekaligus mengubah tujuan dasar dari eksploitasi sumber daya dan akumulasi keuntungan demi produksi dan konsumsi massal. Tujuannya jelas yakni kehidupan adil dan lestari untuk seluruh umat manusia dan seluruh komponen ekologis lainnya.

1. Membaca dan Sekaligus Melawan Praktik Ahistoris

Paparan cerita dari lokasi penelitian “ekonomi nusantara” menyiratkan beberapa fakta serius. Sebagian besar lokasi penelitian sudah eksis jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan masyarakat pun sudah berjalan. Bahkan terus diwariskan pada anak cucu sebagai bentuk kejayaan. Hal itu terjadi justru tanpa kerangkeng rezim teritorial skala besar seperti negara. Meski, tentu saja, setiap lokasi memiliki dinamika, tantangan, dan tingkat keberhasilan yang beragam. Walau demikian, hampir semua lokasi penelitian memiliki dua

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 4.

kesamaan yakni hidup selaras dengan alam dan bertopang pada semangat swakelola.

Satu fakta lainnya ialah bahwa aneka petaka justru mencuat saat memasuki era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di seluruh lokasi penelitian negara Indonesia selalu hadir, tapi dengan beberapa bentuk yang berbeda. Ketiga bentuk kehadiran negara ini dapat terjadi bersamaan di satu lokasi. Bentuk *pertama*, negara hadir dengan ketidakhadirannya. *Kedua*, negara hadir untuk meminggirkan masyarakat. *Ketiga*, negara hadir untuk memproteksi sumber pendapatannya. Bentuk kehadiran negara yang *pertama* dan *kedua* terjadi di Sendi, Tanjung Aur, dan Sinar Mulya. Kehadiran negara dalam bentuk *kedua* terjadi di Lung Isun, Lebak Belanti, dan Lebak Rawang. Sementara bentuk kehadiran *ketiga* terjadi di Kedongan.

Misalnya dalam konteks masyarakat Sendi. Pada 1960an, negara hadir dengan wajah Perhutani. Instansi ini mengambil alih lahan masyarakat yang ditinggalkan sementara selama periode perang kemerdekaan. Lalu pada 1980an, negara kembali hadir untuk meminggirkan masyarakat dengan menghapus Desa Sendi secara administratif. Sedangkan pada tahun 2000an, ketika masyarakat Adat Sendi memerlukan pengakuan, negara justru hadir dengan ketidakhadirannya. Negara mengetahui dan memiliki kekuatan dan perangkat untuk memberikan kepastian hukum, namun negara justru abai dan tutup mata. Padahal masyarakat sangat membutuhkan kepastian, karena ini menyangkut status lembaga adat dan pengelolaan wilayah mereka.

Kondisi nyaris serupa terjadi di Tanjung Aur dan Sinar Mulya. Negara hadir dalam bentuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Kumbang. Bahkan di Tanjung Aur, ditambah dengan program Prokimal (Proyek Pemukiman Angkatan Laut). Dalam konteks ini, negara justru hadir untuk membatasi dan meminggirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Namun ketika masyarakat mengajukan izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), negara justru hadir

dengan ketidakhadirannya. Sampai dengan penelitian ini dibuat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum juga menerbitkan izin tersebut.

Lain hal dengan apa yang terjadi di Lebak Rawang dan Lebak Belanti. Negara hadir dengan paras UU Desa. Produk UU ini mengubah model administrasi adat yakni marga. Dampaknya, banyak kearifan dan pengetahuan lokal yang tergerus seiring perubahan model administratif tersebut. Selain itu, negara juga hadir di Lebak Rawang dan Lebak Belanti dalam wujud penerbitan izin usaha bagi perusahaan skala besar. Keberadaan perusahaan jelas merugikan masyarakat karena menghancurkan ekologi setempat dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

Begitu pula dengan yang terjadi di Lung Isun. Pada 1970an negara hadir untuk mengubah sistem kehupian. Perubahan sistem Hipui telah mengakibatkan otoritas adat tereduksi. Perkara ini makin terasa saat negara memprakarsai proses peminggiran masyarakat melalui penerbitan izin perusahaan. Sejak saat itu, hutan dan seluruh sumber daya yang berada di wilayah adat tidak lagi mutlak milik masyarakat. Beruntungnya, beda dengan Lebak Rawang atau Lebak Belanti, upaya pengusulan hak pengakuan hutan dan masyarakat adat di Lung Isun menuai titik terang. Usulan masyarakat diterima negara dan kini masih dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Potret yang sedikit berbeda memang terjadi di Kedonganan. Negara hadir untuk memproteksi sumber pendapatannya. Hal ini mudah dipahami. Pasalnya, perputaran terbesar uang yang masuk ke negara—dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat—berasal dari industri wisata. Nilai jual industri wisata di Bali ialah kearifan adat dan pemandangan alam yang indah. Dan kedua hal ini dimiliki oleh Kedonganan. Menariknya, Kedonganan tidak begitu saja terjebak logika industri pariwisata yang individualistik. Namun Kedonganan justru mampu membalik logika tersebut dan mengembangkan

konsep pariwisata yang lebih komunal. Alhasil semua lapisan masyarakat Kedonganan turut merasakan dampak perputaran uang dari pariwisata.

Temuan di lokasi penelitian memang menunjukkan bahwa kehadiran negara, sebagian besar, justru menjadi masalah. Negara memang selalu hadir. Namun, alih-alih memperkuat praktik baik yang sudah dilakukan masyarakat, sering kali negara justru muncul untuk meminggirkan. Padahal bagi masyarakat adat misalnya, kehidupan dan kesejahteraan mereka sudah ada jauh sebelum negara berdiri. Persis di sini negara lupa dengan tonggak penting pembentukan Indonesia itu sendiri yakni Keputusan Kongres II Pemuda di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Kongres ini berlangsung 17 tahun sebelum Negara Indonesia berdiri. Hasil kongres tersebut pun jelas bahwa lima dasar persatuan Indonesia, salah satunya, ialah hukum adat. Namun naasnya, pengakuan hukum adat sebagai unsur persatuan jauh panggang dari api. Kecuali Kedonganan, seluruh masyarakat hukum adat dalam penelitian ini justru tidak diberi pengakuan dan terancam ekspansi perusahaan skala besar.

Pada masa kini, di tengah makin menggilanya logika pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan refleksi serius tentang keberadaan negara. Kerangka usang yang menempatkan negara semata sebagai penjaga atau regulator berlakunya sistem kapitalisme perlu direvisi. Negara bukan semata penjaga atau regulator, tapi sekaligus adalah kapitalisme itu sendiri. Wujudnya bermacam-macam. Bisa jadi Perhutani, Taman Nasional, atau yang lainnya. Namun praktiknya acap sama yakni mencongkel masyarakat kelas bawah dari ruang hidupnya. Sehingga kerangka yang berlaku saat ini menjadi “Kapitalisme Korporasi & Kapitalisme-Negara *vs* Masyarakat.” Dengan begitu, mewujudkan kehidupan lain di luar kapitalisme juga berarti mewujudkan kehidupan lain di luar sistem negara. Tentu saja ini bukan perkara mudah, namun bukan berarti ini

pun sama sekali tidak mungkin. Praktik kejayaan masa lalu di Nusantara dapat menjadi bahan pembelajaran.

Kami tidak hendak mengatakan bahwa tata kelola kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Nusantara sudah pasti baik. Kami juga menyadari ada banyak sekali kekurangan dalam praktik kehidupan sebelum era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami pun bukan hendak mendorong kembali ke era primitif tanpa teknologi. Karena pada kenyataannya kehidupan hari ini telah sedemikian bergelimang teknologi. Kami hanya ingin menyodorkan fakta bahwa kehidupan yang selaras dengan alam, makmur, dan sejahtera dapat pula terjadi tanpa negara. Paparan cerita hampir di semua lokasi penelitian ini menunjukkan itu. Hampir seluruhnya telah mencapai kejayaannya justru ketika belum terantai rezim teritori skala besar macam negara. Dan keberadaan negara justru menjadi pintu masuk aneka bentuk kehancuran masyarakat. Baik itu kehancuran ekosistemnya akibat izin perusahaan atau kehancuran semangat kolektif di tubuh masyarakat.

Kunci keberhasilan praktik berkehidupan sebelum era negara ialah semangat swakelola, berelasi baik dengan alam, komunalisme, dan praktik skala kecil. Karena itu, jika hendak belajar dari masa lalu, maka upaya masa kini yang perlu didorong ialah diversifikasi (terutama energi), desentralisasi masyarakat, dan organisasi sosial yang kuat.²⁰⁴ Contoh diversifikasi energi sudah ada, salah satunya, oleh masyarakat Sinar Mulya. Mereka membuat sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk mencukupi kebutuhan listriknya. Praktik desentralisasi nyaris berlaku hampir di semua lokasi penelitian. Pada masa lalu (dan beberapa sampai saat ini), mereka hidup dalam skala kecil dengan bertopang pada keberadaan institusi adat atau marga. Bahkan batas-batas wilayahnya ditentukan dari pertanda alam sekitar. Sementara

²⁰⁴ Murray Bookchin, *Ekologi dan Anarkisme: Kumpulan Esai* (Terjemahan), (Salatiga: Pustaka Catut, 2018), hlm. 23.

organisasi sosial yang kuat dapat diwakilkan oleh Lembaga Adat Kedonganan. Kekuatan organisasi di Kedonganan sudah teruji, salah satunya, pada momen krisis akibat pandemi COVID-19.

Tantangan mewujudkan “dunia lain” tanpa negara dan kapitalisme ialah bagaimana mereplikasi sebanyak mungkin praktik baik tersebut di banyak ruang. Salah satunya di ruang yang disebut Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Tentu saja masing-masing tempat akan memiliki perbedaan. Hal itu sangat wajar, mengingat perbedaan karakter dan konteks masing-masing tempat. Dan sudah pasti ini pun bukan pekerjaan yang selesai dalam satu malam. Ini adalah pekerjaan mengaktivasi ruang yang panjang dan melelahkan. Namun itu tetap perlu dilakukan, sekalipun itu hanya semacam upaya kecil untuk menunda kekalahan.

2. Meluruskan Sejarah dan Membangun Ekonomi Konstitusional

Ancaman dan krisis yang terjadi di lokasi praktik “ekonomi nusantara” merupakan buah perbuatan ahistoris negara. Dengan kata lain, lupa asal usul dan sejarah lahirnya Indonesia. Masa transisi pascakemerdekaan belum berhasil memulihkan hak rakyat yang dirampas pada masa kolonial. Meski sebenarnya konsep hak penguasaan negara sudah disusun dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya, tujuan mewujudkan sosialisme Indonesia tidak berjalan seperti pada aneka teks peraturan perundang-undangan.

Hak menguasai negara pun diplesetkan menjadi hak memiliki. Model kepemilikannya pun privat alih-alih publik. Dan ini sangat kontras dengan semangat sosialisme. Benih-benih kapitalisme negara dengan kedok sosialisme, lahir pada fase awal Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jalan inkonstitusional Soekarno yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Cara Soekarno, berbeda dengan

Soeharto yang melanggengkan kuasanya melalui justifikasi konstitusional. Meski, sebenarnya berbagai produk hukum yang diterbitkan Soeharto juga inskonstitusional.²⁰⁵

Pemerintahan Soeharto yang menyebut diri rezim “Orde Baru” merupakan pelopor kapitalisme negara. Menurut Eric Hiariej, kapitalisme negara di Indonesia dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, negara berpartisipasi secara langsung dalam menumpuk modal dengan cara memiliki sumber daya finansial dan menanam modal di berbagai sektor usaha, terutama melalui aneka bentuk perusahaan milik negara. *Kedua*, negara terlibat secara tidak langsung lewat perencanaan, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan kebijakan.²⁰⁶ Singkatnya, negara hadir sebagai pemilik modal dan sekaligus agen yang mengukuhkan kerja kapitalisme.

Dalam perkembangannya, kapitalisme negara di Indonesia (era Soeharto) perlahan runtuh karena skema pasar. Jatuhnya harga minyak dan praktik kecurangan yang hanya menguntungkan kroni tidak kompatibel dengan kapitalisme yang lebih maju (*advanced capitalism*). Akhirnya kejatuhan rezim militeristik Soeharto pun menjadi ruang konsolidasi. Para pemilik modal skala besar berkumpul dan mendorong Indonesia masuk ke dalam skema *advanced capitalism*. Dalam skema ini, tidak ada lagi pemisah antara penguasa dan pemilik modal. Oleh karena itu, sebenarnya “Reformasi” juga berarti terbukanya ruang bagi kelompok bisnis untuk menguasai parlemen dan pemerintahan. Mereka mengendalikan ekonomi dan politik seraya tetap tunduk pada mekanisme pasar.

Uraian ringkas di atas merupakan bentuk praktik ahistoris dan inkonstitusional yang berkembang di Indonesia. Dan itu terjadi selama lebih dari enam dasawarsa. Karena itu, menjadi sulit untuk meruntuhkan kuasa dan hegemoni tersebut. Tapi itu

²⁰⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 72.

²⁰⁶ Eric Hiariej, “Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10 No. 1, Juli 2006, hlm. 93-94.

bukan tidak mungkin. Apalagi kita punya basis historis dan konstitusional yang jelas. Sebuah basis yang bertentangan dengan kapitalisme dan sekaligus logika pertumbuhannya.

Mengapa praktik saat ini dikatakan ahistoris? Ada dua argumentasi yang dapat menjelaskannya. Kami akan mulai dari sejarah dan cita-cita awal pembentukan Indonesia. Dengan mengutip banyak sumber, Roeslan Abdulgani pernah menyebut bahwa bangsa Indonesia mengalami masa keemasannya pada abad 15 dan 16 sebelum datangnya kolonialisme Belanda.²⁰⁷ Saat itu berbagai suku hidup berjaya dan makmur. Setiap suku mempunyai beragam model produksi dan praktik ekonomi. Rakyat pun hidup di alam kemerdekaan yang serba cukup dan sejahtera. Lalu datang zaman penjajahan. Zaman ini ditandai dengan kemiskinan rakyat kebanyakan, kelimpahan para penjajah, dan keculasan elit bumiputera. Dimensi kemiskinan rakyat kebanyakan itu bahkan dalam dua hal yakni secara materiil dan spirituil. Potret kemiskinan itu pula yang melahirkan pergerakan kebangsaan dan cita-cita sosialisme.

Pilihan pada sosialisme sempat melahirkan friksi dan perebutan massa antara Partai Komunisme Indonesia (sebelum kemerdekaan) dan Syarikat Islam. Bahkan dalam perkembangannya, sosialisme pun melahirkan friksi antara kelompok Islam, Sosialis, dan Nasionalis. Terkait hal ini, Roeslan Abdulgani menyebut bahwa upaya menyintesiskan Islam dan Marxisme pernah dilakukan oleh Haji Agus Salim, namun tetap buntu. Baru pada 1924 kebuntuan tersebut mulai terpecahkan oleh Tjokroaminoto melalui risalah bertajuk "Islam dan Sosialisme." Dalam risalah tersebut, Tjokroaminoto menyampaikan empat hal penting.²⁰⁸

²⁰⁷ Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Indonesia Perkembangan Tjita2nya, Ketegasannja, Sosialisme Utopia, Sosialisme Ilmijah*, (Jajasan Prapantja, Djanuari 1964), hlm. 22-23.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

- a. Islam dengan ajaran anti-riba pada hakikatnya adalah anti-kapitalisme;
- b. Perintah-perintah Tuhan untuk berbuat kedermawanan (zakat-fitrh dan sebagainya), kebajikan, dan bermusyawarah (*wa'amruhum sjuro bainahum*) kepada dan dengan sesama manusia adalah suruhan Tuhan untuk sosialisme dan demokrasi;
- c. Penyelidikan-penyelidikan sejarah dari buku-buku karangan sarjana Islam sendiri maupun dari karya disebutkan negara-negara Islam yang dipimpin oleh Nabi dan sahabatnya berturut-turut yakni Sajidina Abubakar, Sajidina Oemar, Sajidina Oesman, dan Sajidina Ali, yang dikenal dengan nama Chulafaur Rasjidin adalah berisikan masyarakat sosialis yang memang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam; malahan bahwa sewaktu Sajidina Umar susunan Pemerintahannya dan masjarakatnja adalah Communistis- militaristis dalam batas-batas adjaran Islam;
- d. Berdasarkan analisis secara Marxistis dilahirkan kesimpulan, bahwa kemelaratan rakyat Indonesia ini disebabkan karena kolonialisme dan kapitalisme, dan bahwa kaum Sarekat Islam mempunyai keyakinan, bahwa tujuan-tujuannya itu bersamaan dengan tujuan-tujuan sebagian besar dari pergerakan Rakjat dan kaum buruh dunia. Adanya hubungan kerjasama antara gerakan buruh-sosial-internasional dengan Pan-Islamisme.

Selanjutnya, Roeslan Abdulgani juga mengutip pendapat Soekarno pada 1926 saat menyajikan sistesis antara Islam, Marxisme, dan Nasionalisme.²⁰⁹ Tiga hal tersebut yakni (1) merujuk pada perjuangan dan ajaran nasionalisme, maka perjuangan nasionalisme Indonesia harus bersatu dengan Islam

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 30-32.

dam Marxisme; (2) beberapa ajaran Islam dalam Quran, khususnya mengenai riba yang mempunyai kesamaan dengan ajaran sosialisme dan demokrasi, maka Islam di Indonesia harus dapat bersatu dengan Nasionalisme dan Marxisme; dan (3) Nasionalisme Indonesia dan Islam di Indonesia adalah aliran-politik dan aliran-agama yang tertindas, maka Marxisme di Indonesia harus dapat bersatu dengan Nasionalisme dan Islam. Selanjutnya, Bung Karno juga menyebut bahwa persoalan tentang materialisme, terkait *stof en geest*, tidak perlu diperdebatkan. Alasannya, kebencian kelompok marxis Eropa kepada gereja punya konteks tersendiri. Di sana kelompok gereja sering menggunakan agama untuk melindungi kepentingan kapitalisme dan membela kelompok elit.

Lalu pertanyaannya, bukankah kehadiran penjajah juga merupakan bentuk imperialisme dan kolonialisme? Apa hubungannya dengan kapitalisme? Kami kembali mengutip tulisan Roeslan Abdulgani. Menurutnya,

“Djadi menurut perkembangan sedjarah-dunia, maka ‘Kolonialisme *alten Stils*’ adalah anak-kelahiran daripada andelskapitalisme dan ‘Kolonialisme *neuen Stils*’ adalah anak-kelahiran imperialisme, sedangkan imperialisme adalah puntjankja kapitalisme.”²¹⁰

“Tegaslah bahwa ilmu-pengetahuan sedjarah, ilmu-pengetahuan politik dan masjarakat serta ilmu-pengetahuan ekonomi menundjukkan dengan tegas sumbernja kolonialisme, jaitu sistim produksi atas azas kapitalisme.”²¹¹

“... bahwa „*het kapitalisme werkt in een kolonie verderfelijker dan in eigen land*”, (sistim kapitalisme dalam

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 78.

negeri djadjahan lebih merusak daripada dalam negerinja sendiri).”²¹²

Berdasarkan pendapat di atas, tegas bahwa sejarah dilahirkannya Indonesia merupakan sejarah perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Sejarah kolonialisme dan kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari dua hal berikut yakni (1) kebutuhan terhadap bahan baku yang tidak tersedia di negara-negara Barat; dan (2) kebutuhan konsumen terhadap hasil produksi dari negara-negara Utara, khususnya Amerika Serikat. Sebenarnya banyak sejarah lain, tapi dua corak di atas yang tampak terus terjadi hingga saat ini.

Sejarah dan semangat penolakan imperliasme, kolonialisme, dan kapitalisme dengan cara kerja sosialisme tersebut dibenarkan oleh Yudi Latif. Dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, ia menyebut:²¹³

“...sosialisme merupakan jalan yang dipilih oleh para pendiri bangsa ini. Karena itu jalan sosialisme ini termaktub dalam UUD 1945. Jalan sosialisme ini dipilih setelah para pendiri bangsa menolak keras kapitalisme yang telah mengakibatkan penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia. Baik dari partai yang paling kanan dan juga yang paling kiri saat itu. Semua menolak kapitalisme. Jalan sosialisme termaktub dalam cita-cita UUD 1945 dan dijabarkan terutama dalam pasal 33. Sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini, jalan sosialisme telah diabaikan dan digantikan oleh kapitalisme. Kapitalisme liberal semakin lama semakin kuat di dalam pembangunan bangsa. Akibatnya, Indonesia semakin menjauh untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Perlu meluruskan kembali

²¹² *Ibid.*, hlm. 81.

²¹³ <https://www.antaranews.com/berita/262070/pengamat-uud-1945-anjurkan-sosialisme-indonesia>, Diakses pada 31 Januari 2021.

pembangunan bangsa menuju jalan sosialisme Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945.”

Hegemoni kapitalisme di Indonesia merupakan buah dari praktik ahistoris. Dan itu bertentangan dengan sejarah terbentuknya Indonesia. Hal tersebut merupakan penegasan terhadap jawaban atas pertanyaan yang telah dilontarkan sebelumnya, “Mengapa praktik saat ini dikatakan ahistoris?”. Selanjutnya, kami akan masuk pada jawaban kedua. Jawaban kedua akan memperkuat jawaban pertama. Jawaban kedua didasarkan pada argumentasi konsensus pembentukan Indonesia. Dasar yang kami rujuk adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Posisi Pancasila adalah sumber hukum utama, sementara UUD NRI 1945 adalah puncak hierarki hukum. Jawaban ini akan dimulai dari sumber hukum utama, Pancasila.

Sebagai sumber hukum utama, Pancasila sering disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*). Dalam makalah yang dipaparkannya di Badan Pembaharuan Hukum Nasional (BPHN), Yudi Latif secara tegas menjelaskan urgensi Pancasila dalam pembentukan konstitusi. Ia menyebut UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) dengan istilah Konstitusi Proklamasi. Menurutnya,

“Konstitusi Proklamasi menganut sistematis negara kekeluargaan. Sistematis kekeluargaan dari Konstitusi Proklamasi itu merupakan *resultante* dari pergulatan ragam aspirasi dan ideologi yang ada.”

Paling tidak, terdapat tiga arus utama ideologi yang mewarnainya: **ideologi-ideologi berhaluan keagamaan, ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan, dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme**. Ketiga arus utama ideologi tersebut memiliki perbedaan dan perspektifnya masing-masing. Namun titik temu itu ditemukan, setidaknya dalam tiga ciri

implementasi semangat Pancasila: **unitarisme, demokrasi permusyawaratan, dan sosialisme.**²¹⁴

Yudi Latif juga menyebut bahwa Konstitusi Proklamasi menggariskan empat fungsi negara (sistem pemerintahan negara) yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu:²¹⁵

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Dalam konteks kebijakan, empat fungsi negara tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua tujuan. *Pertama*, tujuan *social defence* untuk rumusan fungsi poin 1 dan 4. *Kedua*, tujuan *social welfare policy* untuk fungsi poin 2 dan 3. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI menegaskan keempat fungsi dan/atau dua tujuan tersebut dilaksanakan atas dasar lima sila dalam Pancasila.

Fokus kritik kami adalah terhadap ekonomi kapitalistik. Oleh sebab itu, uraian ini akan lebih fokus pada tujuan *social welfare*. Sementara untuk tujuan *social defence* tidak akan diulas terlalu dalam. Uraian inilah yang nantinya akan memperkuat praktik ahistoris sekaligus inkonstitusional dalam pelaksanaan perekonomian nasional. Selanjutnya, uraian bagian ini juga akan memperlihatkan relasi konstitusional dalam tawaran konsep “ekonomi nusantara.” Sehingga, dalam konteks global,

²¹⁴ Yudi Latif, “Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya terhadap Perumusan Konstitusi”, https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf, diakses pada 12 Februari 2021.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

konteks historis dan konstitusional dalam tawaran ini menjadi layak untuk dipertimbangkan. Terutama sebagai narasi guna melawan hegemoni pertumbuhan ekonomi—sebuah model ekonomi yang kental dengan aroma kapitalisme dan keberadaannya sudah ditolak sedari Indonesia masih menjadi sebuah wacana kebangsaan.

Narasi konstitusional yang menjadi argumen kami adalah ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 (sebelum maupun sesudah amandemen). Pasal 33 UUD NRI berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Uraian rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 ini akan disajikan dalam tiga bagian yaitu (1) usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) hak menguasai negara dan kemakmuran rakyat; dan (3) demokrasi ekonomi. Setelah menjelaskan tiga hal tersebut, maka akan diperlihatkan bahwa narasi yang kami tawarkan koheren secara historis dan sekaligus merupakan refleksi atas praktik ekonomi konstitusional. Tawaran ini juga

mempunyai relasi dengan apa yang diperjuangkan secara global oleh gerakan *degrowth*. Tiga uraian tersebut akan semakin menegaskan kekeliruan pilihan berekonomi Indonesia yang ahistoris dan inkonstitusional, karena itu harus segera ditinggalkan.

Bagi kami, tawaran konsep “ekonomi nusantara” merupakan cara tepat dan konstitusional untuk meng-Indonesia-kan kembali praktik perekonomian kita. Selain itu, konsep “ekonomi nusantara” merupakan cara meruntuhkan hegemoni ekonomi pertumbuhan dan membangun ulang pondasi ekonomi nasional yang sejalan dengan sejarah dan semangat konstitusi.

a. Usaha Bersama atas Asas Kekeluargaan

Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) merupakan ketentuan yang berasal dari teks asli UUD NRI 1945. Ketentuan ayat (1) menyebutkan “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.*” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi defenisi perekonomian sebagai tindakan (aturan atau cara) berekonomi.²¹⁶ Makna tersebut menjelaskan bagaimana harusnya Indonesia menentukan aturan atau cara berekonomi. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, maka cara berekonomi Indonesia haruslah “disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Namun sayangnya, pilihan berekonomi Indonesia tidak tunduk pada pedoman tersebut.

Teks asli UUD NRI 1945 memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan usaha bersama dan atas asas kekeluargaan yaitu

“...ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. **Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan**, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu

²¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perekonomian>, Diakses pada 30 Januari 2021.

prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.²¹⁷

Serupa dengan penjelasan UUD NRI 1945, Mohammad Hatta juga menyebut bahwa yang dimaksud “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” ialah koperasi. Selanjutnya, sebagaimana dikutip Frederika J.E. Agoes, Hatta menyebutkan²¹⁸

“Koperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama, yaitu gotong royong. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.”

Amandemen UUD NRI 1945 menghilangkan bagian penjelasan. Walau begitu, secara historis tentu apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) tidak dapat dikaburkan. Ketentuan tersebut harus dimaknai secara kontekstual seperti apa yang disepakati oleh para *founding parents*. Bahkan Bung Hatta pun secara rinci menjelaskan mengapa pilihan institusi ekonomi yang tepat adalah koperasi. Secara sederhana, karena koperasi merupakan model institusi ekonomi yang mengenal ruang kepemilikan komunal. Berbagi peran sekaligus berbagi keuntungan bersama. Walau dalam praktiknya saat ini, koperasi sering disalahgunakan. Ia tidak lagi dimaknai sebagai institusi usaha bersama, hanya kepentingan segelintir orang dengan memelintir makna kekeluargaan.

²¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen).

²¹⁸ Frederika J.E Agoes, *Soekarno dan Masalah Ekonomi* dalam Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988) hlm. 222-223.

Sri-Edy Swasono menyebutkan, untuk memahami apa yang dimaksud “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, maka harus dimulai dengan memaknai apa yang dimaksud dengan rakyat. Dalam sebuah bahan ajarnya, Edy Swasono menerangkan bahwa²¹⁹

“Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemoh yang biasanya melanjutkan bertanya, ‘bukankah seorang konglomerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat?’ Tentu!”

“Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat. ‘Rakyat’ adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah ‘*the common people*’, rakyat adalah ‘orang banyak.’ Pengertian rakyat berkaitan dengan ‘kepentingan publik’, yang berbeda dengan ‘kepentingan orang-seorang.’ Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut ‘*public interest*’ atau ‘*public wants*’, yang berbeda dengan ‘*private interest*’ dan ‘*private wants*’. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara ‘*individual privacy*’ dan ‘*public needs*’ (yang berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa ‘*social preference*’ berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari ‘*individual preferences*’. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat ‘publik’ itu.”

“Penjelasan di atas mengantar kita pada makna apa yang dimaksud rakyat dalam UUD NRI 1945. Rakyat merupakan orang banyak dan direpresentasikan dalam pengertian kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Secara historis, Edy Swasono menjelaskan bahwa dasar

²¹⁹ Sri-Edi Swasono, “Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat”, <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2008/12/sri-edi-swasono-asas-kekeluargaan.pdf>, diakses pada 30 Januari 2021.

dibentuknya Pasal 33 ayat (1) merupakan wujud upaya lepas dari praktik kolonial. Ketentuan ini hendak melakukan restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*).”²²⁰

Selanjutnya, dalam memaknai secara rinci apa yang dimaksud “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan,” ia menyebut.²²¹

“‘Kebersamaan’ adalah suatu ‘*mutuality*’ dan ‘asas kekeluargaan’ adalah ‘*brotherhood*’ (bukan kinship) atau ‘*broederschap*’, bahasa agamanya adalah *ukhuwah*, yang mengemban semangat kolektivitas dan solidaritas sosial. Pura-pura tidak memahami makna mulia ‘asas kekeluargaan’ terkesan untuk sekedar menunjukkan kepongahan akademis belaka. ‘Asas kekeluargaan’ adalah istilah Indonesia yang sengaja diciptakan untuk memberi arti *brotherhood*, seperti halnya ‘Persatuan Indonesia’ adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan ‘Kerakyatan’ adalah istilah Indonesia untuk demokrasi.”

“Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai ‘saudara’, ‘*sederek*’, ‘*sedulur*’, ‘*sawargi*’, ‘*kisanak*’, ‘*sanak*’, ‘*sameton*’ dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menganggap sesama *ummat* (bahkan manusia) sebagai ‘saudara’, dalam konteks *rahmatan lil alamin*. Jadi asas kekeluargaan yang *brotherhood* ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan *family system* atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

²²¹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial....”

“Mengulang yang disinggung di atas, ‘usaha bersama’ dan ‘asas kekeluargaan’ adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana ‘partisipasi’ dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan ‘emansipasi’. Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi *genuine* tanpa adanya emansipasi.

Berbagai pernyataan di atas jelas membedakan praktik kroni yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto. Praktik kroni, secara nyata hanya menguntungkan keluarga, kerabat, dan segelintir pihak yang mempunyai relasi dengannya. Praktik seperti itu tidak menguntungkan rakyat secara kolektif. Hal itu pula yang terjadi dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Rakyat sekedar di atas namakan. Secara satir, mengulang pernyataan Sri-Edy Swasono, apakah pebisnis tambang, kehutanan, dan perkebunan skala besar yang memperoleh keuntungan dari buah legislasi selama tahun 2020 adalah rakyat? Tentu. Tapi buah legislasi tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan perekonomian rakyat.

Apabila kita secara konsisten memaknai dan mempraktikkan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan,” maka ekonomi Indonesia tidak akan melahirkan pemenang dan pecundang. Ambisi mendorong rakyat menjadi pelaku ekonomi yang mengedepankan kompetisi, baik secara global, nasional, hingga lokal, bukan merupakan corak ‘kebersamaan’ dan ‘kekeluargaan.’ Sistem ini hanya akan melahirkan banyak pecundang dan itu selalu menimpa rakyat kebanyakan. Dengan sistem ekonomi korporatokrasi, rakyat tidak akan pernah dibuka ruang kepemilikannya, karena semua sektor usaha akan didominasi kuasa investasi. Kuasa ini dilandaskan pada modal uang dan bukan atas semangat usaha bersama. Parahnya, kuasa

ini pun tidak mengenal batasan “cukup”, termasuk untuk melampaui batasan ekosfer (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup).

Kami kembali mengutip pernyataan Acemoglu untuk memperkuat pendapat di atas.²²² Acemoglu merupakan seorang ekonom yang mempercayai ekonomi pertumbuhan. Namun ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu melahirkan pecundang. Dengan mengutip pendapat Simon Kuznets, ia menyebutkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan seringkali disertai dengan transformasi struktural besar-besaran. Transformasi ini acap menghancurkan hubungan tertentu yang sudah mapan dan menciptakan kompetisi yang berujung pada kelahiran pemenang dan pecundang.

Acemoglu juga menyebutkan bahwa negara harus memberi kompensasi atau insentif kepada orang-orang yang dirugikan oleh praktik kompetisi. Alasannya sederhana, agar si pecundang tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia. Tujuan negara memberi insentif dan kompensasi hanya sekadar untuk memastikan pertumbuhan dan mekanisme pasar tetap bekerja. Sama sekali bukan untuk memastikan rakyat dapat tumbuh dan sejahtera dalam usaha bersama. Karena itu, sekali lagi, kepercayaan pada kapitalisme beserta alat ukur ekonominya harus segera ditinggalkan. Dan rakyat harus menyadarkan negara bahwa konsensus perekonomian kita adalah sistem ekonomi bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan.

b. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara merupakan sinonim dari frasa “dikuasai oleh negara” dalam rumusan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Frasa ini sering disalah artikan menjadi “hak milik negara.” Akibatnya negara berlaku sewenang-wenang

²²² Daron Acemoglu, *op.cit.*, hlm. 8-9.

menerbitkan perizinan kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Aneka bentuk perizinan tersebut hadir di atas tanah atau sumber daya yang dimiliki rakyat secara turun temurun. Fakta ini menunjukkan bahwa negara abai terhadap tujuan “*social defence*” dan “*social welfare*.” Negara tidak memberi perlindungan, namun justru malah merampas kesejahteraan bangsa dan tumpah darah Indonesia. Bahkan penerbitan izin sering tidak memperhatikan aspek lain di luar ekonomi. Alhasil rakyat pun ditaruh di bawah bayang-bayang bencana ekologis.

Dalam perkembangannya, frasa hak menguasai negara akhirnya diberi pedoman pemaknaan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pemaknaan tersebut jauh lebih detail dan konkrit dibanding Penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum amandemen). Sebelum amandemen, dalam Penjelasan UUD NRI 1945 diberi deskripsi ringkas Pasal 33 ayat (2) dan (3) yaitu

“Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Apabila diperhatikan dengan seksama, penguasaan negara bertujuan untuk mencapai tiga hal yaitu (1) menghindari sentralistik penguasaan sumber daya alam terhadap orang per orang; (2) menghindari penindasan terhadap rakyat banyak; dan (3) untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Tentu ketiganya harus dimaknai secara utuh dan tidak boleh terpisah. Namun sayangnya, norma ini sekadar menjadi teks. Hal ini dapat dilihat dari fakta penguasaan ruang dan angka ketimpangan kemiskinan. Akibat dominasi segelintir orang

terhadap sumber daya alam, akhirnya rakyat kebanyakan pun dijauhkan dari kemakmuran.

Beberapa tahun pascareformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa pertimbangan putusannya memberi definisi tentang apa yang dimaksud hak menguasai negara. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan MK.

- (1) Pertimbangan MK tentang “hak menguasai negara” dalam perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. MK menyebut “hak menguasai negara” haruslah diartikan “mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat hal tersebut dalam pertimbangan berikutnya dinyatakan bukan dalam makna memiliki sesungguhnya, namun menjalankan mandat konstitusional rakyat;
- (2) Pertimbangan MK tentang frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dalam perkara Nomor 3/PUU/2010. Dalam putusan ini, MK memberi pertimbangan terdapat empat tolak ukur, adapun tolak ukur tersebut yaitu, (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat

sumber daya alam, serta; (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Produk hukum atau undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan tolak ukur ini, maka sangatlah wajar apabila publik menyatakannya sebagai produk hukum inkonstitusional;

Setelah beberapa putusan MK di atas, kondisi tidak jauh berbeda. Batasan makna yang diberi MK diacuhkan oleh pemerintah dan parlemen. Fakta ketimpangan penguasaan ruang dan kemiskinan tidak berubah signifikan. Bahkan pertimbangan di atas diabaikan dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Contohnya dapat dilihat dalam pengesahan (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tafsir konstitusional hak menguasai negara sepenuhnya diabaikan. Bahkan kedua UU tersebut justru membuka lebar ruang privatisasi dan ruang ‘penindasan’ rakyat.

c. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan terminologi yang sejak awal tercantum dalam teks asli UUD NRI 1945. Terminologi ini dimuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI. “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!” Walau tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Namun pesannya sangat tegas, kemakmuran bagi semua orang dan/atau bagi rakyat – dalam pengertian Sri-Edy Swasono.

Selanjutnya, pada amandemen VI UUD NRI 1945, disisipkan satu ayat pada Pasal 33. Ketentuan tersebut tidak memberi definisi, namun ia memberi batasan prinsip pelaksanaan

demokrasi ekonomi. Ia harus dilaksanakan dengan tunduk pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara teori, demokrasi ekonomi mempunyai sisi erat dengan sosialisme. Bahkan secara historis, slogan-slogan Sosialisme Indonesia secara jelas disebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang masih eksis adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sosialisme merupakan konsensus sekaligus jalan yang dipilih dalam pembentukan Indonesia. Sosialisme dijadikan dasar konsensus untuk menolak keberadaan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Dalam buku *Economic Democracy the Politics of Feasible Socialism*, Robert Archer menjelaskan bahwa sesungguhnya demokrasi ekonomi merupakan salah satu varian dari sosialisme.²²³ Keduanya memiliki tujuan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan tawaran model kapitalisme. Sementara perbedaannya, demokrasi ekonomi secara politik menolak totalitarian a la sosialisme soviet. Dalam model soviet, demokrasi tidak sekadar sebagai bagian dari politik. Ia bahkan menjelma menjadi pengikat dengan apa yang disebut *social democracy*.

Archer juga memberikan gambaran bahwa yang dimaksud demokrasi ekonomi dapat dilihat dalam dua proposisi. *Pertama*, *principle of equal liberty* (prinsip kebebasan yang sama). Proposisi ini merupakan 'moralitas konstitutif' sosialisme, dimana setiap individu mempunyai batasan kebebasan maksimal yang sama. *Kedua*, proposisi ini menyebut manusia sebagai individu sosial. Dua prinsip ini merupakan satu kesatuan dalam konteks demokrasi ekonomi. Kebebasan individu dibatasi dalam

²²³ Robert Archer, *Economic Democracy The Politics of Feasible Socialism*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 5-7.

lingkupnya sebagai makhluk sosial. Kedua prinsip ini merupakan satu kesatuan. Sehingga semua orang yang tunduk pada otoritas asosiasi tertentu mempunyai hak dalam pengambilan keputusan asosiasinya. Dengan kata lain, tidak ada relasi tuan dan majikan.

Dalam demokrasi ekonomi, asosiasi ekonomi pun menjadi milik bersama. Proporsi keuntungannya ditentukan secara bebas antara buruh dan pemilik saham. Individu dan entitas lain yang terkena dampak harus melakukan kontrol tidak langsung. Contohnya, dalam proses produksi, buruh mempunyai kebebasan yang sama dengan pemilik saham dalam mengambil keputusan. Mulai dari proses produksi hingga pembagian keuntungan. Sementara orang yang tidak terikat dalam asosiasi, seperti konsumen, mengambil peran melalui pasar. Sedangkan negara berperan melalui peraturannya. Dengan demikian, konsumen dan pemerintah (negara) dapat menjalankan fungsi kontrolnya.²²⁴

Lalu, apa yang dimaksud demokrasi ekonomi dalam rumusan konstitusi kita? Sri-Edy Swasono menyebut inti dari demokrasi ekonomi harus berangkat dari apa yang dimaksud dengan demokrasi.²²⁵ Inti dari demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Dalam demokrasi ekonomi, berlaku tuntutan partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Bagi negara bekas jajahan seperti Indonesia, maka diperlukan pendekatan partisipatoris dan sekaligus emansipatoris. Namun emansipasi di sini jangan dianggap sebagai sesuatu yang *taken-for-granted*. Emansipasi tidak bisa otomatis berlaku sebagaimana di Barat. Pasalnya di Indonesia masih berlaku ekonomi "tuan-hamba" atau "majikan-kuli" yang tidak emansipatoris. Sementara menurut Soekarno, demokrasi ekonomi dalam konteks

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 9-11 dan 43-45.

²²⁵ Sri-Edi Swasono, "Mewaspada Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi" disampaikan pada Konferensi FISIP UI "Warisan Otoritarianisme dan Tirani Modal" pada 5 Agustus 2008, hlm. 5-6.

Indonesia adalah “kerakyatan ekonomi atau kesama-rasa dan kesamarataan ekonomi.”²²⁶

Sri-Edy Swasono juga menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 (teks asli), sesungguhnya telah tertuang nyata dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Ia dimaknai sebagai usaha bersama dalam suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan.²²⁷ Istilah ini semakin menguat ketika ditarik dalam batang tubuh konstitusi pascaamandemen dalam penambahan Pasal 33 ayat (4). Namun sayangnya, frasa demokrasi ekonomi ini diikuti dengan prinsip efisiensi berkeadilan. Baginya frasa ini merupakan tipuan keadilan.

Kata efisiensi merupakan kata terselubung yang dimasukkan untuk mendukung pandangan neoliberalisme ekonomi. Kata Efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximun gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Singkatnya, saat pintu pasar bebas terbuka, maka daulat pasar pun menggusur daulat rakyat. Pasar bebas menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan. Padahal tercapainya kepuasan maksimal orang-seorang/individu dan laba maksimal badan usaha privat tidak harus dikejar, apalagi jika mengorbankan kepentingan sosial.²²⁸

Pandangan Sri-Edy Swasono terkait penolakan penambahan frasa efisiensi berkeadilan sangat rasional. Namun bagi kami, pemaknaan efisiensi berkeadilan apabila bertentangan dengan konsensus awal bangsa dan ketentuan lain UUD NRI 1945 harus dikesampingkan. Walau pada faktanya, negara lebih memilih mengoperasikan frasa “efisiensi berkeadilan” dibanding ide pokok Pasal 33 UUD NRI 1945. Upaya pelemahan makna demokrasi ekonomi sebenarnya telah dilakukan berulang.

²²⁶ Frederika J.E Agoes, *op.cit.*, hlm. 218-219.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 14-15.

Contohnya, seperti norma Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pasal 12 TAP MPR ini masih memilih cara kapitalisme. Parahnya, ketentuan ini menaruh kepentingan liberalisasi ekonomi dengan mengatasnamakan rakyat. Bunyinya, “Dalam upaya mempercepat pemulihan dan **pertumbuhan ekonomi** nasional diperlukan **penanaman modal asing** yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.”

Tentu saja ketentuan Pasal 12 TAP MPR XVI/1998 harus dikesampingkan. Ketentuan ini bertentangan dengan substansi utama demokrasi ekonomi dan ketentuan lain dalam TAP MPR ini. Pasal 3 TAP MPR menjadi norma yang akan membatasi atau menegasikan ketentuan Pasal 12. Norma tersebut menentukan “Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.”

Kelahiran UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba jelas bertentangan dengan norma di atas. Alih-alih meniadakan ketimpangan, kedua UU tersebut malah berpotensi memperbesar angka ketimpangan. Parahnya, UU Cipta Kerja justru menjadikan (1) TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan (2) TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai konsideran mengingat. Artinya, dua TAP MPR ini dijadikan sebagai dasar legal penerbitan undang-undang yang sangat kapitalistik. Sebuah kebohongan besar apabila DPR dan pemerintah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan buah legislasi yang didasarkan semangat demokrasi ekonomi, pembaharuan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil.

Uraian dasar historis dan konstitusional yang tegas merupakan modal penting dalam perjuangan meruntuhkan hegemoni kapitalisme. Bagi kami, memaknai Pasal 33 ayat (4) secara utuh dalam bingkai Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan jawabannya. Demokrasi ekonomi diturunkan dalam prinsip partisipasi dan emansipasi. Menaruh kesetaraan kebebasan individu, pengambilan kebijakan/keputusan, dan kontrol secara baik. Lalu model ekonomi seperti apa solusinya? Pasal 33 ayat (4) dengan frasa lengkap *prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* merupakan praktik ekonomi komunal dalam model praktik ekonomi ekologis. Praktik ekonomi yang sadar akan batasan ekosfer dan menaruh nilai dan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu lingkaran utuh.

d. Narasi Tanding “Ekonomi Nusantara”: Berdimensi Historis, Konstitusional, dan Selaras dengan Perjuangan Global

Wacana lain “ekonomi nusantara” memang disiapkan WALHI untuk melawan hegemoni ekonomi saat ini. Konsep ini berangkat dari sebuah ketidakpercayaan terhadap sistem kapitalisme yang digerakkan oleh pengetahuan yang bernama *economic growth*. Konsep “ekonomi nusantara” tidak didesain untuk hanya sekedar menjadi pengetahuan alternatif. Satu pengetahuan yang hanya berupaya menemukan jalan tengah terhadap otoritas pengetahuan dominan saat ini. Konsep “ekonomi nusantara” tidak mengambil jalan kompromis, sehingga kami sebut ini sebagai wacana lain. Karena itu berbeda dari tawaran wacana yang sekedar menjadi alternatif, namun masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting kemajuan. Wacana ini tidak sekedar mengakomodir kepentingan sosial dan lingkungan sebagai pelengkap

kepentingan ekonomi, namun menaruh kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sejajar.

Temuan dari lokasi penelitian juga memperlihatkan empat indikator “ekonomi nusantara” memenuhi kriteria konstitusional yang dirumuskan Pasal 33 UUD NRI 1945. Terdapat usaha bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan. Praktik demokrasi tidak hanya dalam skema politik, tapi masuk dalam skema ekonomi. Demokrasi ekonomi diperlihatkan dari adanya kepemilikan komunal dan partisipasi. Transformasi ekonomi tidak mengubah corak kekeluargaan dan partisipasi tersebut. Praktik ekonominya pun dapat dimasukkan dalam kelompok praktik ekonomi ekologis. Dalam arti, tidak merusak dan memperhatikan batasan ekosfer. Ikatan konstitusional ini sekaligus menjadi pengikat historis.

Selain mempunyai relasi konstitusional dan historis, “ekonomi nusantara” pun mempunyai relasi dengan konsep, gerakan, teori, bahkan pendekatan filsafat yang eksis secara global. Konsep ini memiliki kesamaan dengan beragam pandangan yang menolak pemisahan manusia dengan entitas alam lainnya (biotik dan abiotik). Termasuk kesamaan pandangan untuk menolak kapitalisme beserta cara kerja *economic growth*-nya. Secara filosofis, konsep “ekonomi nusantara” dapat dikategorikan sebagai perjuangan ekosentrisme. Dalam bacaan *ecophilosophy*, ekosentrisme memosisikan manusia dengan alam (biotik dan abiotik) setara. Menurut Rob White, “*ecocentrism refuses to place humanity either above or below the rest of nature.*”²²⁹

Dalam posisi setara semacam itu, manusia tetap diberikan kapasitas untuk memanfaatkan alam. Hanya saja dengan metode yang baik, tepat, dan senantiasa memperhatikan batas ekosfer planet bumi. Karena itu, manusia sangat bertanggungjawab atas pilihan moda produksi yang dijalankan. Agar dapat memastikan tanggung jawab tersebut, maka proses

²²⁹ Rob White, *op.cit.*, hlm. 11-12.

legislasi dan pengambilan kebijakan harus disusun dengan memperhatikan posisi manusia sebagai bagian integral dari alam. Sehingga proses legislasi dan pengambilan kebijakan harus mengesampingkan tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan.

Model ekonomi pertumbuhan telah berulang kali gagal. Namun pengalaman ini tidak pernah menjadi bahan pembelajaran. Padahal seharusnya itu sudah cukup untuk jadi alasan meninggalkan model pembangunan *growth*. Dan mengubah haluannya untuk kembali ke hakikat ekonomi kerakyatan, yang ramah pada aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, tawaran konsep “ekonomi nusantara” layak dipertimbangkan.

Konsep “ekonomi nusantara” mempunyai ikatan konstitusional, historis, dan relasi dengan pengetahuan global. Meruntuhkan sistem kapitalisme dan menyusun ulang moda produksi yang cocok secara konstitusional merupakan satu-satunya solusi menyelamatkan Indonesia dari krisis. Dan hanya dengan cara ini perkara ketimpangan dapat selesai. Oleh karena itu, pada bagian akhir penelitian ini, kami akan coba menyajikan desain dan konsep pengorganisasian yang kami tawarkan.

3. Aktivasi Ruang Pengorganisasian

Bagian sebelumnya telah banyak menjelaskan contoh praksis “ekonomi nusantara” sebagai praktik *degrowth* a la Indonesia. Praksis tersebut juga bagian dari bentuk gerakan anti kapitalisme. Praksis ini sudah ada, namun terkesan tersebar di mana-mana dan tidak terhubung. Dalam arti, belum sepenuhnya terkonsolidasi. Alhasil banyak praksis yang kadang tidak dapat dibedakan dengan inisiatif ekonomi lokal biasa. Dalam gerakan *degrowth* sendiri, ada suatu keresahan tentang bagaimana gerakan sosial-ekologis ini mampu berkejaran

dengan perubahan iklim atau *climate emergency and feedback loop*. Tentu saja perubahan iklim ini merupakan eksekusi dari praktik kapitalisme yang mensyaratkan kerusakan lingkungan.

Umat manusia saat ini mulai merasakan banyak sekali bentuk bencana hidrometeorologis. Bencana ini kuat kaitannya dengan keadaan bumi yang makin rusak akibat perilaku segelintir manusia. Seorang pemuka agama Budha dari Tibet, Dalai Lama, bahkan menyatakan bahwa ia terinspirasi dari seorang aktivis muda, Greta Thunberg. Greta aktif berdemonstrasi dan lantang berteriak di depan para politisi tentang perubahan iklim. Pada 2019, dalam agenda *UN Climate Summit* di New York, Greta menyatakan

“Kita telah memulai masa kepunahan massal, dan kalian membicarakan uang dan dongeng pertumbuhan ekonomi yang abadi. Bagaimana kalian dapat melanjutkan untuk mengabaikan hal ini dan datang ke sini mengatakan telah melakukan cukup tindakan ketika politik dan solusi yang dibutuhkan sama sekali belum ada?”

Tidak lama setelah pernyataan yang menghebohkan itu, majalah *Der Spiegel* di Jerman menulis ungkapan retorik; apakah Greta hanya satu-satunya yang paling peka di dunia yang gila ini dan suatu hari nanti pidatonya akan menjadi pesan berpengaruh dari abad 21?²³⁰ Pada awal 2019, Greta juga mengungkapkan hal senada dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Greta meminta tindakan segera, karena bumi hari ini seperti sebuah rumah yang sedang terbakar.

Pada titik ini, model tawaran *economic growth* dinilai tidak masuk akal untuk berkejaran dengan waktu *feedback loop* dari perubahan iklim. Dalam satu artikelnya, Andrea Grainger menguraikan bahwa belum tentu skenario *degrowth* dibutuhkan selamanya. Akan tetapi, tanpa melakukan perencanaan apapun, hanya dengan pertumbuhan ekonomi saja dan sekadar

²³⁰ Dalai Lama & Franz Alt, *Our Only Home: A Climate Appeal to the World*, (New York: Hanover Square Press, 2020) hlm. 16-18.

memenuhi *absolute decoupling* (seperti pada skema sosialisme dan SDGs misalnya), maka dunia akan tetap mengalami kehancuran dalam 30 tahun mendatang.

Masa tanpa *growth* atau *degrowth*, bukan akhir dari sejarah. Namun itu justru satu hal yang tidak terhindarkan untuk segera dilakukan. Mengingat urgensi waktu untuk menyelamatkan peradaban bagi generasi mendatang.²³¹ Demikian pula dalam konteks Indonesia. Serupa *degrowth*, “ekonomi nusantara” pun harus segera memperluas gerakannya. Palsunya, dari data yang dihimpun WALHI, tren peningkatan bencana hidrometeorologis juga makin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini kuat kaitannya dengan operasi logika kapitalisme yang membuat kerusakan lingkungan di Indonesia menjadi makin parah.²³² Pada bagian ini, kami akan lebih banyak membahas tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh “ekonomi nusantara”. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi model inisiatif yang sejalan dengan *degrowth*. Tujuannya agar dapat mewujudkan dalam gerakan yang lebih luas dan dapat menjadi hegemoni tanding pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Secara ringkas, bagian ini akan menyajikan beberapa tawaran, usulan, strategi, dan model pengorganisasian “ekonomi nusantara.” Tentu saja, tujuannya agar “ekonomi nusantara” tidak berhenti hanya sekadar menjadi teks. Lebih jauh, “ekonomi nusantara” harus berkembang menjadi diskursus yang otoritatif. Selain itu, “ekonomi nusantara” juga harus mempunyai kuasa untuk mengaktivasi ruang kehidupan lain yang adil dan lestari. Bagian pengorganisasian ini akan

²³¹ Lihat misalnya: Andrea Grainger, “In defence of degrowth”, <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/defence-degrowth/> (Diakses pada 25 Januari 2021).

²³² Lihat: Manda Firmansyah, “WALHI: Bencana hidrometeorologi di era Presiden Jokowi naik”, dalam <https://www.alinea.id/nasional/walhi-bencana-hidrometeorologi-di-era-presiden-jokowi-naik-b2cwB906z> (Diakses pada 5 Februari 2021).

kami bagi menjadi tiga ruang. Masing-masing ruang pengorganisasian bertujuan untuk memperbesar gerakan dan melahirkan aliansi. Dari situ pula diharapkan tercipta satu kekuatan baru. Satu model kekuatan yang ditopang oleh semangat saling bahu membahu untuk mewujudkan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan alam. Satu kekuatan baru untuk mewujudkan kemakmuran bersama yang tidak hanya dimiliki generasi saat ini, tapi juga generasi berikutnya.

a. Ruang Publik dan Komunitas

Secara sederhana, pengorganisasian di ruang publik dan komunitas bertujuan untuk melahirkan kesadaran politik baru dan sekaligus meruntuhkan *common sense* yang telah usang. Termasuk, meruntuhkan kesadaran *nrimo* walau dalam keadaan tertindas karena hidup dalam cara keliru kapitalisme. Lalu apa yang harus dilakukan guna meruntuhkan *common sense* dan melahirkan kesadaran baru tersebut? Dalam hal ini, kami merumuskan beberapa strategi pengorganisasian. Kami coba belajar, mereplikasi, dan memodifikasi dari pengalaman yang ada. Bahkan mungkin saja hingga menyusun satu cara kerja baru. Beberapa uraian tersebut dimuat dalam sajian di bawah ini.

1. Belajar dari Zapatista: Politik Bahasa dan Transmisi Narasi Tanding untuk Mengubah *Common Sense*

Kami kembali meminjam pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni tanding. Maksud hegemoni tanding ditandai jika masyarakat menerima narasi lain atau alternatif dari narasi dominan tanpa mempertanyakan benar atau salahnya. Kondisi ini secara politik disebut *common sense*. Dalam arti, suatu kelompok yang memperjuangkan gagasan tertentu berhasil membuat gagasan tersebut diterima oleh masyarakat tanpa pertanyaan. Dan Gramsci yakin masyarakat sipil yang diharapkan dapat menjadi motor perubahan semacam ini

adalah para intelektual organik. Mereka tidak hanya memiliki kecerdasan, namun juga daya kritis untuk memperjuangkan narasi dan wacana tanding. Termasuk berjuang melakukan proses penyadaran (*consent*) untuk melakukan *war on position* terhadap hegemoni narasi dominan. Bisa melalui partai politik atau organisasi sosial yang ada di masyarakat.

Dalam satu publikasi ilmiah, Wrigley menunjukkan adanya tumpang tindih dari berbagai inisiatif yang sejalan dengan *degrowth*. Misalnya *commoning*, keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan gerakan transformasi lainnya di masyarakat. Berbagai inisiatif ini dapat menjadi basis aliansi untuk membentuk koalisi yang lebih besar.²³³ Dengan demikian, inisiatif “ekonomi nusantara” pun perlu untuk berjejaring dan beraliansi dengan berbagai gerakan anti kapitalisme lainnya. Walaupun, tentu saja, akan ada berbagai friksi dalam aliansi tersebut. Namun hal itu justru perlu dilihat sebagai peluang memperkaya argumen pendukung *degrowth* di tingkat publik. Dengan begitu maka gerakan seperti “ekonomi nusantara” pun menjadi tidak terlalu marjinal dan dapat mulai diperhitungkan.

Tatanan sosial yang diperjuangkan “ekonomi nusantara” pun sebaiknya perlu mempertimbangkan banyak hal. Dalam arti, meski sama-sama melawan hegemoni kapitalisme, bukan berarti harus meniru model tatanan sosialis yang memiliki riwayat represif dan totaliter di beberapa kasus. Karena itu pula, peringatan Ralph Miliband tentang kepemilikan publik perlu menjadi perhatian. Sebagai sebuah proyek sosialisme, gerakan hegemoni tanding perlu memastikan kepemilikan publik terwujud, sekalipun itu dalam sistem ekonomi campuran. Dengan kata lain, kepemilikan publik harus lebih mendominasi daripada kepemilikan pribadi. Dan kepemilikan publik tersebut juga bukan dalam arti kepemilikan negara.

²³³ Lihat: Kylie Wrigley, “Degrowth Dilemmas: Analysing the discourse of movement advocates in the debate on growth (*Master-Thesis*)”, Development, Environment, and Cultural Change, Centre for Development and the Environment Universitetet I OSLO, hlm 99.

Di samping itu, basis nilai demokrasi yang perlu diperjuangkan oleh pengusung hegemoni tanding adalah kepemilikan dan kekuasaan tidak terpusat pada segelintir orang. Basis nilai ini didasari pada premis bahwa “orang biasa” mampu mengatur diri mereka sendiri. Bahkan tidak hanya itu, mereka pun dapat memastikan kelangsungan hidup ko-operasi, manusiawi, dan tatanan sosial rasional. Dengan begitu, demokrasi dan hak-hak sipil juga perlu diperjuangkan secara konsisten dalam mengupayakan gerakan kontra hegemoni kapitalisme. Khususnya untuk menunjukkan bahwa ada demokrasi “lain” di luar model demokrasi yang diusung kelompok borjuis (elit ekonomi dan politik).²³⁴

Perjuangan kontra hegemoni kapitalisme yang dapat menjadi acuan bagi gerakan “ekonomi nusantara” adalah gerakan restrukturisasi sistem ekonomi-politik neoliberalisme di Meksiko. Gerakan ini dimobilisasi oleh kelompok petani Suku Maya Indian Zapatista (selanjutnya disebut EZLN atau Zapatista) pada tahun 1994 hingga 2006. Perjuangan EZLN dalam melawan hegemoni kapitalisme cukup berhasil dilakukan. Mereka menerapkan cara-cara gerakan sosial politik baru, seperti menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan jejaring lokal, nasional, dan global. Alhasil mereka pun dapat menghasilkan *war in position* yang kuat. Mereka melawan sistem ekonomi-politik neoliberalisme yang berangkat dari pertalian kekuatan ekonomi dan politik di tingkat global.

Perjuangan EZLN mendapat momentum ketika akan diberlakukannya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) tahun 1994. Kebijakan ini akan semakin menghancurkan ekonomi kelompok petani miskin, termasuk kelompok Zapatista yang membentuk EZLN di Chiapas Meksiko. Walaupun mereka adalah kelompok sipil bersenjata, tetapi strategi perlawanan mereka sangat berhati-hati. Mereka

²³⁴ Lihat misalnya: Ralph Miliband, “Counter-Hegemonic Struggles”, <https://jacobinmag.com/2018/06/ralph-miliband-socialism-legitimation-hegemony> (Diakses 25 Januari 2021).

berusaha menghindari jatuhnya korban sipil. Apalagi tujuan mereka memang menggalang dukungan dari petani dan kelompok adat yang marjinal dan sekaligus memaksa pemerintah untuk mencabut kebijakan yang memiskinkan.

Bruhn menggambarkan analisis Gramsci pada gerakan Zapatista. Menurutnya, Zapatista mempraktekkan apa yang diintoduser Gramsci tentang sumber utama dari *war in position*: penggunaan secara kreatif dari bahasa. Bahasa menjadi alat utama hegemoni untuk dapat menguatkan nilai dalam *common sense*. Namun melalui bahasa pula transmisi narasi tanding terhadapnya dapat bekerja. Zapatista menggunakan kuasa kata daripada senjata karena ada dua pertimbangan. *Pertama*, mereka tidak mau dimata-matai oleh intelijen pemerintah Meksiko karena terhubung dengan bank. Alhasil mereka pun sangat bergantung pada sumber dana di masyarakat basis EZLN di Chiapas. Tentu saja sumber dana ini terbatas. Meski demikian, mereka tidak mau melakukan perampokan dan penculikan untuk mendapatkan dana revolusi.

Pertimbangan *kedua*, menurut Street (1996), mereka mengidentikkan diri sebagai subyek sosial. Dalam Bahasa Meksiko disebut *palabra verdadera* yang berarti “kata yang benar”. Hal ini sekaligus menjadi praktik demokrasi di tubuh Zapatista. Mereka menggunakan kata untuk kebenaran dan mempertanyakan akuntabilitas dari yang berkuasa. *Palabra verdadera* adalah semacam identitas untuk menyatukan dan menggantikan identitas kelas. Tanpa ini, keberadaan kelompok adat tidak diakui secara politik.²³⁵

Menurut Bruhn, kuasa kata juga digunakan EZLN untuk mobilisasi sumber daya dan menggerakkan revolusi. Selain itu, kuasa kata digunakan pula untuk mengembangkan mitos. Mereka mampu menghubungkan seorang tokoh petani pejuang

²³⁵ Kathleen Bruhn, dalam Antonio Gramsci and the Palabra Verdadera “The Political Discourse of Mexico’s Guerrilla Forces”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* Vol. 41, No. 2, hlm 33.

yang sangat terkenal di Meksiko, Emiliano Zapata dengan Yesus. Lalu menghubungkan Zapata dengan Tuhan dalam kaca mata orang Suku Maya yang akan membagikan tanah bagi petani.

Dalam beberapa dokumen Zapatista, kata seperti *walks*, *fight*, dan *soldier* digunakan sebagai alat menggerakkan revolusi di internal EZLN dan para pendukungnya. Fungsi kata-kata itu adalah untuk membentuk satu narasi kebenaran alternatif yang dapat mempersatukan. Pasalnya, menurut Adamson (1980), klaim kebenaran semacam itu penting untuk mempersoalkan realitas kebenaran yang diyakini oleh pemerintah. Dalam bahasa Gramsci, hal ini disebut dengan strategi perang ideologi. Aspek Gramscian lain dari Zapatista adalah terbentuknya blok historis dari *war in position*. Prosesnya dimulai dengan melancarkan kritik terhadap peradaban kapitalisme. Kritik menjadi semacam kesadaran utuh proletariat dan menunjukkan budaya.

Fungsi kedua dari perjuangan klaim kebenaran adalah untuk mendapatkan dukungan dari aliansi masyarakat sipil. Menurut Gramsci, masyarakat sipil adalah seluruh kompleks dari organisasi sosial, politik, budaya, yang bukan menjadi bagian dari pemerintah (Lawner 1973). Sementara kelas berkuasa sudah menjadikan pemerintah sebagai kekuatan pemaksa. Negara dan/atau pemerintah mereproduksi nilai dominan sebagai organisasi privat sembari membentuk konsensus. Karena itu, secara budaya dan kekuasaan, konfrontasi masyarakat sipil terhadap konsensus (negara) merupakan bentuk *war in position*. Sebuah strategi untuk melakukan penetrasi informal.²³⁶

Penetrasi informal, menurut Bhrun, yang dilakukan masyarakat sipil bukan semata retorika belaka. Misalnya EZLN menggunakan betul strategi ini dalam keseluruhan tindakan revolusioner. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

dialog dan konferensi yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Meksiko dan dari luar Meksiko. Bahkan EZLN juga menginisiasi referendum untuk memperlihatkan bahwa ini bukan hanya semata permintaan EZLN, tetapi juga orang Meksiko di luar Chiapas. Sangat berbeda dengan narasi yang dikampanyekan pemerintah bahwa ini semata tuntutan kepentingan EZLN. Menariknya, EZLN justru mendorong dialog langsung dengan pemerintah dan/atau wakil kongres. Mereka tidak mendorong gerakan yang hanya sekedar menandatangani perjanjian dengan pemerintah.

Metode EZLN juga menunjukkan bahwa koalisi pro-Zapatista lebih banyak menghabiskan waktu dan uang daripada bentuk perlawanan menggunakan senjata. Sebenarnya EZLN bisa saja menggunakan bom. Akan tetapi, karena konsituennya adalah masyarakat sipil, mereka diingatkan bahwa Chiapas adalah pusat listrik nasional di Meksiko. Di samping itu, mereka pun tidak ingin kehilangan pendukung pasifisnya, Gereja Katolik. Karena, tentu saja, Gereja Katolik tidak akan merestui tindakan militeristik seperti penggunaan bom. Karena itu, EZLN berbeda dengan kelompok sipil bersenjata lainnya di Meksiko. Meskipun mereka sama-sama memiliki misi anti kapitalisme dan menentang pemerintah. Kelompok sipil bersenjata lainnya acap mengangkat senjata dan menyerang basis militer dengan tujuan untuk menghancurkan negara.²³⁷

Bhrun juga menjelaskan, tidak hanya (konsep) kuasa kata saja yang penting, namun juga terkait kemasannya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari Zapatista. Jika dibandingkan dengan kelompok penentang NAFTA lainnya seperti EPR, ada perbedaan prioritas konsep yang diusung. EZLN lebih banyak menggunakan konsep *mainstream* seperti *peace*, *justice*, dan *liberty*. Sementara EPR lebih banyak menggunakan kata

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

kapitalisme, oligarki, dan kedaulatan. EZLN juga lebih banyak menggunakan kata dialog daripada negosiasi. Maksud *civil society* yang diusung EZLN pun tidak berkaitan dengan partai politik. EZLN juga tidak menggunakan narasi-narasi khas Marxian seperti orang hilang atau tahanan politik. Tujuannya agar tidak ditautkan dengan gerakan politik gerilyawan dari tahun 1970an. Pasalnya, gerilyawan ini sudah sangat mendapat prioritas pengawasan intelijen negara.

EZLN juga tidak banyak menyebutkan dan/atau mengangkat tema pertaliannya dengan Amerika. Mereka sangat mempertimbangkan citra intervensi Amerika bagi aliansi di Meksiko dan menghindari konflik dengan pendukung Zapatista di Amerika. Akhirnya mereka lebih memilih menggunakan tema-tema umum seperti keadilan, martabat, dan perdamaian. Meski demikian, demokrasi (selain partisipasi, hak-hak asasi manusia, pemilu, neoliberalisme, dan petani) tetap menjadi tema sentral EZLN dan EPR. Karena tema tersebut dapat menjadi pengikat untuk kerangka gerakan politik kolektif.

Artikulasi aneka konsep progresif, seperti yang diingatkan Laclau & Moufee, dapat berbeda di masing-masing tempat. Dan itu sangat tergantung pada karakter dari gerakannya. Bahkan tergantung pula dari dimensi simbolik gerakan yang hendak ditunjukkan. Seperti dari nama, kegiatan, dan citra yang dibentuk untuk menyampaikan pesan. Zapata disimbolkan oleh Zapatista dalam tiga hal yaitu kebebasan, keadilan, dan tanah — yang kemudian digantikan oleh demokrasi.

Gerakan Zapatista juga melakukan *mediating figure* Zapata. Mereka membentuk citra baru atas perjuangan Zapata yang telah memenangkan kekuatan petani. Karena pada saat yang sama, Presiden Meksiko juga menggunakan simbol Zapata untuk mendukung kebijakan privatisasi *ejidos* (tanah ulayat dalam kampanye NAFTA). Dengan demikian, figur Zapata Gerakan Zapatista memang digunakan untuk melawan penggunaan simbol Zapata oleh pemerintah. Zapata sendiri

memang sangat populer, termasuk di kalangan sebagian besar kaum terpelajar Meksiko. Sosok Zapata bahkan lebih populer dibandingkan figur politik lain. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Zapatista untuk membentuk blok kultural historis dalam gerakan hegemoni tanding.²³⁸

Peran *Subcomandante* Marcos sebagai intelektual organik juga dijelaskan oleh Bhrun. Menurutnya, Marcos juga mengakui bahwa EZLN menggabungkan banyak tradisi perjuangan. Seperti melalui kultural dan produksi bahasa (simbol) untuk memengaruhi masyarakat dari berbagai strata. Praktik EZLN diandaikan seperti mengetuk pintu dan saat pintu terbuka mereka masuk dengan bahasa politik. Hal ini sangat berbeda dengan kelompok gerilyawan EPR yang sering menggunakan tokoh politik. Biasanya tokoh politik tersebut dicitrakan sebagai seorang tahanan politik atau orang yang dihilangkan rejim. Sementara EZLN justru acap menggunakan tokoh politik kontemporer dan/atau orang-orang populer. Tidak heran, atlet sepak bola asal Argentina, Diego Maradona, sering muncul dalam *Communique* atau pernyataan/pengumuman dari EZLN. *Communique* ini ditulis dalam banyak bahasa seperti Meksiko, Latin, bahasa lokal, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain-lain. Menyesuaikan dengan sasaran kaum intelektual dan aliansi lokal/Internasional mana yang hendak disasar.

Sebenarnya Marcos adalah dosen komunikasi. Ia dengan jeli merasa bahwa diskursus Marxian dalam EZLN justru akan menyingkirkan dukungan luas yang dibutuhkan. Pasalnya, hal itu dapat membingungkan target *audience* mereka karena berkuat pada upaya mengubah kekuatan ekonomi-politik besar. Saat Marcos bertemu dengan Zapatista, ia merasa penting untuk menyampaikan situasi eksploitasi yang dialami Zapatista. Namun tidak dengan cara lampau seperti melalui narasi relasi borjuis-proletariat. Ia mengubah penyampaiannya

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

menjadi gagasan tentang demokrasi kolektif komunitas dan pandangan dunia dari target *audience*-nya.

Setelah perang 01 Januari 1994, fungsi Marcos di EZLN adalah menjadi seorang translator. Marcos bertugas menerjemahkan ide-ide dari kelompok adat kepada orang Meksiko yang berbahasa Spanyol. Persis seperti pesan bendera EZLN bahwa ini adalah perlawanan adat dan sekaligus perlawanan urban. Dan Marcos menggunakan betul strategi Gramscian. Dalam arti, mengubah *common sense* ideologi dominan (neoliberalisme) menjadi ekspresi kelompok *subaltern* yang tereksplorasi seperti Zapatista. Hal itu dilakukan dengan bahasa politik standar, untuk menciptakan makna yang kontekstual, lalu menjadi sebuah wacana tanding.²³⁹

Bruhn juga menyebutkan bahwa gaya retorika Zapatista cenderung lebih sastra dan lebih naratif. Salah satu inovasi budaya dari gerakan ini adalah pilihan gaya bertutur dalam *Communique*. Kampanye mereka sangat rendah hati dan berpihak kepada yang paling tertinggal dalam proses pembangunan. Setidaknya terdapat empat tema wacana yang digunakan Zapatista: (1) keinginan otonomi dan menolak pihak yang menghambat otonomi ini; (2) *to rule obeying* atau akuntabilitas mereka yang dipilih rakyat; (3) martabat; dan (4) politik identitas.

Beberapa orang berpendapat bahwa keempat tema Zapatista bukan wacana yang kuat. Meski demikian, selain keempat tema tersebut, sebenarnya EZLN dan Marcos telah menemukan tema penting lainnya. Bahkan tema-tema itu sudah hadir di tengah masyarakat sipil Meksiko dan masyarakat di luar negeri. Misalnya tema kerendahan hati sebagai senjata. Artinya solidaritas kepada semua yang melawan kapitalisme neoliberal atau ekonomi global. Wacana ini diterima oleh warga sipil di Meksiko. Dan itu ditunjukkan saat mereka juga menolak NAFTA. Sejak itu EZLN dan Marcos menjadi figur dan gerakan

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

yang paling didukung oleh masyarakat di Meksiko. Jauh mengalahkan dukungan terhadap tentara, gereja, pemerintah, atau pihak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat pada Agustus 1998 di Meksiko.²⁴⁰

Pada akhirnya NAFTA tetap berlaku di Meksiko. Usulan perjanjian San Andres tentang kepentingan tanah adat, hak-hak petani, dan pemanfaatan sumber daya alam juga tidak diakomodir oleh kongres parlemen di Meksiko. Namun Zapatista mendapatkan otonomi sementara di Chiapas. Mereka mengubah otoritarianisme pemerintahan di Meksiko (yang berkuasa 71 tahun) ke pemerintahan partai oposisi. Walaupun mereka masih menggunakan sistem ekonomi-politik neoliberalisme.²⁴¹

Keberhasilan Zapatista selanjutnya terjadi sejak tahun 2006. Mereka berhasil menggaungkan *other campaign* (*La otra campana*) atau kampanye tanding lainnya. Mereka mengubah arah, tidak lagi hanya berjuang untuk menumbangkan pertumbuhan ekonomi. Mereka justru fokus pada pembentukan aliansi “dari bawah dan untuk kiri”. Aliansi ini coba menggabungkan seluruh kelas termarjinalkan di Meksiko seperti petani, nelayan, pekerja, mahasiswa, serikat buruh, korban bencana alam, aktivis anti pembangunan, lingkungan, perempuan, dan gerakan pro demokrasi lainnya. Mereka bersatu untuk melanjutkan perlawanan terhadap kapitalisme dan neoliberalisme.

Pada tahun 2009, Zapatista dan aliansinya berhasil mendorong wacana *degrowth* untuk dibahas dalam konferensi. Sejak saat itu hingga 2014, mereka juga aktif memimpin perlawanan bersama aliansi dari banyak kalangan. Mulai dari NGO, komunitas di luar Zapatista, tokoh agama, hingga akademisi. Mereka serentak menolak dan berupaya

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁴¹ Kartika Giri Wijayanti, “Analisis Gramsci Terhadap Ide Pemerintah Meksiko pada Gerakan Zapatista (Periode 1994-2006)”, dalam *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I, hlm. 44.

menggagalkan mega proyek yang memiliki dampak terhadap degradasi sosial-ekologis. Saat ini, perjuangan Zapatista fokus pada upaya membangun aliansi dan melakukan dekolonisasi pemikiran/inisiatif pembangunanisme. Tujuannya untuk melawan bekerjanya logika kapitalisme dan menyodorkan alternatif lain di luar ekspansi ekonomi.²⁴²

2. Mendorong Replikasi Praktik dan Pertukaran Pengetahuan Antarkomunitas

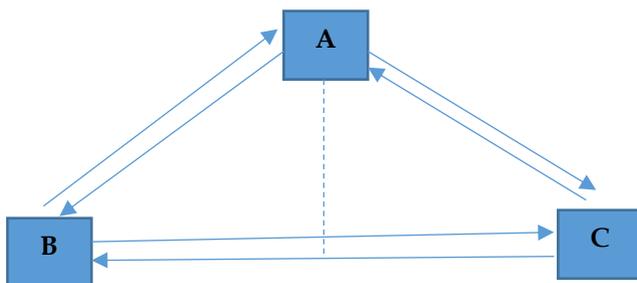
Bagian ini terinspirasi dari teori pertukaran sosial. Kelompok dan jaringan pertukaran dalam bagian ini diambil dari teori yang diintrodusir Emeson.²⁴³ Teori ini telah sedikit dimodifikasi sesuai konteks buku ini. Tujuannya untuk dapat melihat alur pertukaran informasi antarkomunitas. Dan, tentu saja, agar dapat mendorong terjadinya replikasi praktik “ekonomi nusantara” di banyak tempat. Replikasi di sini tentu harus disesuaikan dengan konteks masing-masing tempat. Dengan harapan, proses inilah yang akan memicu terjadinya “subjektivasi” dan sekaligus mendorong terjadinya *war of position*. Ketika pola ini berhasil, pelan-pelan wacana dominan pun akan terkikis dan berganti menjadi satu wacana baru. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai *common sense*, pada akhirnya dapat dikritik oleh komunitas/kolektif itu sendiri. Kemudian, dari situ kesadaran dan pengetahuan baru yang lebih kritis pun lahir dan masuk ke ruang-ruang pertarungan politik.

Paling tidak, terdapat tiga kelompok yang terlibat dalam jaringan pertukaran. Pertama, jejaring aktor utama yaitu kelompok yang memperoleh informasi dari komunitas. Untuk mempermudah, sebut saja kelompok ini sebagai kelompok A. Sementara dua kelompok lainnya, B dan C, adalah komunitas

²⁴² Lisa L. Gezon and Susan Paulson (Ed), "Degrowth, culture and power", Special Section of the *Journal of Political Ecology*, 24: 425-66, hlm. 431.

²⁴³ George Ritzer & Barry Smart (ED), *Handbook Teori Sosial*, (Jakarta: Nusa Media, 2012), hlm. 521-522.

itu sendiri. Kelompok A mendapat sumber informasi dari kelompok B dan C. Tugas kelompok A adalah membuka atau memfasilitasi ruang pertukaran informasi secara langsung antara kelompok B dan C. Setelah komunitas/kelompok B dan C bertukar informasi, tidak menutup kemungkinan jika keduanya akan melakukan kunjungan antarkomunitas. Alur kerja ini dapat disimak dari bagan berikut ini.



Supaya alur pertukaran informasi ini lebih tergambar, kami akan memberikan sebuah ilustrasi:

WALHI memperoleh informasi tentang skema pariwisata di Desa Adat Kedonganan. Informasi tersebut berisi cerita tentang praktik baik “ekonomi nusantara” di Kedonganan yang mampu menaruh kepentingan ekonomi, sosial, dan alam secara setara. Bahkan pengelolaan pariwisata di sana dilakukan secara komunal. Hal ini mampu mengantar masyarakat lepas dari fase krisis. Selanjutnya, WALHI juga mendapat informasi dan terlibat dalam proses advokasi penolakan privatisasi Pulau Komodo. Dalam proses pengorganisasi pertukaran informasi ini, WALHI sebagai A, Komunitas Kedonganan sebagai B, dan Komunitas di Pulau Komodo sebagai C. Dari informasi yang diketahui WALHI, maka masing-masing informasi didistribusikan kepada dua komunitas tersebut. Proses pengorganisasian dan penyampaian informasi dilakukan dengan cara membangun

solidaritas antarkomunitas. Selanjutnya, ruang komunikasi antarkomunitas dibuka dan didorong untuk saling belajar. Bahkan saling berkunjung. Dari proses pertukaran informasi inilah diharapkan, proses replikasi praktik baik “ekonomi nusantara” dapat dilakukan. Dari proses ini pula, diharapkan lahir sintesis baru untuk menguatkan pengetahuan “ekonomi nusantara” itu sendiri.

Dalam konteks ini, proses replikasi praktik baik “ekonomi nusantara” diposisikan sebagai kapasitas untuk bertindak.²⁴⁴ Kapasitas untuk bertindak ini merupakan bagian dari proses subjektivasi. Hal ini kami adopsi dari Foucault, karena itu berbeda dengan yang dimaksud Bacon. Bacon menganggap manusia yang memengaruhi pengetahuan. Bahkan hingga menjadi dasar kekuasaan. Dengan kata lain, siapa yang mempunyai pengetahuan lebih maka dia akan berkuasa.²⁴⁵ Sedangkan menurut Foucault, justru pengetahuan dengan otoritas kuasa impersonal yang mempengaruhi manusia. Manusia bukan subjek yang menentukan pengetahuan dan kekuasaan bagi dirinya. Namun justru sebaliknya yakni dinamika pengetahuan/kuasa itu sendiri yang menentukan subjektivitas manusia. Dengan demikian, pengetahuan bukan semata-mata hasil pemikiran dari seorang jenius, melainkan suatu dinamika antara keduanya.

Proses pertukaran informasi akan menyingkap hal apa saja yang tidak mencuat dalam realitas. Seperti, misalnya, tentang apa yang disebut perampasan struktural, kekeliruan *nrimo*, atau tentang pemaksaan pengetahuan palsu. Termasuk dalam hal wacana tentang kemajuan. Dari pertukaran informasi, diketahui bahwa kemajuan bukan berarti harus mengorbankan kepentingan sosial dan alam. Jika informasi semacam ini tersampaikan maka subjektivasi pun tercipta. Artinya, masing-masing individu dalam komunitas telah menjadi subyek

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 987.

²⁴⁵ Antonius Suadiardja, “Michel Foucault (1926-1984)”, *Bahan Ajar Extension Course Filsafat* (11 November 2019), hlm. 1.

utuh.²⁴⁶ Perlahan, dari situ akan lahir kesadaran dan partisipasi untuk melawan kuasa. Bisa dengan cara membentuk wacana baru; mengikuti wacana progresif yang sudah ada; atau melahirkan pembacaan lain atas kenyataan.

Kondisi semacam inilah yang akan menghapus *common sense*. Lalu melahirkan kapasitas untuk bertindak dan mengambil keputusan baru. Eksistensi hegemoni yang tidak adil, akan dilawan dengan pengetahuan dan hegemoni baru (*counter-hegemony*). Lalu lahir *war of position* antara hegemoni dominan dengan wacana lain yang baru. Dengan demikian, proses replikasi praktik “ekonomi nusantara” dan pertukaran informasi secara meluas menjadi kunci. Kerja-kerja semacam inilah yang akan mendorong kesadaran baru dan meneguhkan solidaritas untuk melawan hegemoni kapitalisme.

3. Membumikan “Ekonomi Nusantara” di Ruang Publik

Saat ini, seperti yang ditegaskan Jason W. Moore, dunia berada pada masa yang disebut “era kapital” (*capitalocene*). Pada masa ini, logika kapitalisme menguasai dunia dan berkuasa atas seluruh aspek kehidupan. Logika ini telah menghegemoni, bahkan hingga cara pikir sebagian manusia. Logika ini juga digdaya di ruang politik, dilindungi oleh hukum dan kebijakan, dan terus diregenerasi melalui ruang pendidikan. Menurut George Ritzer dan Barry Smart, kapitalisme yang kini berkuasa disambut dengan tangan terbuka oleh banyak pihak.²⁴⁷ Penyebaran kapitalisme pun sejalan dengan penyebaran demokrasi dan isu perdamaian. Bahkan, lanjut Ritzer dan Smart, kedua isu tersebut juga dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk meluaskan pengaruhnya.

Belakangan, hegemoni kapitalisme disadari telah membawa kehancuran, sekalipun itu dipoles dengan embel “hijau”.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁴⁷ George Ritzer & Barry Smart (ed.), *op.cit.* hlm. 395.

Namun sayangnya, kelompok yang sadar tentang logika kapitalisme masih sedikit. Oleh karenanya, bagian ini akan menyajikan secuil strategi pengorganisasian di ruang publik untuk menggoyang kedigdayaan logika kapitalisme. Salah satu strateginya ialah dengan mengarusutamakan “ekonomi nusantara” di ruang publik. Proses pengarusutamaan tersebut sebisa mungkin harus membumi. Dalam arti, sederhana dan dapat mudah dipahami oleh publik.

Kami akan banyak menggunakan teori komunikasi sebagai strategi pengarusutamaan di ruang publik. Khususnya, dalam kerangka ruang publik yang diintrodusir Jurgen Habermas. Komunikasi merupakan sarana mengkritik, melahirkan pengertian, dan membangun kesepakatan (mufakat). Pengorganisasian di ruang publik merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk melahirkan konsensus (mufakat), sekaligus memperluas dukungan. Metode yang diambil dari teori komunikasi Habermas sebatas pada komunikasi publik dan kritik terhadap sistem. Publik, dalam hal ini, dilihat sebagai pihak yang bisa diajak duduk setara. Sedangkan kritik pada sistem, merupakan komunikasi yang tidak setara. Walaupun, dalam kritik Habermas terhadap gerakan hukum kritis, ia tidak memotret ketidaksetaraan tersebut secara tepat. Dalam proses pembentukan hukum, ia tidak melihat bagaimana lembaga politik tidak membuka ruang komunikasi yang setara dengan kelompok-tak-berkuasa. Karena itu, kami meyakini bahwa sasaran komunikasi yang tepat untuk mengarusutamakan “ekonomi nusantara” adalah pada publik, bukan pada sistem seperti lembaga politik.

Satu hal yang kami adopsi dari Habermas adalah “tindakan komunikatif” dalam “teori komunikasi normal.” Bentuknya ialah dengan mengenalkan “ekonomi nusantara” sebagai pengetahuan kritis terhadap hegemoni kapitalisme. Komunikasi tersebut dilakukan dengan memberikan informasi kritis dan mudah dipahami tentang situasi saat ini. Seperti, misalnya, informasi bahwa kapitalisme memproduksi dan mereproduksi krisis hari ini. Wujud krisis tersebut banyak,

beberapa diantaranya ialah ketimpangan sosial-ekonomi; bencana sosial-ekologis; dan lain sebagainya. Informasi semacam ini diharapkan dapat melahirkan pengertian. Dari pengertian lalu dibangun konsensus (mufakat). Karenanya, informasi yang cukup harus didasarkan pada validitas dan argumentasi rasional. Sehingga kritik dalam tindak komunikatif mampu melahirkan diskursus “ekonomi nusantara” di ruang publik. Bantuan beragam ilmu, khususnya ekonomi, hukum, dan politik, menjadi penting untuk memantik diskursif tersebut.

Dalam praktiknya, pola tindakan komunikatif ini juga diharapkan mampu melahirkan pengertian mengapa krisis harus dimaknai sebagai patologi. Maksudnya, satu situasi kesakitan yang sebenarnya tidak harus terjadi dan dapat dipulihkan. Pengertian inilah yang menjadi modal melahirkan konsensus guna menjalin kerja sama melawan hegemoni kapitalisme. Komunikasi yang dibangun dalam tindak komunikatif tidak boleh koersif, namun justru harus mengakui sisi otonom semua pihak yang terlibat. Karenanya, bahasa merupakan sarana kunci dalam tindakan komunikatif. Sementara sarana non-bahasa hanya memperkuat informasi agar pengertian dan konsensus (mufakat) lebih mudah terbangun. Oleh sebab itu, kecakapan pengetahuan harus dilengkapi juga dengan kemampuan bahasa yang baik. Kelihaihan memilih bahasa akan membantu menghadirkan banyak pengertian dan mufakat. Apalagi pengetahuan “ekonomi nusantara” memang berangkat dari kritik yang sah terhadap kapitalisme, lengkap beserta alat ukur pertumbuhan ekonominya.²⁴⁸

Lalu, di ruang publik seperti apa tindakan komunikatif tersebut diimplementasikan? Menurut Habermas, ruang publik adalah suatu tempat yang memungkinkan dilakukannya pertukaran ide.²⁴⁹ Satu ruang yang memungkinkan debat dan

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 400-403.

²⁴⁹ C. Calhoun & J. Gerteis Dkk, *Contemporary Sociological Theory*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2007), hlm. 360.

silang pendapat terjadi secara setara. Termasuk, seperti yang digambarkan Habermas, di ruang yang dapat dipergunakan untuk membicarakan kritik-kritik politik. Bagi Habermas, argumentasi rasional dan sah lebih penting dibandingkan identitas si pembicara. Oleh karena itu, sebenarnya “tindakan komunikatif” untuk mengenalkan “ekonomi nusantara” dapat dilakukan di mana saja—baik forum formal maupun informal. Forum ini dapat diinisiasi sendiri atau memanfaatkan forum atau saluran yang ada. Ruang publik yang dimaksud juga mencakup ruang media virtual. Poin pentingnya, proses silang pendapat tersebut harus dilakukan secara setara. Selain itu, tindakan komunikatif juga ditujukan untuk membangun atau melahirkan pengertian terhadap situasi saat ini. Dari situ kemudian kemungkinan kerja sama dapat tercipta.

Dengan demikian, “tindakan komunikatif” untuk membumikan “ekonomi nusantara” tidak hanya terbatas milik para penulis, kontributor, atau WALHI secara khusus. Semua pihak dapat melakukan itu, selama berangkat dari kritik dan ide konsensus yang sama. Semakin banyak ruang publik dan orang yang menjadi corong “ekonomi nusantara,” maka makin banyak peluang lahirnya pengertian tersebut. Dan makin banyak pengertian yang terbangun, maka makin besar pula modal untuk membangun konsensus kerja sama.

b. Ruang Pendidikan

Berulang kali telah disebutkan bahwa regenerasi di ruang pendidikan turut andil mengokohkan logika kapitalisme. Regenerasi tersebut dilakukan untuk melahirkan pemikir, pekerja, pengambil keputusan, hingga konstituen kapitalisme lainnya. Mereka didesain untuk sepenuhnya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi, akumulasi, investasi, produksi (ekspor+impor), dan konsumsi merupakan cara terbaik menuju “kemajuan.” Mereka didorong untuk percaya bahwa pasar dan eksploitasi-tak-terbatas merupakan satu-satunya model pembangunan yang layak dipertahankan. Mereka didongengi

bahwa memberi stimulus ekonomi kepada pelaku usaha besar akan memberi tetesan kesejahteraan. Namun, apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa dongeng-dongeng semacam itu salah belaka.

Kekuasaan logika kapitalisme telah meresap hingga kurikulum pendidikan. Ruang pendidikan (sekolah) digerakkan sejalan dengan tipuan dan kebutuhan kapitalisme. Ruang tersebut disetir untuk terus meregenerasi logika kapitalisme dan melanggengkan struktur sosial yang ada. Nahasnya lagi, logika ini bahkan telah menjadi mistifikasi. Hal ini telah menjauhkan peserta pendidikan dari cara pikir kritis. Seperti yang dinyatakan Paulo Freire, mistifikasi akan melahirkan kecenderungan totaliter, dalam arti memberangus semua orang yang bersifat kritis.²⁵⁰ Tak ayal, pemberangusan tersebut memang bertujuan untuk melindungi kesucian status quo dan mengaburkan ketimpangan sosial-ekonomi hari ini.

Meski demikian, guru, dosen, atau tenaga pengajar lainnya tidak dapat serta merta disalahkan. Walaupun posisi mereka memang sebagai agen regenerasi logika kapitalisme. Pasalnya, mereka pun sebenarnya adalah korban dari sistem ini. Otoritas kekuasaan lah yang telah membuat mereka menjadi agen. Bahkan sebelum menjadi 'agen', mereka juga mencecap kurikulum pendidikan yang memang didesain untuk meregenerasi logika kapitalisme. Alhasil mereka pun takluk dan terseret arus *common sense*. Namun tidak semua tenaga pendidikan tersebut sama. Masih terdapat segelintir tenaga pendidik yang menjalankan tugas pendidikan secara kritis.

Guna mendorong keruntuhan regenerasi tersebut, kami menawarkan dua strategi pembaharuan dunia pendidikan. *Pertama*, pembaharuan substansi melalui beragam cara. Salah satunya adalah dengan menawarkan jalan dekolonisasi imajinasi *growth* melalui pendidikan dan estetika. *Kedua*,

²⁵⁰ Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 195.

perubahan substansi kurikulum atau bacaan wajib peserta didik jelas membutuhkan motor penggerak. Karena itu, kami meminjam istilah intelektual organik dari Gramsci. Mereka inilah yang harus menjadi motor penggerak perubahan. Namun di sini, agar lebih luas, kami pun sedikit memodifikasi makna intelektual tersebut.

1. Jalan Dekolonisasi Imajinasi *Growth* melalui Pendidikan dan Estetika

Melawan hegemoni kapitalisme membutuhkan apa yang disebut wacana tanding. Akan tetapi, membentuk wacana tanding bukan perkara mudah untuk dilakukan. Apalagi mengingat dominasi wacana kapitalisme yang telah sedemikian mengakar kuat. Bahkan hingga ke level kesadaran kolektif dan *common sense* yang diterima kebanyakan orang sebagai sebuah kebenaran. Banyak dari ahli dan pegiat lingkungan yang telah menunjukkan seberapa akut logika kapitalisme membawa kita kepada kehancuran bumi. Namun sayangnya, sebagian besar warga bumi masih menolak kenyataan itu. Hal ini pun tidak lepas dari imajinasi dan daya cengkram kapitalisme yang telah menjajah mental dan fantasi sebagian besar umat manusia.

Dengan demikian, imajinasi kapitalisme harus didekolonisasi. Proses dekolonisasi cara pikir dan imajinasi kapitalis adalah prasyarat untuk memulai gerakan alternatif seperti *degrowth* atau “ekonomi nusantara”. Gerakan alternatif di sini harus meletakkan nilai bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Salah satu peluang atau caranya, menurut Michel Foucault, adalah dengan melakukan subyektivasi. Dan jalan pendidikan dan estetika, rupanya, dapat menjadi kunci yang memungkinkan narasi dan wacana tanding dapat diterima secara luas. Tentunya, dengan tetap memegang prinsip bahwa perlawanan individual saja tidak cukup.

Mengapa kedua hal ini penting dilakukan di Indonesia? Baru-baru ini, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh

YouGov-Cambridge Globalism Project, menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia termasuk yang paling tidak percaya (18 persen dari total sampel) tentang perubahan iklim yang diakibatkan oleh (segelintir) manusia. Disusul masyarakat di 22 negara lainnya seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hasil ini bertentangan dengan temuan para ilmuwan dan juga PBB. Dalam aneka laporan PBB dan para ilmuwan, prediksi ilmiah menunjukkan bahwa satu juta spesies tumbuhan dan hewan akan punah akibat oleh (segelintir) manusia. Temuan semacam itu jelas perlu diwaspadai. Namun yang terpenting ialah bagaimana memperdalam dan memperluas kesadaran akan *climate emergency* tersebut. Karena dengan cara itulah, nampaknya, percakapan tentang memulihkan lingkungan hari ini dapat dimulai.

Gutierrez dan Nafria menyarankan, sebagai sebuah gerakan, pertama-tama *degrowth* harus meringkai ulang proses sosialisasi, rekonstruksi kurikulum pendidikan, mengembangkan konten ekonomi, sosial, dan politik yang otentik dan mekanisme ideologis dari kekuasaan yang membangun mentalitas ini. Dalam istilah Horkheimer, hal ini disebut aturan baru yang mengatur pikiran dan relasi material kita.²⁵¹ Karena itu, menjadi penting pula untuk memahami secara spesifik seperti apa bentuk dan pembentukan subyek neoliberal seperti fantasi *growth*. Misalnya, pada bagian pendidikan formal dan media. Pembentukan subyek neoliberal yang mengutamakan spirit produktivitas dan kompetisi memang dibentuk oleh pendidikan di masyarakat Barat. Hal ini secara intensif dipengaruhi oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, WB, WTO, OECD, atau EU. Bahkan tidak cukup hanya dengan spirit, transformasi perilaku pun dibutuhkan pula untuk mengubah kepentingan dan tanggung jawab kolektif menjadi individu.

²⁵¹ Enrique Javier Díez-Gutiérrez & José María Díaz-Nafria, "Degrowth and Educative Deconstruction of the Neoliberal Subject: Alternatives to Build up a Sustainable Society", *ICAI Workshop* (2019), hlm. 126.

Menurut Foucault, disiplin telah melahirkan rasa bersalah dalam diri individu (*subjective introjection mechanism*). Misalnya, saat tidak memperoleh pekerjaan, maka itu berarti tidak kompeten. Situasi kelangkaan lapangan kerja akhirnya menjadi bentuk eksploitasi atas diri sendiri, melalui rasa bersalah. Di lingkungan pekerjaan, para individu juga dididik untuk mengembangkan eksploitasi diri sendiri melalui pandangan *help yourself* (artinya bantulah dirimu sendiri). Pemilihan sekolah berdasarkan *freedom of choice* atau kebebasan memilih, sebenarnya justru sesuai dengan mekanisme pasar. Pemilihan sekolah semacam ini tidak hadir dalam kerangka sekolah untuk semua kalangan. Padahal perkara sekolah, bagi orang miskin, adalah hidup dan mati. Pasalnya, bahkan bagi orang miskin di negara kesejahteraan sekalipun, bantuan dari tetangga telah dihilangkan. Akhirnya mereka dipaksa untuk bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri, termasuk untuk menghindari hilangnya harga diri dalam perkara sekolah.

Di bidang ekonomi, kesadaran korban diubah menjadi rasa bersalah atau eksploitasi diri sendiri. Karena itu, ia meletakkan kerja dirinya sendiri sebagai sesuatu yang gratis. Depolitisasi semacam ini terus terjadi. Oleh sebab itu, perlu upaya mempolitisasi segala hal. Termasuk soal sekolah, soal eksploitasi dirinya sendiri, atau soal lainnya. Max Weber menyebut hal ini sebagai rasionalitas yang memerangkap lebih kuat daripada penjara. Perkaranya, mereka tentu tidak mudah untuk membebaskan diri dari norma yang sudah ada dan terus didepolitisasi melalui serangkaian proses internalisasi.²⁵² Dengan demikian, yang perlu dibentuk ulang oleh pendidikan *degrowth* adalah mengembangkan pendidikan yang mengajarkan praktik bagaimana hidup yang lebih baik dan sederhana. Di samping itu, perlu mendorong adanya "*slow education*" yang mempromosikan nilai kedalaman pemahaman, refleksi, dan bukan kecepatan. Karena dengan pendalaman, kemungkinan analisis yang lebih mendalam, kepedulian sosial,

²⁵² *Ibid.*, hlm. 127-130.

dan kemauan berada dalam gerakan sosial dapat dimungkinkan.

Upaya untuk mendorong manajemen sekolah yang didanai dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis (*school of democracy*) juga harus dilakukan. Termasuk mengajarkan nilai anti-kapitalis melalui teladan dalam keseharian. Subyektivasi semacam ini diperlukan untuk menciptakan "*reason of common.*" Artinya, mendorong praktik kerja sama dalam konteks solidaritas ekonomi para siswa; menciptakan jejaring komunitas belajar; dan memaksimalkan waktu berbagi dan saling bantu dalam komunitas. Subyektivasi ini juga ditujukan untuk mengembalikan pendidikan sebagai hak untuk semua orang dan kurikulumnya pun humanis. Dalam arti, berbasis pada pengembangan siswa; berbasis pada semangat mendorong partisipasi masyarakat; dan berbasis pada mereka yang miskin dan minoritas agar dapat mengakses pendidikan.

Model pendidikan semacam ini tidak berbasis pada kompetensi dan permintaan pasar. Karena itu, pendidikan tersebut tidak semata bertujuan untuk mendulang keuntungan secara ekonomi. Tapi semata bertujuan untuk membuka akses pendidikan yang layak, kritis, dan humanis bagi semua orang. Kurikulum dalam pendidikan tersebut juga disiapkan sebagai upaya mendorong kesetaraan antarsiswa dan antara siswa dan tenaga pendidik. Kurikulum dan pendidikan *degrowth* ini perlu disadari sebagai proyek politik dan moral. Kesadaran ini tidak terpisah dari keseharian kehidupan sosial dan politik para peserta didik. Sehingga dapat mendorong nilai-nilai di luar kapitalisme. Caranya, bisa dengan mengambil banyak contoh masyarakat yang mengembangkan praktik hidup sejahtera. Masyarakat semacam ini cukup banyak ada di belahan dunia Selatan. Poin ini juga menegaskan bahwa sudah waktunya, dunia pendidikan untuk tidak lagi berkiblat semata-mata pada masyarakat kapitalis di Utara.²⁵³

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 130-133.

Sejarah pendidikan di Indonesia, terutama pada periode pascakemerdekaan, pernah bertujuan untuk membentuk subyek sosialis-nasionalis.²⁵⁴ Namun haluan ini berubah drastis saat pemerintahan militeristik Soeharto berkuasa. Alhasil yang dibentuk dari pemerintahan Soeharto adalah subyek apolitis dan pancasilais. Kemudian pada pemerintahan setelah Soeharto atau masa reformasi, membentuk subyek liberal dan neoliberal. Pertandanya, dimulai saat pencabutan subsidi anggaran pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada sulitnya kelas bawah untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa ini pula kurikulum berbasis kompetensi dan kompetisi mulai kokoh.²⁵⁵

Pelajaran dari gerakan Zapatista penting untuk dijadikan alat refleksi. Gerakan ini melawan dengan banyak menggunakan kata, mitos, atau pun sastra. Cara-cara ini terbukti ampuh untuk mendapat dukungan yang lebih luas. Oleh karena itu, nampaknya jalan seni atau estetika juga bisa menjadi pilihan menarik. Dengan kata lain, jalan seni dan estetika dapat digunakan untuk membentuk subyektivikasi alternatif pada individu maupun masyarakat. Dengan mengutip Foucault, Alexander menyebut bahwa konsep ini disebut dengan eksistensi estetika. Maksudnya, kekuasaan telah mengoperasikan dunia pengetahuan hari ini dan telah membentuk kita hari ini. Sering kali bahkan tanpa kita sadari. Karena itu, kita perlu melakukan perlawanan subyek dengan menyadari bahwa kita harus memandang diri kita selayaknya kerja seni yang bahan mentahnya adalah kehidupan kita sendiri. Dengan kata lain, subyek dapat berkreasi atas dirinya sendiri seperti sebuah karya seni.

²⁵⁴ Muhammad Rijal Fadli & Dyah Kumalasari, "Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)", *Jurnal Agastya* Vol. 9 No. 2 Juli 2019, hlm. 157-171.

²⁵⁵ Syaharuddin & Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonial Nusantara sampai Reformasi*, (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2019), hlm. 88 dan 117.

Konsep ini telah diperluas oleh aktivis *New Age* seperti Herbert Marcuse ataupun para ekofeminis. Tidak lagi individual, politik subyek eksistensi estetika diperluas agar dapat bekerja pada tingkat komunitas. Dengan demikian, menyuguhkan bentuk, konten, atau narasi *degrowth* juga tidak lagi melulu untuk menggugah sisi intelektualitas individu. Namun justru harus sampai mampu menggugah emosi masyarakat. Karena itu pula, model gangguan budaya (*culture jamming*) atau disebut juga artivisme dapat dikembangkan. Model ini bertujuan untuk melakukan disrupsi dan sekaligus menggantikan pemahaman yang dibentuk kapitalis. Pemahaman *degrowth* harus sampai pada pemahaman bagi orang biasa dalam keseharian mereka. Bentuknya pun harus lebih mudah dipahami.

Dalam konteks ini, maka besar harapan untuk para seniman agar dapat mendorong komunikasi yang lebih jelas dan mudah. Baik itu lewat gaya hidup yang sederhana, produk organik, gaya hidup lokal, tren berjalan kaki, bersepeda, permakultur atau berkebun di rumah. Semua hal tersebut harus berorientasi pada komunitas dan kerja sama. Simbol, mitos, dan juga apokaliptis juga dapat dimanfaatkan. Sehingga yang muncul tidak lagi hanya sisi gelap dari situasi lingkungan saat ini, tetapi juga membuka mata pada pengetahuan baru hari ini.²⁵⁶

Seperti halnya yang kita lihat dalam praktik “ekonomi nusantara” di beberapa wilayah. Kami rasa, perlu dilakukan upaya transformasi di jalan pendidikan dan seni semacam ini – baik di level komunitas maupun sebagai sebuah gerakan. Peluang ini dapat diupayakan dengan, misalnya, mendorong organisasi lingkungan seperti WALHI untuk melakukan intervensi pendidikan dan seni dengan cara *degrowth*.

²⁵⁶ Samuel Alexander, “Degrowth as an ‘Aesthetics of Existence’”, *MSSI Monograph Series* Melbourne Sustainable Society Institute, The University of Melbourne (2017), hlm. 8-19.

Cara-cara tersebut tidak hanya dapat diambil dari nilai-nilai anti kapitalis di belahan Selatan, tetapi justru dari praktik “ekonomi nusantara” itu sendiri. Hal ini penting untuk mendorong disrupsi budaya orang biasa agar tidak hanya menerima hegemoni budaya kapitalis. Namun mereka juga dapat mempraktikkan cara pikir dan cara hidup “ekonomi nusantara”. Karena itu, visibilitas praktik “ekonomi nusantara” perlu didokumentasikan dan disebarluaskan secara lebih masif lagi. Salah satunya, melalui jalan pendidikan dan seni. Tujuannya jelas yakni untuk mendorong adanya transformasi cara pikir dan membuka imajinasi bahwa alternatif lain dari kapitalisme itu ada, bahkan mungkin untuk dipraktikkan.

2. Mengumpulkan dan Menyemai Intelektual Organik

Menurut Roger Simon, penggunaan istilah intelektual oleh Gramsci menggambarkan dua tema.²⁵⁷ *Pertama*, untuk menghapus perbedaan kerja manual dan kerja intelektual yang dilakukan oleh kapitalisme dalam proses produksi. *Kedua*, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Terdapat kohesi antara keduanya. Pengetahuan dipandang sebagai monopoli kelas berkuasa. Perlu perubahan mendasar antara hubungan manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme. Tema kedua memperlihatkan kesamaan pikiran Gramsci dan Foucault dalam memandang kekuasaan dan pengetahuan. Namun sayangnya, Gramsci tidak mengembangkan suatu teori kaum intelektual secara komprehensif. Karena itu, dalam tawaran ini, kami melakukan beberapa modifikasi dari pandangan intelektual organik yang disampaikan Gramsci.

Penggunaan kata ‘intelektual’, sebenarnya ditentang atau dihindari oleh beberapa ahli di kelompok aliran kritis. Namun, kami masih sulit menemukan padanan kata ganti untuk frasa ‘intelektual organik’—sebagai individu atau kelompok yang diharapkan melakukan pengorganisasian “ekonomi

²⁵⁷ Roger Simon, *op.cit.*, 140.

nusantara.” Terlebih intelektual yang disampaikan Gramsci bukan sekadar menggambarkan aktivitas berpikir intrinsik, tapi lebih melekat pada melaksanakan fungsi intelektual. Hal ini dapat dilihat dari definisi kaum intelektual yang diusungnya. Semua orang adalah intelektual organik ketika mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi, dan termasuk dalam wilayah politik dan kebudayaan. Mereka bukan hanya pemikir, penulis, atau seniman, namun termasuk juga para organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, ahli mesin, manajer, atau para teknisi.²⁵⁸

Selanjutnya, Gramsci pun membedakan dua kelompok intelektual menjadi tradisional dan organik. Ini menandakan setiap kelas mempunyai kalangan intelektualnya sendiri. Intelektual tradisional digambarkan sebagai kelompok intelektual yang mewakili kepentingan kelompok berkuasa, atau ia yang mengambil posisi independen. Kemudian, secara ambigu, Gramsci menyebut bahwa yang dimaksud intelektual tradisional adalah intelektual organik dari kelompok kelas kapitalis. Sedangkan intelektual organik merupakan kelompok intelektual dari kelas pekerja. Namun sayangnya, definisi dan batasan intelektual organik ini terlalu sempit. Ia hanya mencakup organisator dan pemimpin gerakan. Kelompok ini terikat dalam dua kategori yakni ikatan dengan partai revolusioner; dan kepercayaan terhadap Marxisme. Kerja utama intelektual organik adalah meruntuhkan *common sense*. Dan hubungan antara partai revolusioner dan intelektual yang berada di luarnya yang akan menjadi dasar dibentuknya blok historis.²⁵⁹

Berangkat dari definisi dan uraian tersebut, maka makna intelektual organik perlu dimodifikasi. Dalam menggerakkan “ekonomi nusantara,” para intelektual organik yang perlu

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 143-152.

diidentifikasi dan dikumpulkan adalah orang yang memenuhi dua kriteria. *Pertama*, setiap orang yang mempunyai pengetahuan kritis dan mengambil posisi oposisi terhadap kapitalisme dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, orang yang menaruh kepentingan ekonomi selaras dengan kepentingan sosial dan alam. Kerja utama pegiat atau pelopor “ekonomi nusantara” adalah mengumpulkan orang atau kelompok yang memenuhi kriteria tersebut.

Langkah awalnya ialah dengan melakukan tindakan strategis dan komunikatif. Tujuannya membangun aliansi untuk meruntuhkan *common sense* dan memutus regenerasi pengetahuan kapitalistik. Ruang kerja utamanya ialah sekolah. Di sana, para intelektual organik berusaha mendorong kesadaran para siswa untuk kritis dan meleak persoalan hari ini. Proses inilah yang disebut proses menumbuh dan menyemai intelektual organik baru. Mereka pula yang akan menyebarkan pengetahuan kritis “ekonomi nusantara.” Meski begitu, hasil semai ini tidak melulu soal melakukan kerja pendidikan dan komunikasi di sekolah. Selain itu, dapat pula dengan masuk ke ruang lebih luas seperti ruang publik dalam kaca mata Habermas. Hal ini, dalam pandangan Foucault, dapat disebut dengan proses subjektivasi.

c. Ruang Politik dan Kebijakan

Ruang pengorganisasian politik dan kebijakan merupakan ruang yang paling menentukan. Karena di ruang ini, pertanyaan seperti apakah daulat rakyat dapat dipulihkan atau direbut kembali menjadi relevan. Dalam konteks negara demokrasi, ruang politik merupakan ruang yang paling menentukan untuk mendorong lahirnya legislasi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Proses pengorganisasian ini sebenarnya telah dimulai pada fase awal kemerdekaan. Namun sayangnya, Soekarno belakangan tidak konsisten dalam memaknai sosialisme dan demokrasi (sosial dan ekonomi). Demokrasi Terpimpin era

Soekarno justru dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih liberal untuk menumbangkannya. Keruntuhan Pemerintahan Soekarno lalu dimanfaatkan untuk proses menanam kapitalisme dan sistem politik otoritarian.

Bagian pengorganisasian di ruang ini akan dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu (1) keberhasilan pengorganisasian politik hijau dan sosialisme baru di Amerika Latin; (2) mendorong dinamika konstitusional; dan (3) membangun partai politik baru. Tiga tema tersebut akan diurai di bawah.

1. Keberhasilan Pengorganisasian Politik Hijau dan Sosialisme Baru

Bagian ini akan menyajikan secara ringkas sejarah pengorganisasian gerakan politik elektoral di luar dominasi hegemoni kapitalisme. Meski, sebenarnya, gerakan itu pun belum sepenuhnya lepas dari bayang kapitalisme. Namun paling tidak, dua gerakan ini telah memperlihatkan konsistensinya melawan status quo. Fokusnya ada pada dua gerakan politik, yaitu politik hijau dan sosialisme baru di Amerika Latin. Uraian ringkas ini akan dimulai dari sejarah politik hijau, lalu masuk ke uraian sosialisme baru di Amerika Latin.

Pertama, pada mulanya politik hijau merupakan isu atau platform gerakan. Tema ekologi menjadi spektrum utamanya. Gerakan ini mendorong lebih banyak orang untuk sadar dan sekaligus terlibat dalam gerakan. Saat awal kelahirannya, politik hijau tidak terinstitusi secara kelembagaan politik. Butuh proses panjang melahirkan kelembagaannya dan melahirkan jaringan lintas negara. Kelahirannya sebagai blok politik baru sering disebut sebagai kelompok “hijau alternatif” atau “merah-hijau.” Alasannya karena politik hijau merupakan perpaduan dari perjuangan sosial dan ekologi, bukan *an sich* berjuang

untuk isu konservasi.²⁶⁰ Politik hijau mengusung enam prinsip dalam melakukan kerja politiknya (*The Global Greens Charter*). Keenam prinsip tersebut ialah kearifan ekologi, keadilan sosial, demokrasi partisipatif, non-kekerasan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap keanekaragaman.²⁶¹

Sejarah keberhasilan Partai Hijau di Jerman untuk masuk ke ruang pemerintahan membuat politik hijau menjadi lebih populer. Sejak didirikan pada tahun 1980, partai ini langsung mengikuti pemilu. Namun sayangnya, secara nasional, partai ini hanya memperoleh 1,5% suara dan gagal mencapai batas 5% *parliament threshold*. Meski demikian, untuk pemilu level negara bagian, partai hijau berhasil memperoleh beberapa kursi. Selanjutnya, secara konsisten sejak Pemilu 1983, *Die Grünen* terus melampaui batas 5% *parliament threshold*. Dan terus mendapat kursi cukup signifikan, kecuali pada 1990. Bahkan pada Pemilu 1998 dan 2002, Partai Hijau Jerman berhasil masuk ke ruang pemerintahan (eksekutif). Mereka membangun koalisi “merah-hijau” bersama partai sosialis (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*, SPD). Setelah itu, Partai Hijau Jerman kembali menjadi partai oposisi. Sementara pada momen pemilu parlemen Uni Eropa, sejak 1984, *Bündnis 90/ Die Grünen* konsisten memenangkan kursi untuk wakilnya.²⁶²

Partai Hijau Jerman (*Bündnis 90/ Die Grünen*) bukan partai hijau pertama yang mengikuti pemilu tingkat nasional. Partai hijau pertama yang mengikuti proses politik elektoral nasional adalah *the Values Party*. Partai yang didirikan pada 1970 dan telah mengikuti pemilu nasional Selandia Baru pada 1972. Meski, keikutsertaannya hingga pemilu 1987 belum membuahkan kursi di parlemen nasional. Hanya saja, untuk beberapa kali pemilihan daerah, *the Values Party* berhasil

²⁶⁰ <https://www.globalgreens.org/literature/maier/westerneurope>, diakses pada 21 Januari 2021.

²⁶¹ <https://www.globalgreens.org/globalcharter>, diakses pada 21 Januari 2021.

²⁶² <https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte>, diakses pada 17 Januari 2021.

mendudukan kandidatnya. Pada 1989, *the Values Party* resmi dibubarkan. Namun pada Mei 1990, beberapa tokoh dan anggota *the Values Party* bersama aktivis lingkungan lainnya mendirikan partai hijau baru, *Green Party of Aotearoa New Zealand*. Perolehan suaranya pada Pemilu 1990 sebesar 6,85% suara. Namun sayangnya, suara ini tidak menghasilkan satu pun kursi di parlemen. Pada pemilu 1993 dan 1996, partai ini bergabung dengan aliansi yang terdiri dari lima haluan *Democrats, Liberals, Mana Motuhake and NewLabour Party*.²⁶³ Pada dua perhelatan pemilu tersebut, *Green Party of Aotearoa New Zealand* berhasil mendudukan beberapa kandidatnya di parlemen.

Pada pemilu 1999, *Green Party of Aotearoa New Zealand* mulai kembali menjadi peserta mandiri. Mereka memperoleh 5,16% suara dengan jumlah tujuh kursi parlemen.²⁶⁴ Setelahnya, Partai Hijau Selandia Baru secara konsisten mengikuti politik elektoral. Pada Pemilu 2002 memperoleh 7,00% suara (sembilan kursi); 2005 5,30% suara (enam kursi); 2008 memperoleh 6,72% suara (sembilan kursi); 2011 memperoleh 11,06% (14 kursi); dan 2014 memperoleh 10,70% (14 kursi). Sementara pada pemilu 2017, di tengah perpecahan di tubuh partai, perolehan suara *Green Party of Aotearoa New Zealand* anjlok ke 6,3% (delapan kursi). Partai ini juga sempat mencicipi masuk dalam pemerintah yang dipimpin oleh Partai Buruh (*New Zealand Labour Party*). Pada pemilu 2020, keadaan partai ini pun membaik dan mendapat 7,9% suara (10 kursi).

Satu hal menarik dalam koalisi *Green Party of Aotearoa New Zealand* dalam pemerintahan yang dipimpin *New Zealand Labour Party* adalah adanya kesepakatan untuk tidak sepakat. Partai Hijau diberikan kebebasan mengambil keputusan di kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia tetap diberi kebebasan untuk mengkritik pemerintahan Jacinda Ardern,

²⁶³ https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Party_of_Aotearoa_New_Zealand/The_Alliance_years, diakses pada 18 Januari 2021.

²⁶⁴ <https://www.greens.org.nz/about>, diakses pada 21 Januari 2021.

Perdana Menteri Selandia Baru sekaligus pemimpin partai buruh.²⁶⁵ Karena itu pula, kami merasa kuasa “merah-hijau” di Selandia Baru adalah yang paling relevan dengan penelitian ini. Apalagi “ekonomi nusantara” memang hadir untuk menjadi lawan tanding model pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pada Mei 2020, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, sempat mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan “kesejahteraan” warganya daripada berfokus pada produktivitas dan pertumbuhan PDB.

Bukan kebetulan, Selandia Baru adalah negara yang paling siap saat mewabahnya virus korona. Mereka bahkan didaulat sebagai negara terbaik dari negara demokrasi mana pun di dunia yang berhasil meredam penyebaran virus. Model ini mungkin dapat menjadi contoh bagi dunia untuk membuat kesehatan ekonomi sejalan dengan kesehatan untuk semua kehidupan. Kebijakan ini mencatatkan Selandia Baru sebagai negara pertama yang mengambil kebijakan mengenyampingkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Ardern dan Selandia Baru ini menurut The “*Wellbeing Economy Alliance*”, merupakan sebuah “*Great Pause*.” Lembaga ini menyebut bahwa apa yang dilakukan Ardern, merupakan hal yang tepat untuk mengejar kesejahteraan dibanding pertumbuhan ekonomi.²⁶⁶

Kemajuan pesat politik hijau di ruang politik elektoral juga terjadi di Eropa. Tidak hanya di level nasional, partai hijau beberapa negara juga secara perlahan mulai menguasai ruang parlemen Uni Eropa. Bahkan Joshua Keating menyebut bahwa

²⁶⁵ <https://republika.co.id/berita/qj40ug382/jacinda-ardern-bentuk-pemerintahan-baru-dengan-partai-hijau>, diakses pada 25 Desember 2020.

²⁶⁶ James Magnus-Johnston, “New Zealand Deprioritizes Growth, Improves Health and Wellbeing”, <https://www.resilience.org/stories/2020-05-13/new-zealand-deprioritizes-growth-improves-health-and-wellbeing/>, diakses pada 4 Januari 2021.

*In Europe, Green is New Red.*²⁶⁷ Tulisan singkat tersebut dibuat untuk menyikapi hasil pemilu parlemen Uni Eropa. Mereka memberi pujian sekaligus kritik terhadap keberhasilan partai hijau di beberapa negara Eropa. Partai Hijau di Eropa lahir sebagai kekuatan baru. Mereka banyak mendulang kemenangan telak di beberapa negara. Bahkan tawaran politiknya mengalahkan suara partai berhaluan sosialis dan kiri tengah. Blok Partai Hijau Eropa memperoleh peningkatan 14 kursi dibanding Pemilu Parlemen Eropa 2014.

Kemenangan di Prancis dan Irlandia dirasa cukup fenomenal dibanding capaian di Jerman. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman politik panjang *Die Grünen*, partai hijau paling senior dan terkuat di dunia. Bahkan di Pemilu Nasional Jerman 2017, partai ini menjadi pemegang suara kedua terbanyak dan mengalahkan partai sosialis (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*, SPD). Di sisi lain, Partai Hijau Austria (*Die Grünen – Die Grüne Alternative*), malah menjalin koalisi nasional dengan partai berhaluan kanan. Satu sisi, ia memperlihatkan isu lingkungan menjadi perhatian bagi kelompok bonafide kanan. Namun di sisi lain, ia memperlihatkan kerentanannya. Terutama karena tidak sesuai dengan platform politik hijau yang ditawarkan oleh jaringan *global greens*.

Kedua, lahirnya sosialisme baru di Amerika Latin ditandai, salah satunya, dengan kemenangan Hugo Chavez sebagai presiden pada pemilu 1998. Keberhasilan Chavez berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya. Chavez menyebut ini sebagai “Sosialisme Abad ke 21.” Kemenangan elektoral demokratis ini menular kepada pemimpin dan partai yang bernaungan ‘kiri’ atau ‘kiri tengah’ di Amerika Latin. Para pengamat

²⁶⁷ Joshua Keating, “In Europe, Green Is the New Red”, <https://slate.com/news-and-politics/2020/07/green-parties-france-ireland-austria.html>, diakses pada 27 Januari 2021.

menyebutnya sebagai “sosialisme baru” Amerika Latin.²⁶⁸ Kemenangan Chavez di pemilu 1998 membuatnya menunaikan janji politik mengubah Konstitusi Venezuela. Konstitusi 1991 diubah menjadi Konstitusi Bolivarian 1999. Konstitusi baru ini menentukan peningkatan fasilitas dan perlindungan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan di Venezuela. Struktur pemerintahan pun berganti berdasar konstitusi tersebut.

Kemenangan Chavez bersama Partai Politik Demokrasi Sosial dan Pergerakan Republik Kelima belakangan bertransformasi menjadi Partai Sosialis Bersatu Venezuela/*Partido Socialista Unido de Venezuela* (PSUV). Hal ini bukan kemenangan yang lahir secara tiba-tiba. Pada proses awal pencalonan, Chavez bukan tokoh yang populer. Dalam beragam survei awal, hasilnya tidak memproyeksinya Chavez akan memenangkan pemilihan presiden. Kampanye dengan tema anti-korupsi, anti-kemiskinan, dan seruan meruntuhkan dominasi dua partai besar Venezuela, telah mengantarnya beranjak kian populer hingga memenangkan pemilu. Hanya saja, kemenangan tersebut tidak diikuti kemenangan partai pendukungnya. Dua partai penguasa masih menjadi kelompok mayoritas di parlemen.

Perjuangan dan pengorganisasian politik yang dilakukan Chavez sudah dimulai pada periode 1980an. Bahkan upayanya sempat dilakukan dengan cara bersenjata (upaya kudeta 1992). Kudeta yang dirancang Chavez gagal dan mengantarnya menjalani pembedanaan penjara selama dua tahun. Setelah keluar penjara, Chavez mulai terbuka berkampanye untuk presiden pada platform Bolivarianisme, suatu platform demokrasi kerakyatan yang melibatkan partisipasi massa dalam pemerintahan, kemandirian ekonomi, dan nasionalisme yang

²⁶⁸ Launa & M. Azman Fajar, “Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin: Sebuah Era Baru” dalam *Jurnal Sosial Demokrasi* Volume 4 Nomor 1, Oktober-Desember 2008, hlm. 4.

kuat.²⁶⁹ Butuh sekitar empat tahun bagi Chavez dan kelompoknya untuk memperkenalkan platform ini.

Kematian Chavez pada Maret 2013, melahirkan guncangan politik di Venezuela. Berita kemiskinan, tindakan anti demokrasi, krisis pangan, hingga obat mewarnai media. Nicolas Maduro melanjutkan kebijakan Chavez, tapi dia tidak begitu dekat dengan rakyat. Contoh baik kemenangan Chavez melawan kelompok dominan, dihancurkan oleh model kepemimpinan anti demokrasi, menguatnya militerisme, dan gurita korupsi perminyakan. Selain itu, ketergantungan pada pasar dan ekspor minyak juga menjadi penyebab krisis Venezuela makin parah.²⁷⁰

Efek kemenangan Chavez mendorong perubahan politik signifikan di Amerika Latin. Presiden Brazil, Luis Ignacio “Lula” da Silva (2001); Presiden Argentina Nestor Kirchner (2003, yang beberapa waktu lalu digantikan isterinya, Christina Fernandez); Presiden Uruguay Tabarez Vasquez (2005); Evo Morales, petani koka miskin yang terpilih sebagai Presiden Bolivia (2006); Michelle Bachelet, aktivis Partai Sosialis, menjadi Presiden Chili (2006); tokoh revolusioner lama Nikaragua, Daniel Ortega, yang kembali ke panggung kekuasaan negara sebagai Presiden Nikaragua (2006); Rafael Correa, ekonom dan doktor ekonomi lulusan Amerika Serikat, yang terpilih sebagai Presiden Ekuador (2007); dan Fernando Lugo, Presiden Paraguay (2008).²⁷¹

²⁶⁹ https://kbr.id/opini_anda/032013/kontroversi_chavez_tradisi_politik_amerika_latin_dan_keberhasilan_sosialisme/68261.html, diakses pada 27 Januari 2021.

²⁷⁰ Lihat misalnya: <https://www.antaranews.com/berita/661160/dituduh-korupsi-11-pejabat-perusahaan-minyak-venezuela-ditangkap>; <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47144750>; <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47223838>; atau artikel berikut ini <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45272065>, diakses pada 19 Januari 2021.

²⁷¹ Launa & M. Azman Fajar, *op.cit.*, hlm. 5.

Namun sayangnya, efek kemenangan sosialisme baru Amerika Latin hanya bertahan sekitar satu setengah dekade. Satu per satu kekuatan sosialisme baru mengalami kemunduran. Apabila pada 2008 delapan dari sepuluh kursi presiden di Amerika Latin dikuasai kaum populis kiri, pada 2016 jumlahnya menurun jadi lima.²⁷² Selanjutnya, pada 2019, Alberto Fernadez yang merepresentasikan kelompok kiri Argentina berhasil merebut kembali pimpinan negara tersebut dari kelompok haluan kanan. Begitu juga di Bolivia, penerus Morales berhasil memenangkan pemilu pada 2020. Hal ini memperlihatkan, dinamika demokrasi dan partai ideologi tertentu akan dihakimi apabila gagal lepas dari krisis dan mengantar rakyatnya pada kemakmuran. Belum lagi godaan korupsi dan pertarungan ideologi antara kelompok berhaluan kanan dan kiri. Bersamaan dengan itu, isu kemiskinan merupakan isu dominan di Amerika Latin, sementara isu lingkungan hidup masih termasuk minim.

2. Mendorong Dinamika Konstitusional

Ruang pengorganisasian politik Indonesia merupakan ruang pengorganisasian konstitusional—berwatak kerakyatan dan demokratis (sosial, politik, dan ekonomi). Pada bagian ini, kami menawarkan model pengorganisasian yang terdiri dari tiga komponen, (1) pengorganisasian informasi konstitusional; (2) menggerakkan lapisan struktural; dan (3) melahirkan budaya konstitusional. Tiga hal ini diadopsi dari teori sistem hukum. Tiga komponen ini melekat sebagai sistem yang harus digerakkan serentak. Tidak dapat dipisahkan, ketiganya merupakan satu kesatuan.

Pada komponen substansi, hal yang harus diorganisasikan adalah informasi yang meliputi aspek sejarah, nilai, dan norma konstitusi. Menggerakkan informasi konstitusi sama halnya

²⁷² <https://tirtoid.com/benarkah-amerika-latin-bergerak-ke-kanan-cw3A>, diakses pada 21 Januari 2021.

dengan melahirkan pengertian dan/atau pengetahuan kritis. Dalam proses pengorganisasian substansial ini, sebaiknya dipilah secara tematik sesuai dengan hak konstitusional rakyat. Hal ini akan memudahkan pengarusutamaan informasi. Targetnya adalah rakyat paham tentang posisinya sebagai warga negara dan sekaligus pemegang daulat. Dan hak yang dimuat dalam konstitusi merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara.

Selanjutnya, sebagai sebuah struktur, masyarakat (*society*) diharapkan dapat mengetahui peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah mana yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Rakyat sebagai struktur utama pemegang daulat mampu melahirkan tekanan konstitusional terhadap struktur yang menjalankan mandat (daulat) secara perwakilan. Caranya dilakukan secara konstitusional, melalui jalur legal, seperti uji materi, dan penggunaan hak gugat lainnya. Sesuai muatan konstitusi, penyampaian pendapat melalui demonstrasi dan penyampaian pendapat lainnya merupakan jalur konstitusional dan demokratis.

Dua hal di atas merupakan dasar meruntuhkan *common sense* dan mendorong kebudayaan baru di masyarakat: tidak pasrah, tidak merasa inferior terhadap pemegang otoritas, dan menjadi kritis dalam menentukan pilihan politiknya. Bahkan mengusung tema perjuangan konstitusional, seperti yang kami tawarkan dalam “ekonomi nusantara.” Tawaran ini merupakan praktik dan sekaligus pengetahuan yang tidak sekadar mempunyai aspek konstitusional, namun juga mencakup kesejarahan dan perjuangan global.

3. Membangun Partai Politik Baru

Pengalaman pengorganisasian politik hijau dan sosialisme baru memperlihatkan kebutuhan untuk mengintervensi ruang politik elektoral. Oleh sebab itu, dibutuhkan kelembagaan politik formal berupa partai politik yang membawa *platform* dan

tujuan yang berbeda dari partai politik saat ini. Apalagi partai politik (yang berkuasa) hari ini terus menerus melegitimasi sistem kapitalisme. Mereka membuka jalan untuk mengejar pertumbuhan, namun abai soal keadilan sosial-ekologis.

Ide dan tawaran politik hijau dan sosialisme baru layak dipertimbangkan untuk diadopsi. Pilihan adopsi pun harus dilakukan sesuai dengan isu kerakyatan, konstitusional, dan materiil di Indonesia. Apabila meninjau enam prinsip *Charter of The Global Greens*, maka tawaran politik hijau pun sebenarnya tidak banyak berbeda dengan ide yang kita perjuangkan. Begitu pula dengan tawaran sosialisme baru. Apalagi secara historis, lahirnya Indonesia pun berasal dari cita-cita sosialisme. Namun demikian, pekerjaan rumah dalam menyajikan ide ini tentu terkait seberapa banyak rakyat yang sadar akan ide dan tawaran yang disampaikan partai baru. Karena itu pula, dominasi *common sense* akan menjadi pekerjaan rumah paling berat dalam proses pengorganisasian partai politik baru.

Membangun kendaraan baru ini membutuhkan energi yang besar. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah, tapi harus tetap dilakukan. Pengalaman pengorganisasian politik hijau dan sosialisme baru memperlihatkan kebutuhan untuk bersabar dan bekerja keras. Proses mewarnai dan masuk ke dalam parlemen akan selalu tidak berjalan mulus. Bahkan ketika berkuasa, *war in position* akan tetap terus terjadi. Belum lagi potensi represi sebelum masuk ke dalam tahap elektoral. Pengalaman Amerika Latin dapat dijadikan contoh.

Pengalaman politik elektoral Indonesia memperlihatkan bahwa partai politik acap tidak melahirkan tawaran baru. Mereka semua terkesan sama saja. Amanat konstitusional hanya jadi janji belaka. Hal itulah yang membuat kami menaruh ketidakpercayaan kepada partai politik (yang berkuasa) saat ini. Sulit, bahkan mustahil, untuk mengusung dan mengorganisir ide “ekonomi nusantara” bersama partai politik saat ini. Karena itu, menurut kami, kemungkinannya hanya mereplikasi ide, tapi tidak untuk pelaksanaannya. Bahkan partai yang menyebut

dirinya sebagai pengusung Marhanisme sekalipun sangat sulit untuk dipercaya.

Kesulitan dalam pengorganisasian politik di Indonesia juga memiliki satu perkara lain. Di Indoensia, sampai saat ini, belum ada kekuatan (partai) politik yang layak diajak membangun blok historis. Bahkan untuk beraliansi dan berkoalisi pun sangat berat. Contohnya, ketika banyak eks aktivis lingkungan, demokrasi, dan HAM yang masuk ke dalam partai politik tertentu. Di sana ternyata mereka tetap gagal memberi warna baru. Jika pun bersuara, mereka lebih sering muncul atas nama pribadi, bukan atas nama partai.

Tawaran “ekonomi nusantara” hanya akan berhenti pada level ide atau wacana apabila tidak mencoba merebut otoritas. Pilihan paling rasional saat ini adalah membangun kekuatan politik baru. Namun dalam membangun model demokrasi yang lebih partisipatif, menurut kami, haruslah dilakukan dengan meruntuhkan kuasa partai politik oligarki terlebih dahulu. Karena itu pula, melahirkan blok “merah-hijau” a la Indonesia juga merupakan suatu kebutuhan mendesak. Pun apabila kekuatan (partai) politik kerakyatan berjumlah lebih dari satu, tentu itu bukan persoalan. Karena ia akan menjadi mitra potensial bagi politik hijau untuk berkoalisi dan beraliansi. Paling tidak, pengalaman di Jerman dan Selandia Baru telah membuktikannya.

Ketika berkuasa sekalipun, blok “merah-hijau” Indonesia tidak boleh mempertahankan kuasanya secara tidak demokratis. Gerakan sosial di luar partai harus dibiarkan tetap tumbuh dan berkembang. Hal tersebut ditujukan untuk menjadi alat kontrol kritis untuk memastikan haluan kerakyatan. Evaluasi kader dan pilihan koalisi pun harus berkesinambungan. Misalnya, harus didasarkan pada kesamaan ide dan nilai perjuangan. Hal inilah yang menentukan apakah kekuatan (partai) baru ini mampu bertahan dan tidak terseret ke arah kuasa politik oligarki. Tawaran-tawaran lain tentu terbuka. Apabila pilihannya tidak dengan

cara melahirkan partai politik baru di luar kuasa oligarki, kami pun mendukung. Selama ia mengedepankan ide politik kerakyatan dan menaruh kepentingan ekonomi, sosial, dan alam sama pentingnya. Tentu pilihan ini harus didasarkan pada cara demokratis dan konstitusional.

d. Menggalang Aliansi: Strategi Wacana Tanding “Ekonomi Nusantara”

Paulson dan Gezon mempublikasikan satu ulasan penting tentang perkembangan terkini upaya *degrowth* dari belahan bumi “Selatan.” Seperti, misalnya, *swaraj* dan demokrasi ekologi di India; *gross national happiness* di Bhutan; dan *buen vivir* di Amerika Latin. Mereka menekankan beberapa refleksi penting untuk memperluas gerakan *degrowth*. Salah satunya, *degrowth* jangan hanya fokus pada perlawanan untuk menurunkan produksi dan konsumsi. Namun harus mulai melakukan apa yang disebut Latouche sebagai transformasi kebudayaan. Transformasi ini diperlukan untuk membangun matapencaharian, relasi, dan politik yang memiliki tujuan dan nilai baru.

Bersamaan dengan itu, diperlukan satu analisis ekologi-politik untuk membantu mengonseptualisasikan transformasi baru tersebut. Terutama agar dapat memengaruhi sistem budaya dan kekuasaan. Menurut Escobar, analisa tersebut dapat berupa (1) ekonomi-politik degradasi lingkungan; (2) menggali proses epistemologi tentang konsep/wacana yang berdampak pada relasi manusia dan lingkungan; dan (3) meningkatkan pertanyaan ontologis tentang produksi dan reproduksi dunia sosial-ekologis hari ini.²⁷³

Satu perangkat lainnya ialah dengan subyektivasi. Perangkat ini digunakan untuk memahami normalisasi wacana dominan dari penguasa yang bekerja atas individu. Misalnya, normalisasi

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 430-438.

wacana dalam isu-isu pembangunan, kelestarian lingkungan, SDGSs, atau pada kebijakan yang tidak adil seperti *omnibus law*. Seluruh isu tersebut dapat digunakan untuk mengupayakan penyadaran politik dan penyadaran kritis pada level individu (subyektivasi).

Di samping itu, wacana “ekonomi nusantara” juga dapat menggunakan strategi visibilitas, pemanfaatan bahasa, dan teknologi informasi. Terutama untuk memperluas jaringan, baik di level urban dan/atau level global, yang memiliki inisiatif serupa. Meningkatnya percakapan tentang keadilan ekologis dan perubahan iklim juga dapat menjadi ruang strategis tersendiri. Ruang tersebut dapat menjadi pintu masuk membentuk aliansi. Paling penting, segala inisiatif/gerakan dari berbagai spektrum wacana tersebut masih dalam kerangka yang sama yakni anti logika kapitalisme.

Namun, seperti yang diingatkan Paulson dan Gezon, perubahan di tingkat individual saja tidak cukup. Apalagi jika hendak mengubah arah kultural dan kekuasaan yang ditancapkan kapitalisme. Bagi setiap gerakan yang bermimpi melakukan perubahan, seperti kata Gramsci, sangat perlu pula untuk mempertimbangkan kedigdayaan kekuatan kultural dalam mempertahankan status quo. Walau begitu, kemungkinan untuk melakukan transformasi tetap terbuka. Karena, secara historis, pada dasarnya kapitalisme akan selalu mengalami krisis. Oleh sebab itu, Swyngedouw dkk (2015) mengusung gagasan untuk mengisi momen (krisis) tersebut dengan terus merepolitisasi wacana ekonomi dan ekologi, sembari terus belajar dari berbagai inisiatif *degrowth* yang telah ada.²⁷⁴

Dengan demikian, “ekonomi nusantara” harus diletakkan sebagai praktik baik yang perlu terus dipelajari. Bersamaan dengan itu, “ekonomi nusantara” pun perlu segera membangun aliansi bersama dengan penggerak inisiatif serupa dan

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 440.

memperluas jangkauannya pada berbagai level masyarakat. Caranya, belajar dari Zapatista, dimulai dengan melakukan pemilihan tema-tema penting (yang lebih luas) seperti demokrasi, keadilan, dan martabat. Pemilahan tersebut penting karena berkaitan dengan upaya membangun blok historis yang lebih luas. Mulai dari mereka yang paling terpinggirkan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, dan serikat buruh. Lalu diperluas lagi ke kalangan mahasiswa dan pelajar, kelompok korban bencana alam, korban pelanggaran HAM dan lingkungan, organisasi masyarakat sipil pro demokrasi, hingga kelompok agama.

Strategi memulainya dari kelompok paling marjinal tersebut bukan tanpa alasan. Seperti yang diingatkan Martinez Alier (2014), cara orang miskin berpikir tidak selalu bermula dari kesadaran lingkungan. Namun justru dari pemahaman mereka tentang kerentanan dan ancaman atas ruang hidup. Bentuk kerentanan dan ancaman tersebut beraneka ragam. Bisa bermula dari operasi industri dan kebijakan negara yang merusak lingkungan atau yang lainnya. Baru dari situ kemudian mereka mau berjuang untuk memperbaiki lingkungan.²⁷⁵

Temuan dari praktik “ekonomi nusantara” juga menunjukkan hal serupa. Masyarakat belajar dari sejarah krisis yang mereka alami. Mereka merasakan betul bagaimana operasi kapitalisme merusak segalanya. Mulai dari lingkungan, ikatan sosial, hingga kebudayaan. Pembelajaran itulah yang kemudian membangkitkan perjuangan masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya. Begitu pula dengan anak muda milenial yang masuk kelompok prekariat baru ini. Mereka sangat berbeda dengan generasi orang tuanya. Mereka lebih terpapar informasi,

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 431.

kritis, sehingga sangat potensial menjadi penggerak aliansi ini.²⁷⁶

Aliansi ini juga harus membangun komunikasi lintas wilayah secara lebih artikulatif. Karena itu pemilihan narasi menjadi krusial. Narasi tersebut harus dapat diterima lebih banyak orang, namun tetap memiliki makna perlawanan dalam wacana *degrowth*. Narasi tersebut juga harus mampu menyampaikan situasi lokal ke aras pemahaman nasional. Misalnya pada kasus Kedonganan. Minawisata dan tradisi *ngujur* dapat disebarluaskan dan dipromosikan untuk menjawab persoalan pangan akibat pandemi di level nasional.

Pada level global, upaya “ekonomi nusantara” untuk membangun aliansi lintas negara dapat dimulai dengan mereka yang juga memiliki inisiatif serupa. Misalnya dengan inisiatif *commoning*, perlawanan *growth*, dan/atau dengan gerakan antikapitalisme secara lebih umum. Pertemuan di tingkat lokal, nasional, dan Internasional harus dilakukan dengan melibatkan lebih banyak kelompok. Karena itu, “ekonomi nusantara” juga perlu bekerja sama dengan universitas atau organisasi masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan wacana “ekonomi nusantara” baik itu di tingkat nasional dan wacana *degrowth* di skala Internasional.

Aliansi ini juga perlu meniru apa yang dilakukan oleh Zapatista. Mereka dapat melakukan solidaritas dan bantuan langsung dalam pelbagai advokasi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mengancam masyarakat miskin. Misalnya, seperti saat Zapatista terlibat aktif mengupayakan penghentian mega proyek di Meksiko pada kurun waktu 2009–2014. Cara yang dilakukannya adalah dengan mengartikulasikan proyek di Meksiko ke tingkat global melalui kerangka kebijakan neoliberalisme global. Dalam upaya penyadaran publik,

²⁷⁶ Hatib Abdul Kadir, “Kita Memasuki Era Kartun Tom and Jerry” dalam <https://www.jawapos.com/opini/12/10/2020/kita-memasuki-era-kartun-tom-and-jerry/> (Diakses pada 25 Januari 2021).

sedapat mungkin narasi gerakan “ekonomi nusantara” pun harus bersifat lebih merangkul banyak orang. Misalnya, seperti yang dilakukan EZLN, dengan gaya narasi yang lebih halus dan anti kekerasan. Sehingga dapat mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat.

Dari sudut pandang perdebatan teoritik, wacana “ekonomi nusantara” perlu didorong masuk dalam percakapan konsep ekonomi dan ekologi. Misalnya dengan menautkan “ekonomi nusantara” sebagai teori dan konsep demokrasi ekonomi dan/atau sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan konstitusi. Agar lebih kontekstual, perangkatnya bisa dengan meminjam model *gross national happiness* di Bhutan—satu model rendah karbon sehingga cocok untuk menggantikan model ukuran GDP. Apalagi model tersebut juga terbukti lebih tangguh saat terjadi momen pandemi COVID-19. Selain itu, “ekonomi nusantara”, khususnya yang dilakukan di Kedonganan, dapat dipromosikan pula sebagai bentuk ekonomi-ekologis dan/atau *degrowth tourism* dalam tata kelola wisata di Indonesia. Apalagi model tata kelola di Kedonganan terbukti jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Sementara di ranah kerja-kerja pengorganisasian di tingkat lokal, pembelajaran dari praktik “ekonomi nusantara” di berbagai wilayah seperti dalam hal otonomi, semangat kolektif, dan nilai-nilai pengikat lainnya juga harus terus diperkenalkan. Pasalnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan perampasan ruang hidup juga adalah bagian dari aliansi. Bahkan mereka adalah juga figur intelektual organik. Karena sejatinya, intelektual organik ini tidak terbatas pada mereka yang ada dalam dunia akademik. Namun juga para individu yang mempraktikkan “ekonomi nusantara” di wilayahnya masing-masing. Adapun intelektual organik dari lingkungan akademik yang dapat diajak berkolaborasi adalah para ilmuwan/akademisi yang memiliki keberpihakan jelas. Mereka kritis terhadap lingkungan, demokrasi, dan terutama pada praktik kapitalisme dan neoliberalisme.

Aliansi ini belum menjadikan pemain politik elektoral hari ini sebagai satu bagian dari aliansi. Aliansi justru harus memainkan upaya menciptakan wajah politik alternatif baru. Misalnya dengan meningkatkan percakapan tentang wacana politik hijau dan menyadarkan para pemilih (politik elektoral) tentang demokrasi ekonomi dan ekonomi-ekologis. Strategi-strategi ini sudah disinggung pada Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI tahun 2020. Dan dari segi advokasi, aliansi perlu lebih intensif lagi membela masyarakat miskin dari aneka bentuk kejahatan peraturan perundang-undangan dan kerjasama ekonomi kapitalisme. Bentuknya bermacam-macam, seperti kebijakan yang tidak pro masyarakat adat, kebijakan energi kotor, *omnibus law*, atau kebijakan yang mempermulus praktik eksploitasi dan apropriasi manusia dan non-manusia di bumi Indonesia.

Kunci menggalang aliansi adalah kesamaan lawan dan nilai yang diusung. Kunci ini pula yang digunakan untuk merebut (kembali) daulat rakyat. Aliansi yang kuat juga menentukan pembagian peran dan pilihan strategi politik. Misalnya, dengan mewarnai atau masuk ruang praktis elektoral. Bagian dari aliansi yang terbangun ini juga bertugas untuk mendorong dan mengumpulkan dukungan. Dari basis kesadaran politik kritis individu, naik ke level kelompok, komunitas, dan membesar ke jaringan dan ruang lebih luas – baik itu nasional atau global. Dengan kata lain, semakin luas dan besar maka makin baik. Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa keadilan sosial-ekologis tidak hanya tumbuh dalam spot lokal atau nasional. Pasalnya, batasan ekosfer yang menjadi alarm keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan alam tidak dapat dilihat secara parsial. Perubahan iklim merupakan contoh bahwa perjuangan sosial-ekologis harus dilakukan secara global. Apalagi, ruang politik global juga turut andil menentukan kelanjutan nasib seluruh makhluk di muka bumi ini.

BAB LIMA

Penutup

A. Simpulan

Temuan dan analisis penelitian ini melahirkan beberapa simpulan, yaitu:

1. Visibilitas praktik dan pengetahuan “ekonomi nusantara” di lokasi penelitian dengan aneka lanskap ekologis dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Praktik “ekonomi nusantara” yang menaruh kepentingan ekonomi, sosial, dan alam (lingkungan hidup) secara seimbang masih eksis. Kondisinya di masing-masing lokasi berbeda. Rinciannya, yaitu
 - 1) Praktik “ekonomi nusantara” di Desa Adat Kedongan, Kampung Lung Isun, dan Dusun Sendi berada dalam kondisi berjaya. Relasi baik dengan alam membuat masyarakat hidup berkecukupan secara ekonomi dan mempertahankan kesakralan hubungan sosial (termasuk adat dan keagamaan). Kunci menemukan kembali kejayaannya berasal dari kekuatan institusi lokal dan kemampuan mengelola ancaman dan dukungan;
 - 2) Tiga lokasi di Desa Tanjung Aur, Desa Sinar Mulya, dan Lebak Rawang masih mampu bertahan dengan praktik baik “ekonomi nusantara.”

Sayangnya, praktik dan pengetahuan baik ini telah banyak mengalami kemunduran. Beberapa kearifan lokal telah hilang. Salah satu penyebabnya adalah ancaman investasi berbasis lahan skala besar. Apabila masyarakat gagal memperkuat institusi lokal dan sekaligus mengelola ancaman dan dukungan, maka tidak menutup kemungkinan praktik “ekonomi nusantara” di tiga lokasi ini akan hilang;

- 3) Praktik “ekonomi nusantara” di Lebak Belanti berada di ujung kepunahan. Lebak Belanti yang dulunya lumbung pangan kini berubah menjadi kampung buruh tani. Sawah telah berubah menjadi lokasi genangan air buangan kanal perusahaan. Tradisi dan praktik baik “ekonomi nusantara” digerus korporasi perkebunan skala besar. Kini hanya tersisa praktik lokal menangkap ikan.
- b. Temuan di seluruh lokasi penelitian memperlihatkan bahwa praktik dan pengetahuan “ekonomi nusantara” layak diposisikan sebagai wacana lain. Bahkan sekaligus menjadi narasi tanding terhadap hegemoni sistem kapitalisme, lengkap dengan model ukuran pertumbuhan ekonominya. Hegemoni tersebut tidak sesuai dengan corak ke-Indonesia-an. Hegemoni ini pun menjadi penyebab runtuhnya integrasi praktik ekonomi yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan alam. Investasi sebagai salah satu variabel perhitungan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab jauhnya masyarakat dari kesejahteraan. “Ekonomi nusantara” sebagai wacana lain cukup identik dengan gagasan gerakan *degrowth*. Gerakan global ini juga sama-sama menolak sistem kapitalisme dengan ukuran pertumbuhan ekonomi. Bahkan empat indikator utama “ekonomi nusantara” sejalan dengan tiga ide

besar *degrowthers*: mendorong praktik ekonomi ekologis, mendorong penurunan konsumsi, dan menolak ekonomi kapitalistik.

2. Sebagai narasi tanding terhadap hegemoni *economic growth*, konsep “ekonomi nusantara” muncul sebagai tawaran solusi untuk memulihkan Indonesia dari krisis dan merespon *climate emergency*—satu situasi di mana krisis semakin meluas dan merugikan umat manusia dan seluruh komponen ekologis. Kekhususan lain konsep “ekonomi nusantara” adalah keselarasannya secara historis, konstitusional, dan dengan gerakan global. Tiga modal tersebut menjadi dasar untuk mendorong “ekonomi nusantara” menjadi pengetahuan dan sekaligus praktik yang otoritatif untuk memulihkan Indonesia dari krisis sosial-ekologis hari ini. Cara pengarustamaan “ekonomi nusantara” dimulai dengan melakukan pengorganisasian sebagai pekerjaan rumah paling utama. Tujuannya menciptakan *war of position* antara narasi dominan pertumbuhan ekonomi dan “ekonomi nusantara.” Adapun kerja-kerja pengorganisasian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Melepaskan publik dan komunitas dari *common sense* hegemoni pertumbuhan ekonomi (termasuk pertumbuhan hijau). Komunitas dan publik luas harus sadar bahwa negara telah keliru memilih jalan berekonomi;
 - b. Memutus regenerasi hegemoni dari ruang pendidikan dan seni. “Ekonomi nusantara” dan tawaran pengetahuan konstitusional dan historis harus disiapkan untuk memutus mata rantai regenerasi sistem kapitalisme;
 - c. Menyiapkan saluran politik yang emansipatoris dan partisipatif untuk menyalurkan “ekonomi nusantara,” secara demokratis. “Ekonomi nusantara” yang sejalan dengan konstitusi, ide, dan cita-cita dibentuknya

Indonesia layak menjadi kekuatan pendobrak hegemoni kapitalisme dan kuasa oligarki;

- d. Proses mengaktivasi ruang pengorganisasian di ruang publik, pendidikan, dan politik harus disiapkan dengan kerja bersama. Sehingga melahirkan aliansi besar yang mampu meruntuhkan kuasa dan hegemoni kelompok oligarki.
- e. Membuka kemungkinan untuk membentuk aliansi politik “merah-hijau” dengan kelompok progresif di Indonesia. Seperti aliansi antara Partai Hijau dengan Partai Buruh dan/atau Partai Kelas Pekerja di Selandia Baru dan Jerman.

B. Rekomendasi

Simpulan di atas mendorong kami untuk mengajukan beberapa rekomendasi untuk mencongkel tipuan kapitalisme bahwa “kesejahteraan hanya dapat tercipta melalui model ekonomi pertumbuhan.” Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh lapisan dan komponen masyarakat sipil (buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pelajar, masyarakat adat, akademisi, kelompok pro demokrasi, kelompok korban dan minoritas, pegiat lingkungan dan agraria, dan lainnya) perlu membangun aliansi untuk:
 - a. Menolak cara berekonomi kapitalistik, termasuk dengan wajah terbarunya, “pertumbuhan hijau.” Pilihan berekonomi ini jelas ahistoris dan inkonstitusional. Alih-alih menyejahterakan, pilihan berekonomi tersebut justru menjerat Indonesia dalam krisis. Efeknya, hidup rakyat kebanyakan jatuh dalam ketimpangan ekonomi dan akses politik, bahkan

banyak komunitas adat dan masyarakat lokal terancam kehilangan keberagaman identitas kebudayaan;

- b. Menghentikan regenerasi pengetahuan yang melanggengkan kapitalisme. Selanjutnya, bersama-sama membangun pengetahuan ekonomi-politik yang selaras dengan aspek kesejarahan dan konstitusional. Selaras dengan ide dan cita-cita dibentuknya Indonesia sesuai rumusan Pembukaan UUD NRI 1945. Menaruh batasan ekologis sebagai dasar gerak pengetahuan dan teknologi. Jaringan pengetahuan ini sebaiknya juga membaaur dengan jaringan Internasional yang juga menolak model pertumbuhan ekonomi;
- c. Menggerakkan dan mereplikasi praktik “ekonomi nusantara” di sebanyak mungkin desa/kampung/komunitas/lokasi, baik itu yang sedang terkepung korporasi atau belum begitu terintervensi kapitalisme. Praksis ini lalu didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran bahwa “dunia lain” itu mungkin dan perlu diwujudkan;
- d. Membangun kekuatan politik kerakyatan di luar hegemoni kuasa oligarki. Membangun blok historis baru, salah satunya bisa dengan cara berjuang memenangkan politik elektoral. Paling penting, kendaraan politik tersebut juga harus mengusung ide “ekonomi nusantara.” Satu ide yang senafas dengan cita-cita pembentukan Indonesia: demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Cita-cita ini yang akan mengantar kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan tidak hanya bagi manusia Indonesia semata, tapi juga bagi seluruh komponen ekologis Indonesia.

2. Kami merekomendasikan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta lembaga negara lainnya untuk kembali meluruskan jalan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia. Satu jalan yang memuliakan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Pilihan menggerakkan negara dengan jalan konstitusional dan selaras dengan sejarah dibentuknya Indonesia. Mandat rakyat adalah mandat konstitusional. Sehingga putusan politik, kebijakan legislasi, dan tindakan lain (penggusuran, tindakan represif, diskriminasi ekonomi dan lainnya) harus mencerminkan ide kerakyatan. Produk hukum, kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan semangat tersebut harus dibatalkan dan/atau dimaknai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

A. Buku dan Jurnal

- Abdulgani, Roeslan. 1964. *Sosialisme Indonesia Perkembangan Tjita2nya, Ketegasannja, Sosialisme Utopia, Sosialisme Ilmijah*. Jajasan Prapantja.
- Acemoglu, Daron. 2009. *Introduction to Modern Economic Growth*. New Jersey: Princeton University Press.
- Adityanandana, Made dan Julien-Francois Gerber. 2019. "Post-growth in the Tropics? Contestations over Tri Hita Karana and a tourism megaproject in Bali." *Journal of Sustainable Tourism*.
- Alexander, Samuel. 2017. "Degrowth as an 'Aesthetics of Existence.'" *MSSI Monograph Series Melbourne Sustainable Society Institute, The University of Melbourne*.
- Archer, Robert. 1995. *Economic Democracy The Politics of Feasible Socialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Asara, Viana Dkk. 2015. "Socially Sustainable Degrowth as a Social-Ecological Transformation: Repoliticizing Sustainability." *Sustain Sci*.
- Astutiningsih, Sri Eka dan Citra Mulya Sari. 2017. "Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Bloemmen, Marjolijn Dkk. 2015. "Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture." *Jurnal Ecological Economic* 112.
- Bookchin, Murray. 1980. *Toward an Ecological Society*. Quebec: Montreal Black Rose Books.
- Bungin, Burhan (Ed). 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burkhart, Corinna Dkk (Ed). 2020. *Degrowth Movement(s): Exploring Pathways for transformation*. UK: Zero Books.
- Calhoun, C. & J. Gerteis Dkk. 2007. *Contemporary Sociological Theory*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Coedes, George. 2014. *Kedatuan Sriwijaya*. Depok: Komunitas Bambu.

- Darwin, Muhadjir. 2017. "(Resensi Buku) Negara Gagal: Bagaimana dengan Indonesia." *Jurnal Populasi* Volume 25 Nomor 1.
- De Angelis, Massimo. 2014. "The Commons: Brief Journey of Life Journey." *Community Development Journal* Vol. 49 No. 51 Januari.
- Díez-Gutiérrez, Enrique Javier & José María Díaz-Nafría. 2019. "Degrowth and Educative Deconstruction of the Neoliberal Subject: Alternatives to Build up a Sustainable Society." *ICA Workshop*.
- Escobar, Arturo. 2001. "Culture sits in Places: Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Localization." *Political Geography*.
- Euler, Johannes. 2019. "The Commons: A Social Form that Allows for Degrowth and Sustainability." *Journal Capitalism Nature Socialism*.
- Fadli, Muhammad Rijal & Dyah Kumalasari. 2019. "Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)." *Jurnal Agastya* Vol. 9 No. 2.
- Fioramonti, Lorenzo. 2017. *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Reaitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Fitriyana, Neli. 2019. "Peran Pangeran Cungkai Dalam Mengembangkan Islam di Kaur Tahun 1700 – 1842." *Tesis*: Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Fletcher, Robert Dkk. 2019. "Tourism and degrowth: an emerging agenda for research and praxis." *Journal of Sustainable Tourism*.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gezon, Lisa L & Susan Paulson (Ed). 2017. "Degrowth, culture and power." Special Section of *the Journal of Political Ecology*.
- Gibson, Luke. 2017. "Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest." *Brief Paper*: Oxfam International and INFID.
- Graeber, David. 2014. "On the moral grounds of economic relations: A Maussian approach." *Journal of Classical Sociology* 14:65.

- Gramsci, Antonio & the Palabra Verdadera. 1999. "The Political Discourse of Mexico's Guerrilla Forces." *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* Vol. 41, No. 2.
- Halsey, Mark dan Rob White. 1998. "Crime, Ecophilosophie, Environmental Harm." *Theoretical Criminology (Sage Publication)* Vol. 2.
- Hiariej, Eric. 2006. "Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10 No. 1, Juli 2006.
- Ingebrigtsen, Stig dan Ove Jakobsen. 2012. "Utopias and realism in ecological economics—Knowledge, understanding, and improvisation." *Ecological Economics* 84.
- Klitgaard, Kent. 2010. "Secular Stagnation and the Failed Growth Economy." Makalah *2nd Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity*, Barcelona 2010.
- Kreps, David. 2015. *Gramsci and Foucault: A Reassessment*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
- Kurniawan, Kevin Nobel. 2020. *Kisah Sosiologi: Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*. Jakarta: Obor.
- Kuznets, Simone. 1937. *National Income and Capital Formation 1929-1932*. National Bureau of Economic Research.
- Lama, Dalai & Franz Alt. 2020. *Our Only Home: A Climate Appeal to the World*. New York: Hanover Square Press.
- Launa & M. Azman Fajar. 2008. "Jalan 'Sosialisme Baru' Amerika Latin: Sebuah Era Baru." *Jurnal Sosial Demokrasi* Volume 4 Nomor 1, Oktober-Desember 2008.
- Lautoche, Serge. 2009. *Farewell to Growth*. Cambridge: Polity Press.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria, Federico Dkk. 2013. "What is Degrowth: From an Activist Slogan to a Social Movement." *Jurnal Environmental Values*.
- Marry, Rahma Dkk. 2007. *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*. Jakarta: Perkumpulan HuMa dan LBH Semarang.
- Marsden, William. 2013. *Sejarah Sumatra*. Depok: Komunitas Bambu.

- Martínez-Alier, Joan. 2012. "Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements." *Jurnal Capitalism Nature Socialism* Volume 23, Maret.
- Menteri Kehutanan. 1998. *Surat Keputusan Nomor 309/Kpts-II/1998 27/02/1998 Penunjukkan HPT Bukit Kumbang Regional 85*. Jakarta.
- Menton, Marry & Carlos Larrea Dkk. 2020. "Environmental justice and the SDGs: from synergies to gaps and contradictions." *Jurnal Springer: Sustainability Science* April.
- Moore, Jason W (Ed). 2016. *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism*. Oakland: PM Press.
- Murray Bookchin. 2018. *Ekologi dan Anarkisme: Kumpulan Esai* (Terj. Bima Satria). Salatiga: Pustaka Catut.
- Murray Li, Tania. 2020. *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Ritzer, George & Barry Smart (ED). 2012. *Handbook Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Schoppek, Dorothea Elena. 2020. "How Far is Degrowth a Really Revolutionary Counter Movement to Neoliberalism?" *Environmental Values* 29 (2) April.
- Seknas Jokowi. 2014. *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*. Jakarta: Seknas Jokowi.
- Sembiring, Boy Jerry Even Dkk. 2019. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2019: Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?* Jakarta: WALHI.
- Shahbanu, Alwiya Dkk. 2019. *Mengarak Ekonomi Tanding: Solusi Melawan Bujuk Rayu Ekonomi Tambang Batubara (Strategi dan Siasat Warga di Bengkulu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Terj. Imam Baehaqi). Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (Ed). 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sohibuddin, Mohammad. 2009. *Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute dan IPB.

- Stiglitz, Joseph E Dkk. 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan* (Terj. Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur). Jakarta: Marjin Kiri.
- Suadiardja, Antonius. 2019. "Michel Foucault (1926-1984)." *Bahan Ajar Extension Course Filsafat*, 11 November 2019.
- Swasono, Sri-Edi. 2008. "Mewaspadaai Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi." Disampaikan dalam *Konferensi FISIP UI "Warisan Otoritarianisme dan Tirani Modal"* pada 5 Agustus 2008.
- Syahrudin & Heri Susanto. 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonial Nusantara sampai Reformasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Tim Penulis. 2018. "Valuasi Ekonomi di 6 Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia" dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tidak dipublikasikan.
- Wahyunto Dkk. 2005. *Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada: Bogor.
- Wai-Poi, Matthew Dkk. 2019. *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*. Washington: The World Bank.
- White, Rob. 2008. *Crime Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Devon: William Publishing.
- Wijayanti, Kartika Giri. 2014. "Analisis Gramsci Terhadap Ide Pemerintah Meksiko pada Gerakan Zapatista (Periode 1994-2006)." *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I.
- Wrigley, Kylie. 2020. "Degrowth Dilemmas: Analysing the discourse of movement advocates in the debate on growth." *Master-Thesis: Development, Environment, and Cultural Change*, Centre for Development and the Environment University I OSLO.
- Yusdani. 2004. "The Book of Simbur Cahaya The Receptive Theory Point of View." *Jurnal Al Millah* Vol. 3 No. 2.

B. Internet

- Ahmad, Hussein. 2015. "Erosi Kultural Bromo Tengger Semeru." dalam <https://www.kompasiana.com/fixiegreen/55c56f824f9773b810eb9caf/erosi-kultural-bromo-tengger-semeru>, 08 Agustus, pukul 09:55 WIB.
- Andrea Grainger. 2019. "In defence of degrowth." <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/defence-degrowth/>, Diakses pada 25 Januari 2021.
- Anonim. 2014. "Sejarah dan Jasa-Jasa Mulia Mpu Kuturan di Bali." <http://hindudamai.blogspot.com/2014/05/sejarah-dan-jasa-jasa-mulia-mpu-kuturan.html>, 30 Mei, pukul 08:08 WIB.
- Apriando, Tommy. 2014. "Jerinx SID: Jokowi Harus Batalkan Reklamasi Teluk Bena." <https://www.mongabay.co.id/2014/09/12/jerinx-sid-jokowi-harus-batalkan-reklamasi-teluk-bena/>.
- Bappenas. TT. "Indonesian Green Growth Program." <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>, Diakses 26 Oktober 2020.
- BPS. 2020. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, Diakses 26 September 2020.
- Burkhart, Corinna Dkk. 2016. "Degrowth In Movement, Strengthening Alternatives and Overcoming Growth, Competition and Profit." <https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/degrowth/>, Diakses pada 30 Maret 2020.
- Firmansyah, Manda. 2021. "WALHI: Bencana hidrometeorologi di era Presiden Jokowi naik." <https://www.alinea.id/nasional/walhi-bencana-hidrometeorologi-di-era-presiden-jokowi-naik-b2cwB906z>, Diakses pada 5 Februari 2021.
- Friends of The Earth International. TT. "Economic justice and resisting neoliberalism." https://www.foei.org/_what-we-do/economic-justice-resisting-neoliberalism, Diakses pada 24 Maret 2020.
- Ghofar, M. 2018. "Kampung Metalibaq Telusuri Sejarah Berdirinya." <https://kaltim.antaranews.com/berita/48901/kampungng->

matalibaq-telusuri-sejarah-berdirinya, 26 Desember, pukul 14:42 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Party_of_Aotearoa_New_Zealand#The_Alliance_years, Diakses pada 18 Januari 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses berulang dari September 2019 s/d Februari 2021.

https://kbr.id/opini_anda/032013/kontroversi_chavez_tradisi_politik_amerika_latin_dan_keberhasilan_sosialisme/68261.html, Diakses pada 27 Januari 2021.

<https://republika.co.id/berita/qj40ug382/jacinda-ardern-bentuk-pemerintahan-baru-dengan-partai-hijau>, Diakses pada 25 Desember 2020.

<https://tirta.id/benarkah-amerika-latin-bergerak-ke-kanan-cw3A>, Diakses pada 21 Januari 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/262070/pengamat-uud-1945-anjurkan-sosialisme-indonesia>, Diakses pada 31 Januari 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/661160/dituduh-korupsi-11-pejabat-perusahaan-minyak-venezuela-ditangkap>, Diakses pada 19 Januari 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45272065>, Diakses pada 19 Januari 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47223838>, Diakses pada 19 Januari 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47144750>, Diakses pada 19 Januari 2021.

<https://www.globalgreens.org/globalcharter>, Diakses pada 21 Januari 2021.

<https://www.globalgreens.org/literature/maier/westerneurope>, Diakses pada 21 Januari 2021.

<https://www.greens.org.nz/about>, Diakses pada 21 Januari 2021.

<https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte>, Diakses pada 17 Januari 2021.

- Indonesia-Investments. 2020. "Produk Domestik Bruto Indonesia", <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia>, Diakses pada 26 Oktober 2020.
- Kadir, Hatib Abdul. 2020. "Kita Memasuki Era Kartun Tom and Jerry." <https://www.jawapos.com/opini/12/10/2020/kita-memasuki-era-kartun-tom-and-jerry/>, Diakses pada 25 Januari 2021.
- Kallis, Giorgos. 2015. "The Degrowth Alternative." <https://greattransition.org/images/Kallis-Degrowth-Alternative.pdf>, Diakses pada 20 November 2020.
- Katadata. 2018. "Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>, Diakses 20 Januari 2020.
- Keating, Joshua. 2020. "In Europe, Green Is the New Red." <https://slate.com/news-and-politics/2020/07/green-parties-france-ireland-austria.html>, Diakses pada 27 Januari 2021.
- Latif, Yudi. TT. "Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya terhadap Perumusan Konstitusi." https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf, Diakses pada 12 Februari 2021.
- Magnus-Johnston, James. 2020. "New Zealand Deprioritizes Growth, Improves Health and Wellbeing." <https://www.resilience.org/stories/2020-05-13/new-zealand-deprioritizes-growth-improves-health-and-wellbeing/>, Diakses pada 4 Januari 2021.
- Mahmudi, Adib Dian. 2017. "Klaim Para Penjahar." http://kpa.or.id/media/baca2/opini/7/KLAIM_PARA_PENJARAH/, Diakses pada 02 April, pukul 00:00 WIB.
- Perhutani. 2019. *Profile Perum Perhutani 2019*. <https://perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/pada>, Diakses pada 21 Januari 2020.
- Ralph Miliband. 2018. "Counter-Hegemonic Struggles." <https://jacobinmag.com/2018/06/ralph-miliband-socialism-legitimation-hegemony>, Diakses 25 Januari 2021.

- Ramadhian, Nabila. 2020. "Melasti dan Pengerupukan, Upacara Sebelum Melakukan Nyepi." <https://travel.kompas.com/read/2020/03/24/223300227/melasti-dan-pengerupukan-upacara-sebelum-melakukan-nyepi>, Diakses pada 24 Maret 2020, pukul 22:33 WIB.
- Sudiarta, Ketut Dkk. 2013. "Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali." <https://drive.google.com/file/d/0B-OM5NIm3dkzLXdfUGFwQUxmMmM/edit>, Diakses pada 26 Juni 2020.
- Suriyani, Luh De. 2018. "Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali." <https://www.mongabay.co.id/2018/12/15/kedonganan-kampung-nelayan-yang-bertahan-di-pusat-turisme-bali/>, Diakses pada 15 Desember 2020.
- Swasono, Sri-Edi. TT. "Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat." <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2008/12/sri-edi-swasono-asas-kekeluargaan.pdf>, Diakses pada 30 Januari 2021.
- UNU-CRIS. TT. "Wellbeing Economy - Success in a World without Growth." <https://cris.unu.edu/wellbeing-economy-success-world-without-growth>, Diakses pada 26 Oktober 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan

- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 297 tentang Penetapan Lokasi Atas Tanah Untuk Pembangunan Program Permukiman TNI Angkatan Laut (Prokimal) Bengkulu.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Boy Jerry Even Sembiring

Even, begitu biasa disapa. Namun, sepuluh tahun belakangan, banyak orang mengenal dan menyapa dengan nama depannya. Anak kelima dari enam bersaudara ini lahir di Pekanbaru, 27 Juni 1987. Di Pertengahan studi menengah pertama, Bapak-nya mulai mengenalkannya dengan beberapa buah karya Soekarno dan Hatta. Hal inilah yang mengantarkannya menikmati diskusi dan bahan bacaan kritis. Mulai aktif di beberapa organisasi dan kelompok diskusi di pertengahan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penghujung masa studi di kampus menjadi tonggak awal mengenal organisasi non-pemerintah (ornop). Kelompok Advokasi Riau (KAR) merupakan ornop pertama tempat ia mengabdikan. Tidak lama setelahnya, melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selama di Semarang, aktif di Kelompok Diskusi Tjipian, yang akhirnya melahirkan lembaga penelitian Satjipto Rahardjo Institute. Pasca studi, memilih pekerjaan di kantor hukum, Jakarta dan Pekanbaru. Juni dan Oktober 2013 merupakan momen penting yang mengantarnya meninggalkan dunia hukum profit. Meninggalkan kantor hukum dan memilih bergabung dengan WALHI Riau. Dipercaya menjadi Deputy Direktur Eksekutif Daerah. Pada 2014 bergabung menjadi peneliti/ anggota *Riau Corruption Trial* (kini Senarai). Tiga setengah tahun di WALHI Riau, bergabung ke Eksekutif Nasional WALHI. Dari Maret 2017 sampai saat ini tercatat sebagai Manajer Kajian Kebijakan WALHI. Tugasnya melakukan analisis kebijakan, sosial, dan hukum. Pekerjaan ini mengantarnya dikenal sebagai advokat publik sekaligus peneliti hukum dan sosial. Beberapa publikasinya (baik sendiri maupun bersama), yaitu “Penerbitan Izin PT. RAPP di Pulau Padang (Analisis Kebijakan dan Sosiologi Konflik)” (Jurnal Selat, 2015); novel non fiksi *Cerita dari Sungai Tohor* (2016); “Kebakaran Hutan Indonesia, Siapa yang Melanggengkan? Sebuah Analisis Singkat (kontributor, 2016); “Melampaui Restorasi Gambut: Cerita

Kearifan Dan Inisiatif Lokal Memulih-Selamatkan Ekosistem Rawa Gambut” dalam Dokumen Kajian Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding (2016); “*Rencana Kotor Di Balik RUU Perkelapasawitan*” (2017); “*Studi Efektivitas Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Selama Periode Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla*” (2019); “*Mencari Keadilan di Tanah Perjuangan Masyarakat Adat Sakai Komentar Tertulis Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Pemidanaan Dipaksakan Pada Perkara Pidana No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls di Pengadilan Negeri Bengkalis*” (2020); dan “*Melompat ke Jurang Krisis yang Lebih Curam?*” (2020). Ia memimpin penulisan tiga Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI, yaitu “*Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik*” (2018) “*Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?*” (2019); “*Menuai Krisis Multidimensi*” (2020). Awal tahun ini menyumbang tulisan ekonomi, hukum dan politik dalam publikasi Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI “*Negara Gagal Atasi Krisis?*” (2021). Selain itu, ia dua kali menjadi co-editor pada publikasi “*Mata Tajam Eyes on the Forest Antologi Laporan Investigasi EoF 2005-2006, Mengupas Tuntas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*” (2006); dan “*Studi Investigasi Praktik Kotor "Perkebunan Kayu" (IUPHHK-HT/ Hutan Tanaman Industri)*” (2021). Kontak: sembiring.even@gmail.com.

Tanti Budi Suryani

Mahasiswa Doktoral Antropologi Universitas Indonesia dengan disertasi tentang politik nilai dan kekuasaan pada konteks revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau. Tesis Master Sosiologinya dari FISIP Universitas Indonesia (2015) tentang “*Resistensi Komunal Berbasis Informationalism di Wilayah Bencana Teknologi (Studi Kasus Komunitas Jimpitan Sehat dan Ar-Rohmah Yang Terdampak Semburan Lumpur di Kabupaten Sidoarjo)*.” Studi ini merupakan bentuk keterlibatannya dalam jejaring advokasi komunitas terdampak di kasus Lumpur Lapindo (2008 - 2014). Tesis ini pernah dipresentasikan pada pertemuan *4th International Conference on*

Human Rights and Peace and Conflict in Southeast Asia: Reclaiming Lost Ground, SEAHRN (2016). Aktivist dan Peneliti pada isu hak atas informasi, akses informasi, pemerintahan terbuka, kelestarian lingkungan, dan isu sosial kemanusiaan lainnya. Beberapa tulisannya dipublikasikan di Prisma (2011), The Jakarta Post (2010), dan INSIST (2017). Menjadi pembicara Internasional tentang demokrasi pada pertemuan *Southeast Asia Media Legal Defense Conference* (2010), *International Anti-Corruption Conference (IACC 15) hosted by Transparency International* (2012). Dapat dihubungi melalui: duadunia1ibu.ts@gmail.com.

Bagas Yusuf Kausan

Seorang pembelajar amatir paruh waktu (*part-time*). Lahir di Kampung Pasirkaliki Tengah, Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung, Jawa Barat, 09 Desember 1996. Setelah lulus dari pendidikan menengah atas di Bandung, melanjutkan pendidikan ke Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang dan lulus pada tahun 2019. Sejak mahasiswa sampai sekarang aktif bekerja di media kolektif Kalamkopi.id dan Kooperasi Moeda Kerdja (Semarang). Saat ini sedang aktif membantu riset Eksekutif Nasional WALHI tentang proyek infrastruktur di Papua. Tertarik dengan percakapan tentang sejarah perkampungan kota, urbanisasi, arsip/dokumentasi, ekologi-politik, dan pekerja immaterial. Meski sedikit, beberapa akun media sosial dan publikasi tulisannya dapat ditemukan dengan mengetik nama "Bagas Yusuf Kausan" di mesin pencarian (daring) seperti *Google*. Kontak: Bagasyusufkausan@gmail.com.

Ignasius Hanyang

Lahir di Long Hubung, 25 Mei 1985, Dayak Bahau Busang Nyang, begitu ia biasa disapa, mempunyai riwayat pendidikan formal yaitu SDK Long Hubung, lulus tahun 1997; SMPN 1 Long Hubung lulus tahun 2000; SMA Katolik Wr. Soepratman Samarinda lulus tahun 2003; dan STMIK WICIDA Samarinda 2004-2008. Pengalamannya di organisasi masyarakat sipil dimulai sebagai *office boy* (2002-2008) di Perkumpulan Nurani Perempuan. Saat ini, ia merupakan Koordinator Divisi Dokumentasi dan Publikasi Perkumpulan Nurani Perempuan. Pada 2008-2013 dia dipercaya sebagai Staf Divisi Resolusi Konflik (2008-2013); Koordinator Divisi Resolusi Konflik (2013-2016); dan Koordinator Riset Tradisi Lisan di Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies (2014-2016). Pada tahun 2016, Hanyang mendapat mandat menjadi Direktur *ad Interim* Perkumpulan Nurani Perempuan. Selain aktif di Perkumpulan Nurani Perempuan, Nyang juga aktif di Tim Pemberdayaan *Credit Union* Petemai Urip; Koordinator Riset Tradisi Lisan di Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies; Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kalimantan Timur; Pembina LPADKT DPC Samarinda Ulu; dan anggota Gerakan Pemuda Dayak (GERDAYAK) Kalimantan Timur. Lokasi penelitian Lung Isun merupakan salah satu lokasi yang secara intens didampinginya bersama Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Pada 2018, Nyang bersama Roedy Haryo Widjono AMZ, Awang Leander, dan Martha Doq menerbitkan sebuah buku *Cerita Rakyat Dayak Bahau Busang Sastra Lisan Warisan Leluhur*. Kontak: icna5_nyang@yahoo.co.id.

Deni Arian Nando

Lahir di Baturaja tahun 1994. Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu, mendapatkan beasiswa Bidikmisi dari pemerintah untuk Program Sarjana Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya, 2012-2017 (1 tahun lanjut dengan biaya sendiri karena habis masa subsidi 4 tahun). Aktif berorganisasi dan menjadi Ketua Umum KPA Elite Armada Rimba Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2015-2016. Pernah menjadi Manajer Pengelolaan Sumber Daya dan Organisasi di Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan tahun 2018-2020. Sejak Desember 2019 melanjutkan pendidikan Program Magister Administrasi Publik di Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi kebijakan publik. Saat ini sebagai Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.

Abdul Ghofar

Berasal dari Kabupaten Kendal, sebuah wilayah *peripheral* Kota Semarang. Ia menamatkan jenjang S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Walisongo pada 2018. Melanjutkan S2 di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Unika Soegijapranata, namun tak selesai karena mangkir. Pada 2014 mendirikan Komunitas Pecinta Alam Pashtunwali. Keterlibatan dalam gerakan lingkungan membawanya masuk ke Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah sebagai Koordinator Advokasi dan Kampanye pada 2017-2019. Sejak September 2019, ia menjadi siswa magang isu urban dan iklim di Eksekutif Nasional WALHI.

Puspita Indah Sari Sitompul

Biasa disapa Butet. Lahir pada 2 Mei 1994 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Anak terakhir dari empat bersaudara ini dikenal sebagai penyanyi. Bermula bergabung di Rumah Koalisi

Masyarakat Peduli Balita Korban Asap pada tahun 2015 untuk membantu proses evakuasi balita terdampak bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mengikuti *Green Student Movement* 2016 WALHI Sumatera Selatan karena ketertarikannya pada lingkungan hidup. Pada tahun 2017, mendapatkan Program Beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan (SAPP) Sajogyo Institute dan menyelesaikan buku pertamanya bersama tandemnya Rina Saputri dengan judul tulisan “Sedumuk Bathuk Sanyari Bumi: Perlawanan dan Nasib Hidup Transmigran Di Tanah Harapan” dalam buku *Perempuan di Tanah Kemelut: Situasi Perempuan dalam situasi-situasi Krisis Sosial Ekologis*. Selanjutnya mendapatkan beasiswa di Sekolah Indonesia Volunteers For Social Movement (INVOLMENT) angkatan ke X di *Indonesian Society For Social Transformation* (INSIST) November 2017. Dari 2018 sampai saat ini menjadi fungsionaris WALHI Sumatera Selatan.

Agus Dwi Hastutik

ADH, untuk singkat. Selalu bersemangat menghadapi tantangan baru untuk terus berkembang dan menikmati perspektif baru. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan didorong motivasi diri dengan komitmen yang kuat. Setelah lulus dari studi S1 Sastra Inggris Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, pada Oktober 2018, ia kemudian bergabung dengan WALHI Nasional sebagai asisten pengampanye Internasional pada Januari 2019. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman sebagai jurnalis magang di *The Jakarta Post* untuk *desk features* selama tiga bulan, September - November 2017. Selama bersama WALHI, ia membantu mewujudkan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan bersama masyarakat lokal. Ia juga pernah menghadiri konferensi Warisan Dunia UNESCO di Baku, Azerbaijan, pada bulan Juli 2019 untuk mengkampanyekan perlindungan terhadap hutan hujan tropis Sumatera dan konsep Wilayah Kelola Rakyat yang diusung oleh WALHI sejak tahun 1990-an.

Meike Inda Erlina

Mei, sebuah nama kecil sekaligus panggilan akrab terhadap Meike Inda Erlina ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Perempuan yang lahir di Bengkulu 27 tahun silam tepatnya 2 Mei 1993 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu pada tahun 2016. Penyuka anime dan *camping* ini, selama masa mahasiswa aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial se-Indonesia (FORKOMKASI), kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Nasional periode 2015-2017 dan merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu tahun 2012-2016. Tepat pada pertengahan Ramadhan 2017, Mei bergabung di Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu sebagai Manajer Kampanye Hak-hak Perempuan. Selama ± 2,5 tahun berproses di ED WALHI Bengkulu, ia berkesempatan belajar ke Filipina pada kegiatan *2nd Regional Skill Share on Women, Natural Resources and Livelihoods* yang diselenggarakan oleh *Global Alliance on Green and Gender Action (GAGGA)* pada 23-29 April 2018. Maret 2019, ia bersama warga dari Desa Lubuk Resam, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berkesempatan belajar ke JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Pati dan Rembang di Semarang. Pada 16-19 Juli 2019, ia juga kembali berkesempatan belajar ke Kamboja pada kegiatan *3rd WAMA Regional Skillshare Workshop* yang diselenggarakan oleh *Women in Action on Mining in Asia (WAMA)*. Di luar rutinitasnya di ED WALHI Bengkulu, perempuan yang sering meluangkan waktu untuk menggambar dan menyanyi ini sering berkumpul dengan teman-temannya dari kalangan mahasiswa, pecinta alam, dan penggiat seni di kota Bengkulu. Berbekal informasi serta ketertarikan mengenai persoalan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mengantarkan Mei dan teman-temannya menginisiasi kegiatan Milenial Kepo Lingkungan dan Bengkulu Climate Call 2019. Menjelang akhir Ramadhan 2020, Mei bergabung di Akar Foundation sebagai Staf Program Gender dan Sosial Inklusi

hingga februari 2021. Selama di Akar Foundation, ia menulis beberapa essay tentang isu perempuan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dibaca di www.akar.or.id dan coklektif.com. Saat ini ia bergabung dengan Tim Kerja Perempuan dan Tambang sebagai peneliti paruh waktu dan pengelola ruang belajar perempuan tanah-air. Penerima beasiswa Ruang Baca Puan di Sekolah Literasi Ekofeminis ini terdaftar sebagai pelajar hingga bulan Mei mendatang. Meike Inda Erlina dapat dihubungi melalui meikeinda@gmail.com, atau akun instagram [@meikeindaerlina](https://www.instagram.com/meikeindaerlina).

Ridho Saipul

Arek kampung kelahiran Lakarsantri (perbatasan Kota Surabaya dengan Gresik), 4 Agustus 1977. Sehari-hari ia dipanggil Ipoel atau Cak Ipoel. Ia memulai riwayat advokasinya pada usia dua puluh tahun. Saat itu ia berjuang bersama masyarakat kampungnya. Mereka membentuk Forum Kepedulian Warga Kelurahan Lakarsantri. Sejarah ini yang mengantarnya terlibat dalam gerakan sosial jelang dan pasca reformasi. Pada 2001, Ipoel bergabung di WALHI Jawa Timur. Selama di WALHI, Ipoel dipercaya bertanggung jawab melakukan kerja advokasi, pendidikan, kelembagaan jaringan anggota dan dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur periode 2005-2008. Selanjutnya, ia dipilih menjadi anggota Dewan Daerah WALHI Jawa Timur periode 2012-2016. Dari 2016 sampai dengan saat ini, Ipoel dipercaya menjadi Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Timur. Beberapa pengalaman advokasinya, antara lain kasus penutupan LPA sampah Keputih Sukolilo, Surabaya; kriminalisasi pejuang lingkungan hidup di Mojokerto; semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo dan lainnya. Pengalaman advokasi di Mojokerto, khususnya Dusun (eks Desa) Sendi, Kecamatan Pacet merupakan salah satu pengalaman advokasi yang paling menarik. Hingga kini, ia masih aktif dalam proses advokasi di lokasi tersebut. Hal ini mendorongnya terlibat mencatatkan

pengalaman tersebut di penelitian ini. Terlebih Ipoel mempunyai pengalaman (aktif hingga saat ini) menulis artikel di berbagai media massa, jurnal, investigasi dan penelitian. Saat ini, ia aktif menjadi narasumber atau fasilitator di berbagai diskusi/seminar dan pelatihan bagi komunitas maupun organisasi sosial.

Azzumar Adhitha Santika

Keluarga dan beberapa kawan memanggilnya Adhit, tetapi banyak juga orang yang memanggil Azzumar/Zumar. Menempuh pendidikan S1 di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, dan melanjutkan studi S2 di Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations. Sewaktu menempuh studi S2, jiwa kemanusiaan dan ketertarikannya akan komunikasi publik (juga komunikasi politik) mendorongnya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya di WALHI Nasional. Peran terakhirnya di WALHI Nasional sebelum memutuskan untuk "menyepi dalam gua" guna menyelesaikan Tesis adalah sebagai Asisten Peneliti di Riset Ekonomi Nusantara. Kini pria asal Banten ini sedang menjalani peran sebagai konsultan dan analis komunikasi publik untuk instansi pemerintah serta pengajar di Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations.

Suriadi Darmoko

Terlibat dalam organisasi pecinta alam, mengenalkan Moko dengan gerakan lingkungan, juga WALHI Bali. Menghabiskan sebagian besar waktunya di Bali untuk menjadi pengurus WALHI Bali sejak tahun 2010 dan mendedikasikan waktunya untuk dan advokasi lingkungan hidup. Di WALHI Bali pernah menjabat sebagai Direktur WALHI Bali periode 2014 - 2014, pernah menjadi Deputy Internal WALHI Bali dan saat ini menjadi Dewan Daerah WALHI Bali. Selain itu ia juga menjadi

Koordinator Divisi Politik ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa) sejak tahun 2013.

Moko, menamatkan dua kali pendidikan Strata-1, terakhir ia menempuh pendidikan hukum dan menamatkan studi hukumnya di Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Dwijendra 2017 juga telah lulus Ujian Profesi Advokat, PERADI 2019.

Moko yang lahir dan besar di dataran tinggi Pegunungan Tengger ini berminat pada berbagai isu kebijakan terutama kebijakan lingkungan hidup. Ia terlibat dalam berbagai riset kebijakan, terbaru terlibat dalam riset *“Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi terbarukan, dan Transisi yang adil.”*

Putu Juli Sastrawan

Putu Juli Sastrawan, merupakan penulis dan penerjemah. Lahir di Klungkung, 6 Juli 1993. Karyanya pernah masuk 10 esai terbaik mahasiswa se-Bali (2014). Juli sempat menjadi pemenang kedua Festival Literasi Nasional (2016) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ia menjadi salah satu pemenang dalam lomba esai Festival Anti Korupsi (2017) yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga sempat menjadi Co-writer script film *Lasagna; Eve without Adam, Europe on The Screen* (2018)/ INA. Zinyanya pernah dipamerkan dalam Singapore Art Book Fair, *Deszination; Ground Zero!* (2019). Ia baru saja menerbitkan novel pertamanya *Kulit Kera Piduka* (2020).

Zenzi Suhadi

Zenzi, biasa disapa, memulai proses belajar advokasi di Yayasan Kanopi Bengkulu (2005), lembaga anggota WALHI Bengkulu. Selanjutnya melanjutkan proses tersebut di Yayasan Karti dan WALHI Bengkulu. Pada tahun 2008 dipilih menjadi Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu. Selepas dari WALHI Bengkulu, ia semakin kuat memutuskan mengabdikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Hal ini yang mengantarnya untuk hijrah ke Jakarta dan melanjutkan proses advokasi di Eksekutif Nasional WALHI. Pada 2012 s/d 2016 menjalankan tugas sebagai Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar. Periode ini mengantarnya mulai aktif dalam aktivitas advokasi dan kampanye internasional. Beberapa diantaranya, yaitu menjadi peserta pertemuan atau konvensi (Transformasi Predator Ekologis/ Nigeria, 2013; Metamorfosis Kejahatan SDA/ Tokyo, 2013; Potensi Korupsi Kehutanan dan Perkebunan/ Washington, 2015; dan Peta Jalan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Asia-Afrika/ Cameroon, 2016) dan peserta ahli dalam pertemuan internasional (Chatamhouse: Forestry Crime/ London, 2014). Pada 2016 hingga saat ini dipercaya menjadi Kepala Departemen Advokasi (sebelumnya Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan). Posisi baru ini membuatnya aktif dalam advokasi nasional dan internasional. Beberapa publikasinya (mandiri maupun bersama), yaitu "Perempuan vs Tambang Global" (Kontributor, 2013), "*Land Swap: Mengganti Sengsara Asap ke Malapetaka Bandang*" (2017); "Ruang Hampa Pasca Korupsi" (2015); dan "Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut" (2015). Selain dikenal sebagai pejuang lingkungan dan kemanusiaan, beberapa sahabat mengenal ia sebagai penggemar angrek dan penulis puisi. Beragam puisi karyanya dapat dibaca di <https://zenziart.blogspot.com/>. Kontak: zenzi.walhi@gmail.com.



Yuk, jadi bagian dari WALHI!

Bersama WALHI menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidup untuk generasi mendatang. Berikan kontribusimu dengan berdonasi Rp. 150.000,-/bulan. Donasi dapat dilakukan melalui:

Via GO-PAY scan QR:



Donasi yang SAHABAT berikan diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan WALHI, diantaranya; pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas pengiat lingkungan hidup dan kegiatan lainnya dalam upaya memastikan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan dapat berkelanjutan bagi kita dan generasi yang akan datang.

Online:

<https://walhi.or.id/donasipublik/>

Offline:

Dapatkan formulir donasi, surat kuasa donasi WALHI melalui tim fundraising WALHI. Isi dan kirimkan ke kantor WALHI.

Donasi Satu Kali

a/n Yayasan WALHI

BNI 021-882-4228

MANDIRI 070-000-3016-420

BCA 30-1999-1980

Wajah investasi di sektor ekonomi ekstraktif selalu mensyaratkan pengerukan sumber daya alam tanpa batas. Kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan penguasaan ruang merupakan konsekuensinya. Hal ini membuat cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, hanya jadi catatan sejarah dan teks konstitusi.

EKONOMI NUSANTARA

"Bagi WALHI, "ekonomi nusantara" merupakan perjuangan kategoris yang menjadi kritik atas model ekonomi pertumbuhan. Model ekonomi pertumbuhan hanya mengobjektifikasi alam dan menganggapnya sebagai entitas yang terpisah dengan komunitas manusia yang hidup di dalamnya. Secara intrinsik "ekonomi nusantara" sangat menghargai keragaman interaksi manusia dengan lanskap/ekosistem ruang hidupnya dan senantiasa berorientasi pada pemulihan krisis yang dihadapi oleh komunitas-warga dan alamnya."

Nur Hidayati, Direktur WALHI

